



**TUGAS AKHIR - RP141501**

**PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DI  
KELURAHAN BELITUNG SELATAN KOTA BANJARMASIN**

**ABI SYARWAN WIMARDANA  
NRP 3612 100 067**

**Dosen Pembimbing  
Rulli Pratiwi Setiawan, ST., M.Sc.**

**JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA  
Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan  
Institut Teknologi Sepuluh Nopember  
Surabaya 2016**



**FINAL PROJECT - RP141501**

**HANDLING OF URBAN SLUM SETTLEMENT AREA IN  
SOUTH BELITUNG DISTRICT BANJARMASIN CITY**

**Abi Syrawan Wimardana  
NRP 3612 100 022**

**Advisor  
Rulli Pratiwi Setiawan, ST., M.Sc.**

**DEPARTMENT OF URBAN AND REGIONAL PLANNING  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING AND PLANNING  
SEPULUH NOPEMBER INSTITUTE OF TECHNOLOGY  
SURABAYA 2016**

## LEMBAR PENGESAHAN

### PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH KELURAHAN BELITUNG SELATAN KOTA BANJARMASIN

#### TUGAS AKHIR

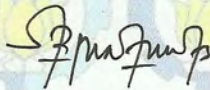
Ditujukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Teknik  
pada

Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota  
Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan  
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Oleh

**ABI SYARWAN WIMARDANA**  
NRP. 3612 100 067

Disetujui oleh Pembimbing Tugas Akhir :



**Rulli Pratiwi Setiawan, ST, M.Sc**

NIP. 197906032008122004

SURABAYA, 22 JULI 2016



# **PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DI KELURAHAN BELITUNG SELATAN KOTA BANJARMASIN**

Nama Mahasiswa : Abi Syarwan Wimardana  
Nrp : 3612100067  
Jurusan : Perencanaan Wilayah Dan Kota FTSP ITS  
Dosen Pembimbing : Rulli Pratiwi Setiawan, ST, M.Sc

## **ABSTRAK**

*Kenaikan laju pertumbuhan penduduk memiliki dampak pada tingginya akses terhadap kebutuhan-kebutuhan primer salah satunya adalah kebutuhan akan rumah tinggal. Dari hal tersebut menimbulkan pemicu terhadap munculnya permukiman kumuh. Keberadaan permukiman kumuh di Kota Banjarmasin mengindikasikan munculnya permasalahan sosial dan lingkungan yang besar. Salah satunya terjadi di wilayah Kelurahan Belitung Selatan. Dimana tersebar permukiman kumuh di 10 RT Kelurahan Belitung Selatan yang termasuk dalam kategori kumuh ringan sebanyak 9 Rukun Tangga (RT 4,8,9,10,11,12,13,14,15) dan Kumuh Ringan 1 Rukun Tangga (RT 6). Dengan tingkat kepadatan bangunan cukup tinggi dengan rata-rata luas persil kecil dan kondisi bangunan yang cukup tua.. Luas permukiman kumuh pada 10 RT sebesar 6,04 Ha. Kawasan kumuh terdiri dari rumah 480 Unit dengan persebaran jumlah penduduk 1.920 jiwa pada kawasan permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan.*

*Penelitian ini bertujuan merumuskan arahan penanganan permukiman kumuh. Dengan melakukan pencapaian sasaran yaitu mengidentifikasi kawasan permukiman kumuh, menganalisis penentuan faktor prioritas penyebab kumuh serta menentukan arahan penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Belitung Selatan. Dalam mencapai tujuan tersebut maka dilakukan beberapa tahapan analisis. Pertama Mengidentifikasi karakteristik permukiman kumuh di Kelurahan Belitung Selatan melalui analisis statistik deskriptif.*

*Tahap selanjutnya yaitu menganalisis faktor prioritas yang mempengaruhi permukiman kumuh melalui analisa stakeholder dan menggunakan teknik analisis AHP (analythical Hierarchy Process) dalam penentuan faktor prioritas penyebab kumuh serta turunan faktor berupa variabel penyebab kumuh. Menentukan arahan penanganan melalui tingkatan prioritas penanganan masing-masing variabel penyebab kumuh.*

*Tahapan akhir penelitian yaitu berupa perumusan arahan penanganan kawasan permukiman kumuh hasil-hasil analisis yang telah dilakukan. Diperoleh 4 tingkatan prioritas penanganan dalam kurun waktu tahun 2016-2019. Dengan fokus arahan penanganan berupa pengelolaan dan pembangunan kualitas permukiman serta infrastruktur kawasan permukiman. Penelitian ini dapat menjadi rekomendasi dalam menyusun atau merumuskan penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin oleh stakeholder sehingga menghasilkan permukiman yang layak huni dan nyaman bagi masyarakat.*

**Kata Kunci :** *Permukiman kumuh, Faktor penyebab kumuh, Arahan penanganan permukiman kumuh, Tingkat prioritas.*

# **HANDLING OF URBAN SLUM SETTLEMENT AREA IN SOUTH BELITUNG DISTRICT BANJARMASIN CITY**

Name : Abi Syarwan Wimardana  
NRP : 3612100067  
Department : Urban and Regional Planning FTSP ITS  
Advisor : Rulli Pratiwi Setiawan, ST., M.Sc.

## **ABSTRACT**

*A rapid population growth directly impacts housing demand, which was in turn triggers the establishment of a slum area. Slum area in Banjarmasin indicates that there are unresolved social and environmental problems, one of them is in South Belitung. There are 10 neighborhood units (Rukun Tetangga/RT) that can be categorized as the slum area. Nine of them are in the level of moderate slum (RT 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) and the other one is low level of slum (RT 6) with high building density, relatively small blocks, and old construction. The housing units that take space for 6.04 Ha with a total population of 1,920 people.*

*The purpose of this research is to formulate slum area quality improvement directives by using three stages of analysis, those are identifying slum area characteristics by using statistical descriptive analysis, analyzing priority factors that affect the slum area by using stakeholder analysis and analytical hierarchy process, and last, formulating directives in order to improve slum area quality based on each identified variable.*

*The result shows that there are 4 levels of improvement priorities between 2016-2019, focusing on managing and improving housing quality and its infrastructure. The research result can be used as a recommendation for related stakeholders in order to develop South Belitung in Banjarmasin City a better place to live.*

**Keyword** : *Slum area, Causes of slum, quality improvement, priority level.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xvii
DAFTAR GAMBAR .....	xxv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Permasalahan .....	6
1.3 Tujuan Dan Sasaran .....	7
1.4 Ruang Lingkup Penelitian .....	8
1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah .....	8
1.4.2 Ruang Lingkup Subtansi .....	9
1.4.3 Ruang Lingkup Pembahasan .....	9
1.5 Manfaat Penelitian .....	13
1.5.1 Manfaat Teoritis .....	13
1.5.2 Manfaat Praktis .....	13
1.6 Sistematika Penulisan Penelitian .....	14
1.7 Kerangka Berpikir .....	15
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	 17
2.1 Perumahan Dan Permukiman .....	17
2.1.1 Pengembangan Kawasan Permukiman .....	18
2.1.2 Pengembangan Perumahan & Permukiman Layak Huni .....	20
2.2 Perkembangan Permukiman Kumuh .....	24
2.2.1 Karakteristik Permukiman Kumuh .....	26
2.2.2 Faktor Penyebab Permukiman Kumuh .....	32
2.2.3 Dampak Perkembangan Permukiman Kumuh .....	37
2.3 Konsep Penanganan Permukiman Kumuh .....	40



2.4	Sintesa Tinjauan Pustaka .....	48
BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....		53
3.1	Pendekatan Penelitian .....	53
3.2	Jenis Penelitian .....	54
3.3	Variabel Penelitian.....	55
3.4	Populasi Dan Sampel .....	61
3.4.1	Populasi .....	61
3.4.2	Sampel .....	62
3.5	Metode Pengumpulan Data.....	67
3.5.1	Metode Pengumpulan Data Primer.....	67
3.5.2	Metode Pengumpulan Data Sekunder .....	70
3.6	Teknik Analisis.....	72
3.6.1	Mengidentifikasi Karakteristik Permukiman Kumuh Di Kelurahan Belitung Selatan .....	74
3.6.2	Menganalisis Faktor Prioritas Penyebab Kumuh Pada Kawasan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin .....	75
3.6.3	Merumuskan Arah Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin .....	78
3.7	Tahapan Penelitian.....	82
3.7.1	Kerangka Tahapan Metode Analisis Penelitian.....	84
BAB IV HASIL & PEMBAHASAN .....		85
4.1.	Gambaran Umum.....	85
4.1.1	Gambaran Umum Wilayah Administratif .....	85
4.1.2	Gambaran Umum Kondisi Sosial Kependudukan ....	89
4.1.3	Gambaran Umum Permukiman Kumuh Kelurahan Belitung Selatan.....	90
4.1.4	Gambaran Umum Sarana Fasilitas Pendidikan Kelurahan Belitung Selatan .....	92
4.1.5	Gambaran Umum Kondisi Sosial Keluarga Prasejahtera Permukiman Kumuh Kelurahan Belitung	

	Selatan .....	93
4.2	Identifikasi karakteristik kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin. ....	94
4.2.1	Persebaran bangunan di kawasan permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin. ....	94
4.2.2	Kondisi Fisik Bangunan Permukiman Kumuh Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin. ....	99
	4.2.2.1 Kondisi Fisik Bangunan Berdasarkan Status Kepemilikan Lahan.....	99
	4.2.2.2 Kondisi Fisik Bangunan Berdasarkan Kualitas Bangunan.....	105
	4.2.2.3 Kondisi Fisik Bangunan Berdasarkan Kepadatan Bangunan.....	111
	4.2.2.4 Kondisi Fisik Bangunan Berdasarkan Pertumbuhan Luas Bangunan Kumuh ....	112
	4.2.2.5 Kondisi Fisik Bangunan Berdasarkan Jarak Antar Bangunan .....	114
4.2.3	Kondisi Sosial & Ekonomi Masyarakat Permukiman Kumuh di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin .....	116
	4.2.3.1 Kondisi Sosial Masyarakat Berdasarkan Kepadatan Penduduk .....	116
	4.2.3.2 Kondisi Sosial Masyarakat Berdasarkan Kegiatan Masyarakat .....	117
	4.2.3.3 Kondisi Sosial Masyarakat Berdasarkan Pertumbuhan Penduduk.....	118
	4.2.3.4 Kondisi Sosial Masyarakat Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	120
	4.2.3.5 Kondisi Ekonomi Masyarakat Berdasarkan Pola Mata Pencaharian .....	121
	4.2.3.6 Kondisi Ekonomi Masyarakat Berdasarkan Tingkat Pendapatan Penduduk .....	124

4.2.4	Kondisi Sarana & Prasarana Permukiman Kumuh di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin .....	126
4.2.4.1	Kondisi Prasarana Kualitas Jaringan Jalan .	131
4.2.4.2	Kondisi Prasarana Kualitas Drainase.....	137
4.2.4.3	Kondisi Prasarana Kualitas Jaringan Air ....	138
4.2.4.4	Kondisi Prasarana Kualitas Persampahan...	140
4.2.4.5	Kondisi Prasarana Kualitas Air Limbah .....	142
4.2.5	Kondisi Mitigasi Bencana di Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin .....	144
4.2.5.1	Kondisi Mitigasi Bencana Berdasarkan Ketersediaan Jalur Evakuasi Bencana. ....	147
4.3	Analisis faktor prioritas penyebab kumuh pada kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin. ....	150
4.3.1	Analisis faktor prioritas penyebab kumuh pada kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin berdasarkan stakeholder pemerintah. ....	152
4.3.1.1	Hasil analisa faktor prioritas penyebab kumuh pada kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin Berdasarkan BAPPEDA Banjarmasin .....	153
4.3.1.2	Hasil analisa faktor prioritas penyebab kumuh pada kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin Berdasarkan Dinas Cipta Karya & Perumahan .....	160
4.3.1.3	Hasil analisa faktor prioritas penyebab kumuh pada kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin Berdasarkan Dinas Tata Ruang & Bangunan.....	168
4.3.1.4	Hasil analisa faktor prioritas penyebab kumuh pada kawasan permukiman kumuh di	

	Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin Berdasarkan Dinas PU & Bina Marga .....	175
4.3.1.5	Hasil analisa faktor prioritas penyebab kumuh pada kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin Berdasarkan Kelurahan Belitung Selatan ..	182
4.3.2	Analisis faktor prioritas penyebab kumuh pada kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin Berdasarkan <i>Stakeholder Akademisi</i> .....	188
4.3.3	Analisis faktor prioritas penyebab kumuh pada kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin Berdasarkan <i>Stakeholder Masyarakat</i> .....	195
4.3.4	Hasil faktor prioritas penyebab kumuh pada kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin Berdasarkan Preferensi Keseluruhan <i>Stakeholder</i> .....	202
4.3.4.1	Hasil analisa variabel yang mempengaruhi faktor prioritas penyebab kumuh pada kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin Berdasarkan Preferensi Keseluruhan <i>Stakeholder</i> .....	209
4.4	Arahan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin .....	214
4.4.1	Tingkatan Prioritas Arahan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan Belitung Selatan..	225
BAB V KESIMPULAN & REKOMENDASI .....		251
5.1	Kesimpulan .....	251
5.2	Saran & Rekomendasi .....	255

DAFTAR PUSTAKA..... 257

LAMPIRAN A ..... 261

LAMPIRAN B..... 263

LAMPIRAN C..... 267

LAMPIRAN D ..... 273

LAMPIRAN E..... 279

LAMPIRAN F ..... 297

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1</b> Tinjauan Faktor Pengembangan Kawasan Permukiman .	19
<b>Tabel 2.2</b> Kajian Faktor Perkembangan Kawasan Perumahan dan Permukiman.....	23
<b>Tabel 2.3</b> Kajian Karakteristik Permukiman Kumuh.....	29
<b>Tabel 2.4</b> Faktor Penyebab Kawasasn Kumuh .....	35
<b>Tabel 2.5</b> Dampak Perkembangan Permukiman Kumuh.....	39
<b>Tabel 2.6</b> Kajian penanganan permukiman kumuh .....	47
<b>Tabel 2.7</b> Sintesa Tinjauan Pustaka terkait Indikator yang digunakan dalam Penelitian .....	49
<b>Tabel 3.1</b> Indikator & Variabel Sasaran Penelitian.....	55
<b>Tabel 3.2</b> Pengambilan Sampel Menggunakan Propotional Random Sampling di Wilayah Penelitian .....	64
<b>Tabel 3.3</b> Kepentingan Stakeholder dalam penelitian .....	66
<b>Tabel 3.4</b> Metode Perolehan Data Primer.....	69
<b>Tabel 3.5</b> Survei Instansi Dalam Perolehan Data Sekunder .....	71
<b>Tabel 3.6</b> Metode Analisis Data Penelitian.....	72
<b>Tabel 3.7</b> Skala Preferensi Dari Perbandingan Dua Kriteria .....	76
<b>Tabel 3.8</b> Tingkatan Prioritas Arahan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Di Wilayah Penelitian .....	80
<b>Tabel 4.1</b> Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kelurahan Belitung Selatan.....	89
<b>Tabel 4.2</b> Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis .....	90
<b>Tabel 4.3</b> Luas Permukiman Kumuh di Kelurahan Belitung Selatan .....	91
<b>Tabel 4.4</b> Lokasi Kumuh di Kelurahan Belitung Selatan .....	91
<b>Tabel 4.5</b> Persebaran fasilitas pendidikan di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin .....	92
<b>Tabel 4.6</b> Jumlah Keluarga Prasejahtera di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin .....	93
<b>Tabel 4.7</b> Persebaran Bangunan Rumah di Kawasan Permukiman	

Kumuh Menurut Kategori Kumuh .....	94
<b>Tabel 4.8</b> Kondisi Status Kepemilikan Lahan di Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan Belitung Selatan .....	99
<b>Tabel 4.9</b> Kondisi Kualitas Bangunan Berdasarkan Material Atap .....	105
<b>Tabel 4.10</b> Kondisi Kualitas Bangunan Berdasarkan Material Dinding di Kelurahan Belitung Selatan .....	107
<b>Tabel 4.11</b> Kualitas Bangunan Berdasarkan Material Lantai di Kelurahan Belitung Selatan.....	109
<b>Tabel 4.12</b> Kepadatan Bangunan Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan Belitung Selatan.....	111
<b>Tabel 4.13</b> Pertumbuhan Luas Bangunan Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan Belitung Selatan .....	112
<b>Tabel 4.14</b> Kondisi Fisik bangunan berdasarkan Jarak Antar Bangunan di Permukiman Kumuh Kelurahan Belitung Selatan .....	114
<b>Tabel 4.15</b> Kepadatan Penduduk di Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan Belitung Selatan.....	117
<b>Tabel 4.16</b> Kondisi Sosial Masyarakat Berdasarkan Kegiatan Masyarakat di Kelurahan Belitung Selatan .....	118
<b>Tabel 4.17</b> Proyeksi Penduduk di Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan Belitung Selatan .....	119
<b>Tabel 4.18</b> Kondisi Penduduk Di Kawasan Permukiman Kumuh Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	121
<b>Tabel 4.19</b> Kondisi masyarakat menurut pola mata pencaharian di Permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan .....	122
<b>Tabel 4.20</b> Kondisi ekonomi berdasarkan tingkat pendapatan Penduduk di permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan .....	124
<b>Tabel 4.21</b> Kondisi fasilitas di kawasan permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan .....	127
<b>Tabel 4.22</b> Persebaran fasilitas di permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan.....	127

<b>Tabel 4.23</b>	Kondisi Prasarana Kualitas Jaringan Jalan Menurut Jenis Perkerasan Jalan.....	131
<b>Tabel 4.24</b>	Kondisi jaringan drainase di kawasan permukiman Kumuh Kelurahan Belitung Selatan .....	137
<b>Tabel 4.25</b>	Kondisi pelayanan jaringan air berdasarkan sumber air di Kawasan permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan .....	139
<b>Tabel 4.26</b>	Kondisi persebaran pelayanan berdasarjan KK yang telah Terlayani sistem jaringan air di Kawasan permukiman Kumuh Kelurahan Belitung Selatan .....	139
<b>Tabel 4.27</b>	Kondisi sistem pengelolaan persampahan berdasarkan Jenis pengelolaan sampah di kawasan permukiman Kumuh Kelurahan Belitung Selatan .....	141
<b>Tabel 4.28</b>	Kondisi sistem pengelolaan air limbah di kawasn Permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan.....	142
<b>Tabel 4.29</b>	Kondisi kebencanaan berdasarkan jenis bencana alam di Kawasan permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan .....	144
<b>Tabel 4.30</b>	Intensitas kebencanaan yang terjadi di kawasan Permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan.....	146
<b>Tabel 4.31</b>	Ketersediaan jalur evakuasi bencana di kawasan Permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan.....	147
<b>Tabel 4.32</b>	Ketersediaan program mitigasi bencana di kawasan permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan.....	148
<b>Tabel 4.33</b>	Analisa Stakeholder berdasarkan pengelompokan stakeholder serta bidang dan kepentingan stakeholder	150
<b>Tabel 4.34</b>	Pengelompokan hasil analisa stakeholder bedasarkan stakeholder dari pemerintah.....	152
<b>Tabel 4.35</b>	Tingkatan Bobot Faktor Prioritas Penyebab Kumuh Berdasarkan BAPPEDA Kota Banjarmasin .....	154
<b>Tabel 4.36</b>	Tingkatan Bobot Variabel Penyebab Faktor Kondisi Fisik Bangunan Berdasarkan BAPPEDA Kota Banjarmasin .....	155



<b>Tabel 4.37</b>	Tingkatan Bobot Variabel Kondisi Sarana dan Prasarana Berdasarkan BAPPEDA Kota Banjarmasin .....	157
<b>Tabel 4.38</b>	Tingkatan Nilai Bobot Variabel Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat Berdasarkan BAPPEDA Kota Banjarmasin .....	158
<b>Tabel 4.39</b>	Tingkatan Bobot Variabel Pengendalian Hukum Berdasarkan BAPPEDA Kota Banjarmasin .....	159
<b>Tabel 4.40</b>	Tingkatan Bobot Analysis Hierarchy Process Faktor Prioritas Penyebab Kumuh Berdasarkan Dinas Cipta Karya dan Perumahan .....	161
<b>Tabel 4.41</b>	Tingkatan Bobot Variabel Kondisi Fisik Bangunan Berdasarkan Dinas Cipta Karya dan Perumahan Kota Banjarmasin .....	162
<b>Tabel 4.42</b>	Tingkatan Bobot Variabel Kondisi Sarana dan Prasarana Berdasarkan Dinas Cipta Karya dan Perumahan Kota Banjarmasin .....	164
<b>Tabel 4.43</b>	Tingkatan Bobot Variabel Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat Berdasarkan Dinas Cipta Karya dan Perumahan Kota Banjarmasin .....	165
<b>Tabel 4.44</b>	Tingkatan Bobot Variabel Pengendalian Hukum Berdasarkan Dinas Cipta Karya dan Perumahan Kota Banjarmasin .....	167
<b>Tabel 4.45</b>	Tingkatan Bobot Faktor Prioritas Penyebab Kumuh Berdasarkan Dinas Tata Ruang dan Bangunan .....	168
<b>Tabel 4.46</b>	Tingkatan Bobot Variabel Kondisi Fisik Bangunan Berdasarkan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Banjarmasin .....	170
<b>Tabel 4.47</b>	Tingkatan Bobot Variabel Kondisi Sarana dan Prasarana Berdasarkan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Banjarmasin .....	171
<b>Tabel 4.48</b>	Tingkatan Bobot Variabel Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat Berdasarkan Dinas Tata Ruang dan Bangunan	

	Kota Banjarmasin .....	173
<b>Tabel 4.49</b>	Tingkatan Bobot Variabel Pengendalian Hukum Berdasarkan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Banjarmasin.....	174
<b>Tabel 4.50</b>	Tingkatan Bobot Faktor Prioritas Penyebab Kumuh Berdasarkan Dinas PU & Bina Marga.....	175
<b>Tabel 4.51</b>	Tingkatan Bobot Variabel Kondisi Fisik Bangunan Berdasarkan Dinas PU & Bina Marga Kota Banjarmasin .....	177
<b>Tabel 4.52</b>	Tingkatan Bobot Variabel Kondisi Sarana dan Prasarana Berdasarkan Dinas PU & Bina Marga Kota Banjarmasin .....	178
<b>Tabel 4.53</b>	Tingkatan Bobot Variabel Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat Berdasarkan Dinas PU & Bina Marga Kota Banjarmasin.....	179
<b>Tabel 4.54</b>	Tingkatan Bobot Variabel Pengendalian Hukum Berdasarkan Dinas PU & Bina Marga Kota Banjarmasin .....	181
<b>Tabel 4.55</b>	Tingkatan Bobot Faktor Prioritas Penyebab Kumuh Berdasarkan Kelurahan Belitung Selatan .....	182
<b>Tabel 4.56</b>	Tingkatan Bobot Variabel Kondisi Fisik Bangunan Berdasarkan Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin.....	183
<b>Tabel 4.57</b>	Tingkatan Bobot Variabel Kondisi Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin.....	185
<b>Tabel 4.58</b>	Tingkatan Bobot Variabel Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat Berdasarkan Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin .....	186
<b>Tabel 4.59</b>	Tingkatan Bobot Variabel Pengendalian Hukum Berdasarkan Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin.....	188
<b>Tabel 4.60</b>	Tingkatan Bobot Faktor Prioritas Penyebab Kumuh	

	Berdasarkan Stakeholder Akademisi Bidang Perumahan & Permukiman.....	189
<b>Tabel 4.61</b>	Tingkatan Bobot Variabel Kondisi Fisik Bangunan Berdasarkan Akademisi Bidang Perumahan dan Permukiman.....	190
<b>Tabel 4.62</b>	Tingkatan Bobot Variabel Kondisi Sarana dan Prasarana Berdasarkan Akademisi Bidang Perumahan dan Permukiman.....	192
<b>Tabel 4.63</b>	Tingkatan Bobot Variabel Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat Berdasarkan Akademisi Bidang Perumahan dan Permukiman.....	193
<b>Tabel 4.64</b>	Tingkatan Bobot Variabel Pengendalian Hukum Berdasarkan Akademisi Bidang Perumahan & Permukiman.....	194
<b>Tabel 4.65</b>	Tingkatan Bobot Faktor Prioritas Penyebab Kumuh Berdasarkan Stakeholder Masyarakat .....	196
<b>Tabel 4.66</b>	Tingkatan Bobot Variabel Fisik Bangunan Berdasarkan Stakeholder Masyarakat .....	198
<b>Tabel 4.67</b>	Tingkatan Bobot Variabel Kondisi Sarana dan Prasarana Berdasarkan Stakeholder Masyarakat .....	199
<b>Tabel 4.68</b>	Tingkatan Bobot Variabel Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat Berdasarkan Stakeholder Masyarakat .....	200
<b>Tabel 4.69</b>	Tingkatan Bobot Variabel Pengendalian Hukum Berdasarkan Stakeholder Masyarakat .....	202
<b>Tabel 4.70</b>	Tingkatan Bobot Permukiman Kumuh di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin Berdasarkan Kombinasi Seluruh Stakeholder .....	203
<b>Tabel 4.71</b>	Tingkatan Bobot Variabel Fisik Bangunan Berdasarkan Kombinasi Seluruh Stakeholder .....	204
<b>Tabel 4.72</b>	Tingkatan Bobot Variabel Kondisi Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kombinasi Seluruh Stakeholder .....	206
<b>Tabel 4.73</b>	Tingkatan Bobot Variabel Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat Berdasarkan Kombinasi Seluruh Stakeholder	

.....	207
<b>Tabel 4.74</b> Tingkatan Bobot Variabel Pengendalian Hukum Berdasarkan Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin.....	209
<b>Tabel 4.75</b> Tingkatan Bobot Keseluruhan Variabel Penyebab Kumuh Berdasarkan Kombinasi Seluruh Stakeholder .....	210
<b>Tabel 4.76</b> Faktor Prioritas Penyebab Kumuh Berdasarkan Hasil Nilai Bobot Oleh Stakeholder.....	215
<b>Tabel 4.77</b> Variabel Penyebab Kumuh Berdasarkan Hasil Nilai Bobot Oleh Stakeholder.....	215
<b>Tabel 4.78</b> Arahan Penanganan Umum dan Detail Berdasarkan Variabel Penyebab Kumuh dengan Perbandingan Komparasi Data .....	217
<b>Tabel 4.79</b> Pelaksanaan Arahan Penanganan Berdasarkan Tingkat Prioritas dan Periode Waktu .....	228

*“Halaman sengaja dikosongkan.”*

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.1</b>	Peta Batas Administrasi Wilayah Penelitian .....	11
<b>Gambar 1.2</b>	Kerangka Berpikir Penelitian .....	15
<b>Gambar 2.1</b>	Azas Dasar Konsep TRIDAYA .....	45
<b>Gambar 3.1</b>	Diagram Kepentingan Stakeholder .....	65
<b>Gambar 3.2</b>	Grand Desain Program Permukiman Berkelanjutan ...	79
<b>Gambar 3.3</b>	Tingkatan Prioritas Arahan Pengananan Kawasan Permukiman Kumuh.....	80
<b>Gambar 4.3</b>	Tahapan Perumusan Arahan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan Belitung Selatan..	81
<b>Gambar 3.5</b>	Kerangka Tahapan Analisis Penelitian .....	84
<b>Gambar 4.1</b>	Peta Batas Administrasi Wilayah Penelitian .....	87
<b>Gambar 4.2</b>	Persebaran Bangunan Kumuh di Kelurahan Belitung Selatan .....	97
<b>Gambar 4.3</b>	Presentase Kepemilikan Lahan di Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan Belitung Selatan.....	100
<b>Gambar 4.4</b>	Lama Tinggal Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan Belitung Selatan .....	101
<b>Gambar 4.5</b>	Peta Gambaran Eksisting Kawasan Permukiman Kumuh .....	103
<b>Gambar 4.6</b>	Kualitas Bangunan Berdasarkan Material Atap di Kawasan Permukiman Kumuh .....	106
<b>Gambar 4.7</b>	Kondisi Fisik Material Atap Bangunan.....	106
<b>Gambar 4.8</b>	Presentase Kualitas Bangunan Berdasarkan Material Dinding di Kelurahan Belitung Selatan .....	108
<b>Gambar 4.9</b>	Kondisi Fisik Material Dinding Bangunan .....	108
<b>Gambar 4.10</b>	Presentase Kualitas Bangunan Berdasarkan Material Lantai Bangunan di Kelurahan Belitung Selatan.....	110
<b>Gambar 4.11</b>	Kondisi Fisik Material lantai Bangunan.....	110
<b>Gambar 4.12</b>	Pertumbuhan Luas Bangunan Kumuh di Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan Belitung Selatan...	113

<b>Gambar 4.13</b>	Pertumbuhan Permukiman Kumuh di Kelurahan Belitung Selatan.....	114
<b>Gambar 4.14</b>	Kondisi Jarak Antar Bangunan di Kawasan Permukiman Kumuh.....	115
<b>Gambar 4.15</b>	Diagram Proyeksi Penduduk di Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan Belitung Selatan.....	120
<b>Gambar 4.16</b>	Pola Mata Pencarian Masyarakat di Permukiman Kumuh Kelurahan Belitung Selatan.....	123
<b>Gambar 4.17</b>	Rata-rata Tingkat Pendapatan Masyarakat permukiman Kumuh di Kelurahan Belitung Selatan.....	125
<b>Gambar 4.18</b>	Fasilitas Pendidikan SDN 7 Belitung Selatan.....	128
<b>Gambar 4.19</b>	Kondisi fasilitas peribadatan di RT.08 dan RT.06 Kelurahan Belitung Selatan.....	129
<b>Gambar 4.20</b>	Fasilitas Kesehatan Posyandu atau Puskesmas.....	130
<b>Gambar 4.21</b>	Kondisi Jaringan Jalan Perkerasan Paving di Gg. Famili RT.10 & RT.13 Kelurahan Belitung Selatan.....	132
<b>Gambar 4.22</b>	Kualitas jaringan jalan berdasarkan jenis perkerasan Jalan di kawasan permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan.....	133
<b>Gambar 4.23</b>	Peta Kondisi Jaringan Jalan Kawasan Permukiman Kumuh.....	135
<b>Gambar 4.24</b>	Ketersediaan Sistem Drainase kawasan permukiman Kumuh di Kelurahan Belitung Selatan.....	138
<b>Gambar 4.25</b>	Skala sistem pengelolaan sampah di kawasan Permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan...	141
<b>Gambar 4.26</b>	Ketersediaan Septic Tank di kawasan permukiman Kumuh Kelurahan Belitung Selatan.....	143
<b>Gambar 4.27</b>	Jenis bencana alam yang pernah terjadi di kawasan Permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan...	145
<b>Gambar 4.28</b>	BPK Putra RT.11 Kelurahan Belitung Selatan.....	148
<b>Gambar 4.29</b>	Ketersediaan program mitigasi bencana di kawasan	

	Permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan....	149
<b>Gambar 4.30</b>	Nilai Bobot Analysis Hierarchy Process Faktor Prioritas Penyebab Kumuh Berdasarkan BAPPEDA Kota Banjarmasin .....	153
<b>Gambar 4.31</b>	Nilai Bobot Analysis Hierarchy Process Penyebab Faktor Kondisi Fisik Bangunan Berdasarkan BAPPEDA Kota Banjarmasin .....	155
<b>Gambar 4.32</b>	Nilai Bobot Analysis Hierarchy Process Penyebab Faktor Kondisi Sarana dan Prasarana Berdasarkan Berdasarkan BAPPEDA Kota Banjarmasin .....	156
<b>Gambar 4.33</b>	Nilai Bobot Analysis Hierarchy Process Penyebab Faktor Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat Berdasarkan BAPPEDA Kota Banjarmasin .....	158
<b>Gambar 4.34</b>	Nilai Bobot Analysis Hierarchy Process Penyebab Faktor Pengendalian Hukum Berdasarkan BAPPEDA Kota Banjarmasin .....	159
<b>Gambar 4.35</b>	Nilai Bobot Analysis Hierarchy Process Faktor Prioritas Penyebab Kumuh Berdasarkan Dinas Cipta Karya dan Perumahan.....	161
<b>Gambar 4.36</b>	Nilai Bobot Analysis Hierarchy Process Faktor Kondisi Fisik Bangunan Berdasarkan Dinas Cipta Karya dan Perumahan.....	162
<b>Gambar 4.37</b>	Nilai Bobot Analysis Hierarchy Process Faktor Kondisi Sarana & Prasarana Berdasarkan Dinas Cipta Karya dan Perumahan .....	164
<b>Gambar 4.38</b>	Nilai Bobot Analysis Hierarchy Process Faktor Kondisi Sosial & Ekonomi Masyarakat Berdasarkan Dinas Cipta Karya dan Perumahan.....	165
<b>Gambar 4.39</b>	Nilai Bobot Analysis Hierarchy Process Faktor Kondisi Pengendalian Hukum Berdasarkan Dinas Cipta Karya dan Perumahan .....	167
<b>Gambar 4.40</b>	Nilai Bobot Analysis Hierarchy Process Faktor Prioritas Penyebab Kumuh Berdasarkan Dinas Tata	



	Ruang & Bangunan .....	168
<b>Gambar 4.41</b>	Nilai Bobot Analysis Hierarchy Process Faktor Kondisi Fisik Bangunan Berdasarkan Dinas Tata Ruang & Bangunan .....	169
<b>Gambar 4.42</b>	Nilai Bobot Analysis Hierarchy Process Faktor Kondisi Sarana & Prasarana Berdasarkan Dinas Tata Ruang & Bangunan .....	171
<b>Gambar 4.43</b>	Nilai Bobot Analysis Hierarchy Process Faktor Kondisi Sosial & Ekonomi Masyarakat Berdasarkan Dinas Tata Ruang & Bangunan.....	172
<b>Gambar 4.44</b>	Nilai Bobot Analysis Hierarchy Process Faktor Kondisi Pengendalian Hukum Berdasarkan Dinas Tata Ruang & Bangunan .....	174
<b>Gambar 4.45</b>	Nilai Bobot Analysis Hierarchy Process Faktor Prioritas Penyebab Kumuh Berdasarkan Dinas PU & Bina Marga .....	175
<b>Gambar 4.46</b>	Nilai Bobot Analysis Hierarchy Process Faktor Kondisi Fisik Bangunan Berdasarkan Dinas PU & Bina Marga .....	176
<b>Gambar 4.47</b>	Nilai Bobot Analysis Hierarchy Process Faktor Kondisi Sarana & Prasarana Berdasarkan Dinas PU & Bina Marga .....	178
<b>Gambar 4.48</b>	Nilai Bobot Analysis Hierarchy Process Faktor Kondisi Sosial & Ekonomi Masyarakat Berdasarkan Dinas PU & Bina Marga .....	179
<b>Gambar 4.49</b>	Nilai Bobot Analysis Hierarchy Process Faktor Kondisi Pengendalian Hukum Berdasarkan Dinas PU & Bina Marga.....	181
<b>Gambar 4.50</b>	Nilai Bobot Analysis Hierarchy Process Faktor Prioritas Penyebab Kumuh Berdasarkan Kelurahan Belitung Selatan.....	182
<b>Gambar 4.51</b>	Nilai Bobot Analysis Hierarchy Process Faktor	

	Kondisi Fisik Bangunan Berdasarkan Kelurahan Belitung Selatan .....	183
<b>Gambar 4.52</b>	Nilai Bobot Analysis Hierarchy Process Faktor Kondisi Sarana & Prasarana Berdasarkan Kelurahan Belitung Selatan .....	185
<b>Gambar 4.53</b>	Nilai Bobot Analysis Hierarchy Process Faktor Kondisi Sosial & Ekonomi Masyarakat Berdasarkan Kelurahan Belitung Selatan.....	186
<b>Gambar 4.54</b>	Nilai Bobot Analysis Hierarchy Process Faktor Kondisi Pengendalian Hukum Masyarakat Berdasarkan Kelurahan Belitung Selatan .....	188
<b>Gambar 4.55</b>	Nilai Bobot Analysis Hierarchy Process Faktor Prioritas Penyebab Kumuh Berdasarkan Akademisi .....	189
<b>Gambar 4.56</b>	Nilai Bobot Analysis Hierarchy Process Faktor Kondisi Fisik Bangunan Berdasarkan Akademisi ...	190
<b>Gambar 4.57</b>	Nilai Bobot Analysis Hierarchy Process Faktor Kondisi Sarana dan Prasarana Berdasarkan Akademisi .....	192
<b>Gambar 4.58</b>	Nilai Bobot Analysis Hierarchy Process Faktor Kondisi Sosial & Ekonomi Masyarakat Berdasarkan Akademisi .....	193
<b>Gambar 4.59</b>	Nilai Bobot Analysis Hierarchy Process Faktor Pengendalian Hukum Berdasarkan Akademisi .....	195
<b>Gambar 4.60</b>	Nilai Bobot Analysis Hierarchy Process Faktor Prioritas Penyebab Kumuh Berdasarkan Stakeholder Masyarakat .....	196
<b>Gambar 4.61</b>	Nilai Bobot Analysis Hierarchy Process Faktor Fisik Bangunan Berdasarkan Stakeholder Masyarakat .....	197
<b>Gambar 4.62</b>	Nilai Bobot Analysis Hierarchy Process Faktor	

	Kondisi Sarana dan Prasarana Berdasarkan Stakeholder Masyarakat .....	199
<b>Gambar 4.63</b>	Nilai Bobot Analysis Hierarchy Process Faktor Kondisi Sosial & Ekonomi Masyarakat Berdasarkan Stakeholder Masyarakat .....	200
<b>Gambar 4.64</b>	Nilai Bobot Analysis Hierarchy Process Faktor Pengendalian Hukum Berdasarkan Stakeholder Masyarakat .....	201
<b>Gambar 4.65</b>	Nilai Bobot Analysis Hierarchy Process Faktor Prioritas Penyebab Kumuh Berdasarkan Combine Stakeholder .....	203
<b>Gambar 4.66</b>	Nilai Bobot Analysis Hierarchy Process Faktor Kondisi Fisik Bangunan Berdasarkan Combine Stakeholder .....	204
<b>Gambar 4.67</b>	Nilai Bobot Analysis Hierarchy Process Faktor Kondisi Sarana & Prasarana Berdasarkan Combine Stakeholder .....	206
<b>Gambar 4.68</b>	Nilai Bobot Analysis Hierarchy Process Faktor Kondisi Sosial & Ekonomi Masyarakat Berdasarkan Combine Stakeholder .....	207
<b>Gambar 4.69</b>	Nilai Bobot Analysis Hierarchy Process Faktor Pengendalian Hukum Berdasarkan Combine Stakeholder .....	208
<b>Gambar 4.70</b>	Nilai Bobot Analysis Hierarchy Process Keseluruhan Variabel Penyebab Kumuh Berdasarkan Combine Stakeholder .....	210
<b>Gambar 4.71</b>	Tahapan Perumusan Arahkan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan Belitung Selatan .....	214
<b>Gambar 4.72</b>	Grand Desain Program Permukiman Berkelanjutan 100-0-100 Tahun 2015 - 2019 .....	225
<b>Gambar 4.73</b>	Tingkatan Prioritas Arahkan Pengananan Kawasan	

Permukiman Kumuh.....	226
<b>Gambar 4.74</b> Arahan Penanganan Tingkat Prioritas I Kawasan Permukiman Kumuh Belitung Selatan .....	235
<b>Gambar 4.75</b> Arahan Penanganan Tingkat Prioritas II Kawasan Permukiman Kumuh Belitung Selatan .....	237
<b>Gambar 4.76</b> Arahan Penanganan Tingkat Prioritas III Kawasan Permukiman Kumuh Belitung Selatan .....	239
<b>Gambar 4.77</b> Arahan Penanganan Tingkat Prioritas III Kawasan Permukiman Kumuh Belitung Selatan .....	241
<b>Gambar 4.78</b> Arahan Penanganan Tingkat Prioritas IV Kawasan Permukiman Kumuh Belitung Selatan .....	243
<b>Gambar 4.79</b> Peta Arahan Penanganana Perbaikan Kualitas Jaringan Jalan.....	245
<b>Gambar 4.80</b> Peta Arahan Penanganana Perbaikan Kualitas Akses Sanitasi MCK .....	247
<b>Gambar 4.81</b> Peta Arahan Penanganana Penyediaan Jaringan Drainase.....	249
<b>Gambar 4.82</b> Peta Arahan Penanganana Penyediaan Jaringan Drainase.....	251

*“Halaman sengaja dikosongkan.”*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Urbanisasi di Indonesia saat ini berlangsung demikian pesat. Persoalan urbanisasi, kemiskinan dan lingkungan adalah tiga hal yang berkait. Para ahli perencanaan kota memproyeksikan jumlah penduduk di wilayah urban di dunia akan mencapai 50-60 % dari jumlah penduduk antara tahun 2020-2025. Dalam sepuluh tahun terakhir jumlah penduduk perkotaan berkembang dari 48% menjadi 56% dari keseluruhan jumlah penduduk. Proses ini akan terus berjalan ketika masih ada faktor pendorong (kehidupan yang sulit di perdesaan/kota kecil) maupun faktor penarik yaitu, kehidupan yang lebih baik di perkotaan (Kemen PU, 2015).

Kenaikan laju pertumbuhan penduduk ini akan berdampak pada tingginya akses terhadap kebutuhan-kebutuhan primer salah satunya adalah kebutuhan akan rumah tinggal. Semua orang akan senantiasa berlomba-lomba untuk mendapatkan rumah sebagai pendukung kelangsungan hidup mereka. Dari tingginya kebutuhan terhadap perumahan inilah yang akhirnya menimbulkan adanya persaingan (rivalitas) antar kelompok orang atau kelompok masyarakat. Banyaknya permintaan akan perumahan yang tidak diimbangi dengan ketersediaan pasokan akan perumahan (*supply*) akan mengarah pada kelangkaan perumahan, sehingga pada akhirnya hanya orang-orang dengan kemampuan tertentu yang mampu mendapatkan perumahan sesuai dengan kriteria atau keinginan mereka. Sementara itu untuk mereka yang tidak memiliki kemampuan dalam mengakses kebutuhan perumahan yang mereka inginkan, dalam hal ini seperti masyarakat berpenghasilan rendah, terpaksa harus memilih lokasi-lokasi

permukiman dan jenis perumahan lain yang sesuai dengan kemampuan mereka (Turner, 1976).

Menurut data identifikasi yang dilaksanakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2015 menunjukkan, terdapat 38.431 ha permukiman kumuh pada 4.108 kawasan di seluruh Indonesia yang menjadi target penataan dan perbaikan hingga tuntas (nol persen), sampai tahun 2019 (Kemen PU, 2014). Maka dari itu hal ini dianggap penting karena amanat dari Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada pasal 19 ayat 2 menyebutkan bahwa setiap orang berhak menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

Sebagian masyarakat yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan memilih bertempat tinggal di Kota Banjarmasin yang berperan sebagai pusat aktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Berbagai aktivitas seperti pendidikan, perdagangan, dan pariwisata berbasis wisata budaya yang sesuai karakteristik Kota Banjarmasin. Dari pertumbuhan serta aktivitas tersebut menimbulkan permasalahan. Masalah lingkungan perkotaan Kota Banjarmasin disebabkan karakteristik lahan basah atau gambut pada kawasan lahan perkotaan di Kota Banjarmasin memiliki permasalahan lingkungan dan kebencanaan. Sebagai contoh, tidak jarang ditemukan adanya bangunan baik itu bangunan bertingkat atau permukiman yang mengalami kondisi miring bahkan runtuh akibat terjadinya penurunan muka tanah serta penyebaran api akibat bencana kebakaran satu rumah sangat cepat terjadi karena kerapatan bangunan permukiman dan jenis bahan bangunan yang digunakan didominasi kayu, hingga bencana banjir akibat kenaikan muka air dan sistem drainase perkotaan yang buruk (Bappeda Kota Banjarmasin, 2010).

Keberadaan permukiman kumuh di Kota Banjarmasin mengindikasikan munculnya permasalahan sosial dan lingkungan yang besar. Bangunan permukiman kumuh yang berkepadatan tinggi dengan rata-rata luas persil kecil dan pemanfaatan ruang yang sangat besar menciptakan kesan ketidakteraturan pemanfaatan ruang. Permasalahan lain yang ditimbulkan ialah penurunan kualitas lingkungan pada beberapa tempat akibat perilaku warga yang membuang sampah sembarangan serta penurunan kualitas sungai akibat aktivitas penduduk yang membuang limbah rumah tangga ke badan sungai. Kota Banjarmasin dari segi budaya masyarakat sendiri dulu sangat dikenal dengan rumah yang dibangun dengan model panggung serta bagian depan atau teras yang menghadap sungai. Sekarang, atas nama modernisasi, pola-pola pembangunan pemukiman dan usaha telah mengalami perubahan. Hampir di semua sungai kita akan mendapati deretan perumahan atau warung-warung penduduk yang membelakangi sungai. Hampir semua rumah atau bangunan lainnya saat ini dibangun dengan cara diuruk (Noor, 2007)

Pemanfaatan keberadaan sungai tersebut beserta anak sungainya sebagai jalur transportasi utama dengan jukung sebagai moda utama dalam pergerakan masyarakat. Pengaruhnya pada sebagian besar aktivitas dan permukiman masyarakat Banjarmasin berkembang di sekitar sungai dengan karakteristik rumah mengapung atau mereka sering menyebut sebagai Rumah Lamin. Lebih jauh lagi, penggunaan sungai sebagai jalur transportasi mempengaruhi orientasi muka bangunan, *entrance* bangunan menghadap ke sungai yang merupakan salah satu karakteristik dari *waterfront city*. Pemandangan yang khas dari kota sungai ini adalah adanya rumah-rumah dengan tipe rumah panggung yang dibangun berderet menghadap sungai dan rumah lanting (rumah terapung)



yang berada di atas air di tepi sungai. Penduduk yang bermukim di sepanjang aliran sungai memanfaatkan sungai sebagai prasarana transportasi. Selain itu terdapat pula lanting atau batang, yaitu sejenis rakit yang terbuat dari kayu yang berfungsi sebagai tempat untuk MCK serta sebagai dermaga untuk menambatkan jukung (Raditya, 2010).

Berdasarkan penetapan lokasi permukiman kumuh diterbitkan melalui SK Walikota No 460 tahun 2015 Kota Banjarmasin. Menurut hasil identifikasi terdapat 52 lokasi permukiman kumuh di 5 Kecamatan, dengan luas total 549,7 Ha. Persebaran kawasan kumuh terbagi atas 5 Kecamatan, yaitu Kota Banjarmasin yaitu Kecamatan Banjarmasin Tengah seluas 40,05 Ha sedangkan Kecamatan Banjarmasin Barat seluas 56,93 Ha, Kecamatan Banjarmasin Utara 137,21 Ha serta Kecamatan Banjarmasin Timur seluas 95,25Ha dan Kecamatan Banjarmasin Selatan seluas 220,36 Ha. Secara keseluruhan terbagi atas 52 Kelurahan dan 451 RT di Kota Banjarmasin (Data SK Walikota Kawasan Kumuh, 2015).

Persebaran permukiman kumuh terdapat di 10 RT Kelurahan Belitung Selatan yang termasuk dalam kategori kumuh ringan sebanyak 9 Rukun Tangga (RT 4,8,9,10,11,12,13,14,15) dan Kumuh Sedang 1 Rukun Tangga (RT 6) , dengan luas permukiman kumuh pada 10 RT sebesar 6,04 Ha. Kawasan kumuh terdiri sebanyak rumah 480 Unit dengan persebaran jumlah penduduk 1.920 jiwa pada kawasan permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan (Data Profil Kawasan Kumuh Kota Banjarmasin, Tahun 2014).

Ketersediaan RTH di Kelurahan Belitung Selatan secara keseluruhan sebesar 39,84 Ha yang terbagi RTH publik 26,56 Ha dan privat 13,28 Ha dengan presentase 0,40% dari luas wilayah. Ketersedian TPS masih kurang dengan total TPS Sebanyak 2 titik lokasi TPS dengan kapasitas 5,625 m<sup>3</sup> dan

volume daya tamping sampah harian 5 m<sup>3</sup>/hari. Untuk Kelurahan Belitung Selatan hanya terdapat 1 RT yang melaksanakan pengelolaan sampah 3R yaitu di RT. 37 Cendrawasih Belitung Selatan. (Data RPKPP Kota Banjarmasin, 2011).

Berdasarkan hasil Studi *Environmental Health Risk Assessment* [EHRA] Kota Banjarmasin, Tahun 2012. Kelurahan Belitung Selatan termasuk dalam klaster 3 (resiko sangat tinggi) dalam kualitas sanitasi yang memiliki nilai indeks sumber air dengan skor 36. Kelurahan Belitung Selatan termasuk dalam kategori tinggi yang diukur melalui kualitas sumber air bersih dan persebaran pelayanan air bersih sebesar 98% telah terlayani. Sedangkan untuk air limbah domestik dan persampahan memiliki nilai indeks skor 72 dan skor 59 termasuk sangat tinggi dinilai berdasarkan kualitas prasarana, tingkat pelayanan dan persebaran sarana. Genangan air dan perilaku hidup bersih memiliki nilai indeks skor 61 dan Skor 61 dinilai berdasarkan tingkah laku masyarakat dan kondisi topografi serta hidrologi kawasan. Interval penilaian indeks berdasarkan standar skor 1-50 termasuk tinggi dan 51-100 termasuk sangat tinggi.

Secara kondisi fisik, Kelurahan Belitung selatan memiliki karakteristik bangunan padat dengan jenis bangunan semi permanen. KDB rata-rata bangunan mencapai 100%. Dari segi penataan sanitasi masih kurang baik dan kondisi tersebut tergambarkan dari cara pembuangan limbah rumah secara langsung. Ditambah kondosi morfologi kawasan permukiman yang tumbuh pada area tanah gambut serta bantaran tepi sungai. (RTRW Kota Banjarmasin 2013-2033).

Kelurahan Belitung Selatan termasuk dalam kawasan permukiman kumuh perkotaan dengan keadaan bangunan yang padat. Kondisi jaringan jalan terbagi atas 2 jenis jaringan akses yaitu dengan jalan cor serta kondisi perkerasan kurang baik dan

jalan titian kayu yang digunakan bagi warga bantaran sepanjang sungai dan kawasan rawa. Kondisi sanitasi lingkungan pada kawasan kumuh yang berada di bantaran sungai masih menggunakan jamban apung dan fasilitas MCK komunal yang kondisinya kurang bagus. Pelayanan air bersih di permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan telah dilayani perpipaan jaringan air dari PDAM dan sistem perpipaan air dengan pompa air yang bersumber langsung diambil air sungai khususnya pada permukiman di bantaran sungai. Sistem persampahan di Kelurahan Belitung Selatan masih menggunakan sistem menumpuk dan membakar sampah secara individu di masing-masing RT. Terdapat juga prasarana TPS di Kelurahan Belitung Selatan yang masih minim daya tampung (Profil Identifikasi Kawasan Kumuh Kota Banjarmasin, 2014).

Berdasarkan perkembangannya, permukiman kumuh di Kelurahan Belitung Selatan memiliki karakteristik yang sama pada umumnya dengan permukiman di Kota Banjarmasin yaitu permukiman dengan pola rumah lanting atau rumah terapung sesuai dengan kondisi lahan yang basah serta berada ditepian sungai. Dilihat dari kepadatan penduduk dan kondisi sarana prasarana khususnya sanitasi yang masih sangat buruk. Dimana tujuan penelitian ini yaitu memberikan penanganan melalui arahan dalam perbaikan kualitas permukiman dan sarana prasarana serta pendekatan ini diprioritaskan pada segi perbaikan fisik dan lingkungan kawasan, sehingga pendekatan dapat diterapkan sesuai dengan karakteristik permukiman kumuh di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin.

## **1.2 Rumusan Permasalahan**

Keberadaan permukiman kumuh di Kota Banjarmasin mengindikasikan munculnya permasalahan sosial dan lingkungan yang besar yaitu bangunan permukiman kumuh

berkepadatan tinggi dengan rata-rata luas persil yang kecil dan karakteristik lahan kawasan permukiman. Permasalahan lain yang ditimbulkan ialah penurunan kualitas lingkungan di beberapa lokasi yang diakibatkan perilaku membuang sampah sembarangan oleh warga; penurunan kualitas sungai akibat aktivitas penduduk yang membuang limbah rumah tangga ke badan sungai serta jaringan sarana prasarana yang masih kurang memadai bagi masyarakat permukiman.

Hal tersebut terjadi khususnya pada Kelurahan Belitung Selatan yang memiliki karakteristik bangunan padat dengan jenis bangunan semi permanen dan mayoritas bahan bangunan berasal dari kayu. Kepadatan penduduk di Kelurahan Belitung Selatan sangat tinggi serta kualitas sanitasi masih sangat kurang, ditambah dengan kondisi morfologi kawasan permukiman yang tumbuh pada area tanah basah atau rawa serta bantaran tepi sungai. Berdasarkan gambaran tersebut tampak kesan kumuh pada kawasan permukiman di Kelurahan Belitung Selatan. Dari rumusan masalah tersebut muncullah pertanyaan dalam penelitian sebagai berikut “(1) Bagaimana karakteristik kawasan permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan. (2) apa faktor prioritas penyebab kumuh di kawasan permukiman kumuh. (3) Bagaimana arahan penanganan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin?”

### **1.3 Tujuan Dan Sasaran**

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan arahan penanganan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin. Berdasarkan tujuan tersebut diperoleh beberapa sasaran yaitu :

1. Mengidentifikasi karakteristik kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin.

2. Menganalisis faktor prioritas penyebab kumuh pada kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin.
3. Merumuskan arahan penanganan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin.

## **1.4 Ruang Lingkup Penelitian**

### **1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah**

Dalam penelitian ini wilayah studi yang dibahas dalam penelitian ini adalah kawasan permukiman kumuh pada Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Kecamatan Banjarmasin Barat terdiri atas 9 Kelurahan dengan luas keseluruhan 1.337 Ha sedangkan untuk wilayah Kelurahan Belitung Selatan itu sendiri sebesar 700 Ha. Kawasan kumuh yang diteliti dalam penelitian ini mencakup kawasan permukiman Kelurahan Selatan dengan luas sebesar 6,04 Ha dibagi atas 10 RT yaitu RT (4,6,8,9,10,11,12,13,14,15) dengan batas-batas wilayah penelitian adalah sebagai berikut :

Sebelah Wilayah Utara	: Kelurahan Belitung Utara
Sebelah Wilayah Timur	: Kelurahan Antasan Besar
Sebelah Wilayah Selatan	: Kelurahan Teluk Dalam
Sebelah Wilayah Barat	: Kelurahan Kuin Cerucuk

Adapun peta batas administrasi wilayah penelitian terkait perumusan arahan penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin dapat dilihat pada

### **Gambar 1.1**

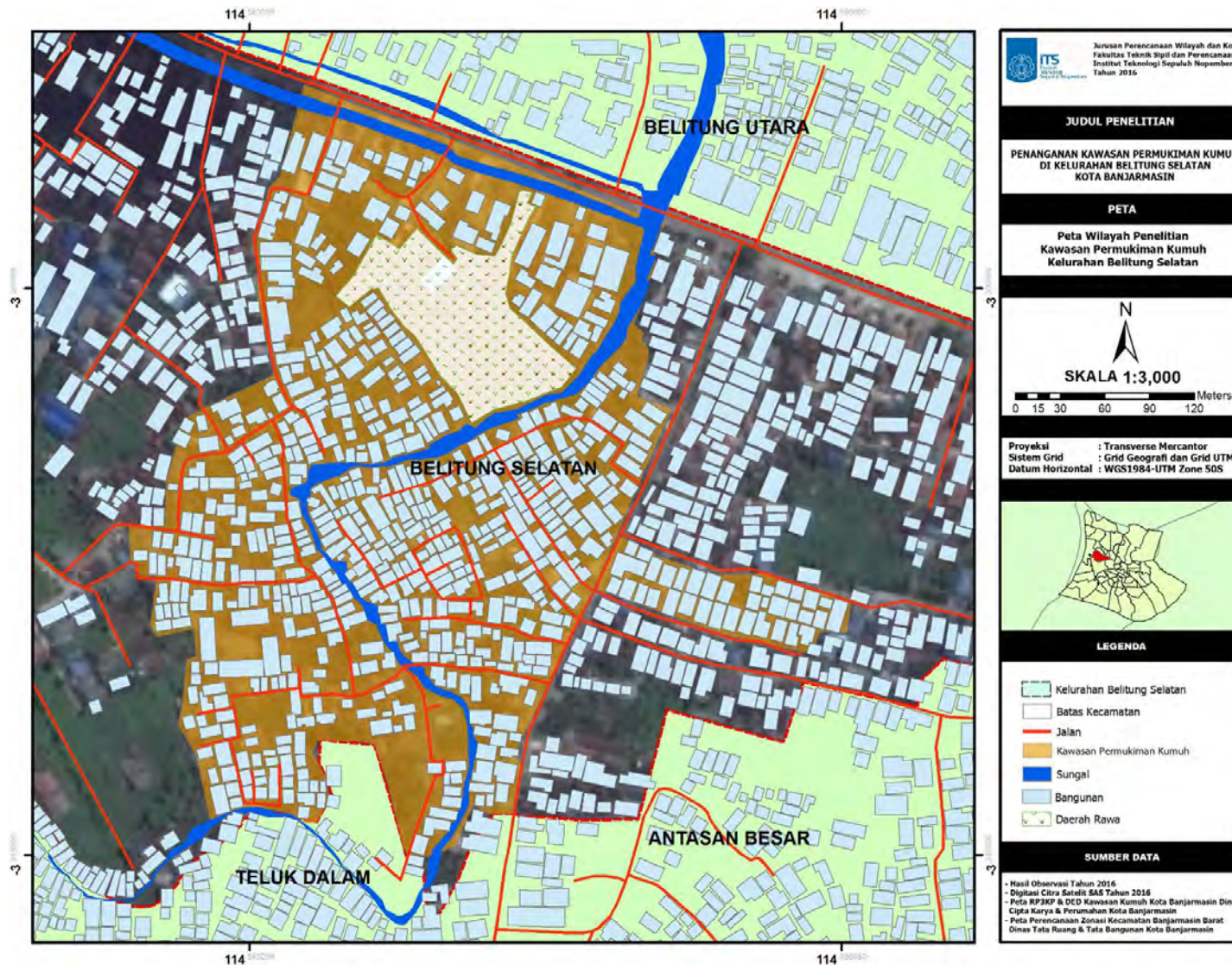
### **1.4.2 Ruang Lingkup Subtansi**

Substansi penelitian ini meliputi perumusan arahan penanganan kawasan permukiman kumuh yang ditinjau berdasarkan faktor prioritas penyebab kumuh dan karakteristik kawasan. Dari hasil analisa faktor tersebut menghasilkan arahan penanganan melalui perbaikan infrastruktur berupa fisik sarana prasarana dan lingkungan yang layak bagi masyarakat di kawasan permukiman kumuh. Penelitian ini ditinjau berdasarkan studi literatur berupa teori pendekatan penanganan kawasan permukiman kumuh dengan indikator dan variabel yang diambil dari teori ataupun studi literatur tersebut.

### **1.4.3 Ruang Lingkup Pembahasan**

Pembahasan yang akan dibahas dalam penelitian ini meliputi pengamatan permasalahan serta cara penanganan yang dilihat dari identifikasi karakteristik permukiman kumuh berdasarkan aspek kondisi sosial kependudukan, kondisi fasilitas jaringan sarana prasarana, kondisi fisik dan tata bangunan serta kepemilikan hak lahan permukiman. Faktor-faktor penyebab kumuh terbagi atas aspek fisik & lingkungan, Sosial, Ekonomi, Hukum. Penelitian ini memiliki output arahan penanganan kawasan permukiman kumuh yang sesuai hasil analisa. Peneliti juga bermaksud memberikan arahan penanganan kumuh dengan program-program perbaikan permukiman secara komprehensif dengan pendekatan terpadu.

*“Halaman sengaja dikosongkan.”*



**Gambar 1.1** Peta Batas Administrasi Wilayah Penelitian  
*Sumber : Hasil Digitasi Peneliti, 2016*



*“Halaman sengaja dikosongkan.”*

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini terbagi atas dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan terutama terkait dengan arahan penanganan terhadap perbaikan kualitas perumahan dan permukiman yang terletak pada wilayah tertentu dengan meninjau metode pendekatan penanganan yang sesuai faktor penyebab kumuh. Arahan penanganan tersebut dilakukan secara terpadu dan komprehensif melalui program-program permukiman dari segi pembangunan dan pengelolaan infrastruktur serta lingkungan. Demi tercapainya penanganan kawasan permukiman kumuh yang baik dan berkelanjutan.

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

Manfaat penelitian ini adalah sebagai rekomendasi bagi pemerintah Kota Banjarmasin dalam melakukan penataan permukiman terutama bagi penataan dan pengembangan kawasan permukiman kumuh dengan metode pendekatan dalam penanganan permukiman kumuh yaitu yang berfokus pada program penanganan dari segi infrastruktur dengan tujuan perbaikan fisik & lingkungan kawasan permukiman pada Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin yang masuk dalam program ketercapaian permukiman Direktorat Pengembangan Permukiman Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat Tahun 2015-2019.

## **1.6 Sistematika Penulisan Penelitian**

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, tujuan penelitian, rumusan masalah dalam penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, sistematika penulisan, kerangka berpikir serta hasil yang diharapkan dalam penelitian.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang teori-teori atau pustaka terkait dengan pembahasan permukiman kumuh yang ditangani dengan melakukan identifikasi terhadap karakteristik kawasan permukiman kumuh.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang penjelasan kebutuhan data, metode analisis data, serta alat analisis data yang digunakan dalam penelitian yang memuat variabel-variabel yang dibutuhkan dalam penelitian.

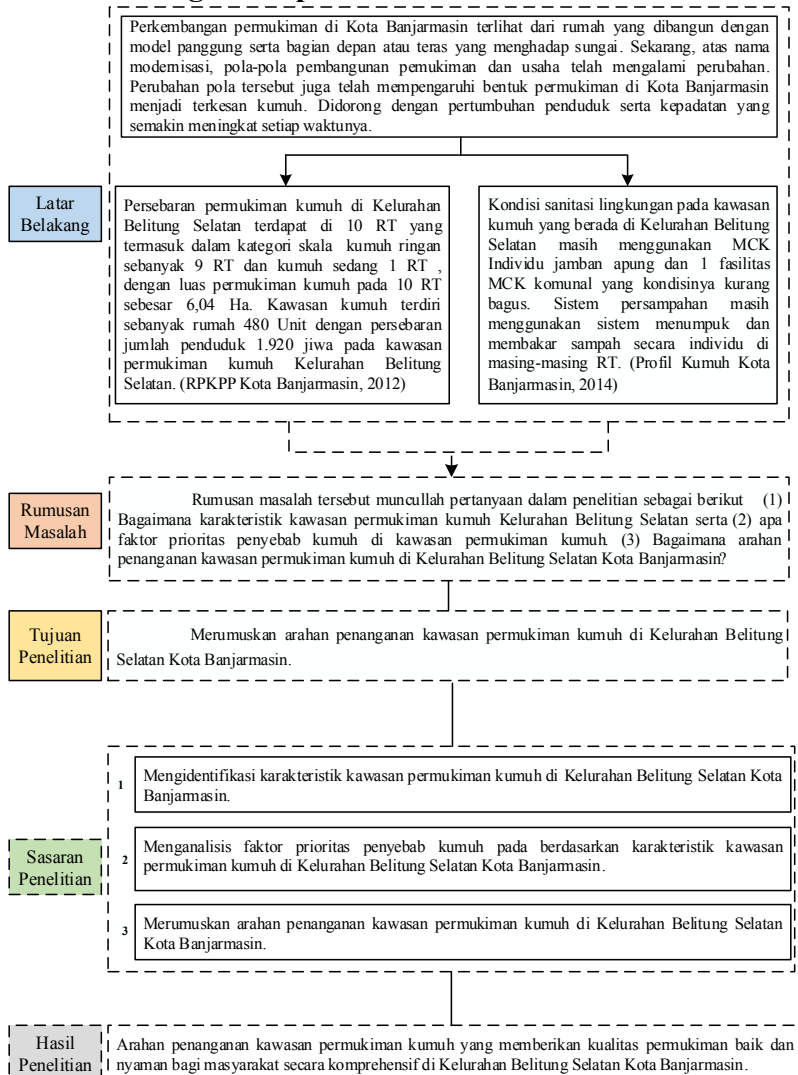
### **BAB IV HASIL & PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang gambaran kondisi wilayah penelitian serta hasil pembahasan berupa analisa dalam menjawab sasaran dan perumusan hasil akhir yang menjawab tujuan penelitian pada kawasan yang menjadi obyek penelitian.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi elaborasi, kesimpulan, rekomendasi, kelemahan studi, serta saran yang dapat ditinjau untuk menindaklanjuti hasil penelitian.

## 1.7 Kerangka Berpikir



**Gambar 1.2 Kerangka Berpikir Penelitian**

*Sumber : Hasil Analisis Peneliti, 2016*

*“Halaman sengaja dikosongkan.”*

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Perumahan Dan Permukiman**

Permukiman diartikan sebagai perumahan atau kumpulan tempat tinggal dengan segala unsur serta kegiatan yang berkaitan dan yang ada di dalam permukiman (Kuswartojo, 2005). Bila dikaji melalui pengertian yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun pedesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan pedesaan. Perumahan merupakan bagian dari kehidupan komunitas dan keseluruhan lingkungan sosial. Perumahan berkaitan erat dengan industrialisasi, aktivitas ekonomi, dan pembangunan. Keberadaan perumahan juga ditentukan oleh perubahan sosial, ketidak matangan sarana hukum, politik, dan administratif serta berkaitan pula dengan kebutuhan akan pendidikan (Abrams dalam Kuswartojo, 1964).

Permukiman adalah area tanah yang digunakan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung (Koestoer, 1995). Permukiman

adalah suatu tempat bermukim manusia yang telah disiapkan secara matang dan menunjukkan suatu tujuan yang jelas (Parwata, 2004). Dari berbagai teori yang dikemukakan oleh para ahli yang ada diatas permukiman atau perumahan merupakan kumpulan dari tempat tinggal yang memiliki fungsi fisik serta didukung oleh sarana dan prasarana yang mendukung fungsi kegiatan ataupun aktivitas penghuni perumahan baik penunjang dari segi ekonomi ataupun sosial.

### **2.1.1. Pengembangan Kawasan Permukiman**

Menurut Yunus (2012), bertambahnya luas lahan kawasan perumahan merupakan suatu konsekuensi logis dari semakin banyaknya penduduk baik sebagai akibat dari pertambahan penduduk secara alami maupun karena migrasi. Semakin banyaknya pendatang baru, maka semakin tinggi pula tuntutan ruang akan tempat tinggal, terdapat dua hal yang menyebabkan pertumbuhan perumahan yaitu (a) bertambahnya lahan perumahan karena bertambahnya bangunan rumah yang dibangun oleh perorangan (individu) dan (b) bertambahnya lahan perumahan sebagai akibat bertambahnya kelompok bangunan yang dibangun oleh para pengembang. arah pergerakan perkembangan kota yang dikemukakan oleh Colby berkaitan dengan pendapat Ruswurm, 1980 dalam Yunus (2012) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kota dalam pembangunan perumahan , yaitu : 1) Pertumbuhan penduduk (*population growth*) ; 2) Persaingan memperoleh lahan (*Competition for land*); 3) hak-hak kepemilikan (*property right*); 4) Kegiatan Pengembang (*developers activities*); 5) Perencanaan (*planning controls*); 6) perkembangan teknologi (*technological*

development); 7) lingkungan fisik (physical environment).

**Tabel 2.1** Tinjauan Faktor Pengembangan Kawasan Permukiman

No.	Sumber	Deskripsi	Faktor
1.	Yunus (2012)	Perkembangan lahan kawasan permukiman dan perumahan akan berkembang berdasarkan semakin banyaknya dari semakin banyaknya penduduk.	Bertambahnya Bangunan
			Kebutuhan ekonomi, sosial dan budaya
			Kebutuhan ruang
2.	Rusuwurn dalam Yunus (2012)	Perkembangan permukiman tumbuh dan berkembang diakibatkan bertambahnya kelompok bangunan yang dibangun oleh para pengembang dan masyarakat.	Pertumbuhan penduduk
			Persaingan Memperoleh Lahan
			Hak-hak kepemilikan
			Kegiatan pengembang
			Perencanaan
			Perkembangan teknologi
			Lingkungan fisik

*Sumber : Hasil Tinjauan Pustaka dan Literatur ,2016*



### **2.1.2. Pengembangan Perumahan & Permukiman Layak Huni**

Penyelenggaraan pengadaan perumahan dan permukiman diarahkan agar setiap orang atau keluarga di Indonesia mampu memenuhi kebutuhan permukiman yang layak dan terjangkau pada lingkungan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan dalam upaya terbentuknya masyarakat yang berjiwa diri, mandiri dan produktif (Asteriani, 2010). Menurut Ana (2010) beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengadaan perumahan adalah sebagai berikut :

- a. jalan lingkungan, apakah cukup lebar
- b. saluran drainase / selokan, apakah memenuhi kriteria karena mempunyai suatu elevasi tertentu sehingga tidak menyebabkan comberan tergenang di depan rumah, serta kemampuan drainase untuk mengalirkan air hujan.
- c. Penerangan jalan
- d. Fasilitas air minum
- e. Air bersih, Seperti yang diketahui, tidak semua wilayah air tanah yang layak digunakan. Oleh karena itu perlu diperhatikan apakah ada saluran PAM atau sarana air layak pakai.
- f. Jaringan telepon
- g. Toko atau pasar untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Selain itu juga menurut Ana (2010), terdapat fasilitas sosial yang perlu diperhatikan yaitu rumah ibadah (mushalla, masjid, gereja da lainnya), lapangan olahraga taman ataupun areal terbuka lainnya untuk umum, pos keamanan, balai pertemuan, dan sebagainya. Kelengkapan fasilitas umum dan sosial tersebut akan membuat penghuni nyaman dan betah tinggal di suatu

lokasi perumahan. perlu dilakukan pengecekan langsung ke lokasi perumahan dan lingkungan yang ada di luar lokasi perumahan. selain itu, terdapat faktor penting lain yang perlu diperhatikan sewaktu membangun lokasi perumahan yaitu aspek legalitas lokasi perumahan seperti sertifikat induk lokal kawasan perumahan. Kriteria permukiman kumuh yang layak huni dan sehat tergantung dari adanya ketersediaan berbagai macam kelengkapan dan pelayanan tertentu. Berikut ini kebutuhan perlengkapan yang minimal harus tersedia di permukiman adalah (Sebastian, 2009) :

1. Ketersediaan prasarana air bersih  
Ketersediaan prasarana air bersih yang dapat digunakan untuk air minum, masak, mandi, dan mencuci perlu ada di setiap rumah.
2. Pembuangan kotoran dan air hujan  
Ketersediaan pembuangan kotoran dan air hujan harus tersedia di setiap rumah seperti kakus yang harus memenuhi persyaratan kesehatan, yaitu dihubungkan dengan septitank, serta sistem pengaliran air yang direncanakan dengan baik.
3. Penempatan-penempatan utilitas  
Saluran-saluran air, gas serta listrik sering ditempatkan pada di bawah tanah, namun haruslah mudah dicapai bila perlu mengadakan pemeriksaan ataupun penggantian. Ssaluran-saluran tersebut seharusnya tidak ditempatkan di bawah jalan yang diperkeras yang bertujuan untuk menghindari adanya gangguan lalu lintas apabila diperlukan pembongkaran. Apabila saluran-saluran tersebut terpaksa diletakkan di bawah jalan, maka perlu dibuat

lorong yang cukup besar untuk saluran-saluran tersebut.

4. Pembuangan sampah  
Penyediaan pembuangan sampah berupa tong-tong yang dapat ditutup dan mudah untuk dibersihkan, serta harus tersedia di pekarangan rumah.
5. Tersedia sarana pelayanan masyarakat  
Ketersediaan sarana berupa taman, sarana kesehatan, sarana niaga, sarana pendidikan yang tidak terlalu jauh dengan tempat tinggal diperlukan untuk suatu permukiman sebagai tempat memenuhi kebutuhan hidup dan bersosialisasi dengan masyarakat lain.

Sedangkan menurut Sinulingga (Febriana, 2009), permukiman yang baik itu harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Mempunyai akses terhadap pusat-pusat pelayanan pendidikan, kesehatan, perdagangan. Akses ini dicapai dengan membuat jalan dan sarana transportasi pada permukiman tersebut dan akses ini dan juga harus mencapai perumahan secara individual dengan mengadakan jalan lokal dan terminal transportasi pada lingkungan permukiman tersebut.
2. Lokasinya tidak terganggu oleh kegiatan lain seperti pabrik, yang umumnya dapat memberikan dampak pada pencemaran udara atau lingkungan lainnya.
3. Fasilitas drainase yang mampu mengalirkan air hujan dengan cepat dan tidak sampai menimbulkan genangan air.
4. Fasilitas penyediaan air bersih berupa jaringan air distribusi yang siap untuk disalurkan ke masing-

- masing rumah. Idealnya setiap rumah dapat dilayani fasilitas air bersih.
5. Fasilitas pembuangan air kotor/tinja yang dapat dibuat dengan system individual berupa tanki septik dan lapangan rembesan atau tangki septik komunal. Untuk permukiman dengan bangunan padat, perlu dibuat system perpipaan air kotor.
  6. Permukiman harus dilayani oleh fasilitas pembuangan sampah secara teratur.
  7. Fasilitas umum seperti taman bermain, lapangan/taman, tempat beribadah, tempat pendidikan, dan kesehatan yang sesuai dengan skala besarnya permukiman.
  8. Dilayani jaringan listrik dan telepon.

**Tabel 2.2** Kajian Faktor Perkembangan Kawasan Perumahan dan Permukiman

No.	Sumber	Deskripsi	Faktor
1.	Asteriani (2010)	perumahan dan permukiman diarahkan agar layak huni melalui pengadaan Lingkungan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan sehingga terbentuk masyarakat yang berjati diri, mandiri dan produktif.	Kualitas lingkungan permukiman
			Tingkat Keamanan
2.	Ana (2010)	Permukiman yang memiliki kelengkapan fasilitas umum dan sosial tersebut akan membuat penghuni nyaman dan betah tinggal di suatu lokasi perumahan. perlu dilakukan pengecekan langsung ke lokasi	Tersedianya fasilitas umum dan sosial
			Legalitas lokasi permukiman dan perumahan

No.	Sumber	Deskripsi	Faktor
		perumahan dan lingkungan yang ada di luar lokasi perumahan.	Kualitas pelayanan prasarana sarana
			Tersedianya fasilitas perdagangan dan jasa
3.	Sebastian (2009)	Permukiman kumuh yang layak huni dan sehat tergantung dari adanya ketersediaan berbagai macam kelengkapan dan pelayanan.	Penyediaan prasarana utilitas
			Penyediaan sarana pelayanan umum
4.	Febriana (2009)	Permukiman yang baik dinilai dari terdapatnya kesesuaian lokasi dan ketersediaan kegiatan penunjang bagi permukiman.	Tersedianya jaringan jalan yang baik
			Lokasi berjauhan dari pabrik
			Tersedianya prasarana utilitas yang memadai
			Tersedianya fasilitas umum

*Sumber : Hasil Tinjauan Pustaka dan Literature ,2016*

## 2.2 Perkembangan Permukiman Kumuh

Menurut Kuswantojo (2005) menjelaskan bahwa permukiman kumuh merupakan permukiman yang padat, memiliki kualitas konstruksi rendah serta memiliki prasarana dan pelayanan permukiman yang minim. Sementara menurut Adisasmita (2005), permukiman kumuh ialah tempat berkumpulnya anggota

masyarakat kota yang mayoritas berpenghasilan rendah dan membentuk permukiman tempat tinggal dalam kondisi yang minim dengan kepadudukan padat.

Bianpoen dalam Komarudin (1999) menjelaskan tentang kumuh atau slum dalam konteks yang lebih luas, yaitu lingkungan kumuh, yang didefinisikan sebagai lingkungan permukiman yang kondisi tempat tinggal atau tempat huniannya berdesakan, luas rumah tidak sebanding dengan jumlah penghuni, rumah berfungsi sekedar tempat istirahat dan melindungi diri dari panas, dingin, dan hujan; lingkungan dan tata permukiman tidak teratur; bangunan sementara; acak-acakan tanpa perencanaan; prasarana kurang; fasilitas sosial kurang; mata pencaharian penghuni tidak tetap dan usaha non formal; tanah bukan milik penghuni; pendidikan rendah; penghuni sering tidak tercatat sebagai warga setempat; rawan timbulnya penyakit, kebakaran, dan banjir.

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Drakakis Smith dalam Soesilowati (2007) yang mendefinisikan slums sebagai lingkungan permukiman yang absah, legal dan permanen tetapi kondisi fisik lingkungannya semakin memburuk karena kurang pemeliharaan, umur bangunan yang menua, ketidak acuan atau terbagi-bagi menjadi unit pekarangan rumah dan kamar yang semakin kecil.

Berdasarkan pemaparan diatas, definisi permukiman kumuh yang digunakan dalam penelitian ialah sintesa dari definisi yang dikemukakan para tokoh diatas, yaitu permukiman yang dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah, bermata pencaharian tidak tetap, berpendidikan rendah, berstatus pendatang serta tidak layak huni karena tidak teratur, memiliki kepadatan

bangunan dan penduduk tinggi, kualitas konstruksi bangunan rendah dan bersifat sementara, sarana prasarana minim, terbagi atas beberapa unit pekarangan, kondisi fisik lingkungan buruk, rawan penyakit dan bencana, berfungsi sebagai tempat istirahat, dan umumnya tanah bukan milik penghuni.

### **2.2.1 Karakteristik Permukiman Kumuh**

Menurut Komarudin (1999) menjelaskan tentang kumuh atau *slum* dalam konteks yang lebih luas, yaitu lingkungan kumuh, yang didefinisikan sebagai lingkungan permukiman yang kondisi tempat tinggal atau tempat huniannya berdesakan, luas rumah tidak sebanding dengan jumlah penghuni, rumah berfungsi sekedar tempat istirahat dan melindungi diri dari panas, dingin, dan hujan; lingkungan dan tata permukiman tidak teratur; bangunan sementara; acak-acakan tanpa perencanaan; prasarana kurang; fasilitas sosial kurang; mata pencaharian penghuni tidak tetap dan usaha non formal; tanah bukan milik penghuni; pendidikan rendah; penghuni sering tidak tercatat sebagai warga setempat; rawan timbulnya penyakit, kebakaran, dan banjir. Menurut Sinulingga (2005), ciri kampung atau pemukiman kumuh terdiri dari:

- 1) Penduduk sangat padat antara 250-400 jiwa/ha. Pendapat para ahli perkotaan (MMUDP,90) menyatakan bahwa apabila kepadatan suatu kawasan telah mencapai 80 jiwa/ha maka timbul masalah akibat kepadatan ini, antara perumahan yang dibangun tidak mungkin lagi memiliki persyaratan fisiologis, psikologis dan perlindungan terhadap penyakit.

- 2) Jalan-jalan sempit tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda empat, karena sempitnya, kadang-kadang jalan ini sudah tersembunyi dibalik atap-atap rumah yang sudah bersinggungan satu sama lain.
- 3) Fasilitas drainase sangat tidak memadai, dan malahan biasa terdapat jalan-jalan tanpa drainase, sehingga apabila hujan kawasan ini dengan mudah akan tergenang oleh air.
- 4) Fasilitas pembuangan air kotor/tinja sangat , minim sekali. Diantaranya yang langsung membuang tinjanya ke saluran yang dekat dengan rumah, ataupun ada juga yang membuangnya ke sungai yang terdekat.
- 5) Fasilitas penyediaan air bersih sangat minim, memanfaatkan air sumur dangkal, air hujan atau membeli secara kalengan.
- 6) Tata bangunan sangat tidak teratur dan bangunan-bangunan pada umumnya tidak permanen dan malahan banyak yang darurat.
- 7) Kondisi membuat kawasan ini sangat rawan terhadap penularan penyakit.
- 8) Pemilikan hak atas lahan sering tidak legal, artinya status tanahnya masih merupakan tanah Negara dan para pemilik tidak memiliki status apa-apa.

Menurut hasil penelitian Suparlan (2000), ciri-ciri dari pemukiman kumuh dapat terlihat dari berbagai sisi sebagai berikut :

1. Fasilitas umum yang kondisinya kurang atau tidak memadai.
2. Kondisi hunian rumah dan permukiman serta penggunaan ruang-ruangnya mencerminkan penghuninya yang kurang mampu atau miskin.



3. Adanya tingkat frekuensi dan kepadatan volume yang tinggi dalam penggunaan ruang-ruang yang ada di permukiman kumuh sehingga mencerminkan adanya kesemrawutan tata ruang dan ketidakberdayaan ekonomi penghuninya.
4. Permukiman kumuh merupakan suatu satuan-satuan komunitas yang hidup secara tersendiri dengan batas-batas kebudayaan dan sosial yang jelas, yaitu terwujud sebagai:
  - a) Sebuah komunitas tunggal, berada di tanah milik negara, dan karena itu dapat digolongkan sebagai hunian liar.
  - b) Satuan komunitas tunggal yang merupakan bagian dari sebuah RT atau sebuah RW.
  - c) Sebuah satuan komunitas tunggal yang terwujud sebagai sebuah RT atau RW atau bahkan terwujud sebagai sebuah kelurahan, dan bukan hunian liar.
5. Penghuni permukiman kumuh secara sosial dan ekonomi tidak homogen. Warganya mempunyai mata pencaharian dan tingkat pendapatan yang beranekaragam, begitu juga asal muasalnya. Dalam masyarakat permukiman kumuh juga dikenal adanya pelapisan sosial berdasarkan atas kemampuan ekonomi mereka yang berbeda-beda tersebut.
6. Sebagian besar penghuni permukiman kumuh adalah mereka yang bekerja di sektor informal atau mempunyai mata pencaharian tambahan di sektor informal.

Terdapat beberapa pendapat mengenai karakteristik permukiman kumuh secara umum. Selain itu juga terdapat pendapat yang dikemukakan oleh

beberapa tokoh, diantaranya Sinulingga (2005), Komarudin (1999), Suparlan (2000) dan Adisasmita (2005). Untuk mempermudah pemahaman dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.3** Kajian Karakteristik Permukiman Kumuh

No	Sumber	Deskripsi	Faktor
1	Sinulingga (2005)	Dalam permukiman dinilai dari lahan serta prasarana yang disediakan dalam kawasan permukiman.	Padat penduduk
			Lebar yang sempit & jenis perkerasan di ruas jaringan jalan
			Prasarana utilitas yang tidak memadai
			Tata bangunan sangat tidak teratur dan tidak permanen
			Rawan terhadap penularan penyakit
			Pemilikan hak atas lahan sering tidak legal
2	Komarudin (1999)	Lingkungan kumuh, yang didefinisikan sebagai lingkungan permukiman yang kondisi tempat tinggal atau tempat huniannya berdesakan, luas rumah tidak sebanding dengan jumlah penghuni	Kondisi lahan
			Kondisi ekonomi lemah
			Kondisi sosial rendah
			Hunian tidak sesuai dengan ketentuan
			Rawan fisik lingkungan
			Prasarana tidak memadai
			Sanitasi lingkungan buruk
			Tidak ada sumber air bersih
3	Adisasmita (2005)	permukiman kumuh ialah tempat anggota masyarakat kota yang mayoritas berpenghasilan rendah dan membentuk	Keadaan kurang memenuhi syarat
			Kesehatan lingkungan sangat rendah
			Sering terkena wabah penyakit

No	Sumber	Deskripsi	Faktor
		pemukiman tempat tinggal dalam kondisi yang minim serta berpenduduk padat.	Jaringan jalan internal tidak teratur
			Umumnya terbuat dari material temporer atau semi permanen
			Ukuran persil dan tanah sempit
			Pola penggunaan tanah tak teratur
			Letak dan bentuk bangunan tidak teratur
			Prasarana fisik lingkungan dibawah standar atau sama sekali tidak ada.
			Dihuni oleh sejumlah penduduk yang padat dalam area yang terbatas
			Mayoritas pendapatan penduduk rendah
			Tingkat pendidikan masyarakat rendah
			Hubungan kegotongroyongan antar individu lebih menonjol dibanding masyarakat pada bagian kota lainnya
			Kesesuaian dengan perundang-undangan dan dasar penataan ruang
			Pola mata pencaharian heterogen
			Tingkat produktivitas dan kesehatan lingkungan rata-rata rendah
			Sektor perekonomian bersifat informal

No	Sumber	Deskripsi	Faktor
4.	Suparlan (2000)		Fasilitas umum tidak memadai
			Kondisi fisik bangunan
			Pemukiman kumuh merupakan suatu satuan-satuan komuniti yang hidup secara tersendiri dengan batas-batas kebudayaan dan sosial yang jelas
			Penghuni permukiman kumuh secara sosial dan ekonomi tidak homogen,
			Masyarakat bekerja di sektor informal atau mempunyai mata pencaharian tambahan di sektor informil

*Sumber : Hasil Tinjauan Pustaka dan Literatur ,2016*

Sedangkan untuk kawasan permukiman kumuh pusat kota umumnya memiliki kesamaan karakteristik seperti permukiman kumuh pinggiran maupun non pusat kota. Yang membedakannya ialah pelayanan infrastuktur, aksesibilitas, dan pendapatan masyarakatnya (Surtiani, 2006). Permukiman kumuh di kawasan pusat kota memiliki ketersediaan infrastruktur yang lebih lengkap dengan pelayanan yang lebih baik dan aksesibilitas yang mudah. Selain itu, pada umumnya penghuni permukiman kumuh pusat kota memiliki tingkat pendapatan yang lebih besar dibandingkan penghuni permukiman kumuh yang terdapat di pinggiran kota atau non pusat kota. Tingkat penganggurannya juga lebih kecil karena kegiatan di pusat kota lebih padat dan berkembang sehingga dimanfaatkan oleh penduduk untuk bekerja di sektor informal.

Berdasarkan pemaparan diatas, karakteristik permukiman kumuh yang digunakan dalam penelitian mengadaptasi dari karakteristik yang dikemukakan Adisasmita (2005). Adapun karakteristik yang telah mencakup beberapa karakteristik yang dikemukakan para tokoh diatas. Sedangkan untuk karakteristik sosial diperjelas lagi oleh pendapat Adisasmita (2005), yang menyatakan bahwa hubungan kegotongroyongan antar individu yang tinggal di permukiman kumuh lebih menonjol dibanding masyarakat yang tinggal pada daerah lainnya.

Dengan demikian, karakteristik permukiman kumuh dalam penelitan ini adalah berkepadatan tinggi, memiliki KDB tinggi, kondisi lahan, kepemilikan lahan, jaringan jalan yang tidak memadai, fasilitas sanitasi yang kurang memadai, Kondisi sosial rendah, dan tidak tersedianya fasilitas penunjang.

### **2.2.2 Faktor Penyebab Permukiman Kumuh**

Kekumuhan disebabkan oleh beberapa hal dimana penyebab kumuh di satu lokasi berbeda dengan lokasi lain. Adisasmita (2005) menyebutkan bahwa kekumuhan disebabkan karena pertambahan penduduk yang tinggi akibat urbanisasi sehingga menyebabkan tekanan ekonomi dan kepadatan bagi kaum urban. Pendapat serupa dikemukakan oleh Sinulingga (1999) yang juga menyatakan bahwa kekumuhan disebabkan karena tingginya arus migran. Sementara Kuswantojo (2005) juga menyebutkan bahwa penyebab kekumuhan ialah urbanisasi dan lemahnya pengendalian. Sedangkan menurut Suparlan (1997), faktor penyebab kekumuhan terbagi atas 2 yaitu :

1. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi seperti kemiskinan dan krisis ekonomi mendorong pendatang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di kota. Akan tetapi dengan keterbatasan pengetahuan, keterampilan, dan modal serta adanya persaingan yang sangat ketat diantara sesama pendatang menyebabkan pendatang tersebut hanya dapat tinggal dan membangun rumah di kota dengan kondisi yang sangat minim. Sementara itu, di sisi lain terdapat pertambahan jumlah pendatang yang menyebabkan pemerintah tidak mampu menyediakan rumah yang layak huni.

## 2. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan yang dimaksud ialah kebencanaan, baik bencana alam maupun bencana lain seperti perang atau pertikaian antar suku juga turut menyebabkan berkembangnya permukiman kumuh dengan cepat. Sementara Surtiani (2006) menyebutkan bahwa faktor penyebab kumuh terdiri dari :

### 1) Status kepemilikan bangunan

Faktor ini diasumsikan memiliki pengaruh terhadap kekumuhan karena perilaku para pendatang yang tidak merasa ikut memiliki dan menjaga bangunan yang mereka tempati sehingga juga berdampak pada kerusakan bangunan.

### 2) Lama tinggal penghuni

Faktor ini diasumsikan memiliki pengaruh terhadap kekumuhan karena cara pandang penghuni yang merasa hanya tinggal sementara waktu dan tidak merasa memiliki bangunan sehingga pelestarian terhadap bangunan diabaikan.

### 3) Tingkat penghasilan

Faktor ini diasumsikan memiliki pengaruh terhadap kekumuhan karena ketidakmampuan penghuni dalam memperbaiki bangunan hunian yang ada.

Pendapat lain dikemukakan oleh Komarudin (1999) yang menyebutkan bahwa faktor penyebab kekumuhan terdiri dari:

1. Tingkat urbanisasi yang tinggi
2. Keterampilan dan tingkat pendidikan pendatang rendah
3. Kurangnya persediaan rumah
4. Pengawasan tanah kurang ketat
5. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum
6. Desakan ekonomi

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat perbandingan pendapat para pakar mengenai faktor penyebab kekumuhan. Kawasan permukiman kumuh di pusat kota pada umumnya memiliki faktor penyebab kumuh yang sama. Yang membedakan ialah daya tarik pusat kota (Clay dalam Surtiani, 2006). Kawasan pusat kota memiliki daya tarik yang lebih besar, baik karena lokasinya yang strategis, ketersediaan sarana prasarana yang lengkap, maupun adanya pusat kegiatan ekonomi, sosial, pemerintahan, dan kegiatan lainnya. Kondisi tersebut yang kemudian menarik orang untuk datang ke kota dengan pemikiran bahwa pusat kota merupakan tempat yang nyaman untuk bekerja. Akan tetapi seringkali pendatang tidak memiliki pendidikan dan keterampilan kerja yang baik. Hal itulah yang pada akhirnya memicu timbulnya kantong-kantong permukiman kumuh di kawasan pusat kota. Terdapat

banyak pandangan mengenai faktor yang menyebabkan kekumuhan. Untuk melihat perbedaan pandangan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.4** Faktor Penyebab Kawasan Kumuh

No	Sumber	Faktor
1	Adisasmita (2005)	pertambahan penduduk yang tinggi akibat urbanisasi
2	Sinulingga (1999)	tingginya arus migrasi
3	Kuswartojo (2005)	Tingginya tingkat urbanisasi
		Lemahnya pengendalian
4	Suparlan (1997)	Faktor ekonomi
		Faktor lingkungan Sarana & Prasarana
5	Surtiani (2006)	Status kepemilikan bangunan
		Lama tinggal penghuni
		Tingkat penghasilan
6	Komarudin (1997)	Tingkat urbanisasi yang tinggi
		Keterampilan dan tingkat pendidikan pendatang rendah
		Kurangnya persediaan rumah
		Pengawasan tanah kurang ketat
		Kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum
		Desakan ekonomi

*Sumber : Hasil Tinjauan Pustaka dan Literature ,2015*

Faktor penyebab kekumuhan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sintesa dari pendapat para tokoh diatas. Adapun secara garis besar, penyebab kekumuhan diklasifikasikan ke dalam 4 faktor yang terdiri dari :



1. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi diwakilkan oleh variabel tingkat pendapatan. Variabel tersebut memiliki pengaruh terhadap kekumuhan karena ketidakmampuan penghuni dalam memperbaiki bangunan hunian yang ada akan mempengaruhi kualitas bangunan dan lingkungan permukimannya. Adapun masyarakat yang bermukim di permukiman kumuh dan turut menyebabkan kekumuhan pada lingkungan permukimannya merupakan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah yang umumnya hanya bisa membangun rumah dengan kondisi minim.

2. Faktor sosial

Faktor sosial diwakilkan melalui variabel tingkat pendidikan dan tingkat migrasi masuk. Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan akan membuat masyarakat tidak dapat bertahan dalam menghadapi persaingan yang sangat ketat, khususnya di antara para pendatang. Sementara tingginya tingkat migrasi masuk menyebabkan kepadatan penduduk semakin tinggi dan menyebabkan tekanan ekonomi pada beberapa pihak.

3. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan diwakilkan oleh variabel tingkat kesadaran lingkungan dan kualitas prasarana permukiman. Terjaganya kualitas lingkungan permukiman sangat tergantung pada perilaku dan pola hidup masyarakat yang bermukim didalamnya. Masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran lingkungan tinggi akan mampu menjaga lingkungan permukimannya sehingga tetap terawat, begitupun juga sebaliknya. Sementara variabel kualitas

prasarana permukiman memiliki pengaruh terhadap kekumuhan karena penyediaan prasarana permukiman yang kurang baik dan tidak memadai akan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan permukimannya.

#### 4. Faktor hukum

Faktor hukum diwakili oleh variabel tingkat pengendalian pemanfaatan ruang. Variabel tersebut memiliki pengaruh terhadap kekumuhan karena lemahnya pengawasan pemerintah dalam mengendalikan pemanfaatan ruang menyebabkan timbulnya bangunan permukiman yang tidak memenuhi standar rumah sehat. Selain itu, beberapa bangunan permukiman juga tumbuh pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya dikarenakan kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum. Hal tersebut tentu menimbulkan ketidakteraturan bangunan dan menyebabkan kekumuhan.

### 2.2.3 Dampak Perkembangan Permukiman Kumuh

Menurut (Rindarjono, 2010) pemadatan bangunan (densifikasi) permukiman, yang berakibat menurunnya kualitas permukiman, dengan demikian di daerah perkotaan akan timbul daerah-daerah permukiman yang kurang layak huni yang sangat padat, dan hal ini akan membawa suatu akibat pada kondisi lingkungan permukiman yang buruk, yang selanjutnya disebut sebagai daerah kumuh. secara umum perkembangan permukiman kumuh dapat diamati berdasarkan hal sebagai berikut: (1) Sifat *extended family* pada sebagian besar pemukiman-permukiman kumuh mengakibatkan dampak pada pemanfaatan ruang

yang sangat semerwut di dalam rumah, untuk menampung penambahan jumlah anggota keluarga maka dibuat penambahan-penambahan ruang serta bangunan yang asal jadi, akibatnya kondisi rumah secara fisik semakin terlihat awut-awutan; (2) Proses penuaan memiliki dampak semakin terlihatnya permukiman kumuh bertambah kusam dalam performanya, hal ini nampak secara visual dari kondisi partisi dinding bangunan yang ada serta atap yang kualitasnya semakin menurun; (3) Di dalam proses pemadatan bangunan (densifikasi) di permukiman kumuh akan diikuti oleh infilling process dan dampak selanjutnya akan terjadi involusi permukiman, yakni permintaan lahan akan permukiman yang semakin meningkat sementara ketersediaan lahan yang cenderung tidak bertambah.

Perumahan kumuh dapat mengakibatkan berbagai dampak. Dari segi pemerintahan, pemerintah dianggap dan dipandang tidak cakap dan tidak peduli dalam menangani pelayanan terhadap masyarakat. Sementara pada dampak sosial, dimana sebagian masyarakat kumuh adalah masyarakat berpenghasilan rendah dengan kemampuan ekonomi menengah ke bawah dianggap sebagai sumber ketidakteraturan dan ketidakpatuhan terhadap norma-norma sosial. Terbentuknya pemukiman kumuh yang sering disebut sebagai slum area dipandang potensial menimbulkan banyak masalah perkotaan, karena dapat menjadi sumber timbulnya berbagai perilaku menyimpang, seperti kejahatan, bencana alam dan sumber penyakit sosial lainnya. Penduduk di permukiman kumuh tersebut memiliki persamaan, terutama dari segi latar belakang sosial ekonomi-pendidikan yang rendah,

keahlian terbatas dan kemampuan adaptasi lingkungan (kota) yang kurang memadai. Kondisi kualitas kehidupan ini yang mengakibatkan semakin banyaknya penyimpangan perilaku penduduk penghuninya. Terjadinya perilaku menyimpang ini karena sulitnya mencari atau menciptakan pekerjaan sendiri dengan keahlian dan kemampuan yang terbatas, selain itu juga karena menerima kenyataan bahwa impian yang mereka harapkan mengenai kehidupan di kota tidak sesuai dengan yang diharapkan dan tidak dapat memperbaiki kehidupan masyarakat menurut Handoko (2012).

**Tabel 2.5** Dampak Perkembangan Permukiman Kumuh

No.	Sumber	Deskripsi	Faktor
1.	Rindarjono (2010)	pemadatan bangunan (densifikasi) permukiman, yang berakibat menurunnya kualitas permukiman, dengan demikian di daerah perkotaan akan timbul daerah-daerah permukiman yang kurang layak huni yang sangat padat, dan hal ini akan membawa suatu akibat pada kondisi lingkungan permukiman yang buruk, yang selanjutnya disebut sebagai daerah kumuh	Kepadatan Penduduk
			Kualitas Fisik Bangunan
			Ketersediaan Lahan
2.	Handoko (2012)	Perumahan kumuh dapat mengakibatkan berbagai dampak. Dari segi pemerintahan, pemerintah dianggap dan dipandang tidak	Tingkat kejahatan
			Bencana Alam

No.	Sumber	Deskripsi	Faktor
		cakap dan tidak peduli dalam menangani pelayanan terhadap masyarakat. Sementara pada dampak sosial, dimana sebagian masyarakat kumuh adalah masyarakat berpenghasilan rendah dengan kemampuan ekonomi menengah ke bawah dianggap sebagai sumber ketidakteraturan dan ketidakpatuhan terhadap norma-norma sosial serta rawannya terjadi rawan terjadinya bencana diakibatkan pola hidup yang tidak baik.	Kualitas hidup masyarakat
			Tingkat penghasilan masyarakat

*Sumber : Hasil Tinjauan Pustaka dan Literature ,2016*

### **2.3 Konsep Penanganan Permukiman Kumuh**

Pemerintah telah melakukan penanganan terhadap kawasan permukiman kumuh yang telah diatur sesuai dengan UU No. 1/2011 pasal 97, lingkup penanganan lingkungan permukiman kumuh adalah untuk peningkatan kualitas yang mencakup hal-hal sebagai berikut :

#### **1) Pemugaran**

Pemugaran merupakan perbaikan dan/ atau pembangunan kembali permukiman menjadi permukiman layak huni. Secara konseptual, implementasi prinsip pemugaran meliputi :

- a) Revitalisasi adalah upaya menghidupkan kembali suatu kawasan mati, yang pada masa silam pernah hidup, atau mengendalikan dan mengembangkan kawasan untuk menemukan kembali potensi yang dimiliki oleh sebuah kota,
  - b) Rehabilitasi merupakan upaya mengembalikan kondisi komponen fisik lingkungan permukiman yang mengalami degradasi,
  - c) Renovasi adalah melakukan perubahan sebagian atau beberapa bagian dari komponen pembentukan lingkungan permukiman,
  - d) Rekontruksi merupakan upaya mengembalikan suatu lingkungan permukiman sedekat mungkin dari asalnya yang diketahui, dengan menggunakan komponen-komponen baru maupun lama,
  - e) Preservasi merupakan upaya mempertahankan suatu lingkungan pemukiman dari penurunan kualitas atau kerusakan. Penanganan ini bertujuan untuk memelihara komponen yang berfungsi baik dan mencegah dari proses penyusutan dini (kerusakan), misalnya dengan menggunakan instrument : ijin mendirikan bangunan (IMB). Ketentuan atau pengaturan tentang : Koefisien Lantai Bangunan, Koefisien Dasar Bangunan, Garis Sempadan Bangunan, Garis Sempadan Jalan dan Garis Sempadan Sungai .
- 2) Peremajaan
- Peremajaan adalah upaya pembongkaran sebagian atau keseluruhan lingkungan perumahan dan permukiman dan kemudian di tempat yang sama

dibangun prasarana dan sarana lingkungan perumahan dan pemukiman baru yang lebih layak dan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan nilai pemanfaatan lahan yang optimal sesuai dengan potensi lahannya.

### 3) Pemukiman kembali

Pemukiman kembali adalah memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/ atau rawan bencana serta dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang.

Penataan lingkungan permukiman kumuh dilaksanakan dengan konsep pemberdayaan masyarakat melalui fasilitas pendampingan yang menyentuh permasalahan strategisnya. Penanganan lingkungan permukiman kumuh tidak dapat diselesaikan parsial, tetapi harus terpadu dan sinergis dengan melibatkan potensi dan eksistensi dari seluruh pihak yang berkepentingan (pemerintah dan masyarakat). Ruang (*spatial approach*) sebagai bagian dari rencana tata ruang, untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ruang secara integral. Penanganan lingkungan kumuh dilakukan melalui penanganan dari pemerintah dan swadaya masyarakat yang dapat berupa swadaya murni maupun dengan bantuan atau subsidi dari pihak ketiga (Penyusunan Identifikasi Kawasan Kumuh, 2014).

Pola-pola alternatif pendekatan tata ruang (*spatial approach*) yang dapat digunakan dalam peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh

(Penyusunan Identifikasi Kawasan Kumuh, 2014), terdiri dari:

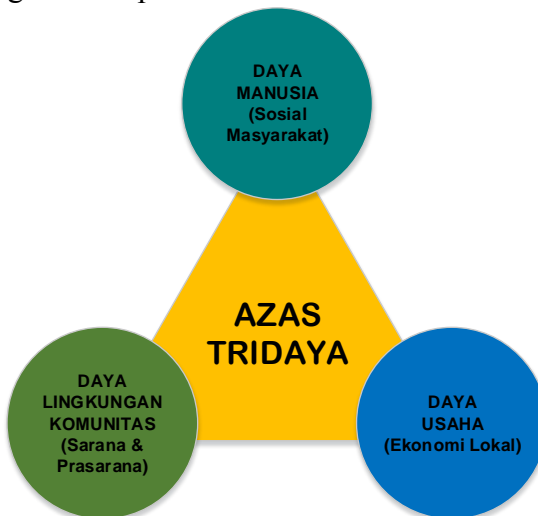
- 1) Redefinisi; yaitu konsep penanganan permukiman melalui penegasan kembali atas pola pemanfaatan struktur ruang yang telah ada, dengan kata lain melakukan intervensi program permukiman tanpa merubah struktur ruang yang telah ada. Program-program yang dapat diterapkan dalam lingkup redefinisi permukiman meliputi:
  - a) Revitalisasi (perbaikan dan peningkatan); peningkatan vitalitas melalui peningkatan kualitas lingkungan, bertujuan untuk memperbaiki dan mendorong ekonomi kawasan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada.
  - b) Rehabilitasi (perbaikan); bertujuan untuk mengembalikan kondisi fisik kawasan yang mengalami degradasi fungsi.
  - c) Renovasi (perubahan sebagian atau beberapa bagian); melakukan perubahan sebagian atau beberapa komponen pembentuk permukiman agar dapat beradaptasi dan menampung fungsi baru tetapi tetap memiliki fungsi yang sama.
  - d) Rekonstruksi (pengembalian kondisi); bertujuan mengembalikan kondisi (kualitas dan fungsi) komponen permukiman pada kondisi asalnya, baik persyaratan maupun penggunaannya.
  - e) Preservasi (pemeliharaan dan pengendalian); bertujuan untuk memelihara komponen yang masih berfungsi baik dan mencegah proses penyusutan dini (kerusakan).



- 2) Restrukturisasi; yaitu konsep penanganan permukiman melalui proses restrukturisasi pola ruang atau struktur ruang yang telah ada, sehingga struktur ruang non fisik diharapkan juga menjadi lebih baik. Program-program yang dapat diterapkan dalam lingkup restrukturisasi permukiman meliputi :
  - a) Renewal (peremajaan); melakukan pembongkaran sebagian atau menyeluruh komponen permukiman, atau melakukan perubahan secara struktural dengan membangun kembali di atas lahan yang sama. Bertujuan untuk mendapatkan pemanfaatan lahan yang optimal sesuai dengan potensi lahan.
  - b) Redevelopment (pembangunan kembali); upaya penataan kembali dengan terlebih dahulu melakukan pembongkaran sarana dan prasarana dari sebagian ataupun keseluruhan kawasan.
  - c) Restorasi (pengembalian); penanganan untuk mengembalikan pada kondisi asalnya sesuai dengan persyaratan permukiman yang benar dengan pengadaan kembali unsur-unsur permukiman yang telah hilang, tanpa menambah unsur-unsur baru.
- 3) Pengembalian fungsi lahan; yaitu bentuk penanganan yang dilakukan apabila kawasan permukiman kumuh tidak memiliki kesesuaian dengan fungsi lokasi dan diarahkan untuk tetap kembali pada fungsi semula. Program dalam lingkup pengembalian fungsi lahan adalah resettlement (permukiman kembali).

Dalam penanganan kampung kumuh di kawasan perkotaan pembangunan perumahan dan permukiman

diselenggarakan sebagai urusan daerah bersama masyarakat dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama, yaitu sebagai pengambil keputusan dan pelaksana keputusan. Melalui Konsep TRIDAYA secara prinsip bertujuan untuk memberdayakan komponen sosial masyarakat, usaha dan ekonomi, serta lingkungan – khususnya di tingkat lokal. Melalui konsep ini akan diintegrasikan kegiatan penyiapan dan pemberdayaan masyarakat, serta kegiatan pemberdayaan kegiatan usaha ekonomi, komunitas dengan kegiatan pendayagunaan prasarana dan sarana dasar lingkungan perumahan dan permukiman sebagai satu kesatuan sistem pemberdayaan yang tidak terpisahkan.



**Gambar 2.1** Azas Dasar Konsep TRIDAYA

*Sumber : Panduan Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh, 2006*

Konsep TRIDAYA memiliki 3 (tiga) komponen, yaitu:

- 1) Daya Manusia; dilaksanakan proses penyadaran untuk menumbuhkan pengertian, pengetahuan,

kepedulian dan rasa memiliki dari peserta proyek atau kelompok binaan terhadap permasalahan yang dihadapi. Mereka difasilitasi untuk mendapatkan akses ke sumberdaya pembangunan yang tidak mereka miliki.

- 2) Daya Usaha; penerima manfaat proyek diberi bekal pengetahuan dan keterampilan usaha yang dapat membantu upaya-upaya peningkatan pendapatan.
- 3) Daya Lingkungan Komunitas; yang terkena dampak proyek diajak untuk mengenali sumber permasalahan yang dihadapi dengan melakukan survei kampung sendiri atau self-assessment survey, yang hasilnya dipaparkan dalam acara rembug warga. Dari hasil rembug warga kemudian diputuskan prioritas pembangunan komponen prasarana dan sarana lingkungan, yang hasilnya berupa Rencana Tindak Komunitas atau Community Action Plan (CAP). Melalui proses penyadaran (diseminasi dan sosialisasi, rembug warga, dan fasilitasi), pengorganisasian dan pengelolaan komunitas (lembaga akar rumput) serta pendampingan, maka hasil pembangunan diharapkan dapat lebih efektif dan berkelanjutan.

Konsep TRIDAYA lebih berorientasi pada penanggulangan kemiskinan yang menekankan pendekatannya pada keswadayaan masyarakat sebagai suatu komunitas. Pendekatan ini dilakukan melalui upaya pendampingan serta penggalian kemampuan dan potensi komunitas itu sendiri. Upaya pemberdayaan dalam konsep TRIDAYA dilakukan untuk mendapatkan hasil alamiah, maksimal dan berkelanjutan. Kelompok

masyarakat binaan diharapkan mampu menggali potensi yang dimiliki dan memecahkan masalah yang dihadapi.

**Tabel 2.6** Kajian penanganan permukiman kumuh

No.	Sumber	Deskripsi	Faktor
1.	UU No. 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman	Pola-pola alternative pendekatan tata ruang (spatial approach) yang dapat digunakan dalam peningkatan kualitas lingkungan	Pemugaran
			Peremajaan
			Permukiman Kembali
2.	Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh Konsep Makro (Penyusunan Identifikasi Kawasan Kumuh, 2014)	Penataan lingkungan permukiman kumuh dilaksanakan dengan konsep pemberdayaan masyarakat melalui fasilitas pendampingan yang menyentuh permasalahan strategisnya. Penanganan lingkungan permukiman kumuh tidak dapat diselesaikan parsial, tetapi harus terpadu dan sinergis dengan melibatkan potensi dan eksistensi dari seluruh pihak yang berkepentingan (pemerintah dan masyarakat).	Redefensi
			Restrukturisasi
			Pengembalian Fungsi Lahan
3.	Konsep TRIDAYA (Panduan Identifikasi	Konsep yang lebih berorientasi pada penanggulangan kemiskinan yang menekankan	Daya Manusia
			Daya Usaha

No.	Sumber	Deskripsi	Faktor
	Kawasan Permukiman Kumuh, 2006)	pendekatannya pada keswadayaan masyarakat sebagai suatu komunitas. Pendekatan ini dilakukan melalui upaya pendampingan serta penggalan kemampuan dan potensi komunitas itu sendiri.	Daya Lingkungan Komunitas

Sumber : Hasil Tinjauan Pustaka dan Literatur ,2016

## 2.4 Sintesa Tinjauan Pustaka

Menurut tinjauan pustaka yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, terdapat beberapa faktor-faktor penting dan perlu dipertimbangkan dalam penanganan permukiman kumuh. Permukiman yang pada dasarnya merupakan permukiman yang layak huni bagi masyarakat. Melihat bahwa pada dasarnya hal yang diteliti adalah penanganan permukiman kumuh yang ditinjau nilai-nilai ekonomi serta hak masyarakat dalam hal bermukim pada lokasi semula. Melalui berbagai macam pendekatan dalam penanganan permukiman kumuh, maka beberapa teori atau pustaka yang digunakan adalah yang fokus penanganan pada segi fisik dan lingkungan ini lebih sesuai dengan karakteristik permukiman kumuh dengan bangunan padat dengan peran pemerintah, swasta dan masyarakat.

Dilihat dari kepadatan penduduk serta kondisi sarana prasarana khususnya sanitasi yang masih sangat buruk,. Konsep penanganan yang secara komprehensif berdasarkan segi fisik dan lingkungan sedangkan untuk teori atau tinjauan pustaka yang lain lebih bersifat

melengkapi konsep pengembangan permukiman yang berwawasan penanganan kumuh dengan pengembangan tata ruang wilayah yang sedang dan akan berkembang diarahkan melalui pola infrastuktur yang lebih terencana dan terpadu. Faktor-faktor yang ada pada sintesa ini merupakan indikator yang sudah dipilih sesuai kebutuhan penelitian. Artinya, ada beberapa variabel dalam tinjauan pustaka yang tidak masuk dalam variabel pada disntesa pustaka karena dianggap kurang relevan dengan penelitian di wilayah studi yakni di kawasan permukiman kumuh yang dapat ditangani melalui faktor penyebab kumuh berdasarkan karakteristik kawasan atau memang variabel tersebut sudah dapat diwakili oleh variabel yang lain. Ilustrasi dari sintesa tinjauan pustaka dalam penelitian ini. Berdasarkan pola pikir tinjauan pustaka yang telah dijelaskan tersebut, hasil sintesa tinjauan pustaka terkait dengan pengembangan permukiman dapat dilihat pada **tabel 2.7** berikut ini.

**Tabel 2.7** Sintesa Tinjauan Pustaka terkait Indikator yang digunakan dalam Penelitian

No.	Pustaka	Faktor	Indikator	Variabel
1.	karakteristik kawasan permukiman kumuh	Fisik & Lingkungan	Kondisi Fisik Bangunan	Kualitas Tanah
				Kepemilikan Lahan
				Kualitas Bangunan
				Kepadatan Bangunan
				Pertambahan Bangunan Kumuh

No.	Pustaka	Faktor	Indikator	Variabel
				Jarak Antar Bangunan
			Kondisi Sarana & Prasarana	Kualitas Jaringan Jalan Lingkungan
				Kualitas Drainase
				Kualitas Jaringan Air Minum
				Kualitas Persampahan
				Kualitas Air limbah
			Mitigasi Bencana	Kategori Bencana
				Penanggulangan Bencana
		Sosial	Kondisi Sosisal Masyarakat	Kepadatan Penduduk
				Pertumbuhan Penduduk
				Kegiatan Masyarakat
				Tingkat pendidikan
		Ekonomi	Kondisi Ekonomi Masyarakat	pola mata pencaharian
				Tingkat pendapatan penduduk
2.	Faktor-faktor penyebab	Fisik & Lingkungan		Kepemilikan Lahan Bangunan

No.	Pustaka	Faktor	Indikator	Variabel
	permukiman kumuh		Kondisi Fisik Bangunan	Ketersediaan rumah
				Kualitas Bangunan
				Kepadatan Bangunan
			Kondisi Sarana & Prasarana	Kualitas Sararana & Prasarana
				Ketersediaan Sarana & Prasarana
		Sosial	Sosial Masyarakat	Tingkat Arus Migrasi
				Tingkat Pendidikan
				Kepadatan Penduduk
		Ekonomi	Kondisi Ekonomi	Penghasilan penduduk
3.	Arahan Penanganan kawasan permukiman kumuh.	Pola-pola alternatif pendekatan tata ruang ( <i>spatial approach</i> ) lingkup	Pengendalian Hukum	Pengawasan peruntukan tanah
				Pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat
			Pemugaran	Fisik & Lingkungan
			Peremajaan	Lingkungan
			Permukiman Kembali	Penyediaan Sarana & Prasarana



No.	Pustaka	Faktor	Indikator	Variabel
		penanganan lingkungan permukiman kumuh		
		Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh Konsep Makro	Redefinisi	Pemanfaatan Struktur Ruang
			Restrukturisasi	Perbaikan Pola Ruang & Struktur Ruang
			Pengembalian fungsi lahan	Kesesuaian Fungsi Lokasi
		Pemberdayaan komponen sosial masyarakat, usaha dan ekonomi serta lingkungan dalam penanganan kampung kumuh di kawasan perkotaan (Konsep TRIDAYA)	Daya Manusia	Sumberdaya Manusia
			Daya Usaha	Tingkat Pendapatan
			Daya Lingkungan Komunitas	Komunitas Masyarakat

*Sumber : Hasil Sintesa Tinjauan Pustaka, 2016*

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian penanganan kawasan permukiman kumuh sesuai karakteristik permukiman kumuh di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin. Hal-hal yang dibahas dalam bab ini meliputi: pendekatan penelitian, jenis penelitian, variabel penelitian, penentuan populasi dan sampel, metode pengumpulan data, penentuan stakeholder kunci, teknik analisis, dan tahapan penelitian.

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Penelitian yang menghasilkan arahan terkait dengan penanganan kawasan permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan rasionalistik yakni pendekatan yang digunakan dengan jalan memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai dimensi dan hubungan interaktif antara instrumen dan tujuan penelitian yang kemudian akan diabstraksi ke dalam model konseptual terkait dengan hubungan keduanya (Bloom dalam Muhadjir, 2000).

Dijelaskan penelitian ini juga menggunakan metode penelitian deduktif. Metode penelitian deduktif merupakan suatu metode penelitian secara teoritik untuk mendapatkan konfirmasi berdasarkan hipotesis dan observasi yang telah dilakukan sebelumnya. Suatu hipotesis lahir dari sebuah teori, lalu hipotesis ini diuji dengan melakukan beberapa observasi. Hasil dari observasi ini akan dapat memberikan konfirmasi tentang sebuah teori yang semula dipakai untuk menghasilkan hipotesis. Dengan kata lain metode penelitian deduktif merupakan metode penelitian yang menggunakan logika untuk menarik satu atau lebih dari satu kesimpulan. Dari pengertian

tersebut diketahui pada dasarnya metode penelitian deduktif juga merupakan metodologi penelitian yang merumuskan sebuah teori atau konsep. Berdasarkan teori atau konsep inilah yang menjadi kata kunci dalam memahami suatu gejala, sehingga memudahkan dalam perumusan arahan penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin.

### **3.2 Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian terapan (*action research*) dengan jenis penelitian kualitatif. Penelitian terapan menekankan pada aktivitas untuk menemukan kebenaran yang obyektif (Masyhuri dan Zainuddin, 2008). Kebenaran tersebut harus didukung dengan data empiris, baik yang bersifat konkret maupun abstrak yang ditransformasikan menjadi data yang konkret. Selain itu, penelitian terapan juga menggunakan teori-teori yang bersifat terpakai (*applied*).

Penelitian terapan dengan jenis penelitian kualitatif digunakan karena penelitian ini tidak bersifat menguji hipotesis dari suatu teori melainkan mengeksplorasi suatu permasalahan yang sedang terjadi dengan memanfaatkan teori-teori yang telah ada. Selain itu data yang digunakan merupakan data yang telah ada, bukan merupakan data-data yang didapat secara eksperimental. Sedangkan pendekatan kuantitatif digunakan untuk menunjukkan hubungan antar variabel dengan metode statistik (Sarwono, 2006), khususnya dalam pengidentifikasian karakteristik permukiman kumuh dan perumusan arahan penanganan permukiman kumuh secara terpadu di Kelurahan Belitung Selatan.

### 3.3 Variabel Penelitian

Variabel Penelitian merupakan instrumen penjelas dari faktor-faktor yang dihasilkan dari sintesa tinjauan pustaka. Dari faktor-faktor tersebut selanjutnya akan diturunkan lagi menjadi kumpulan variabel. Variabel memiliki sifat yang dapat diukur sehingga dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Variabel penelitian inilah yang akan menjadi gambaran awal dari proses penelitian. Penentuan variabel penelitian mengenai arahan penanganan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin.

**Tabel 3.1** Indikator & Variabel Sasaran Penelitian

No.	Sasaran	Indikator	Variabel	Definisi Operasional
1.	Identifikasi karakteristik kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin	Kondisi Fisik Bangunan	Kepemilikan Lahan	Kategori Status kepemilikan tanah
			Kualitas Bangunan	Berdasarkan material jenis & konstruksi Bangunan
			Kepadatan Bangunan	Tingkat kepadatan bangunan yang diukur melalui jumlah bangunan per Ha
			Pertambahan Bangunan kumuh	Luas perkembangan permukiman kumuh (Ha)

No.	Sasaran	Indikator	Variabel	Definisi Operasional
		Kondisi Sarana & Prasarana	Jarak Antar Bangunan	Jarak antar sisi bangunan satu dengan bangunan lainnya
			Kualitas Jaringan Jalan Lingkungan	Jenis perkerasan & lebar jalan yang digunakan
			Kualitas Drainase	Ketersediaan jaringan drainase di wilayah penelitian
				Tingkat kinerja drainase melalui tingginya muka air jika terjadi genangan di wilayah penelitian (meter)
			Kualitas Jaringan Air Minum	Tingkat Pelayanan (terlayani atau tidak terlayani) penggunaan fasilitas air

No.	Sasaran	Indikator	Variabel	Definisi Operasional
				bersih yang tidak terlayani fasilitas air bersih.
				Tingkat perbandingan jenis sumber air bersih (PDAM, non PDAM, dll).
				Tingkat konsumsi penggunaan jaringan air
			Kualitas Persampahan	Jenis sistem persampahan berdasarkan pola pengelolaan sampah mulai dari awal sampah dibuang hingga sampah (dibuang sembaranga, <i>open dumping</i> , <i>controlled landfill</i> , dll)
			Kualitas Air limbah	Jumlah MCK invidu dan

No.	Sasaran	Indikator	Variabel	Definisi Operasional
				umum yang tersedia (unit)
		Mitigasi Bencana	Kategori Bencana	Jenis Bencana yang terjadi (Kebakaran, Banjir, dll)
			Penanggulangan Bencana	Ketersediaan jalur evakuasi bencana
		Kondisi Pemanfaatan Ruang	Kesesuaian dengan perundang-undangan dan dasar penataan ruang	Luas kawasan peruntukan permukiman sesuai dengan dokumen perencanaan
		Kondisi Sosial Masyarakat	Kepadatan Penduduk	Tingkatan kepadatan penduduk per Ha
			Pertumbuhan Penduduk	Besaran proyeksi laju pertumbuhan penduduk setiap tahunnya
			Kegiatan Masyarakat	Intensitas kegiatan gotong royong di kawasan permukiman kumuh

No.	Sasaran	Indikator	Variabel	Definisi Operasional
		Kondisi Ekonomi Masyarakat	Tingkat pendidikan	Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan
			Pola mata pencaharian	Jenis Mata Pencaharian Penduduk
			Tingkat pendapatan penduduk	Besaran Pendapatan Penduduk
2.	Menganalisis faktor prioritas Penyebab Kumuh berdasarkan hasil identifikasi karakteristik kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin	Kondisi Fisik Bangunan	Kepemilikan Lahan Bangunan	Status kategori kepemilikan tanah
			Ketersediaan rumah	Besaran Ketersediaan Lahan Peruntukan Perumahan
			Kualitas Bangunan	berdasarkan material jenis & konstruksi bangunan
			Kepadatan Bangunan	Tingkat kepadatan bangunan yang diukur melalui koefisien dasar bangunan (KDB) di



No.	Sasaran	Indikator	Variabel	Definisi Operasional
				wilayah penelitian (%)
		Kondisi Sarana & Prasarana	Kualitas Sarana & Prasarana	Tingkat Pelayanan Sarana & Prasarana
			Ketersediaan Sarana & Prasarana	Besaran Ketersediaan & Persebaran Sarana & Prasarana
		Kondisi Sosial & Ekonomi Masyarakat	Tingkat Arus Migrasi	Tingkat laju migrasi penduduk setiap tahunnya
			Tingkat Pendidikan	Penduduk Berdasarkan Pendidikan Terakhir
			Kepadatan Penduduk	Tingkat kepadatan penduduk per Ha
			Pendapatan penghasilan penduduk	Tingkat Pendapatan Penduduk
		Pengendalian Hukum	Pengawasan tanah kurang ketat	Luas lahan wilayah yang tidak sesuai dengan pemanfaatan lahan

No.	Sasaran	Indikator	Variabel	Definisi Operasional
			Tingkat pengetahuan dan kesadaran hukum	Ketersediaan dokumen perencanaan kawasan permukiman
3.	Arahan penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat	Sesuai output sasaran 2	Sesuai output sasaran 2	penanganan kawasan permukiman kumuh dengan hasil komparasi data hasil analisa

*Sumber : Hasil Peneliti, 2016*

### **3.4 Populasi Dan Sampel**

#### **3.4.1 Populasi**

Populasi merupakan keseluruhan pengamatan yang menjadi perhatian kita (Walpole, 1995). Populasi memiliki pengertian sekelompok individu atau objek yang memiliki karakteristik yang sama, misalnya status sosial yang sama atau obyek lain yang mempunyai karakteristik sama. Sedangkan sampel dapat diartikan sebagai sebagian dari populasi yang dapat mewakili populasi atau representatif populasi. Sampel inilah yang sering disebut dengan responden penelitian. Responden yang digunakan dalam penelitian terkait dengan penanganan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin berdasarkan karakteristik permukiman kumuh. Ini merupakan responden yang berasal dari segmen atau bidang yang disesuaikan dengan sasaran

penelitian. Segmen responden penelitian ini berasal dari populasi pihak ahli/pakar (*expert*) guna mengetahui prioritas dan bobot dari setiap faktor-faktor yang berpengaruh dalam pengembangan kawasan permukiman.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya dapat diketahui bahwa responden yang terlibat dalam penelitian ini adalah pihak-pihak dari badan, kantor, atau dinas yang berhubungan dan sesuai dengan ranah penelitian dimana responden dalam penelitian ini diposisikan sebagai pihak pakar/ahli (*Expert*). Responden/pakar yang dalam hal ini adalah sebagai responden berfungsi untuk menentukan prioritas dan tingkat pengaruh dari faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penelitian dengan membandingkan tingkat kepentingan antara faktor satu dengan faktor yang lainnya. Proses membandingkan kepentingan antar faktor inilah yang menghasilkan prioritas atau bobot masing-masing faktor dan juga dapat menjadi acuan mengetahui tingkat pengaruh suatu faktor terhadap pengembangan.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penduduk yang bertempat tinggal di 10 RT yang masuk dalam kawasan penanganan permukiman kumuh yaitu sebanyak 480 unit rumah, yaitu RT (4,6,8,9,10,11,12,13,14,15) luas kawasan kumuh 6,04 Ha untuk memenuhi populasi pada sasaran pertama penelitian. ( SK Walikota No.460 Kota Banjarmasin, 2014).

### **3.4.2 Sampel**

Sampel merupakan suatu himpunan bagian dari populasi (Walpole, 1995). Sampel yang baik harus mampu mewakili populasi (*representative*) sehingga dapat menggambarkan secara optimal keadaan populasi (Masyhuri dan Zainuddin, 2008). Sampel dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan rumus :

$$n = N / (1 + N \cdot e^2)$$

dimana :

n = jumlah responden

N = jumlah populasi

e = besar toleransi yang digunakan (10%)

$$\begin{aligned} n &= 480 / (1 + (480 \times 0,1^2)) \\ &= 480 / (1 + (480 \times 0,01)) \\ &= 480 / (1 + 4.8) \\ &= 480 / 5.8 \\ &= 83 \text{ Sampel Responden} \end{aligned}$$

Penentuan jumlah populasi sebesar 480 berdasarkan data kependudukan yang tercatat dalam kawasan permukiman kumuh yang diputuskan melalui surat keputusan Walikota pada daerah penelitian. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *proportional random sampling* dan *purposive sampling*. Pengambilan sampel dengan metode *proportional random sampling* digunakan dalam melakukan identifikasi permukiman kumuh karena area-area permukiman kumuh pada wilayah penelitian tidak tersebar secara merata melainkan hanya tersebar pada beberapa lokasi dengan skala lebih kecil yaitu RT. Dalam penelitian ini, pengambilan sampel dengan metode *proportional random sampling* digunakan untuk menjawab sasaran pertama sebagai berikut :

**Tabel 3.2** Pengambilan Sampel Menggunakan Propotional Random Sampling di Wilayah Penelitian

Lokasi Kumuh	Kategori Kumuh	Jumlah (Unit Rumah )	Proporsi Sampel	Sampel
RT 004	Kumuh Ringan	49 Unit	$(49/480)*83$	8
RT 006	Kumuh Sedang	62 Unit	$(62/480)*83$	11
RT 008	Kumuh Ringan	48 Unit	$(48/480)*83$	8
RT 009	Kumuh Ringan	47 Unit	$(47/480)*83$	8
RT 010	Kumuh Ringan	44 Unit	$(44/480)*83$	8
RT 011	Kumuh Ringan	47 Unit	$(47/480)*83$	8
RT 012	Kumuh Ringan	48 Unit	$(48/480)*83$	8
RT 013	Kumuh Ringan	45 Unit	$(45/480)*83$	8
RT 014	Kumuh Ringan	46 Unit	$(46/480)*83$	8
RT 015	Kumuh Ringan	44 Unit	$(44/480)*83$	8
Jumlah		480	83	83

*Sumber : Hasil Analisa, 2016*

Sedangkan dalam penentuan faktor prioritas penyebab kumuh yang terdapat karakteristik permukiman kumuh dilakukan melalui metode *purposive sampling*.

### **Analisis Stakeholder**

Analisis stakeholder merupakan sebuah proses sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi secara kualitatif untuk menentukan kepentingan siapa yang

harus diperhitungkan ketika mengembangkan atau menerapkan suatu kebijakan atau program (Schmeer, 2007).

Analisis stakeholder dilakukan dengan membuat matriks stakeholder untuk menilai seberapa besar pengaruh dan kepentingan dari masing-masing kelompok stakeholder. Langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan analisis stakeholder adalah sebagai berikut :

- 1) Mengidentifikasi stakeholder yang terlibat
- 2) Menganalisis kepentingan dan pengaruh stakeholder terhadap kebijakan, program atau project terkait.
- 3) Menilai dan menentukan tingkat kepentingan dan pengaruh dari masing-masing kelompok stakeholder.
- 4) Menentukan kelompok stakeholder kunci, yaitu kelompok yang memiliki tingkat kepentingan dan tingkat pengaruh paling tinggi.

Proses penentuan stakeholder berdasarkan tingkatan kepentingan dan instansi/kelembagaan dapat dilihat pada **tabel lampiran B**

	Pengaruh Rendah	Pengaruh Tinggi
Kepentingan Rendah	Kelompok Stakeholder yang Paling Rendah	Kelompok yang bermanfaat untuk merumuskan atau menjembatani keputusan dan opini
Kepentingan Tinggi	Kelompok stakeholder yang penting namun barangkali perlu pemberdayaan	Kelompok Stakeholder yang paling kritis

**Gambar 3.1** Diagram Kepentingan Stakeholder

*Sumber: UNCHS Habitat, 2001*

**Tabel 3.3** Kepentingan Stakeholder dalam penelitian

<b>No.</b>	<b>Komponen</b>	<b><i>Stakeholders</i></b>	<b>Kepentingan</b>
1	Pemerintah	Bappeda Kota Banjarmasin	Mengoptimalkan pemanfaatan ruang kota dengan menyusun kebijakan penataan ruang
		Dinas Cipta Karya dan Perumahan Kota Banjarmasin	Penyusunan kebijakan teknis di bidang tata kota dan permukiman
		Dinas PU dan Bina Marga	Penyusunan kebijakan teknis di bidang pembangunan fisik dan infrastruktur
		Dinas Tata Ruang & Tata Bangunan Kota Banjarmasin	Mempertimbangkan kepentingan terkait Pola Ruang pada lokasi permukiman
		Kelurahan Belitung Selatan	Mempertimbangkan kepentingan masyarakat dalam kondisi sosial & budaya terhadap permukiman di lokasi.
2	Akademisi	Pakar bidang perumahan dan permukiman	Berkepentingan dalam memberikan sudut pandang keilmuan terkait permukiman & Perumahan terhadap permasalahan permukiman kumuh

No.	Komponen	Stakeholders	Kepentingan
3	Masyarakat ( <i>Desicion Maker</i> )	Tokoh Masyarakat atau Pemilik Rumah (Ketua RT/RW/Warga)	Kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah penelitian (menjadi <i>desicion maker</i> ) dan mengetahui perumahan yang memiliki pengaruh sebagai pengambil keputusan dalam pemilihan perumahan.

*Sumber : Hasil Analisis Stakeholders, 2016*

### 3.5 Metode Pengumpulan Data

#### 3.5.1 Metode Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data primer merupakan data yang menggambarkan kondisi faktual wilayah studi yang menjadi obyek penelitian. Teknik yang digunakan untuk mendapatkan data primer antara lain adalah sebagai berikut :

##### A. Observasi

Observasi yang dimaksud dalam pengambilan data pada penelitian ini adalah observasi langsung ke lapangan dengan melihat kondisi eksisting dari wilayah studi yakni kawasan permukiman Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin. Observasi lebih kearah pengamatan langsung yang menggunakan indera penglihatan sehingga dapat dikatakan bersifat pasif atau lebih melihat keadaan daripada mengeksploarasi melalui percakapan. Pengambilan data melalui observasi dalam penelitian mengenai arahan penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Belitung Selatan adalah mengetahui jenis, sebaran, dan kondisi dari beberapa faktor penyebab kumuh dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin.



**B. Wawancara**

Wawancara merupakan pengambilan data primer yang sifatnya lebih mengeksplorasi atau memperdalam temuan-temuan yang didapatkan melalui hasil observasi. Wawancara dilakukan melalui proses tanya jawab terkait dengan fenomena atau fokus penelitian. Dalam penelitian terkait dengan arahan penanganan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin. Wawancara dilakukan untuk mengeksplorasi kondisi dan karakteristik dari indikator-indikator yang bersifat abstrak atau tidak bisa sekaligus diamati oleh panca indera seperti aspek sosial masyarakat serta terkait kondisi fisik bangunan kawasan permukiman kumuh.

**C. Kuisioner**

Kuisioner pada dasarnya adalah metode pengambilan data primer dengan jalan menanyakan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan tujuan penelitian yang kemudian dijawab oleh responden. Kuisioner dapat dikatakan sebagai metode wawancara tidak langsung yang berguna untuk menghimpun data terkait penelitian dengan jumlah responden yang relatif besar. Dalam penelitian terkait arahan penanganan permukiman kumuh berdasarkan karakteristik permukiman kumuh di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin. Data primer yang menggunakan metode kuisioner adalah data mengenai persepsi para pakar/ahli (expert) terkait penentuan prioritas dan bobot faktor-faktor yang berpengaruh dalam arahan penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin.

**Tabel 3.4** Metode Perolehan Data Primer

<b>No.</b>	<b>Metode</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Keterangan</b>
1	Observasi	Sasaran 1 : Identifikasi karakteristik kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin	Melakukan pengamatan kawasan permukiman, dengan objek pengamatan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kondisi fisik bangunan</li> <li>• Kondisi sosial &amp; ekonomi</li> <li>• Mitigasi Bencana</li> <li>• Kondisi Pemanfaatan Ruang</li> <li>• Kondisi Sarana &amp; Prasarana</li> </ul>
2	Wawancara	Sasaran 2 : Menganalisis faktor prioritas penyebab berdasarkan hasil identifikasi karakteristik permukiman kumuh pada kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin	Melakukan wawancara terkait dengan penentuan faktor prioritas penyebab kumuh : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kondisi Fisik Bangunan</li> <li>• Kondisi Sosial &amp; Ekonomi Masyarakat</li> <li>• Kondisi Sarana &amp; Prasarana</li> <li>• Pengendalian Hukum</li> </ul>
3	Kuisisioner	Sasaran 1 : Identifikasi karakteristik kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin	Menyebarkan kuisisioner mengenai Faktor-faktor karakteristik permukiman kumuh yang diwakilkan dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• kondisi fisik bangunan</li> <li>• kondisi sosial &amp; ekonomi masyarakat</li> <li>• kualitas prasarana permukiman</li> </ul>

No.	Metode	Sasaran	Keterangan
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• legalitas kepemilikan tanah</li> <li>• bentuk permukiman kumuh</li> <li>• fungsi permukiman kumuh</li> <li>• sifat bangunan permukiman kumuh</li> </ul>

*Sumber: Hasil Peneliti, 2016*

### 3.5.2 Metode Pengumpulan Data Sekunder

Selain data primer yang didapat melalui pengambilan data langsung sesuai dengan kondisi faktual di lapangan, penelitian terkait dengan arahan penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin. Penggunaan data sekunder sebagai pelengkap data-data primer yang telah didapatkan. Metode pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan survei instansi.

#### A. Studi Pustaka

Studi pustaka dalam penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data-data yang mendukung tujuan penelitian terutama kaitannya dengan hal-hal yang sudah ada sebelumnya dan akan dihubungkan dengan permukiman kumuh di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin. Studi pustaka ini meliputi dasar-dasar, teori-teori, dan konsep yang berupa arahan penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin. Selain itu studi pustaka ini juga berperan dalam merumuskan arahan pengembangan dimana dalam perumusan arahan pengembangan ini memerlukan beberapa acuan validasi seperti teori terkait, penerapan (*best practice*) di lokasi lain, dan kebijakan terkait.

## B. Survei Instansi

Wilayah atau lokasi studi yang menjadi obyek penelitian pada dasarnya secara langsung atau tidak langsung terikat dengan peraturan-peraturan atau regulasi tertentu. Oleh karena itu diperlukan suatu sinkronisasi kebijakan atau regulasi yang dapat diidentifikasi melalui survei instansi. Selain itu dalam penelitian juga dibutuhkan beberapa data sekunder sebagai masukan (*input*) dari salah satu sasaran dalam penelitian. Input tersebut meliputi beberapa data dalam dokumen rencana serta data inventarisasi yang telah diperoleh oleh instansi atau lembaga pemerintahan yang mencakup gambaran umum wilayah penelitian.

**Tabel 3.5** Survei Instansi Dalam Perolehan Data Sekunder

No	Data Sekunder	Instansi
1	Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjarmasin	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Banjarmasin & Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Banjarmasin
2	Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTR) Kota Banjarmasin	
3	Strategi Pengembangan Permukiman Dan Infrastruktur Perkotaan (SPIPP) Kota Banjarmasin	Dinas Cipta Karya daan Perumahan Kota Banjarmasin
4	Rencanan Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan (RPKPP) Kota Banjarmasin	
5	Profil Kawasan Kumuh Kota Banjarmasin	

No	Data Sekunder	Instansi
6	Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota Banjarmasin	
7	SK Walikota No.460 Tahun 2015 Terkait Kawasan Kumuh Kota Banjarmasin	
8	Data kependudukan	BPS Kota Banjarmasin & Kelurahan Belitung Selatan

*Sumber : Hasil Peneliti, 2016*

### 3.6 Teknik Analisis

**Tabel 3.6** Metode Analisis Data Penelitian

No.	Sasaran Penelitian	Metode Analisis Data	Alat Analisis	Deskripsi
1.	Mengidentifikasi karakteristik kawasan permukiman kumuh berdasarkan di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin	Kualitatif	Statistik Deskriptif	Melakukan identifikasi permukiman kumuh berdasarkan karakteristik kawasan permukiman di Kelurahan Belitung Selatan
2.	Menganalisis faktor prioritas penyebab kumuh pada kawasan permukiman kumuh di	Kualitatif	Analisa Stakeholder & AHP ( <i>Analytical</i> )	Faktor-faktor prioritas dalam penyebab kumuh kawasan

No.	Sasaran Penelitian	Metode Analisis Data	Alat Analisis	Deskripsi
	Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin.		<i>Hierarchy Process)</i>	permukiman berdasarkan sintesa tinjauan pustaka akan dinilai oleh responden yang dalam hal ini adalah pihak pakar/ahli ( <i>expert</i> ) sehingga akan memunculkan prioritas dan bobot dari masing-masing faktor yang berpengaruh di permukiman kumuh di Kelurahan Belitung Selatan.
3.	Arahan penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Belitung Selatan	Kualitatif	Deskriptif kualitatif dengan komparasi data	Menggambarkan hasil temuan dari proses analisis sebelumnya yang

No.	Sasaran Penelitian	Metode Analisis Data	Alat Analisis	Deskripsi
	Kecamatan Banjarmasin Barat			divalidasi dan digunakan sebagai dasar merumuskan beberapa arahan pengembangan terkait beberapa variabel/faktor yang kurang memenuhi persyaratan.

*Sumber : Hasil Peneliti ,2016*

### **3.6.1 Mengidentifikasi Karakteristik Permukiman Kumuh Di Kelurahan Belitung Selatan**

Untuk mencapai sasaran mengidentifikasi karakteristik permukiman kumuh di wilayah Kelurahan Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin ini menggunakan metode statistik deskriptif. Analisis data deskriptif atau statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh (Azwar, 1998). Umumnya hasil disajikan dalam bentuk persentase, proporsi, atau frekuensi yang divisualisasikan melalui grafik dan *chart*. Penyajian dengan cara tersebut dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai distribusi subjek menurut kategori-kategori nilai variabel.

### **3.6.2 Menganalisis Faktor Prioritas Penyebab Kumuh Pada Kawasan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin**

Pembobotan kriteria pertimbangan diperlukan untuk menentukan kriteria utama dalam penentuan lokasi pengembangan kawasan perumahan perkotaan. Dalam analisa pembobotan ini menggunakan alat analisis AHP (*analythical Hierarchy Process*), yaitu suatu model pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty. Model pendukung keputusan ini akan menguraikan masalah multi kriteria yang kompleks menjadi suatu hirarki. Pendekatan AHP dikembangkan dari teori pengukuran berkaitan dengan kriteria keputusan yang kuantitatif/non-kuantitatif (*tangible/intengible*) dalam model keputusan yang mengandung resolusi konfliktual. Karenanya prinsip dari pendekatan ini berusaha mengakomodasi aspek-aspek kognitif, pengalaman dan pengetahuan subjektif dari pengambil keputusan sebagai data dasar yang menentukan dalam proses pengambilan keputusan.

Prinsip penggunaan metoda AHP dimulai dengan melakukan dekomposisi problem keputusan yang kompleks dan kemudian menggolongkan pokok permasalahannya menjadi suatu elemen-elemen dalam satu hiraki tertentu. Pada tingkat hiraki yang sama, elemen-elemen matriks yang berpasangan diperbandingkan (*pairwise comparision*) dengan memasukkan pertimbangan kriteria kuantitatif dan kuantitatif. Proses evaluasi perbandingan antara elemen dan kriteria mendasarkan pertimbangan subjektif pengambil keputusan atau evaluator. Proses ini dapat didokumentasikan dan dapat diuji kembali konsistensi penilaiannya. Proses evaluasi ini memanfaatkan bilangan / skala yang dikembangkan (saaty, 1977).

Skala pembobotan ini mencerminkan tingkat preferensi atau kepentingan suatu perbandingan elemen keputusan dalam



kontribusinya terhadap pencapaian suatu tujuan pada hiraki yang lebih atas. Analisis pembobotan kriteria pertimbangan penentuan lokasi perumahan didasarkan pada tiga *stakeholder* yang memiliki kepentingan berbeda atas kawasan permukiman kumuh. masing-masing pihak diwakili oleh beberapa responden dengan mengakomodasi aspek-aspek kognitif, pengalaman dan pengetahuan subyektif dari pengambil keputusan, sebagai data dasar yang menentukan dalam proses pengambilan keputusan.

#### a) Penyusunan Model Hiraki

Kriteria dan sub kriteria yang ditetapkan selanjutnya disusun model hiraknya sesuai dengan nilai bobot yang telah diberikan oleh pihak pengembang, *user* atau pasar dan pemerintah. Skala preferensi diperbandingkan adalah 1-9. Tata cara pemberian intensitas kepentingan dua kriteria yang diperbandingkan dapat dilihat pada **tabel 3.7**

**Tabel 3.7** Skala Preferensi Dari Perbandingan Dua Kriteria

<b>Intensitas Kepentingan</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Penjelasan</b>
1	Kedua elemen sama pentingnya	Dua elemen mempunyai kontribusi yang sama terhadap tujuan
3	Elemen yang satu sedikit lebih penting dengan elemen lain	Pengalaman dan penilaian sedikit menyokong satu elemen dibanding elemen lain
5	Elemen yang satu lebih penting dari elemen yang lain	Pengalaman dan penilaian saling kuat menyokong satu elemen dibanding elemen yang lain
7	Satu elemen jelas lebih mutlak penting dari elemen lain	Satu elemen yang kuat disokong dan dominan terhadap praktek

Intensitas Kepentingan	Keterangan	Penjelasan
9	Satu elemen mutlak penting daripada elemen lain	Bukti yang mendukung elemen yang satu terhadap elemen lain memenuhi tingkat penegasan tertinggi yang mungkin menguatkan
2,4,6,8	Nilai-nilai antara 2 nilai pertimbangan yang berdekatan	Nilai yang diberikan bila ada 2 kompromi diantara 2 pilihan

*Sumber : Hasil Peneliti, 2016*

Terdapat tiga kali perbandingan yang dilakukan yaitu :

- 1) Perbandingan kepentingan antar kriteria dalam mencapai tujuan
- 2) Perbandingan kepentingan subkriteria dalam satu kriteria
- 3) Perbandingan kepentingan antar atribut dalam mencapai tujuan

#### **b) Uji Validasi Penilaian Konsistensi**

Perhitungan hasil bobot prioritas masing-masing kriteria pada setiap matriks ditentukan sesuai dengan besarnya nilai eigenvalue ( $\lambda$  maks). Penentuan terhadap tingkat konsistensi terhadap penilaian persepsi digunakan perhitungan Indeks Konsistensi (IK) atau *Consistency Index Ratio* (CI). Rasio konsistensi (*Concsistency Ratio-CR*) Harus bernilai kurang dari atau sama dengan 10% ( $CR \leq 1$ ) sehingga dapat dianggap bahwa konsistensi responden dalam memberikan persepsi relatif bersifat valid. Namun jika nilai rasio konsistesnsinya lebih dari 10% ( $CR \geq 1$ ) maka pertimbangan ulang dalam level hierarki atau pengulangan terhadap kusioner.

### **3.6.3 Merumuskan Arahan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin**

Proses analisis ini pada dasarnya merupakan proses analisis deskriptif kualitatif. analisis deskriptif kualitatif adalah serangkaian kajian yang tidak dapat dinyatakan dalam angka-angka dan rumus melainkan dengan kata-kata dan kalimat menurut data pengambilan kesimpulan (Sugiyono,2006)

Untuk menghasilkan arahan umum yang relevan tetapi dapat bersifat lebih spesifik maka diperlukan suatu validasi arahan. Arahan umum yang relevan divalidasi dengan tiga acuan yang tidak hanya berfungsi sebagai alat validasi arahan, akan tetapi juga berfungsi memperkaya/masukan terkait arahan umum yang sudah dirumuskan sebelumnya. Adapun tiga acuan untuk memvalidasi sekaligus memberi masukan untuk memperkaya arahan umum dengan adanya arahan rinci yang relevan di wilayah penelitian antara lain :

- a) Teori atau peraturan yang berkaitan dengan faktor-faktor berpengaruh terhadap pengembangan di wilayah penelitian.
- b) Penerapan (*Best Practice*) di lokasi lain terkait faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengembangan di wilayah penelitian.
- c) Kebijakan-kebijakan yang mengatur terkait pengembangan di wilayah penelitian.

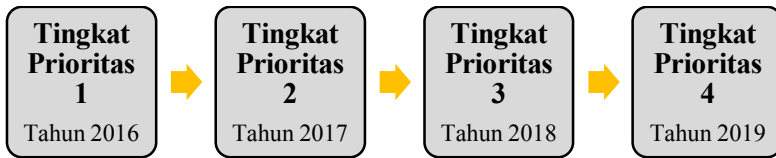
Dalam perumusan arahan penanganan dilakukan penentuan tingkat prioritas yang diperoleh dari hasil analisa AHP yang telah dilakukan. Penentuan arahan disesuaikan dengan agenda program permukiman berkelanjutan 100-0-100 Tahun 2015-2019 oleh Kementrian PU Direktorat Jendral Cipta Karya. Dimana faktor dan variabel penyebab kumuh dengan nilai bobot paling besar akan memiliki tingkatan prioritas utama.



**Gambar 3.2** Grand Desain Program Permukiman Berkelanjutan 100-0-100 Tahun 2015 - 2019

*Sumber : Kementrian PU dan Perumahan Rakyat, 2016*

Dari penjelasan garis besar program dalam memenuhi target kota tanpa kumuh. Sasaran masih terbagi atas beberapa bidang strategi penanganan kumuh yang berfokus pada permasalahan akses air minum, besar luasan kawasan permukiman kumuh, dan akses sanitasi. Ketercapaian sasaran tersebut dilihat pada masa akhir program dengan ketercapaian 100% akses air, 0% luas kawasan kumuh, dan 100% akses sanitasi. Sasaran tersebut dicapai dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Maka dari itu perumusan tingkat prioritas dalam arahan penanganan bertujuan memperjelas pelaksanaan serta target sasaran program permukiman berkelanjutan 100-0-100.



**Gambar 3.3** Tingkatan Prioritas Arahana Pengananan Kawasan Permukiman Kumuh

*Sumber : Hasil Peneliti, 2016*

Perumusan tingkat prioritas arahan penanganan dilakukan atas dasar asumsi melalui pembobotan masing-masing diperoleh berdasarkan asumsi rata2 dan kuartil ( $Q_1, Q_2, Q_3$ ) dari pembulatan bobot nilai keseluruhan variabel kumuh. Bobot nilai tersebut dibagi atas variabel-variabel penyebab kumuh serta periode program permukiman berkelanjutan selama 4 tahun dimulai tahun 2016-2019.

$Q_1 = X_{(n+2)/4}$	$Q_2 = 1/2(X_{n/2} + X_{n/2+1})$	$Q_3 = X_{(3n+2)/4}$
---------------------	----------------------------------	----------------------

Keterangan :

$n$  = banyak data

$Q_x$  = kuartil ke-i

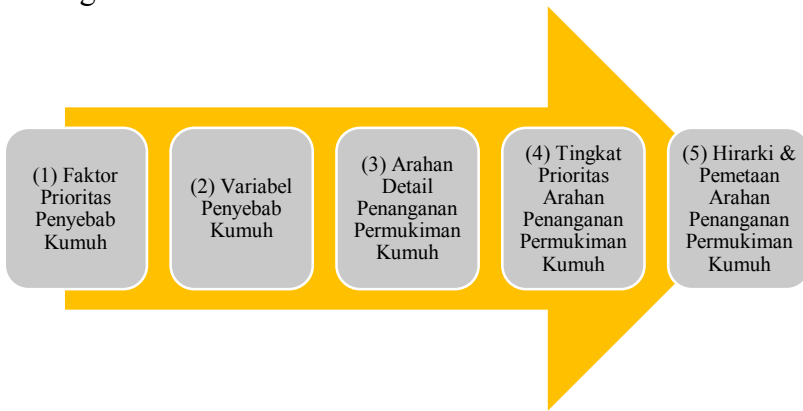
$X$  = nilai kuartil

**Tabel 3.8** Tingkatan Prioritas Arahana Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Di Wilayah Penelitian

No.	Tingkatan Prioritas	Nilai Bobot Penyebab Kumuh
1.	Tingkat Prioritas 1	>10%
2.	Tingkat Prioritas 2	>8%
3.	Tingkat Prioritas 3	>4%
4.	Tingkat Prioritas 4	≤4%

*Sumber : Hasil Peneliti, 2016*

Hasil terkait validasi arahan umum dan detail yang relevan yang telah dirumuskan dengan tiga acuan ini akan memberikan informasi terkait valid atau tidaknya arahan penanganan secara umum jika diterapkan serta dapat memperkaya arahan umum dengan adanya arahan rinci yang bersifat lebih teknis. Serta arahan yang mencakup indikasi program yang diperoleh dari hasil analisa variabel pada masing-masing faktor.



**Gambar 4.3** Tahapan Perumusan Arahan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan Belitung Selatan

*Sumber : Hasil Peneliti, 2016*

Tahapan perumusan arahan dilakukan melalui komparasi antara identifikasi karakteristik kawasan permukiman kumuh dengan hasil analisis dalam penentuan faktor prioritas penyebab kumuh. Arahan tersebut juga disesuaikan dengan kebijakan serta konsep penanganan permukiman kumuh. Dari situ akan menghasilkan program dengan tingkatan prioritas penanganan kawasan permukiman kumuh dalam kurun waktu yang ditentukan.

Melalui arahan penanganan permukiman kumuh yang diperoleh berdasarkan tingkatan prioritas. Dirumuskan model pemetaan serta hirarki arahan penanganan dengan menentukan lokasi ataupun indikasi program yang akan dilaksanakan dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur kawasan permukiman.

### **3.7 Tahapan Penelitian**

Tahapan penelitian yang dilakukan dalam perumusan penanganan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjaini meliputi perumusan masalah, studi literatur, pengeumpulan data , analisis, serta penarikan kesimpulan yang dijabarkan sebagai berikut.

#### **a) Perumusan Masalah**

Perumusan masalah merupakan tahap awal dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian terkait dengan penanganan kawasan permukiman kumuh Belitung Selatan Kota Banjarmasin ini perumusan masalah dilakukan dengan jalan identifikasi karakteristik kawasan permukiman kumuh yang selanjutnya memunculkan faktor-faktor permukiman kumuh di Kelurahan Belitung Selatan yang kemudian difokuskan pada arahan penganan kawasan permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin.

#### **b) Studi Literatur**

Studi literatur yang dilakukan dalam penyusunan penelitian terkait penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin ini lebih mengarah pada proses identifikasi teori-teori dan konsep pengembangan kawasan permukiman. Selain itu studi literatur juga digunakan untuk mengidentifikasi regulasi-regulasi atau kebijakan terkait dengan penanganan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan

Belitung Selatan Kota Banjarmasin melalui konsep penanganan permukiman kumuh secara komprehensif.

**c) Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penyusunan penelitian ini didasarkan pada jenis data yang dibutuhkan. Untuk jenis data primer didapatkan melalui metode observasi, wawancara, dan kuisioner. Sedangkan untuk jenis data sekunder menggunakan metode studi pustaka dan survei instansi.

**d) Analisis**

Analisis dalam penelitian terkait penanganan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Belitung Selatan didasarkan pada sasaran-sasaran penelitian yang diharapkan mampu menjawab tujuan penelitian. Setiap sasaran penelitian menggunakan alat analisis yang berbeda. Untuk keseluruhan analisis, alat analisis yang digunakan antara lain adalah analisis deskriptif kualitatif, Analisis Stakeholder, analisis AHP, dan analisis deskriptif kualitatif komparasi data.

**e) Penarikan Kesimpulan**

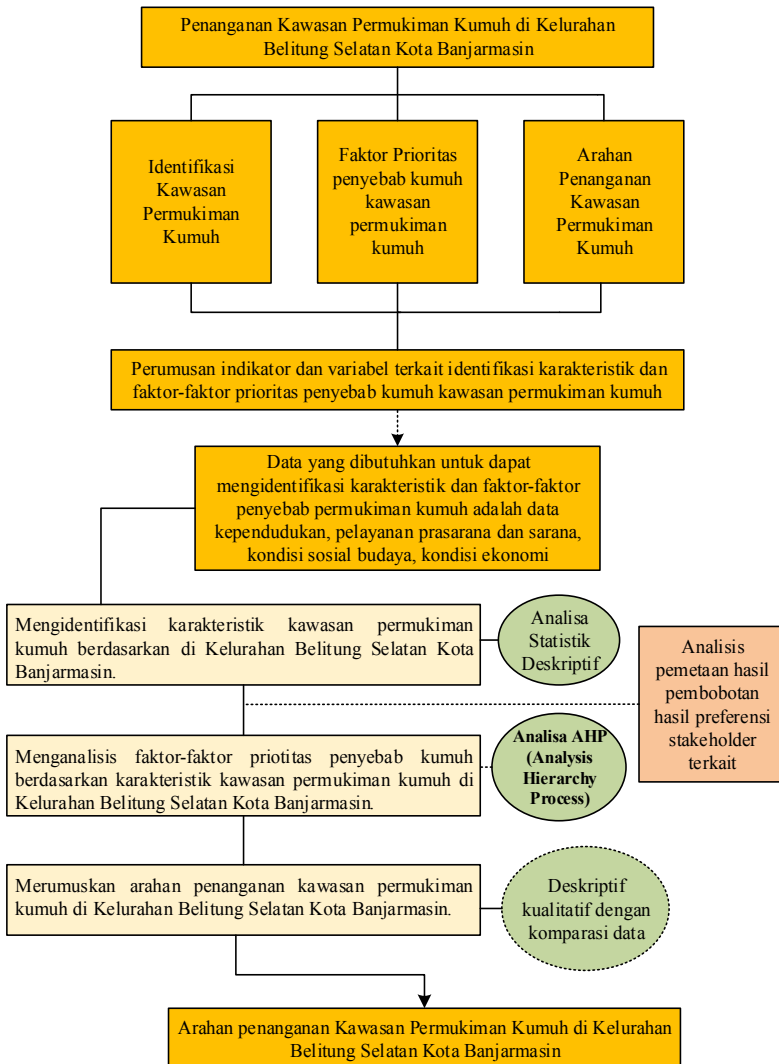
Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari proses penelitian. Penarikan kesimpulan didasarkan atas hasil-hasil analisis yang telah dilakukan serta menjadi pedoman dalam menyusun atau merumuskan penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin.

**f) Pemberian Rekomendasi**

Memberikan masukan dan saran yang berdasarkan hasil pembahasan penelitian. Dimana rekomendasi tersebut bertujuan memunculkan opsi untuk menjawab hasil dari penelitian atau persoalan yang telah dibahas secara menyeluruh dalam penelitian. Khususnya dalam penentuan arahan penanganan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin.



### 3.7.1 Kerangka Tahapan Metode Analisis Penelitian



**Gambar 3.5** Kerangka Tahapan Analisis Penelitian

*Sumber : Hasil Peneliti, 2016*

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Gambaran Umum**

##### **4.1.1 Gambaran Umum Wilayah Administratif**

Wilayah yang menjadi fokus penelitian ini adalah kawasan permukiman di Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat di Kota Banjarmasin terdiri atas 3 Rukun Warga (RW) dan 42 Rukun Tangga (RT) sedangkan diambil 10 Rukun Tangga (RT) saja dalam penelitian ini yakni meliputi RT (4,6,8,9,10,11,12,13,14,15). Wilayah penelitian merupakan wilayah daratan seluas 6,04 Ha dengan batas-batas adm]doiwinistrasi sebagai berikut :

Sebelah Wilayah Utara : Kelurahan Belitung Utara

Sebelah Wilayah Timur : Kelurahan Antasan Besar

Sebelah Wilayah Selatan : Kelurahan Teluk Dalam

Sebelah Wilayah Barat : Kelurahan Kuin Cerucuk

*“Halaman sengaja dikosongkan.”*



*“Halaman sengaja dikosongkan.”*

‘

#### 4.1.2 Gambaran Umum Kondisi Sosial Kependudukan

Tingkat kepadatan penduduk ditinjau berdasarkan jumlah penduduk dalam satuan luas hektar. Dalam penelitian ini, tingkat kepadatan penduduk dapat diketahui dengan menggunakan jumlah penduduk dan luas permukiman yang ada pada kawasan penelitian. Berdasarkan SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan tingkat kepadatan penduduk dapat dikategorikan dalam 4 (empat) klasifikasi yaitu:

- a) Rendah : <150 Jiwa/Ha
- b) Sedang : 151-200 Jiwa/Ha
- c) Tinggi : 201-400 Jiwa/Ha
- d) Sangat Padat : >400 Jiwa/Ha

**Tabel 4.1** Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kelurahan Belitung Selatan

Kelurahan	2013	Luas (Ha)	Kepadatan Penduduk (jiwa/Ha)
Belitung Selatan	15.959	700	22,79

*Sumber: Kecamatan Dalam Angka, 2014*

Berdasarkan pada tabel tersebut, bahwa Kelurahan Belitung Selatan termasuk dalam kategori tingkat kepadatan penduduk tinggi sebesar 22,79 jiwa/Ha. Kepadatan penduduk di Kelurahan Belitung Selatan ini disebabkan oleh banyaknya penduduk yang datang (melakukan migrasi) serta pemekaran Kelurahan Belitung Selatan. Hal ini dikarenakan adanya daya tarik dari kegiatan perdagangan dan jasa. Migrasi penduduk sendiri

diartikan sebagai perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dengan melewati batas negara atau batas administrasi dengan tujuan untuk menetap.

Berikut ini data gambaran umum jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan rasio jenis kelamin di Kelurahan Belitung Selatan :

**Tabel 4.2** Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis

Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Sex Ratio
Belitung Selatan	7.768	8.191	94,84

*Sumber: Kecamatan Dalam Angka, 2014*

Dari data rasio jenis kelamin tersebut dijelaskan bahwa untuk penduduk Kelurahan Belitung Selatan mayoritas berjenis kelamin perempuan. Maka berpengaruh pada menurunnya angka produktif pekerja sehingga akan tingkat pengangguran yang akan cukup tinggi.

#### **4.1.3 Gambaran Umum Permukiman Kumuh Kelurahan Belitung Selatan**

Permukiman kumuh di Kelurahan Belitung Selatan mengalami perkembangan. Hal ini dikarenakan kebutuhan akan lahan permukiman semakin besar. Berikut merupakan perkembangan permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin. Permukiman kumuh berada di 9 RT termasuk kategori ringan (4,8,9,10,11,12,13,14,15) dan 1 RT (RT 6) Kategori Sedang dengan luas 6,04 Ha (SK Walikota No.460 Tahun 2015). Karakteristik permukiman kumuh pada kawasan ini adalah bangunan bekonstruksi kayu

dengan kerapatan KDB mencapai 100%. Kondisi sarana dan prasarana pada permukiman kumuh kurang bagus dan dapat melayani kebutuhan penduduk. Beberapa program pemerintah pada permukiman kumuh yaitu kegiatan gotong royong agar lingkungan lebih bersih dan program perbaikan jalan lingkungan.

Permukiman kumuh di Kecamatan Banjarmasin barat terbagi atas 9 Kelurahan. Salah satu nya terdapat di Kelurahan Belitung Selatan tersebar diberbagai RT. Berikut luas permukiman kumuh yang berada di Kelurahan Belitung Selatan.

**Tabel 4.3** Luas Permukiman Kumuh di Kelurahan Belitung Selatan

Kecamatan	Kelurahan	Luas Kumuh (Ha)	Luas Wilayah (Ha)	Prosentase Kumuh (%)
Banjarmasin Barat	Belitung Selatan	6,04	56,83	9,47

*Sumber: SK Walikota Banjarmasin No.460 Tahun 2015*

**Tabel 4.4** Lokasi Kumuh di Kelurahan Belitung Selatan

No.	RT	Lokasi Kumuh
1	004	Jl. Saka Permai RT 04
2	006	Jl. Saka Permai Gg Rindu
3	008	Jl. Belitung Darat Gg Keluarga
4	009	Jl. Saka Permai Gg Rindu
5	010	Jl. Belitung Darat Gg Famili
6	011	Jl. Saka Permai Gg Amilin
7	012	Jl. Saka Permai Gg Amilin
8	013	Jl. Saka Permai Gg H.Abd Hamid
9	014	Jl. Belitung Darat Gg Keluarga
10	015	Jl. Batu Benawa Ujung

*Sumber: SK Walikota Banjarmasin No.460 Tahun 2015*



#### 4.1.4 Gambaran Umum Sarana Fasilitas Pendidikan Kelurahan Belitung Selatan

Persebaran fasilitas pendidikan di Kelurahan Belitung selatan sebanyak 9 SD, 3 SMP serta 1 Perguruan tinggi. Dengan kondisi sarana fasilitas pendidikan pada permukiman kumuh kurang baik dan masih kurang pelayanan secara menyeluruh disebabkan lokasi fasilitas yang jauh dari kawasan penelitian permukiman kumuh. Berikut persebaran fasilitas pendidikan yang berada pada permukiman kumuh di Kelurahan Belitung Selatan.

**Tabel 4.5** Persebaran fasilitas pendidikan di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin

No	Nama sekolah	Lokasi Fasilitas Pendidikan
1	SMP Anggrek	Jl.Pembangunan I Ujung RT 14
2	SDN Belitung Selatan 1	Jl.Pembangunan I Ujung RT 14
3	AKPER Suaka Insan	Jl.Jafri Zam-zam Komp RS.Suaka Insan
4	SMP PGRI I	Jl.Bandarmasih Komp DPR RT 20
5	SDN Belitung Selatan 2	Jl.Pembangunan I Jl.Menyapa RT 40
6	SDN Belitung Selatan 3	Jl.Pembangunan I RT 14
7	SDN Belitung Selatan 4	Jl.Pembangunan I Jl Menyapa RT 40
8	SDN Belitung Selatan 5	Jl.Bel-Da Gg Bina Warga RT 34
9	SDN Belitung Selatan 6	Jl. Bel-Da Gg Bina Warga RT 34
10	SDN Belitung Selatan 7	Jl. Saka Permai Gg Abd Hamid RT 46

No	Nama sekolah	Lokasi Fasilitas Pendidikan
11	SDN Belitung Selatan 8	Jl. Saka Permai Gg Abd Hamid RT 46
12	SDN Belitung Selatan 9	Jl. Jafri Zam-zam Komp Grawiratama
13	Madrasah Tsnauiyah	Jl. Bandarmasih Komp DPR Gg 4 RT 20

*Sumber: Kelurahan Belitung Selatan Dalam Angka Tahun 2015*

#### **4.1.5 Gambaran Umum Kondisi Sosial Keluarga Prasejahtera Permukiman Kumuh Kelurahan Belitung Selatan**

Kondisi sosial terkait kesejahteraan penduduk di Kelurahan Belitung Selatan masih kurang. Terlihat dari angka jumlah keluarga prasejahtera yang masih cukup tinggi yaitu sebesar 5.131 Kepala Keluarga terbagi atas beberapa kategori. Berikut jumlah keluarga prasejahtera yang berada pada permukiman kumuh di Kelurahan Belitung Selatan.

**Tabel 4.6** Jumlah Keluarga Prasejahtera di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin

No.	Kategori	Jumlah
1	Jumlah Keluarga Prasejahtera	5 KK
2	Jumlah Keluarga Prasejahtera 1	1487 KK
3	Jumlah Keluarga Prasejahtera 2	1464 KK
4	Jumlah Keluarga Prasejahtera 3	759 KK
5	Jumlah Keluarga Prasejahtera 3 Plus	34 KK
Total Jumlah Kepala Keluarga		5.131 KK

*Sumber: Kelurahan Belitung Selatan Dalam Angka Tahun 2015*

## 4.2 Identifikasi karakteristik kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin.

Pengidentifikasian ini dilakukan untuk mencari tahu karakteristik permukiman kumuh di Kelurahan Belitung Selatan beserta fungsi dasar, bentuk dasar, kondisi masyarakat dan legalitas permukiman. Alat analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif. Ringkasan karakteristik dapat dilihat pada sub bab dibawah ini.

### 4.2.1 Persebaran bangunan di kawasan permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin.

Permukiman kumuh di Kelurahan Belitung Selatan tersebar disebagian RW 01 Kelurahan Belitung Selatan. Persebarannya tersebar di 10 RT dengan jumlah keseluruhan 480 Unit Rumah pada 6,04 Ha lahan permukiman. Berikut luas permukiman kumuh yang berada di Kelurahan Belitung Selatan :

**Tabel 4.7** Persebaran Bangunan Rumah di Kawasan Permukiman Kumuh Menurut Kategori Kumuh

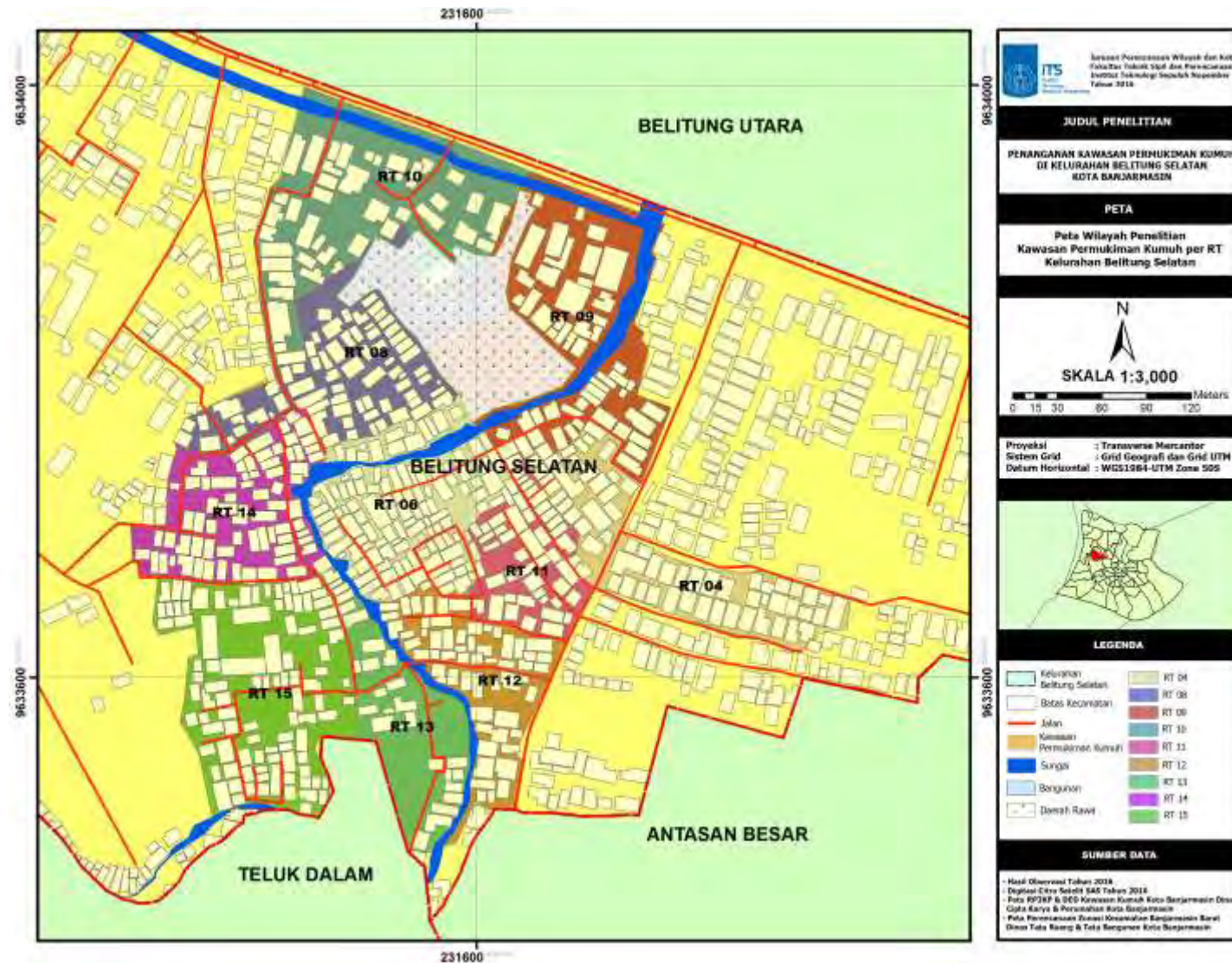
Lokasi Kumuh	Alamat	Kategori Kumuh	Jumlah (Unit Rumah )
<b>Kategori Kumuh Sedang</b>			
RT 006	Jl. Saka Permai Gg. Rindu	Kumuh Sedang	62 Unit
<b>Kategori Kumuh Ringan</b>			
RT 004	Jl. Saka Permai RT 04	Kumuh Ringan	49 Unit

<b>Lokasi Kumuh</b>	<b>Alamat</b>	<b>Kategori Kumuh</b>	<b>Jumlah (Unit Rumah )</b>
RT 008	Jl. Belitung Darat Gg Keluarga	Kumuh Ringan	48 Unit
RT 009	Jl. Saka Permai Gg Rindu	Kumuh Ringan	47 Unit
RT 010	Jl. Belitung Darat Gg Famili	Kumuh Ringan	44 Unit
RT 011	Jl. Saka Permai Gg Amilin	Kumuh Ringan	47 Unit
RT 012	Jl. Saka Permai Gg Amilin	Kumuh Ringan	48 Unit
RT 013	Jl. Saka Permai Gg H.Abd Hamid	Kumuh Ringan	45 Unit
RT 014	Jl. Belitung Darat Gg Keluarga	Kumuh Ringan	46 Unit
RT 015	Jl. Batu Benawa Ujung	Kumuh Ringan	44 Unit
<b>Jumlah</b>			<b>480 Unit</b>

*Sumber: SK Kumuh Walikota No.460 Tahun 2015 & Hasil Observasi 2016*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Kelurahan Belitung Selatan memiliki tingkat kekumuhan yang merata. Tingkat kekumuhan tertinggi terletak pada RT 06 sebanyak 62 unit rumah. Sementara tingkat kekumuhan bangunan Kumuh Ringan tersebar merata pada 9 RT dengan total bangunan 418 unit rumah. Sedangkan tingkat kepadatan rata-rata bangunan di Kelurahan Belitung Selatan sebesar 22,79 jiwa/Ha.

*“Halaman sengaja dikosongkan.”*



**Gambar 4.2** Persebaran Bangunan Kumuh di Kelurahan Belitung Selatan  
*Hasil : Survei Primer 2016*

*“Halaman sengaja dikosongkan.”*

#### **4.2.2 Kondisi Fisik Bangunan Permukiman Kumuh Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin.**

Dari hasil identifikasi kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Belitung Selatan tersebar pada 10 RT dengan kekumuhan kategori sedang dan kategori berat. Karakteristik fisik bangunan yang

##### **4.2.2.1 Kondisi Fisik Bangunan Berdasarkan Status Kepemilikan Lahan.**

Dalam pemanfaatan lahan dalam suatu wilayah atau kawasan perlu adanya legalitas terkait status kepemilikan lahan. Dari pengertian tersebut maka permukiman kumuh juga dilakukan peninjauan salah satunya berdasarkan legalitas kepemilikan tanah. Pengklasifikasian legalitas kepemilikan tanah didasarkan pada Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 yang mengkategorikan kepemilikan tanah ke dalam 4 dari 7 kategori utama yaitu hak milik, girik, hak sewa, Hak Guna Bangunan (HGB). Bagi hak membuka tanah dan memungut hasil hutan tidak dipertimbangkan dikarenakan tidak adanya kawasan hutan dalam penelitian di Kelurahan Belitung Selatan. Untuk mengetahui lebih jelas tentang legalitas kepemilikan tanah pada permukiman kumuh di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.8** Kondisi Status Kepemilikan Lahan di Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan Belitung Selatan

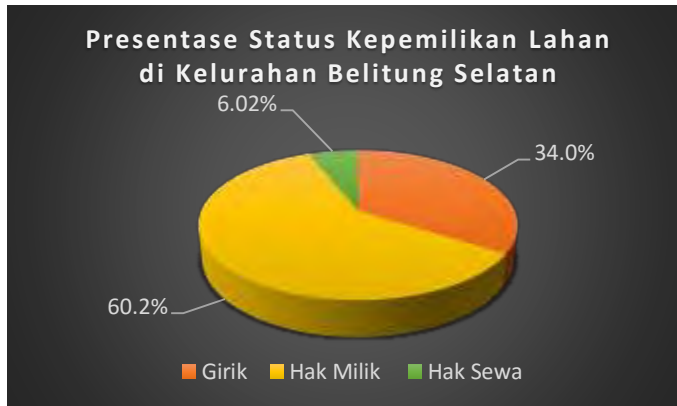
No	RT	Girik	Hak Milik	Hak Sewa	Total
Kategori Kumuh Sedang					
1	RT.06	9	2	-	11
Kategori Kumuh Ringan					
1	RT.04	2	5	1	8



No	RT	Girik	Hak Milik	Hak Sewa	Total
2	RT.08	2	5	1	8
3	RT.09	2	6	-	8
4	RT.10	-	7	1	8
5	RT.11	1	7	-	8
6	RT.12	-	8	-	8
7	RT.13	-	8	-	8
8	RT.14	3	4	2	8
9	RT.15	-	8	-	8
Total		18	50	5	83

*Sumber : Survei Primer, 2016*

Berdasarkan hasil rekapitulasi kuisioner pada tabel diatas, legalitas kepemilikan tanah yang dijumpai di wilayah penelitian terdiri dari girik, hak milik, hak sewa, dan hak guna bangunan.

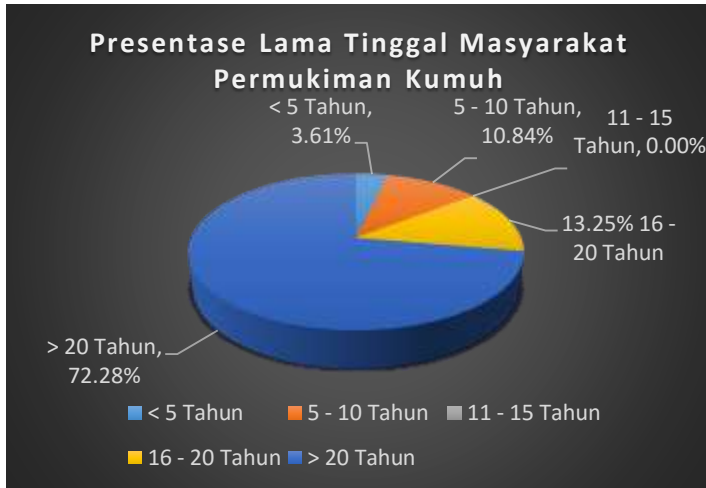


**Gambar 4.3** Presentase Kepemilikan Lahan di Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan Belitung Selatan

*Sumber: Survei Primer, 2016*

Sebanyak 50 responden (60.2%) memiliki rumah dengan status kepemilikan tanah berupa hak milik. Sementara 18 responden (34%) memiliki rumah dengan

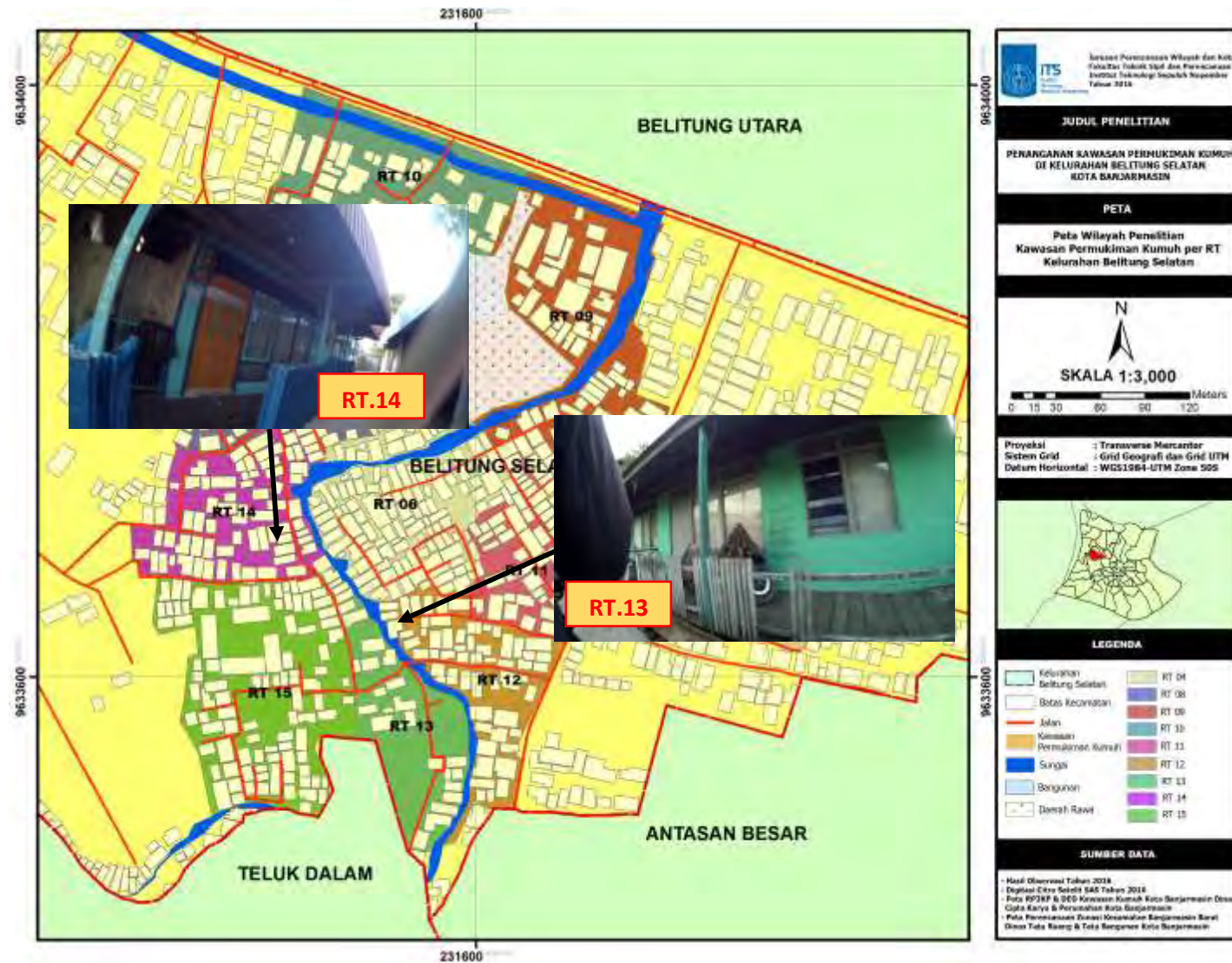
status girik. Pada permukiman kumuh di Kelurahan Belitung Selatan rata-rata telah tinggal lebih dari >20 tahun. Dikarenakan bangunan yang mereka tempati telah menjadi tempat tinggal turun menurun.



**Gambar 4.4** Lama Tinggal Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan Belitung Selatan  
*Sumber: Survei Primer, 2016*

Berdasarkan hasil kusioner sebanyak 60 responden telah tinggal selama >20 tahun. Sementara 11 responden telah tinggal 16 – 20 tahun sedangkan lainnya termasuk dalam masyarakat pendatang yang masih tinggal > 5 tahun. Disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Kelurahan Belitung Selatan telah memiliki legalitas status tanah berupa hak milik serta hak sewa dilihat hasil dari 66,22% responden memiliki status tersebut. Hal itu dilihat juga lama jangka waktu masyarakat Kelurahan Belitung Selatan telah bertempat tinggal di lokasi tersebut. Dimana rata-rata 16 – 20 tahun hingga >20 tahun dilihat dari presentase responden sebesar 85.53%.

*“Halaman sengaja dikosongkan.”*



**Gambar 4.5** Peta Gambaran Eksisting Kawasan Permukiman Kumuh  
*Sumber: Survei Primer, 2016*

*“Halaman sengaja dikosongkan.”*

#### 4.2.2.2 Kondisi Fisik Bangunan Berdasarkan Kualitas Bangunan.

Karakteristik fisik bangunan pada permukiman kumuh di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin dinilai dari jenis material bangunan yang digunakan pada atap, dinding serta lantai bangunan. Untuk material atap bangunan permukiman kumuh dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.9** Kondisi Kualitas Bangunan Berdasarkan Material Atap

No.	RT	Sirap	Genteng	Seng	PVC	lainnya	Total
Kategori Kumuh Sedang							
1	RT.06	5	-	6	-	-	11
Kategori Kumuh Ringan							
1	RT.04	1	-	7	-	-	8
2	RT.08	4	-	4	-	-	8
3	RT.09	-	-	8	-	-	8
4	RT.10	3	-	5	-	-	8
5	RT.11	2	-	6	-	-	8
6	RT.12	1	1	5	-	1	8
7	RT.13	2	-	6	-	-	8
8	RT.14	-	-	8	-	-	8
9	RT.15	2	-	6	-	-	8
Total		20	1	62	-	1	83

*Sumber: Survei Primer, 2016*

Berdasarkan hasil rekapitulasi kuisioner pada tabel diatas berdasarkan material atap seperti sirap, genteng, seng, PVC dan lainnya. Sebanyak 62 unit rumah responden (74.69%) memiliki material atap berupa seng. Sementara 20 unit rumah responden (24.09%) menggunakan sirap dan sebanyak 2 responden (1.22%) menggunakan genteng atau jenis material lainnya.



**Gambar 4.6** Kualitas Bangunan Berdasarkan Material Atap di Kawasan Permukiman Kumuh  
*Sumber: Survei Primer, 2016*

Dari hasil observasi juga terlihat material atap berupa seng dengan kondisi pada beberapa rumah mengalami kebocoran diakibatkan kerusakan seperti berlubang disebabkan umur material yang sudah cukup lama dan mengalami korosi diakibatkan air hujan.



**Gambar 4.7** Kondisi Fisik Material Atap Bangunan  
*Sumber: Survei Primer, 2016*

Wujud bangunan yang digunakan pada dinding bangunan permukiman kumuh dilihat pada tabel berikut :

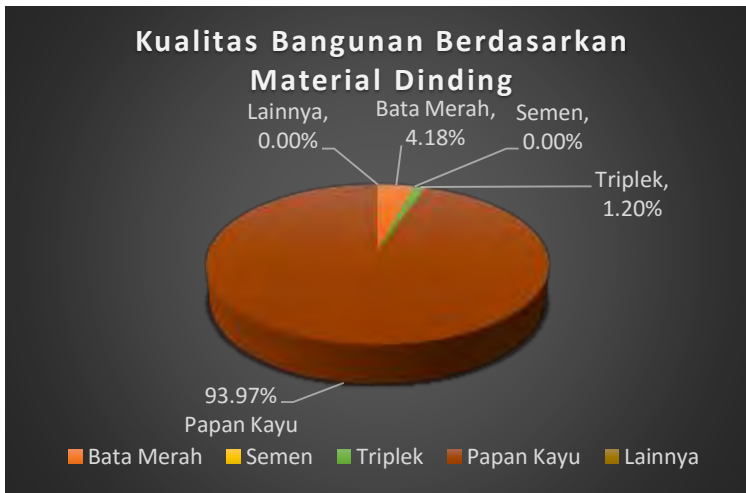
**Tabel 4.10** Kondisi Kualitas Bangunan Berdasarkan Material Dinding di Kelurahan Belitung Selatan

No.	RT	Bata Merah	Semen	Triplek	Papan Kayu	lainnya	Total
Kategori Kumuh Sedang							
1	RT.06	-	-	-	11	-	11
Kategori Kumuh Ringan							
1	RT.04	1	-	-	7	-	8
2	RT.08	-	-	-	8	-	8
3	RT.09	-	-	1	7	-	8
4	RT.10	-	-	-	8	-	8
5	RT.11	-	-	-	8	-	8
6	RT.12	-	-	-	8	-	8
7	RT.13	2	-	-	6	-	8
8	RT.14	1	-	-	7	-	8
9	RT.15	-	-	-	8	-	8
Total		4	-	1	78	-	83

*Sumber: Survei Primer, 2016*

Dari segi material dinding bangunan mayoritas masyarakat Kelurahan Belitung Selatan menggunakan bahan material kayu sebanyak 78 responden (93.97%) dan sebesar 4 responden (4.18%) menggunakan bahan bata merah serta 1 responden menggunakan triplek sebagai bahan material dinding. Dimana untuk rata-rata materil berupa campuran papan kayu dengan triplek sebesar  $\leq 25\%$ . Jenis kayu yang digunakan berasal dari kayu ulin atau lanan yang memiliki ketahanan terhadap air.





**Gambar 4.8** Presentase Kualitas Bangunan Berdasarkan Material Dinding di Kelurahan Belitung Selatan  
*Sumber: Survei Primer, 2016*

Dari hasil observasi juga terlihat material dinding berupa papan kayu dengan kondisi pada beberapa rumah mengalami kerusakan diakibatkan pelapukan usia kayu disebabkan umur material yang sudah cukup lama.



**Gambar 4.9** Kondisi Fisik Material Dinding Bangunan  
*Sumber: Survei Primer, 2016*

Karakterisaterik kualitas bangunan juga dinilai pada material bahan lantai yang digunakan. Untuk material lantai bangunan permukiman kumuh di Kelurahan Belitung Selatan dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.11** Kualitas Bangunan Berdasarkan Material Lantai di Kelurahan Belitung Selatan

No.	RT	Keramik	Batuan	Ubin Kayu	Tegel	lainnya	Total
Kategori Kumuh Sedang							
1	RT.06	-	-	11	-	-	11
Kategori Kumuh Ringan							
1	RT.04	1	-	7	-	-	8
2	RT.08	-	-	8	-	-	8
3	RT.09	-	-	8	-	-	8
4	RT.10	-	-	8	-	-	8
5	RT.11	-	-	8	-	-	8
6	RT.12	-	-	8	-	-	8
7	RT.13	2	-	6	-	-	8
8	RT.14	1	-	7	-	-	8
9	RT.15	-	-	8	-	-	8
Total		4	-	79	-	-	83

*Sumber: Survei Primer, 2016*

Berdasarkan hasil kusioner bahan material lantai bangunan mayoritas masyarakat Kelurahan Belitung Selatan menggunakan bahan material ubin papan kayu sebanyak 79 responden (95.18%) dan sebesar 4 responden (4.18%) menggunakan bahan lantai bangunan keramik. Dimana untuk rata-rata materil berupa campuran ubin papan kayu ulin sebesar  $\leq 25\%$  dengan lapisan tambahan berupa karpet plastik. Jenis kayu yang digunakan berasal dari kayu ulin atau lanan yang memiliki ketahanan terhadap air.



**Gambar 4.10** Presentase Kualitas Bangunan Berdasarkan Material Lantai Bangunan di Kelurahan Belitung Selatan

*Sumber : Survei Primer, 2016*

Dari hasil observasi juga terlihat material lantai berbahan ubin kayu dengan lapisan karpet plastic. kondisi pada beberapa lantai rumah masih dalam kondisi baik dilihat masih kuatnya kayu yang digunakan.



**Gambar 4.11** Kondisi Fisik Material lantai Bangunan

*Sumber : Survei Primer, 2016*

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa karakteristik dari tingkat kekuatan bangunan permukiman kumuh di Kelurahan Belitung Selatan didominasi oleh material konstruksi bangunan yang berasal dari papan kayu dengan kombinasi triplek dan penggunaan atap bangunan berupa sirap atau seng serta lantai bangunan yang terbuat papan kayu.

#### 4.2.2.3 Kondisi Fisik Bangunan Berdasarkan Kepadatan Bangunan

Permukiman kumuh di Kelurahan Belitung Selatan memiliki tingkat kepadatan bangunan yang cukup tinggi seperti dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.12** Kepadatan Bangunan Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan Belitung Selatan

No.	RT	Jumlah Rumah (unit)	Kepadatan Bangunan (unit/Ha)	Tingkat Kepadatan Bangunan
<b>Kumuh Sedang</b>				
1	RT.06	62 Unit	10.26	Sedang
<b>Kumuh Ringan</b>				
1	RT.04	49 Unit	7.65	Ringan
2	RT.08	48 Unit	7.94	Ringan
3	RT.09	47 Unit	7.78	Ringan
4	RT.10	44 Unit	7.28	Ringan
5	RT.11	47 Unit	7.78	Ringan
6	RT.12	48 Unit	7.94	Ringan
7	RT.13	45 Unit	7.45	Ringan
8	RT.14	46 Unit	7.61	Ringan
9	RT.15	44 Unit	7.28	Ringan
<b>Rata-rata</b>		<b>440</b>	<b>72.84</b>	<b>Ringan</b>

*Sumber : RP3KP Kota Banjarmasin & Survei Primer 2016*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Kelurahan Belitung Selatan memiliki tingkat kepadatan bangunan yang merata pada seluruh kawasan permukiman kumuh. Tingkat

kepadatan tertinggi terdapat di RT.06 sebesar 10.26 Unit/Ha. Sedangkan tingkat kepadatan rata-rata bangunan di perkampungan Kelurahan Belitung Selatan sebesar 72.84 unit/Ha. Angka tersebut memiliki arti bahwa secara umum, Kelurahan Belitung Selatan memiliki tingkat kepadatan bangunan yang sedang.

#### 4.2.2.4 Kondisi Fisik Bangunan Berdasarkan Pertumbuhan Luas Bangunan Kumuh

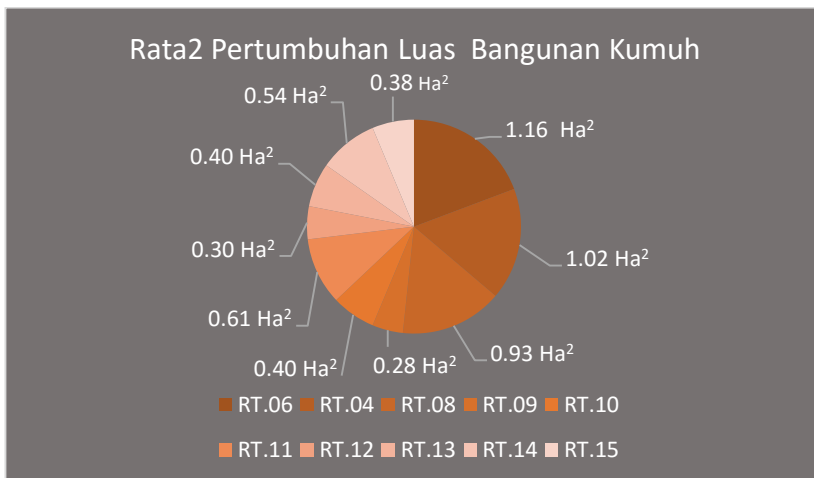
Pada kawasan luas permukiman kumuh juga diukur berdasarkan pertumbuhan bangunan yang mengukur tingkat kekumuhan dari suatu kawasan permukiman kumuh. Pertambahan bangunan permukiman kumuh di Kelurahan Belitung Selatan dapat lihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.13** Pertumbuhan Luas Bangunan Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan Belitung Selatan

No.	RT	Jumlah Rumah (unit)	Luas Unit/Ha (Bangunan)	Tingkat Kepadatan Bangunan
<b>Kumuh Sedang</b>				
1	RT.06	62 Unit	1.16	Sedang
<b>Kumuh Ringan</b>				
1	RT.04	49 Unit	1.02	Ringan
2	RT.08	48 Unit	0.93	Ringan
3	RT.09	47 Unit	0.28	Ringan
4	RT.10	44 Unit	0.40	Ringan
5	RT.11	47 Unit	0.61	Ringan
6	RT.12	48 Unit	0.30	Ringan
7	RT.13	45 Unit	0.40	Ringan
8	RT.14	46 Unit	0.54	Ringan
9	RT.15	44 Unit	0.38	Ringan
<b>Rata-rata</b>		<b>440</b>	<b>6.02</b>	

*Sumber : Hasil Analisis, 2016*

Berdasarkan hasil identifikasi permukiman kumuh dijelaskan bahwa tingkat pertumbuhan kumuh dengan keseluruhan pertumbuhan rata-rata bangunan kumuh di Kelurahan Belitung Selatan 6.02 Unit/Ha. Dimana hasil tersebut berasal dari perhitungan jumlah unit permukiman kumuh sebanyak 440 unit rumah di 10 RT dibagi dengan luasan keseluruhan lahan yang termasuk dalam kawasan permukiman kumuh sebesar 6.04 Ha.



**Gambar 4.12** Pertumbuhan Luas Bangunan Kumuh di Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan Belitung Selatan

*Sumber : Hasil Analisis, 2016*

Dari keseluruhan luas permukiman kumuh di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin sebesar 6.04 Ha yang tersebar di 10 RT. Pertumbuhan bangunan kumuh paling besar di RT.06 sebesar 1.66 Unit/Ha.



**Gambar 4.13** Pertumbuhan Permukiman Kumuh di Kelurahan Belitung Selatan

*Sumber : Survei Primer, 2016*

#### 4.2.2.5 Kondisi Fisik Bangunan Berdasarkan Jarak Antar Bangunan

Karakteristik fisik bangunan pada permukiman kumuh di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin. Berdasarkan dari jarak antar bangunan dengan bangunan lainnya dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel 4.14** Kondisi Fisik bangunan berdasarkan Jarak Antar Bangunan di Permukiman Kumuh Kelurahan Belitung Selatan

No.	RT	< 1 Meter	1 – 2 Meter	3 -4 Meter	5 – 6 Meter	> 6 Meter	Total
Kategori Kumuh Sedang							
1	RT.06	11	-	-	-	-	11
Kategori Kumuh Ringan							
1	RT.04	5	3	-	-	-	8
2	RT.08	4	3	1	-	-	8
3	RT.09	1	6	-	1	-	8
4	RT.10	-	8	-	-	-	8
5	RT.11	2	6	-	-	-	8
6	RT.12	4	4	-	-	-	8
7	RT.13	3	4	1	-	-	8
8	RT.14	4	4	-	-	-	8

No.	RT	< 1 Meter	1 – 2 Meter	3 – 4 Meter	5 – 6 Meter	> 6 Meter	Total
9	RT.15	7	1	-	-	-	8
Total		41	39	2	1	-	83

*Sumber: Survei Primer, 2016*

Sebanyak 41 responden atau 49.31% memiliki rumah dengan jarak bangunan < 1 meter. Sementara 39 atau 46.98% responden memiliki rumah dengan jarak antar bangunan sebesar 1 – 2 meter serta 2 responden atau 2.40% memiliki jarak anatar bangunan sebesar 3 – 4 meter dan 1 responden atau 1.20% memiliki jarak antar bangunan sebeesar 5 – 6 meter.



**Gambar 4.14** Kondisi Jarak Antar Bangunan Dari Tampak Samping Depan di Kawasan Permukiman Kumuh

*Sumber: Survei Primer, 2016*

Dari identifikasi tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata jarak antar bangunan di Kelurahan Belitung Selatan sebesar  $\leq 2$  meter. Dari penjelasan jarak antar bangunan satu dengan lainnya tersebut. Dapat disimpulkan dalam ketegori sangat rapat sehingga memiliki kesan padat pada kawasan.



### **4.2.3 Kondisi Sosiasl & Ekonomi Masyarakat Permukiman Kumuh di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin**

Identifikasi kondisi Sosial & ekonomi permukiman kumuh di kawasan Kelurahan Belitung Selatan ditinjau berdasarkan beberapa karakteristik. Untuk kondisi sosial diidentifikasi dinilai dari kepadatan penduduk, kegiatan masyarakat, pertumbuhan penduduk dan tingkat pendidikan penduduk di permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan. Sedangkan kondisi ekonomi diidentifikasi melalui pola mata pencahariaan dan tingkat pendapatan masyarakat permukiman kumuh di Kelurahan Belitung Selatan.

#### **4.2.3.1 Kondisi Sosial Masyarakat Berdasarkan Kepadatan Penduduk**

Tingkat kepadatan penduduk ditinjau berdasarkan jumlah penduduk dalam satuan hektar luas. Dalam penelitian ini, tingkat kepadatan penduduk permukiman kumuh diidentifikasi dengan menggunakan populasi penduduk dan luas permukiman yang terdapat di masing-masing kecamatan. Berdasarkan SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan, tingkat kepadatan penduduk dikategorikan ke dalam 4 klasifikasi sebagai berikut:

1. Rendah : < 150 jiwa/Ha
2. Sedang : 151 sampai 200 jiwa/Ha
3. Tinggi : 201 sampai 400 jiwa/Ha
4. Sangat Padat : >400 jiwa/Ha

Tingkat kepadatan penduduk pada setiap RT di Kelurahan Belitung Selatan dilihat pada table berikut :

**Tabel 4.15** Kepadatan Penduduk di Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan Belitung Selatan

No.	RT	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Tingkat Kepadatan Penduduk
1	RT.06	328	Tinggi
1	RT.04	165	Sedang
2	RT.08	173	Sedang
3	RT.09	172	Sedang
4	RT.10	196	Sedang
5	RT.11	168	Sedang
6	RT.12	193	Sedang
7	RT.13	202	Sedang
8	RT.14	183	Sedang
9	RT.15	140	Sedang
<b>Jumlah</b>		<b>1.920</b>	<b>Sangat Tinggi</b>

*Sumber: Survei Primer, 2016*

#### 4.2.3.2 Kondisi Sosial Masyarakat Berdasarkan Kegiatan Masyarakat

Keadaan Sosial Masyarakat permukiman kumuh di Kelurahan Belitung Selatan ditinjau berdasarkan intensitas kegiatan gotong royong dan bentuk kegiatan yang dilaksanakan. Kegiatan gotong royong setempat yang dimaksud dalam penelitian ini ialah upaya yang digalakkan oleh RT atau aparat pemerintahan setempat untuk melakukan kerja bakti di lingkungan permukiman. Umumnya masyarakat yang tinggal di Kelurahan Belitung Selatan melakukan kegiatan bersih-bersih lingkungan secara berkala selama beberapa bulan sekali. Intensitas kegiatan gotong royong dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.16** Kondisi Sosial Masyarakat Berdasarkan Kegiatan Masyarakat di Kelurahan Belitung Selatan

No	RT	Tidak Pernah	1 Minggu 1x	2 Minggu 1x	3 Minggu 1x	Lain-lain	Total
<b>Kumuh Sedang</b>							
1	RT.06	10	-	-	-	1	11
<b>Kumuh Ringan</b>							
2	RT.04	2	-	-	-	6	8
3	RT.08	2	-	-	1	5	8
4	RT.09	5	-	-	1	2	8
5	RT.10	6	-	-	1	1	8
6	RT.11	8	-	-	-	-	8
7	RT.12	3	-	1	1	3	8
8	RT.13	-	-	-	-	8	8
9	RT.14	3	-	-	-	5	8
10	RT.15	1	-	-	5	2	8
<b>Total</b>		<b>40</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>33</b>	<b>83</b>

*Sumber: Survei Primer, 2016*

Berdasarkan rekapitulasi hasil kuisioner, sebanyak 40 responden menjawab tidak pernah ada kegiatan gotong royong. Sedangkan sebanyak 2 responden menjawab 2 minggu 1x dan 3 minggu 1x kegiatan gotong royong dilaksanakan. sebanyak 33 responden menjawab lainnya dengan alasan kegiatan gotong royong dilaksanakan kadang-kadang.

#### **4.2.3.3 Kondisi Sosial Masyarakat Berdasarkan Pertumbuhan Penduduk**

Pertumbuhan penduduk ditinjau berdasarkan jumlah penduduk dari tahun ke tahun yang dinilai perhitungan berdasarkan pertumbuhan penduduk. Dengan pertumbuhan setiap tahun sebesar 0.01% sesuai laju pertumbuhan Kecamatan Banjarmasin barat. Dalam penelitian ini, tingkat pertumbuhan

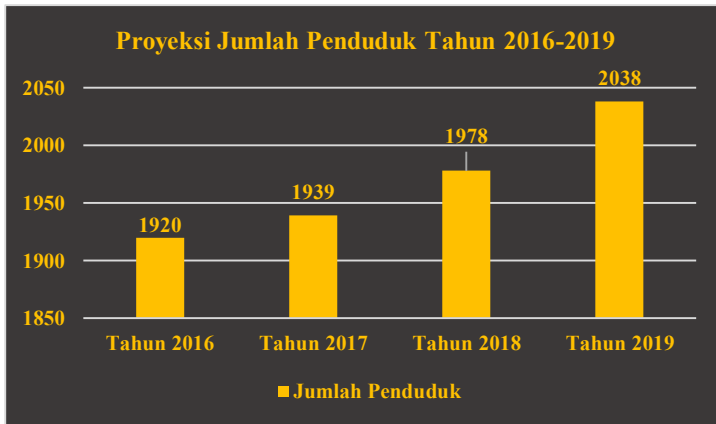
penduduk permukiman kumuh diidentifikasi dengan menggunakan populasi penduduk di masing-masing RT di kawasan permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan.

**Tabel 4.17** Proyeksi Penduduk di Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan Belitung Selatan

No.	RT	Tahun 2016 (Jiwa)	Tahun 2017 (Jiwa)	Tahun 2018 (Jiwa)	Tahun 2019 (Jiwa)	Tingkat Kepadatan Penduduk
1	RT.06	328	331	338	348	Tinggi
1	RT.04	165	167	170	175	Sedang
2	RT.08	173	175	178	184	Sedang
3	RT.09	172	174	177	183	Sedang
4	RT.10	196	198	202	208	Sedang
5	RT.11	168	170	173	178	Sedang
6	RT.12	193	195	199	205	Sedang
7	RT.13	202	204	208	214	Sedang
8	RT.14	183	185	189	194	Sedang
9	RT.15	140	141	144	149	Sedang
<b>Jumlah</b>		<b>1.920</b>	<b>1.939</b>	<b>1.978</b>	<b>2.038</b>	<b>Tinggi</b>

*Sumber: Survei Primer, 2016*

Berdasarkan perhitungan proyeksi perhitungan pertumbuhan penduduk dari tahun 2016 sampai tahun 2019. Dimana laju pertumbuhan penduduk sebesar 0.01% setiap tahun. Dengan persebaran laju pertumbuhan yang merata di seluruh RT kawasan permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan. Berikut grafik pertumbuhan penduduk di kawasan permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan.



**Gambar 4.15** Diagram Proyeksi Penduduk di Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan Belitung Selatan

*Sumber: Survei Primer, 2016*

Dalam perhitungan laju pertumbuhan penduduk diperoleh sebesar 0.01% pertumbuhan penduduk setiap tahunnya. Dengan rata-rata pertambahan penduduk sebesar 39 jiwa /tahun tersebar di seluruh RT Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan Belitung Selatan.

#### **4.2.3.4 Kondisi Sosial Masyarakat Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Karakteristik sosial masyarakat masyarakat permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan yang identifikasi dari tingkat pendidikan yang ditempuh oleh masyarakat terahir. Berikut tabel tingkat pendidikan di kawasan permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan :

**Tabel 4.18** Kondisi Penduduk Di Kawasan Permukiman Kumuh Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	RT	Tidak Sekolah	Tidak Tamat SD	SD	SMP	SMA	Perguruan Tinggi	Total
<b>Kumuh Sedang</b>								
1	RT.06	-	-	4	4	3	-	11
<b>Kumuh Ringan</b>								
2	RT.04	-	-	3	2	3	-	8
3	RT.08	-	-	1	4	2	1	8
4	RT.09	1	-	4	1	2	-	8
5	RT.10	1	-	2	3	1	1	8
6	RT.11	-	1	1	3	3	-	8
7	RT.12	-	1	1	-	5	1	8
8	RT.13	-	-	2	3	3	-	8
9	RT.14	-	-	3	1	4	-	8
10	RT.15	1	-	3	-	4	-	8
<b>Total</b>		<b>3</b>	<b>2</b>	<b>24</b>	<b>21</b>	<b>30</b>	<b>3</b>	<b>83</b>

*Sumber: Survei Primer, 2016*

Berdasarkan hasil rekapitulasi kuisisioner 3 responden atau 3.61% tidak sekolah sedangkan 2 responden atau 2.41% tidak tamat SD. Sebanyak 24 responden atau 28.92% berpendidikan terakhir SD, 21 responden 25.30% tamat SMP, 30 responden atau 36.14% tamat SMA dan 3 responden atau 3.61% menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi.

Disimpulkan bahwa masih tingginya masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan rendah. Diukur dari hampir 60.24% responden atau masyarakat yang berpendidikan masih sangat rendah. Ini juga disebabkan masih kurangnya fasilitas pendidikan serta pelayanan fasilitas pendidikan yang kurang baik.

#### **4.2.3.5 Kondisi Ekonomi Masyarakat Berdasarkan Pola Mata Pencanharian**

Kondisi ekonomi masyarakat permukiman kumuh di Kelurahan Belitung Selatan ditinjau berdasarkan jenis mata pencaharian masyarakat dalam aktivitas sehari-hari. Dengan

jenis mata pencaharian seperti (a) tidak bekerja, (b) pedagang, (c) jasa, (d) tukang, (e) PNS, (f) wiraswasta, (g) pegawai swasta, (h) buruh serta (i) lainnya.

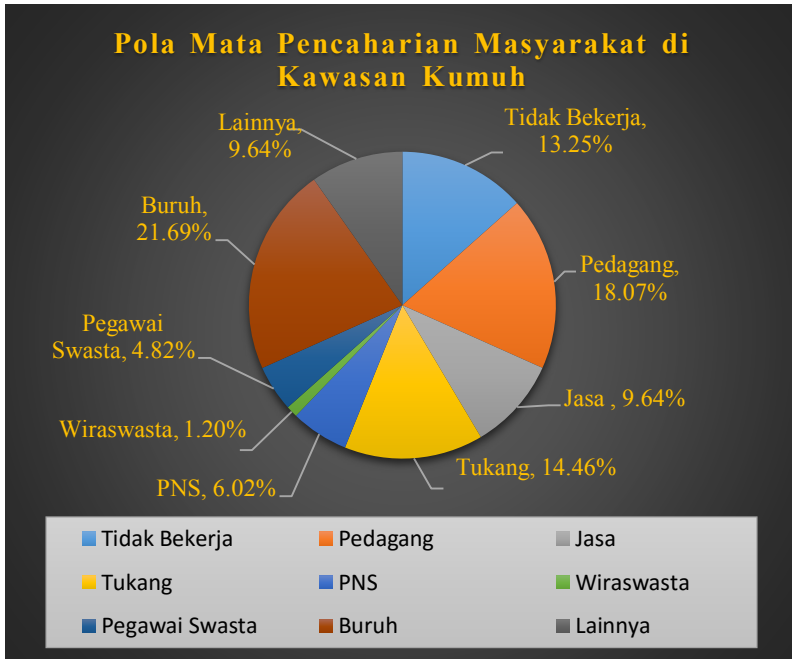
**Tabel 4.19** Kondisi masyarakat menurut pola mata pencaharian di permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan

No	RT	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	Total
<b>Kumuh Sedang</b>											
1	RT.0 6	-	1	2	6	-	-	1	1	-	11
<b>Kumuh Ringan</b>											
2	RT.0 4	2	1	-	-	1	-	1	2	1	8
3	RT.0 8	1	2	1	-	1	1	-	2	-	8
4	RT.0 9	2	2	2	1	-	-	-	1	-	8
5	RT.1 0	-	1	-	2	-	-	1	3	1	8
6	RT.1 1	-	3	2	1	-	-	-	2	-	8
7	RT.1 2	-	3	-	1	-	-	-	1	3	8
8	RT.1 3	2	1	-	-	2	-	-	1	2	8
9	RT.1 4	1	-	-	-	1	-	1	4	1	8
10	RT.1 5	3	1	1	1	-	-	-	1	-	8
<b>Total</b>		<b>11</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>18</b>	<b>8</b>	<b>83</b>

*Sumber: Survei Primer, 2016*

Berdasarkan hasil rekapitulasi kuisioner 11 responden atau 13.25% tidak bekerja sedangkan 15 responden atau 18.07% bermata pencaharian sebagai pedagang. Selanjutnya sebanyak 8 responden atau 9.64% sebagai penyedia jasa, 12 responden atau 12.46% sebagai tukang, 5 responden atau 6.02% PNS dan 18 responden atau 21.69% bekerja pada sektor buruh. Selainnya bekerja pada sektor pegawai swasta 4 responden atau 4.82%,

wiraswasta 1 responden 1.20% dan lainnya sebanyak 8 responden 9.64%.



**Gambar 4.16** Pola Mata Pencaharian Masyarakat di Permukiman Kumuh Kelurahan Belitung Selatan

*Sumber: Survei Primer, 2016*

Disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan memiliki profesi pekerjaan sebagai buruh, pedagang dan tukang. Sebesar 54,16% atau 45 responden dari 83 responden. Namun untuk angka masyarakat tidak bekerja tergolong cukup tinggi sebesar 13.25%. Dari presentasi tersebut mengakibatkan masih adanya masyarakat pra sejahtera di Kelurahan Belitung Selatan.



#### 4.2.3.6 Kondisi Ekonomi Masyarakat Berdasarkan Tingkat Pendapatan Penduduk

Kondisi ekonomi masyarakat permukiman kumuh di Kelurahan Belitung Selatan ditinjau berdasarkan tingkat pendapatan penduduk.

**Tabel 4.20** Kondisi ekonomi berdasarkan tingkat pendapatan penduduk di permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan

No.	RT	< Rp. 500.000	Rp. 500.001 – Rp. 1.250.000	Rp. 1.250.001 – Rp. 2.000.000	> Rp. 2.000.000,-	Total
Kategori Kumuh Sedang						
1	RT.06	-	6	4	1	11
Kategori Kumuh Ringan						
1	RT.04	2	3	-	3	8
2	RT.08	1	-	3	4	8
3	RT.09	3	3	1	1	8
4	RT.10	-	2	3	3	8
5	RT.11	-	5	2	1	8
6	RT.12	2	2	4	-	8
7	RT.13	2	1	1	4	8
8	RT.14	1	4	-	3	8
9	RT.15	3	3	2	-	8
Total		14	29	20	20	83

*Sumber: Survei Primer, 2016*

Berdasarkan hasil rekapitulasi kuisioner dalam identifikasi tingkat pendapatan masyarakat di permukiman Kumuh Kelurahan Belitung Selatan 14 responden atau 16.87% memiliki pendapatan sebesar < Rp 500.000,- sedangkan 29 responden atau 39.94% berpendapatan Rp 500.001 – Rp 1.250.000. Sebanyak 20 atau 24.10% responden berpendapatan

Rp 1.250.000 – Rp 2.000.000 dan sebanyak 20 responden atau 24.10% memiliki pendapatan > Rp 2.000.000.



**Gambar 4.17** Rata-rata Tingkat Pendapatan Masyarakat permukiman kumuh di Kelurahan Belitung Selatan  
*Sumber: Survei Primer, 2016*

Dari identifikasi tingkat pendapatan disimpulkan bahwa pendapatan masyarakat di permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan masih kurang dari UMK Kota Banjarmasin sebesar Rp 2.150.000,-. Dilihat dari total responden keseluruhan sebanyak 63 responden atau 75,90% memiliki tingkat pendapatan masih dibawah UMK Kota Banjarmasin. Berartinya hanya sebesar 20 responden atau 24,09% yang memiliki tingkat pendapatan diatas UMK yang telah ditetapkan.

Berdasarkan presentase tersebut terlihat masih tingginya juga tingkat masyarakat pra sejahtera di kawasan permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan. Yang disebabkan oleh

75.90% masih berpendapatan dibawah UMK. Dari kondisi tersebut perlunya penanganan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat yang masih kurang agar menurunkan tingkat keluarga pra sejahtera.

#### **4.2.4 Kondisi Sarana & Prasarana Permukiman Kumuh di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin**

Analisa identifikasi karakteristik fisik sarana digunakan untuk mengetahui pelayanan fasilitas terhadap penduduk di kawasan permukiman kumuh terhadap sarana umum yang ada. Sarana fasilitas umum yang dianalisis dalam penelitian ini adalah sarana pendidikan, kesehatan, peribadatan, dan perdagangan jasa. Kondisi fisik sarana umum dikategorikan ke dalam 3 kategori, yaitu:

- a) Kategori Baik : Jenis fasilitas umum telah terlayani, kondisi fisik bangunan fasilitas telah layak dan fasilitas telah memenuhi pelayanan berdasarkan kebutuhan penduduk.
- b) Kategori Cukup : Jenis fasilitas umum telah terlayani, kondisi dari segi fisik bangunan fasilitas kurang layak dan fasilitas telah memenuhi pelayanan berdasarkan kebutuhan penduduk.
- c) Kategori Kurang : Jenis fasilitas umum belum tersedia dan kondisi fasilitas kurang memenuhi pelayanan berdasarkan kebutuhan penduduk.

**Tabel 4.21** Kondisi fasilitas di kawasan permukiman kumuh  
Kelurahan Belitung Selatan

No.	RT	Pendidikan	Kesehatan	Peribadatan	Perdagangan & Jasa
Kumuh Sedang					
1	RT.06	Kurang	Cukup	Cukup	Cukup
Kumuh Ringan					
1	RT.04	Cukup	Kurang	Kurang	Cukup
2	RT.08	Kurang	Cukup	Cukup	Cukup
3	RT.09	Cukup	Kurang	Kurang	Cukup
4	RT.10	Kurang	Cukup	Baik	Cukup
5	RT.11	Kurang	Cukup	Cukup	Cukup
6	RT.12	Kurang	Cukup	Baik	Cukup
7	RT.13	Baik	Baik	Baik	Baik
8	RT.14	Cukup	Kurang	Kurang	Cukup
9	RT.15	Kurang	Kurang	Cukup	Cukup

*Sumber: Survei Primer, 2016*

Berdasarkan hasil rekapitulasi kuisioner dan observasi. Bahwa persebaran fasilitas di wilayah penelitian menurut penduduk di kawasan permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan cukup terlayani.

**Tabel 4.22** Persebaran fasilitas di permukiman kumuh Kelurahan  
Belitung Selatan

No.	Jenis Fasillitas	Kategori	Lokasi
1.	Peribadatan	Masjid Miftahul Jannah	Jl. Belitung Darat Gg. Famili RT.10
2.	Peribadatan	Musholla Ar-Rahman	Jl. Belitung Darat Gg Keluarga RT.8
3.	Peribadatan	Musholla Darul Muna	Jl. Saka Permai Gg. Rindu RT.06
4.	Pendidikan	SDN Belitung Selatan 7	Jl. Saka Permai Gg.H.Abdul Hamid RT.13

5.	Pendidikan	TK. Raudhatul Jannah	Jl. Belitung Darat Gg. Famili RT.10
6.	Kesehatan	Posyandu	Jl. Belitung Darat Gg. Famili RT.10
7.	Kesehatan	Posyandu	Jl. Saka Permai Gg. Abdul Hamid RT.13
8.	Perdagangan & Jasa	Pasar Abdul Hamid	Jl. Saka Permai Gg. Abdul Hamid RT.13

*Sumber: Survei Primer, 2016*

#### **a) Sarana Fasilitas Pendidikan**

Berdasarkan hasil kusioner dan observasi didapatkan bahwa 28 responden atau 33.73% menilai kondisi fasilitas pendidikan telah cukup dan 50 responden atau 60.24% menilai untuk fasilitas pendidikan di Kelurahan Belitung Selatan masih kurang. Penilaian tersebut berdasarkan jumlah fasilitas pendidikan yang tersedia hanya TK & SD. Sehingga untuk melanjutkan ke tingkat pendidikan selanjutnya penduduk permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan harus ke fasilitas pendidikan di Kecamatan lainnya.



**Gambar 4.18** Fasilitas Pendidikan SDN 7 Belitung Selatan  
Gg. H.Abdul Hamid RT.13

*Sumber: Survei Primer, 2016*

### **b) Sarana Fasilitas Peribadatan**

Dalam identifikasi kondisi sarana Fasilitas Peribadatan juga sudah dapat melayani kebutuhan penduduk di kawasan permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan. Hal ini terlihat dari 46 responden atau 55.42% yang mengatakan bahwa kondisi fasilitas peribadatan telah cukup. Serta 20 responden atau 24.09% menilai masih kurang dan 17 responden atau 20.48% menilai fasilitas peribadatan baik. Fasilitas peribadatan yang tersebar di permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan berupa 2 musholla dan 1 masjid. Untuk kebutuhan berdasarkan penduduk masih kurang mencukupi tetapi dari kondisi fisik fasilitas dapat dinilai layak.



**Gambar 4.19** Kondisi fasilitas peribadatan di RT.08 dan RT.06  
Kelurahan Belitung Selatan  
*Sumber: Survei Primer, 2016*

### **c) Sarana Fasilitas Kesehatan**

Kondisi sarana Fasilitas Kesehatan juga sudah dapat melayani kebutuhan penduduk di kawasan permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan. Hal ini terlihat dari 44 responden atau 53.01% yang menilai bahwa kondisi fasilitas kesehatan telah cukup. Sebanyak 31 responden atau 37.34% menilai masih kurang dan 8 responden atau 9.63% menilai fasilitas kesehatan

baik. Fasilitas kesehatan yang tersebar di permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan berupa posyandu yang terletak di setiap RT. Untuk kebutuhan berdasarkan penduduk masih kurang mencukupi tetapi dari kondisi fisik fasilitas dapat dinilai kurang layak.



**Gambar 4.20** Fasilitas Kesehatan Posyandu atau Puskesmas di Jl. Belitung Darat Gg. Famili RT.10 Kelurahan Belitung Selatan  
*Sumber: Survei Primer, 2016*

#### **d) Sarana Fasilitas Perdagangan & Jasa**

Kondisi sarana fasilitas perdagangan jasa juga sudah dapat melayani kebutuhan penduduk di kawasan permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan. Hal ini terlihat dari 66 responden atau 79.51% yang menilai bahwa kondisi fasilitas perdagangan jasa telah cukup. Sebanyak 8 responden atau 9.63% menilai masih kurang dan 9 responden atau 10.84% menilai fasilitas perdagangan jasa baik. Dari hasil identifikasi melalui observasi terdapat fasilitas perdagangan jasa berupa pasar di RT.13 Kelurahan Belitung Selatan.

Berdasarkan hasil kusioner dan observasi di Kelurahan Belitung Selatan terdapat karakteristik sarana fasilitas

peribadatan 2 musholla dan 1 masjid. Untuk sarana failitas perdagangan jasa berupa 1 pasar dan sarana fasilitas kesehatan 2 posyandu. Serta sarana fasilitas pendidikan berupa SD dan TK. Dari kondisi

#### 4.2.4.1 Kondisi Prasarana Kualitas Jaringan Jalan

Berdasarkan rekapitulasi kuisioner pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa 78 responden (94%) mengatakan bahwa kondisi jalan lingkungan yang menuju kerumahnya memiliki kualitas yang baik. Sementara 5 responden (6%) menilai kualitasnya. Kondisi jalan lingkungan tentu mempengaruhi tingkat aksesibilitas atau kemudahan dalam mencapai lokasi lain. Adapun aksesibilitas di Kelurahan Belitung Selatan sangat terbatas. Hal tersebut disebabkan karena jaringan jalan yang terdapat di kawasan ini hanya berupa jalan lingkungan dan gang-gang sempit dengan lebar kurang dari 2 meter.

Jalan tersebut hanya bisa dilalui oleh sepeda motor, sepeda, dan pejalan kaki. Sebagian besar, jalan lingkungan yang terdapat di Kelurahan Belitung Selatan sudah diperkeras dengan paving. Akan tetapi juga terdapat jalan yang telah diperkeras namun mengalami kerusakan.

**Tabel 4.23** Kondisi Prasarana Kualitas Jaringan Jalan Menurut Jenis Perekerasan Jalan

No.	RT	Titian Kayu	Tanah Pasir Kecil	Paving	Aspal	Total
1	RT.04	1	-	7	-	8
2	RT.06	3	-	8	-	11
3	RT.08	-	-	8	-	8
4	RT.09	1	-	1	-	8
5	RT.10	-	-	8	--	8
6	RT.11	-	-	8	-	8
7	RT.12	-	-	8	-	8



No.	RT	Titian Kayu	Tanah Pasir Kecil	Paving	Aspal	Total
8	RT.13	-	-	8	-	8
9	RT.14	-	-	8	-	8
10	RT.15	-	-	8	-	8
Total		5	-	78	-	83

*Sumber: Survei Primer, 2016*

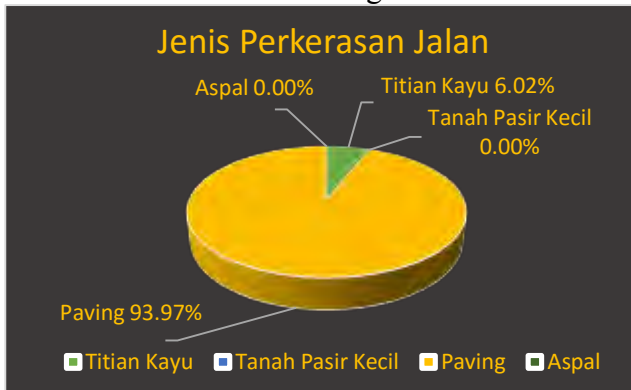
Dari hasil observasi juga terlihat material perkerasan jalan menggunakan paving di hampir keseluruhan RT yang masuk dalam kawasan permukiman kumuh. Dimana perekerasan berupa paving tersebut hasil dari program pemerintah Kota Banjarmasin terkait perbaikan lingkungan kawasan permukiman kumuh tahun 2015. Namun masih terdapat jalan dengan material kayu yaitu RT.06 dan RT.08 yang berfungsi sebagai panghubung jalan lingkungan utama ke area rumah warga.



**Gambar 4.21** Kondisi Jaringan Jalan Perkerasan Paving di Gg. Famili RT.10 & RT.13 Kelurahan Belitung Selatan

*Sumber : Survei Primer , 2016*

Sebagian besar telah dipaving. Sementara sebagian kecil masih berupa titian kayu yg menyambungkan jalan paving ke rumah-rumah. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa karakteristik kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Belitung Selatan ialah memiliki pelayanan infrastuktur yang cukup baik dalam kualitas jalan. Namun persebaran perbaikan yang dilakukan masih sedikit kurang merata.

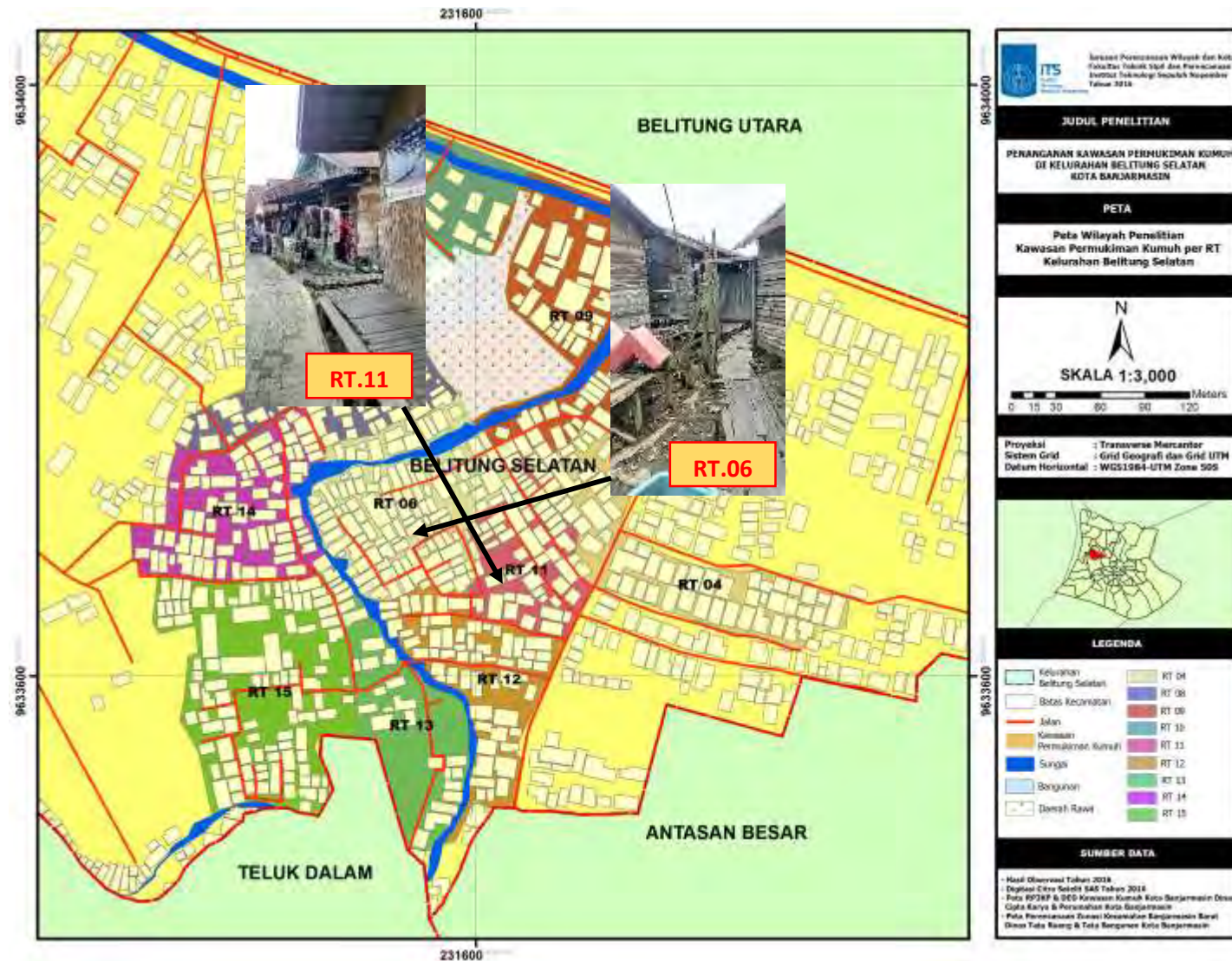


**Gambar 4.22** Kualitas jaringan jalan berdasarkan jenis perkerasan jalan di kawasan permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan

*Sumber : Survei Primer, 2016*

Berdasarkan hasil kusioner untuk identifikasi jenis perkerasan jalan di kawasan permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan. Mayoritas telah menggunakan perekerasan dengan jenis paving sebesar 93.97% atau 78 responden. Serta sebanyak 6.02% atau 5 responden masih menggunakan perkerasan berupa titian kayu. Perkerasan jalan menggunakan paving adalah hasil program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kota Banjarmasin tahun 2015 dalam penanganan kawasan permukiman kumuh.

*“Halaman sengaja dikosongkan.”*



**Gambar 4.23** Peta Kondisi Jaringan Jalan Kawasan Permukiman Kumuh  
*Hasil : Survei Primer 2016*

*“Halaman sengaja dikosongkan.”*

#### 4.2.4.2 Kondisi Prasarana Kualitas Drainase

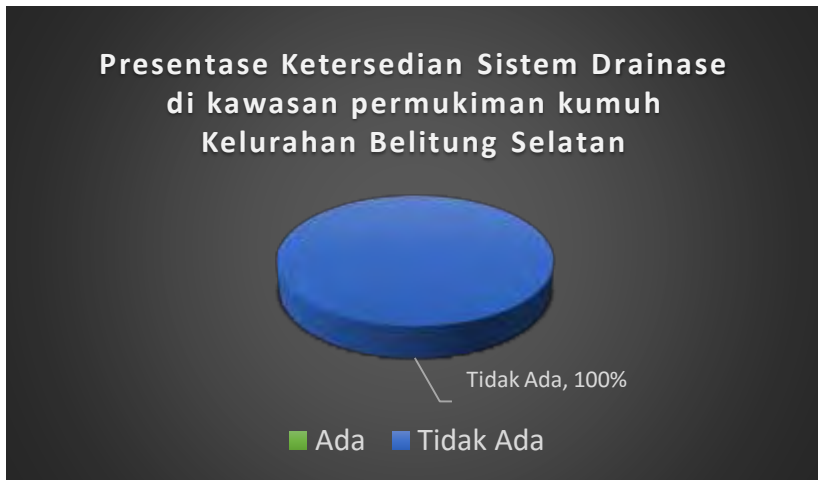
Berdasarkan rekapitulasi kuisioner dapat dilihat bahwa 56 responden (67.46%) teridentifikasi bahwa tidak terjadi genangan air pada kawasan permukiman serta lingkungan sekitar responden. Sedangkan sebanyak 27 responden atau 32.53% bahwa lingkungan permukiman yang ditempati terdapat genangan air  $\leq 30$  cm yang disebabkan oleh hujan.

**Tabel 4.24** Kondisi jaringan drainase di kawasan permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan

No.	RT	Tidak ada	$\leq 30$ cm	$\geq 30$ cm	Total
Kumuh Sedang					
1	RT.06	8	3	-	11
Kumuh Ringan					
1	RT.04	6	2	-	8
2	RT.08	2	6	-	8
3	RT.09	6	2	-	8
4	RT.10	5	3	-	8
5	RT.11	8	-	-	8
6	RT.12	5	3	-	8
7	RT.13	3	5	-	8
8	RT.14	5	3	-	8
9	RT.15	8	-	-	8
Total		56	27	-	83

*Sumber: Survei Primer, 2016*

Sementara itu di beberapa lokasi permukiman kumuh mengalami beberapa kali genangan yang disebabkan oleh hujan. Hal tersebut dikarenakan kurang tersedianya sistem jaringan drainase. Serta Tingkat kesadaran masyarakat Kelurahan Belitung Selatan terhadap lingkungan permukiman sekitar mereka.



**Gambar 4.24** Ketersediaan Sistem Drainase kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Belitung Selatan

*Sumber: Survei Primer, 2016*

Dari hasil observasi dan kusioner identifikasi ketersediaan sistem drainase di kawasan permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan. Sebesar 83 responden atau 100% menilai tidak adanya sistem jaringan drainase berupa gorong-gorong atau jenis lainnya di lokasi permukiman kumuh.

Disimpulkan bahwa untuk sistem drainase dan pengendalian banjir tidak tersedia di kawasan permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan. Sehingga dinilai sangat kurang dalam kualitas serta penyediaan sistem drainase.

#### **4.2.4.3 Kondisi Prasarana Kualitas Jaringan Air**

Berdasarkan hasil rekapitulasi kuisisioner sebanyak 68 responden atau 81.92% telah menggunakan sumber air berasal dari saluran PDAM. Selain itu sekitar 10 responden atau 12.04% masyarakat di lokasi permukiman kumuh menggunakan sumber air berasal dari sungai. Sedangkan sekitar 5 responden atau

6.02% lainnya menggunakan air yang bersumber dari sumur, non PDAM dan sumber air lainnya.

**Tabel 4.25** Kondisi pelayanan jaringan air berdasarkan sumber air di kawasan permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan

No	RT	PDAM	Non PDAM	Air Tanah/Sumur	Sungai	Lain-lain	Total
<b>Kumuh Sedang</b>							
1	RT.06	7	-	-	4	-	11
<b>Kumuh Ringan</b>							
2	RT.04	7	-	-	-	-	8
3	RT.08	5	1	2	-	-	8
4	RT.09	5	-	-	2	1	8
5	RT.10	8	-	-	-	-	8
6	RT.11	8	-	-	-	-	8
7	RT.12	8	-	-	-	-	8
8	RT.13	4	-	-	4	-	8
9	RT.14	7	-	-	-	1	8
10	RT.15	8	-	-	-	-	8
<b>Total</b>		<b>68</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>83</b>

*Sumber: Survei Primer, 2016*

Dalam hal pelayanan prasarana jaringan air diperoleh tingkat pelayanan yang cukup baik. Sebesar 68 responden atau 81.92% telah terlayani jaringan air PDAM. Namun sekitar 15 responden 18.07% masih belum terlayani oleh jaringan air PDAM.

**Tabel 4.26** Kondisi persebaran pelayanan berdasarkan KK yang telah terlayani sistem jaringan air di Kawasan permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan

No.	RT	Terlayani	Tidak Terlayani	Total
<b>Kumuh Sedang</b>				
1	RT.06	7	4	11
<b>Kumuh Ringan</b>				



No.	RT	Terlayani	Tidak Terlayani	Total
1	RT.04	7	1	8
2	RT.08	6	2	8
3	RT.09	6	2	8
4	RT.10	8	-	8
5	RT.11	8	-	8
6	RT.12	8	-	8
7	RT.13	3	5	8
8	RT.14	7	1	8
9	RT.15	8	-	8
Total		68	15	83

*Sumber: Survei Primer, 2016*

Disimpulkan bahwa kualitas jaringan air di kawasan permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan sudah baik. Hal ini dinilai dari telah terlayannya jaringan air melalui PDAM yang mencapai 81.92%. Sehingga karakteristik kaawasan kumuh terkait ketersediaan serta kualitas jaringan air bersih telah cukup terpenuhi.

#### **4.2.4.4 Kondisi Prasarana Kualitas Persampahan**

Hasil identifikasi melalui kusioner dan observasi untuk kualitas sistem persampahan, umumnya permukiman kumuh yang terletak di Kelurahan Belitung Selatan menggunakan sistem pengumpulan di setiap rumah yang dilanjutkan pada pembuangan pada TPS yang tersedia.

Sistem pengangkutan sampah dilakukan dengan gerobak sampah yang mengangkut secara regular, yaitu  $\leq 3$  kali dalam seminggu. Selain itu juga ada integrasi antara pewadahan, pengumpulan, hingga pengangkutan sampah sampai menuju ke TPS di tingkat RW Kelurahan Belitung Selatan.

**Tabel 4.27** Kondisi sistem pengelolaan persampahan berdasarkan jenis pengelolaan sampah di kawasan permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan

No	RT	Ditimbun	Dibakar	Dibuang sembarang tempat	Dibuang Ke sungai	Dibuang Bak Penampungan	Total
Kumuh Sedang							
1	RT.06	-	-	-	-	11	11
Kumuh Ringan							
1	RT.04	-	-	-	-	8	8
2	RT.08	-	-	-	-	8	8
3	RT.09	-	-	-	-	8	8
4	RT.10	-	-	-	-	8	8
5	RT.11	-	-	-	-	8	8
6	RT.12	-	-	-	-	8	8
7	RT.13	-	-	-	-	8	8
8	RT.14	-	-	-	-	8	8
9	RT.15	-	-	-	-	8	8
Total		-	-	-	-	83	83

*Sumber: Survei Primer, 2016*

Berdasarkan hasil kusioner sebesar 83 responden 100% menggunakan sistem persampahan dengan cara dibuang pada bak penampungan TPS yang disediakan oleh pemerintah Kota Banjarmasin disetiap RT atau RW. Berikut grafik intensitas pengangkutan sampah di Kelurahan Belitung Selatan berdasarkan hasil kusioner.



**Gambar 4.25** Skala sistem pengelolaan sampah di kawasan permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan

*Sumber: Survei Primer, 2016*

#### 4.2.4.5 Kondisi Prasarana Kualitas Air Limbah

Menurut hasil Identifikasi melalui kusioner dan observasi untuk kualitas air limbah, umumnya permukiman kumuh yang terletak di Kelurahan Belitung Selatan menggunakan sistem air limbah menggunakan secara individu dan komunal. Untuk klasifikasi individu yaitu pembuangan limbah yang terdapat pada masing-masing rumah sedangkan klasifikasi komunal yaitu penggunaan WC umum yang tersedia pada masing-masing RT yang dikelola oleh masyarakat Kelurahan Belitung Selatan.

**Tabel 4.28** Kondisi sistem pengelolaan air limbah di kawasan permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan

No.	RT	Individu	Komunal	Tidak Ada	Total
Kumuh Sedang					
1	RT.06	8	3	-	11
Kumuh Ringan					
1	RT.04	7	1	-	8
2	RT.08	8	-	-	8
3	RT.09	4	4	-	8
4	RT.10	8	-	-	8
5	RT.11	7	1	-	8
6	RT.12	8	-	-	8
7	RT.13	6	2	-	8
8	RT.14	7	1	-	8
9	RT.15	8	-	-	8
Total		71	12	-	83

*Sumber: Survei Primer, 2016*

Berdasarkan hasil kusioner sebesar 71 responden 85.54% menggunakan system pembuangan limbah secara individu sedangkan 12 responden atau 14.45% masih menggunakan sistem pembuangan limbah secara komunal menggunakan WC umum. Untuk pembuangan limbah secara

individu lokasi WC mayoritas terletak menyatu dengan bangunan rumah.



**Gambar 4.26** Ketersediaan Septic Tank di kawasan permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan

*Sumber: Survei Primer, 2016*

Untuk ketersediaan bak penampungan limbah atau septic tank di Kelurahan Belitung Selatan. Sebanyak 63.85% responden telah menggunakan septic tank sedangkan sebanyak 36.14% responden tidak menggunakan septic tank dalam pembuangan limbah. Pembuangan limbah secara langsung dibuang ke bawah rumah.

Disimpulkan bahwa untuk kualitas sistem pembuangan air limbah sudah cukup baik. Ini dinilai dari penggunaan WC di setiap rumah yang mencapai 85.54% serta penggunaan septic tank sebesar 63.85% di kawansan permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan.

#### 4.2.5 Kondisi Mitigasi Bencana di Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin.

Berdasarkan analisa identifikasi karakteristik kondisi pemanfaatan ruang dan mitigasi bencana. Bahwa kondisi pemanfaatan ruang diukur melalui kesesuaian rencana tata ruang dengan kondisi eksisting permukiman kumuh yang telah berdiri. Untuk kondisi mitigasi bencana diidentifikasi dari jenis bencana yang terjadi, frekuensi bencana serta terdapatnya program mitigasi bencana di permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan.

Menurut hasil Identifikasi melalui kusioner dan observasi untuk kebencanaan dan mitigasi bencana. Umumnya permukiman kumuh yang terletak di Kelurahan Belitung Selatan dihadapi oleh bencana alam seperti banjir, kebakaran, tanah longsor dan lainnya. Untuk bencana alam yang pernah terjadi dijelaskan pada tabel berikut.

**Tabel 4.29** Kondisi kebencanaan berdasarkan jenis bencana alam di kawasan permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan

No.	RT	Banjir	Kebakaran	Tanah Longsor	Lain-lain	Total
Kumuh Sedang						
1	RT.06	-	10	-	1	11
Kumuh Ringan						
1	RT.04	-	6	-	2	8
2	RT.08	-	8	-	-	8
3	RT.09	2	6	-	-	8
4	RT.10	-	3	-	5	8
5	RT.11	-	-	-	8	8
6	RT.12	-	1	-	7	8
7	RT.13	-	6	-	2	8

8	RT.14	-	5	-	3	8
9	RT.15	-	-	-	8	8
<b>Total</b>		<b>2</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>83</b>

*Sumber: Survei Primer, 2016*

Dari tabel tersebut dijelaskan besaran presentase bencana alam yang pernah terjadi di permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan.



**Gambar 4.27** Jenis bencana alam yang pernah terjadi di kawasan permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan

*Sumber: Survei Primer, 2016*

Dijelaskan bahwa untuk bencana alam yang pernah atau sering terjadi di kawasan permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan yaitu bencana kebakaran sebesar 54.22% atau 45 responden. Untuk 36 responden lainnya menilai tidak ada terjadi bencana alam di lingkungan permukiman masyarakat. Ada juga responden menilai terjadinya bencana alam banjir di kawasan permukiman mereka sebesar 2.41% atau hanya 2 responden menjawab jawaban tersebut.

**Tabel 4.30** Intensitas kebencanaan yang terjadi di kawasan permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan

No.	RT	1 – 2 (Bulan 1x)	3 – 4 (Bulan 1x)	5 – 6 (Bulan 1x)	Lain-lain	Total
Kumuh Sedang						
1	RT.06	-	-	-	11	11
Kumuh Ringan						
1	RT.04	-	-	-	8	8
2	RT.08	-	-	-	8	8
3	RT.09	-	-	-	8	8
4	RT.10	-	-	-	8	8
5	RT.11	-	-	1	7	8
6	RT.12	-	-	-	8	8
7	RT.13	-	-	-	8	8
8	RT.14	-	-	-	8	8
9	RT.15	-	-	-	8	8
Total		0	0	1	82	83

*Sumber: Survei Primer, 2016*

Untuk frekuensi atau intensitas skala bencana alam yang pernah atau sering terjadi di kawasan permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan yaitu 83 responden 100% menilai lainnya. Dimana untuk frekuensi bencana alam yang terjadi. Tidak menentu disebabkan bencana alam akan terjadi jika ada kesalahan manusia seperti bencana kebakaran.

Disimpulkan bahwa bencana alam yang terjadi di kawasan permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan berupa bencana kebakaran. Dengan frekuensi kejadian yang tidak menentu. Bencana kebakaran disebabkan oleh kesalahan manusia seperti konsleting arus listrik. Serta ditambah bencana kebakaran yang terjadi juga disebabkan oleh mayoritas bahan material bangunan yang digunakan oleh masyarakat berupa papan kayu dan jarak antar bangunan yang pendek. Sehingga

dapat memicu terjadinya bencana kebakaran di permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan.

#### **4.2.5.1 Kondisi Mitigasi Bencana Berdasarkan Ketersediaan Jalur Evakuasi Bencana.**

Menurut hasil Identifikasi melalui kusioner dan observasi dari kondisi kebencanaan di Kelurahan Belitung Selatan. Harus ditinjau juga terkait program penanggulangan bencana alam. Berikut penjelasan terkait berdasarkan program penyediaan jalur evakuasi.

**Tabel 4.31** Ketersediaan jalur evakuasi bencana di kawasan permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan

No.	RT	Tidak	Ada	Total
Kumuh Sedang				
1	RT.06	11	-	11
Kumuh Ringan				
1	RT.04	8	-	8
2	RT.08	8	-	8
3	RT.09	8	-	8
4	RT.10	8	-	8
5	RT.11	8	-	8
6	RT.12	8	-	8
7	RT.13	8	-	8
8	RT.14	8	-	8
9	RT.15	8	-	8
Total		83	0	83

*Sumber: Survei Primer, 2016*

Dari kebencanaan yang telah terjadi. Dinilai bahwa masih belum adanya terkait program penanggulangan berupa jalur evakuasi bencana. 83 responden atau 100% menilai bahwa tidak adanya ketersediaan program evakuasi bencana di kawasan permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan.



**Tabel 4.32** Ketersediaan program mitigasi bencana di kawasan permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan

No.	RT	Ada	Tidak	Total
Kumuh Sedang				
1	RT.06	1	10	11
Kumuh Ringan				
1	RT.04	8	-	8
2	RT.08	-	8	8
3	RT.09	-	8	8
4	RT.10	1	7	8
5	RT.11	-	8	8
6	RT.12	3	5	8
7	RT.13	8	-	8
8	RT.14	-	8	8
9	RT.15	8	-	8
Total		29	54	83

*Sumber: Survei Primer, 2016*

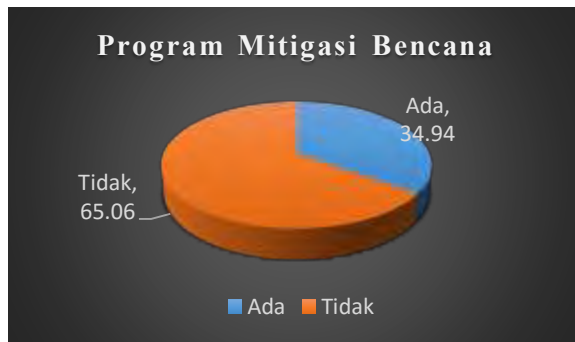
Dari kebencanaan yang telah terjadi. Dinilai bahwa masih adanya terkait program mitigasi bencana. 54 responden atau 65.06% menilai bahwa tidak adanya program mitigasi bencana di kawasan permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan. Namun ada 29 responden atau 34.93% menilai terdapat program mitigasi bencana.



**Gambar 4.28** BPK Putra RT.11 Kelurahan Belitung Selatan

*Sumber: Survei Primer, 2016*

Program tersebut berupa penyediaan mobil pemadam kebakaran atau Badan Pemadaman Kebakaran pada beberapa RT di kawasan permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan. Badan pemadam kebakaran yang ada hasil dari swadaya masyarakat pada masing-masing RT. Mengingat tingginya tingkat rawan bencana kebakaran di skala Kota Banjarmasin.



**Gambar 4.29** Ketersediaan program mitigasi bencana di kawasan permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan

*Sumber: Survei Primer, 2016*

Disimpulkan bahwa bencana alam yang terjadi di kawasan permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan berupa bencana kebakaran. Dengan frekuensi kejadian yang tidak menentu. Bencana kebakaran disebabkan oleh kesalahan manusia seperti konsleting arus listrik. Untuk program mitigasi bencana dinilai masih kurang dikarenakan masih belum adanya terdapat jalur evakuasi bencana di kawasan permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan. Namun ada terdapatnya beberapa program swadaya masyarakat berupa BPK atau Badan Pemadam Kebakaran pada beberapa RT di kawasan permukiman kumuh.

#### 4.3 Analisis faktor prioritas penyebab kumuh pada kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin.

Dalam analisis menentukan faktor prioritas penyebab kumuh yang obyektif. Diperlukan pengujian indikator dan variabel yang telah dibentuk melalui studi literatur. Analisa terhadap faktor penyebab kumuh dalam menentukan faktor prioritas penyebab maka dilakukan dengan menggunakan Analisis AHP (*analyttical hierarchy process*) indikator dan variabel yang ada diujikan tingkat kepentingannya pada pihak pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Semakin tinggi bobot suatu Indikator maka semakin tinggi pula prioritas Indikator tersebut menjadi faktor prioritas penyebab kumuh di Kelurahan Belitung Selatan.

Hasil ini berdasarkan pembobotan yang dilakukan oleh para instansi atau pakar yang menjadi responden dan tingkat kepentingannya dalam analisa Indikator lokasi pengembangan perumahan dapat dilihat pada **Tabel 4.33** berikut :

**Tabel 4.33** Analisa Stakeholder berdasarkan pengelompokan stakeholder serta bidang dan kepentingan stakeholder

No	Kelompok Stakeholder	Instansi Stakeholders	Bidang	Kepentingan
1	Pemerintah	Bappeda Kota Banjarmasin	Bidang Pengembangan Wilayah	Mengoptimalkan pemanfaatan ruang kota dengan menyusun kebijakan penataan ruang
		Dinas Cipta Karya dan Perumahan Kota Banjarmasin	Bidang Pengembangan Permukiman & PBL	Penyusunan kebijakan teknis di bidang tata kota dan permukiman

No	Kelompok Stakeholder	Instansi Stakeholders	Bidang	Kepentingan
		Dinas PU dan Bina Marga	Bidang Pelayanan dan Pengawasan Jalan	Penyusunan kebijakan teknis di bidang pembangunan fisik dan infrastruktur
		Dinas Tata Ruang & Tata Bangunan Kota Banjarmasin	Bidang Pelayanan Penataan Ruang	Mempertimbangkan kepentingan terkait Pola Ruang pada lokasi permukiman
		Kelurahan Belitung Selatan	Pengawas Wilayah	Mempertimbangkan kepentingan masyarakat dalam kondisi sosial & budaya terhadap permukiman di lokasi.
2	Akademisi	Pakar/Dosen Tingkat Perguruan Tinggi	Bidang Perumahan & Permukiman	Berkepentingan dalam memberikan sudut pandang keilmuan terkait permukiman & Perumahan terhadap permasalahan permukiman kumuh
3	Masyarakat ( <i>Desicion Maker</i> )	Tokoh Masyarakat (Ketua RT, RW) / Pemilik Rumah	Masyarakaat Bertempat Tinggal di Permukiman Kumuh	Kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah penelitian (menjadi <i>desicion maker</i> ) dan mengetahui serta yang memiliki pengaruh sebagai pengambil keputusan dalam pemilihan perumahan

*Sumber: Hasil Analisa, 2016*

#### 4.3.1 Analisis faktor prioritas penyebab kumuh pada kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin berdasarkan stakeholder pemerintah.

Dalam menganalisis faktor prioritas penyebab kumuh diperlukan analisa stakeholder untuk memperoleh ekspert yang akan menentukan prioritas faktor berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruh dalam penentuan faktor prioritas penyebab kumuh. Berikut para pakar yang menjadi responden dan tingkat kepentingannya dalam analisa Indikator faktor prioritas penyebab kumuh di Kelurahan Belitung Selatan berdasarkan analisa stakeholder dari pemerintah.

**Tabel 4.34** Pengelompokan hasil analisa stakeholder berdasarkan stakeholder dari pemerintah

Kelompok Stakeholder	Instansi Stakeholders	Nama	Bidang	Kepentingan
Pemerintah	Bappeda Kota Banjarmasin	Jauhar Arif	Bidang Pengembangan Wilayah	Mengoptimalkan pemanfaatan ruang kota dengan menyusun kebijakan penataan ruang
	Dinas Cipta Karya dan Perumahan Kota Banjarmasin	Lisda Maymunah	Bidang Pengembangan Permukiman & PBL	Penyusunan kebijakan teknis di bidang tata kota dan permukiman
	Dinas PU dan Bina Marga	Kartika Estaurina, ST.	Bidang Pelayanan dan Pengawasan Jalan	Penyusunan kebijakan teknis di bidang pembangunan fisik dan infrastruktur
	Dinas Tata Ruang & Tata Bangunan Kota Banjarmasin	Shirley Adillah Alk, ST.	Bidang Pelayanan Penataan Ruang	Mempertimbangkan kepentingan terkait Pola Ruang pada lokasi permukiman

Kelompok Stakeholder	Instansi Stakeholders	Nama	Bidang	Kepentingan
	Kelurahan Belitung Selatan	Karmiyanto	Pengawas Wilayah	Mempertimbangkan kepentingan masyarakat dalam kondisi sosial & budaya terhadap permukiman di lokasi.

*Sumber: Hasil Analisa, 2016*

#### 4.3.1.1 Hasil analisa faktor prioritas penyebab kumuh pada kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin Berdasarkan BAPPEDA Kota Banjarmasin

Dalam kelembagaan pemerintah memiliki perspektif berbeda dalam menilai faktor prioritas penyebab kumuh. Penilaian tersebut diperoleh dari pemerintah yang berorientasi pada peraturan dalam bidang penataan ruang yang dilaksanakan.



**Gambar 4.30** Nilai Bobot *Analysis Hierarchy Process* Faktor Prioritas Penyebab Kumuh Berdasarkan BAPPEDA Kota Banjarmasin

*Sumber: Hasil Ekspert Choice , 2016*

**Tabel 4.35** Tingkatan Bobot Faktor Prioritas Penyebab Kumuh Berdasarkan BAPPEDA Kota Banjarmasin

No.	Indikator	Bobot Indikator
1.	Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat	0,566
2.	Kondisi Fisik Bangunan	0,296
3.	Pengendalian Hukum	0,081
4.	Kondisi Sarana dan Prasarana	0,058
<b>Jumlah Bobot</b>		<b>1</b>

*Sumber: Hasil Analisa, 2016*

Berdasarkan hasil analisa AHP (*Analytic Hierarchy Process*) diatas, diketahui bahwa indikator penyebab kumuh pada kawasan permukiman kumuh yang memiliki prioritas paling tinggi berdasarkan BAPPEDA Kota Banjarmasin adalah indikator kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dengan bobot 0,566; kemudian kondisi fisik bangunan dengan bobot 0,296; pengendalian hukum dengan bobot 0,081; dan kondisi sarana dan prasarana dengan bobot 0,058. Dari hasil tersebut diperoleh indikator faktor prioritas paling tinggi penyebab kumuh sebesar 56.6% yaitu kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di permukiman kumuh.

#### **1. Kondisi Fisik Bangunan**

Dilihat dari pembobotan faktor prioritas penyebab kumuh. Kondisi fisik bangunan memiliki nilai bobot 0,296 dengan presentase prioritas (29,6%). Dari faktor penyebab kumuh berdasarkan indikator kondisi fisik bangunan diperjelas atas dasar variabel kepemilikan lahan bangunan, ketersediaan bangunan, kualitas bangunan serta kepadatan bangunan. Variabel tersebut menjadi parameter dalam indikator kondisi fisik bangunan yang menyebabkan kumuh.



**Gambar 4.31** Nilai Bobot *Analysis Hierarchy Process* Penyebab Faktor Kondisi Fisik Bangunan Berdasarkan BAPPEDA Kota Banjarmasin

*Sumber: Hasil Ekspert Choice , 2016*

**Tabel 4.36** Tingkatan Bobot Variabel Penyebab Faktor Kondisi Fisik Bangunan Berdasarkan BAPPEDA Kota Banjarmasin

No.	Variabel	Bobot Variabel
1.	Kondisi Fisik Bangunan	0,296
a.	Kepemilikan Lahan Bangunan	0,637
b.	Ketersediaan Bangunan	0,209
c.	Kualitas Bangunan	0,086
d.	Kepadatan Bangunan	0,068

*Sumber: Hasil Analisa, 2016*

Menurut hasil analisa AHP (*Analytic Hierarchy Process*) diatas, diketahui bahwa indikator penyebab kumuh terkait kondisi fisik bangunan yang memiliki prioritas paling tinggi dalam pemerintah menurut BAPPEDA Kota Banjarmasin adalah variabel kepemilikan bangunan 0,637; ketersediaan bangunan 0,209; kualitas bangunan 0,086; kepadatan bangunan 0,068. Dari hasil analisa variabel kepemilikan lahan bangunan yang memiliki bobot tinggi yaitu 0,637 dengan presentase (63,7%). Status kepemilikan lahan memiliki peran sebagai prioritas penyebab utama munculnya permukiman kumuh.



Dimana status atau izin kepemilikan lahan bangunan memicu pertumbuhan permukiman menurut stakeholder.

## 2. Kondisi Sarana dan Prasarana

Menurut hasil dari pembobotan faktor prioritas penyebab kumuh. Kondisi sarana dan prasarana memiliki nilai bobot 0,058 dengan presentase prioritas (5.8%). Dari faktor penyebab kumuh berdasarkan indikator kondisi sarana dan prasarana diperjelas dengan variabel kualitas sarana & prasarana serta ketersediaan sarana & prasarana. Kondisi sarana dan prasarana diukur melalui variabel tersebut. Dimana untuk kondisi sarana & prasarana dinilai dari kualitas fasilitas sarana & prasarana yang sudah layak bagi pelayanan di kawasan permukiman kumuh serta ketersediaan sarana & prasarana dalam memenuhi kebutuhan masyarakat standar pelayanan minimum fasilitas. Variabel tersebut menjadi parameter dalam indikator kondisi sarana dan prasarana yang menyebabkan kumuh.



**Gambar 4.32** Nilai Bobot *Analysis Hierarchy Process* Penyebab Faktor Kondisi Sarana dan Prasarana Berdasarkan Berdasarkan BAPPEDA Kota Banjarmasin

*Sumber: Hasil Ekspert Choice , 2016*

**Tabel 4.37** Tingkatan Bobot Variabel Kondisi Sarana dan Prasarana Berdasarkan BAPPEDA Kota Banjarmasin

No.	Variabel	Bobot Variabel
1.	Kondisi Sarana dan Prasarana	0,058
a.	Ketersediaan Sarana dan Prasarana	0,900
b.	Kualitas Sarana dan Prasarana	0,100

*Sumber: Hasil Analisa, 2016*

Menurut hasil analisa AHP (*Analytic Hierarchy Process*) diatas, diketahui bahwa indikator penyebab kumuh terkait kondisi sarana dan prasarana yang memiliki prioritas paling tinggi pemerintah menurut BAPPEDA Kota Banjarmasin adalah variabel ketersediaan sarana dan prasarana dengan nilai bobot 0,900 serta untuk kualitas sarana dan prasarana memiliki nilai bobot 0,100. Dari hasil analisa variabel Ketersediaan sarana dan prasarana memiliki presentase 90.0% sebagai prioritas utama penyebab utama munculnya permukiman kumuh menurut BAPPEDA Kota Banjarmasin. Disebabkan ketersediaan sarana dan prasarana dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas-fasilitas seperti pendidikan, kesehatan, peribadatan, perdagangan jasa, rekreasi dan olahraga masih kurang di kawasan permukiman kumuh.

### **3. Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat**

Dilihat dari pembobotan faktor prioritas penyebab kumuh. Kondisi sosial dan ekonomi memiliki nilai bobot 0,566 dengan presentase prioritas (56.6%). Dari faktor penyebab kumuh berdasarkan indikator kondisi sosial dan ekonomi masyarakat diperjelas atas dasar variabel pendapatan penghasilan penduduk, tingkat pendidikan, tingkat arus migrasi dan kepadatan penduduk. Variabel tersebut menjadi parameter indikator kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang menyebabkan kumuh.



**Gambar 4.33** Nilai Bobot *Analysis Hierarchy Process* Penyebab Faktor Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat Berdasarkan BAPPEDA Kota Banjarmasin

*Sumber: Hasil Ekspert Choice , 2016*

**Tabel 4.38** Tingkatan Nilai Bobot Variabel Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat Berdasarkan BAPPEDA Kota Banjarmasin

No.	Variabel	Bobot Variabel
1.	Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat	0,566
a.	Pendapatan Penghasilan Penduduk	0,517
b.	Tingkat Pendidikan	0,374
c.	Tingkat Arus Migrasi	0,070
d.	Kepadatan Penduduk	0,040

*Sumber: Hasil Analisa, 2016*

Menurut hasil analisa AHP (*Analytic Hierarchy Process*) diatas, diketahui bahwa indikator penyebab kumuh terkait kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang memiliki prioritas paling tinggi pemerintah menurut BAPPEDA Kota Banjarmasin adalah variabel pendapatan penghasilan penduduk 0,517; tingkat pendidikan 0,374; tingkat arus migrasi 0,070; serta kepadatan penduduk 0,040. Dari hasil analisa variabel pendapatan penghasilan penduduk yang memiliki bobot tinggi yaitu 0,517 dengan presentase (51,7%). Pendapatan penghasilan penduduk memiliki peran sebagai prioritas penyebab utama munculnya permukiman kumuh. Dimana pendapatan penghasilan penduduk dibawah rata-rata UMR Kota

Banjarmasin memicu kondisi ekonomi yang rendah menurut stakeholder.

#### 4. Pengendalian Hukum

Hasil dari pembobotan faktor prioritas penyebab kumuh. Pengendalian Hukum memiliki nilai bobot 0,081 dengan presentase prioritas (8.1%). Dari faktor penyebab kumuh berdasarkan indikator pengendalian hokum diperjelas atas dasar variabel pengawasan tanah kurang ketat serta tingkat pengetahuan dan kesadaran hukum. Variabel tersebut menjadi parameter indikator pengendalian hukum yang menyebabkan kumuh.



**Gambar 4.34** Nilai Bobot *Analysis Hierarchy Process* Penyebab Faktor Pengendalian Hukum Berdasarkan BAPPEDA Kota Banjarmasin

*Sumber: Hasil Ekspert Choice , 2016*

**Tabel 4.39** Tingkatan Bobot Variabel Pengendalian Hukum Berdasarkan BAPPEDA Kota Banjarmasin

No.	Variabel	Bobot Variabel
1.	Pengendalian Hukum	0,081
a.	Pengawasan Tanah Kurang Ketat	0,900

No.	Variabel	Bobot Variabel
b.	Tingkat Pengetahuan dan Kesadaran Hukum	0,100

*Sumber: Hasil Analisa, 2016*

Menurut hasil analisa AHP (*Analytic Hierarchy Process*) diatas, diketahui bahwa indikator penyebab kumuh dari faktor pengendalian hukum yang memiliki prioritas penyebab paling tinggi pemerintah menurut BAPPEDA Kota Banjarmasin adalah variabel pengawasan tanah kurang ketat dengan nilai bobot 0,900 serta untuk tingkat pengetahuan dan kesadaran hukum memiliki nilai bobot 0,100. Pengawasan tanah kurang ketat memiliki prioritas penyebab utama munculnya permukiman kumuh menurut BAPPEDA Kota Banjarmasin. Disebabkan pengawasan tanah kurang ketat menimbulkan pertumbuhan bangunan yang kurang sesuai dengan pemanfaatan ruang. Serta masih belum adanya penegakan hukum terhadap penggunaan lahan yang masih belum sesuai dengan peruntukan awal dalam rencana kawasan khususnya di kawasan permukiman kumuh.

#### **4.3.1.2 Hasil analisa faktor prioritas penyebab kumuh pada kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin Berdasarkan Dinas Cipta Karya & Perumahan**

Dalam kelembagaan pemerintah memiliki perspektif berbeda dalam menilai faktor prioritas penyebab kumuh. Penilaian tersebut diperoleh dari pemerintah yang berorientasi pada pemanfaatan dan peraturan dalam bidang pengembangan permukiman & PBL.



**Gambar 4.35** Nilai Bobot *Analysis Hierarchy Process* Faktor Prioritas Penyebab Kumuh Berdasarkan Dinas Cipta Karya dan Perumahan

*Sumber: Hasil Ekspert Choice , 2016*

**Tabel 4.40** Tingkatan Bobot *Analysis Hierarchy Process* Faktor Prioritas Penyebab Kumuh Berdasarkan Dinas Cipta Karya dan Perumahan

No.	Indikator	Bobot Indikator
1.	Kondisi Fisik Bangunan	0,486
2.	Kondisi Sarana dan Prasarana	0,383
3.	Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat	0,073
4.	Pengendalian Hukum	0,058
<b>Jumlah Bobot</b>		<b>1</b>

*Sumber: Hasil Analisa, 2016*

Berdasarkan hasil analisa AHP (*Analytic Hierarchy Process*) diatas, diketahui bahwa indikator penyebab kumuh pada kawasan permukiman kumuh yang memiliki prioritas paling tinggi berdasarkan Dinas Cipta Karya dan Perumahan adalah indikator kondisi fisik bangunan dengan bobot 0,486; kemudian kondisi sarana dan prasarana dengan bobot 0,383; kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dengan bobot 0,073; dan pengendalian hukum dengan bobot 0,058. Dari hasil tersebut diperoleh indikator faktor prioritas paling tinggi penyebab

kumuh sebesar 48.6% yaitu kondisi fisik bangunan di permukiman kumuh.

### 1. Kondisi Fisik Bangunan

Dilihat dari pembobotan faktor prioritas penyebab kumuh. Kondisi fisik bangunan memiliki nilai bobot 0,484 dengan presentase prioritas (48.6%). Dari faktor penyebab kumuh berdasarkan indikator kondisi fisik bangunan diperjelas atas dasar variabel kepemilikan lahan bangunan, ketersediaan bangunan, kualitas bangunan serta kepadatan bangunan. Variabel tersebut menjadi parameter dalam indikator kondisi fisik bangunan yang menyebabkan kumuh.



**Gambar 4.36** Nilai Bobot *Analysis Hierarchy Process* Faktor Kondisi Fisik Bangunan Berdasarkan Dinas Cipta Karya dan Perumahan

*Sumber: Hasil Ekspert Choice , 2016*

**Tabel 4.41** Tingkatan Bobot Variabel Kondisi Fisik Bangunan Berdasarkan Dinas Cipta Karya dan Perumahan Kota Banjarmasin

No.	Variabel	Bobot Variabel
1.	Kondisi Fisik Bangunan	0,486
a.	Kepemilikan Lahan Bangunan	0,110
b.	Ketersediaan Bangunan	0,070
c.	Kualitas Bangunan	0,613
d.	Kepadatan Bangunan	0,207

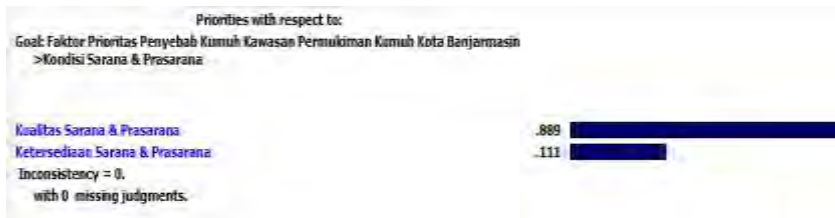
*Sumber: Hasil Analisa, 2016*

Menurut hasil analisa AHP (*Analytic Hierarchy Process*) diatas, diketahui bahwa indikator penyebab kumuh atas kondisi fisik bangunan yang memiliki prioritas paling tinggi dari pemerintah menurut Dinas Cipta Karya dan Perumahan Kota Banjarmasin adalah indikator kualitas bangunan 0,613; kepadatan bangunan 0,207; kepemilikan lahan bangunan 0,110; dan ketersediaan bangunan 0,070. Dari variabel kualitas bangunan yang memiliki bobot tinggi yaitu 0,613 dengan presentase (61,3%). Kualitas bangunan memiliki dampak prioritas penyebab kumuh di kawasan permukiman kumuh. Dinilai dari jenis material bangunan dari mulai lantai, dinding, atap, dan pencahayaan. Agar mengukur seberapa baik kualitas bangunan yang telah ada.

## **2. Kondisi Sarana dan Prasarana**

Menurut hasil dari pembobotan faktor prioritas penyebab kumuh. Kondisi sarana dan prasarana memiliki nilai bobot 0,383 dengan presentase prioritas (38.3%). Dari faktor penyebab kumuh berdasarkan indikator kondisi sarana dan prasarana diukur dengan variabel kualitas sarana & prasarana serta ketersediaan sarana & prasarana. Variabel dinilai dari kualitas fisik bangunan fasilitas sarana & prasarana yang sudah layak bagi pelayanan di kawasan permukiman kumuh serta ketersediaan sarana & prasarana dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai standar pelayanan minimum fasilitas. Variabel tersebut menjadi parameter dalam indikator kondisi sarana dan prasarana yang menyebabkan kumuh.





**Gambar 4.37** Nilai Bobot *Analysis Hierarchy Process* Faktor Kondisi Sarana & Prasarana Berdasarkan Dinas Cipta Karya dan Perumahan

*Sumber: Hasil Ekspert Choice , 2016*

**Tabel 4.42** Tingkatan Bobot Variabel Kondisi Sarana dan Prasarana Berdasarkan Dinas Cipta Karya dan Perumahan Kota Banjarmasin

No.	Variabel	Bobot Variabel
1.	Kondisi Sarana dan Prasarana	0,383
a.	Ketersediaan Sarana dan Prasarana	0,111
b.	Kualitas Sarana dan Prasarana	0,889

*Sumber: Hasil Analisa, 2016*

Menurut hasil analisa AHP (*Analytic Hierarchy Process*) diatas, diketahui bahwa indikator penyebab kumuh terkait kondisi sarana dan prasarana yang memiliki prioritas paling tinggi pemerintah menurut Dinas Cipta Karya dan Perumahan Kota Banjarmasin adalah variabel ketersediaan sarana dan prasarana dengan nilai bobot 0,111 serta untuk kualitas sarana dan prasarana memiliki nilai bobot 0,889. Kualitas sarana dan prasarana memiliki presentase 88.9% sebagai prioritas penyebab utama munculnya permukiman kumuh menurut Dinas Cipta Karya dan Perumahan Kota Banjarmasin. Diperjelas kualitas sarana dan prasarana dinilai dari fisik bangunan fasilitas serta pelayanan publik sarana dan prasarana masih kurang baik di kawasan permukiman kumuh.

### 3. Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat

Dilihat dari pembobotan faktor prioritas penyebab kumuh. Kondisi sosial dan ekonomi memiliki nilai bobot 0,073 dengan presentase prioritas (7.3%). Dari faktor penyebab kumuh berdasarkan indikator kondisi sosial dan ekonomi masyarakat diperjelas atas dasar variabel pendapatan penghasilan penduduk, tingkat pendidikan, tingkat arus migrasi dan kepadatan penduduk. Variabel tersebut menjadi parameter indikator kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang menyebabkan kumuh.



**Gambar 4.38** Nilai Bobot *Analysis Hierarchy Process* Faktor Kondisi Sosial & Ekonomi Masyarakat Berdasarkan Dinas Cipta Karya dan Perumahan

*Sumber: Hasil Ekspert Choice , 2016*

**Tabel 4.43** Tingkatan Bobot Variabel Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat Berdasarkan Dinas Cipta Karya dan Perumahan Kota Banjarmasin

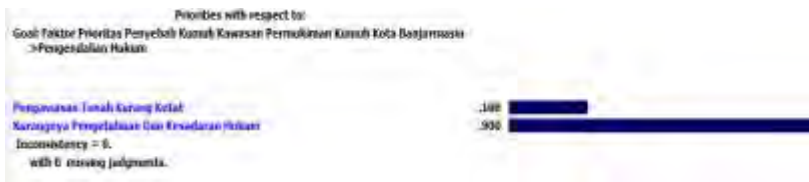
No.	Variabel	Bobot Variabel
1.	Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat	0,073
a.	Pendapatan Penghasilan Penduduk	0,605
b.	Tingkat Pendidikan	0,074
c.	Tingkat Arus Migrasi	0,050
d.	Kepadatan Penduduk	0,271

*Sumber: Hasil Analisa, 2016*

Menurut hasil analisa AHP (*Analyti Hierarchy Process*) diatas, diketahui bahwa indikator penyebab kumuh terkait kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang memiliki prioritas paling tinggi pemerintah menurut Dinas Cipta Karya dan Perumahan Kota Banjarmasin adalah variabel pendapatan penghasilan penduduk 0,605; tingkat pendidikan 0,074; tingkat arus migrasi 0,050; serta kepadatan penduduk 0,271. Dari hasil analisa variabel pendapatan penghasilan penduduk yang memiliki bobot tinggi yaitu 0,605 dengan presentase (60.5%). Pendapatan penghasilan penduduk memiliki peran sebagai prioritas penyebab utama munculnya permukiman kumuh. Dimana pendapatan penghasilan penduduk dibawah rata-rata UMR Kota Banjarmasin memicu kondisi ekonomi yang rendah di masyarakat menurut stakeholder.

#### **4. Pengendalian Hukum**

Hasil dari pembobotan faktor prioritas penyebab kumuh. Pengendalian Hukum memiliki nilai bobot 0,058 dengan presentase prioritas (5.8%). Dari faktor penyebab kumuh berdasarkan indikator pengendalian hokum diperjelas atas dasar variabel pengawasan tanah kurang ketat serta tingkat pengetahuan dan kesadaran hukum. Variabel tersebut menjadi parameter indikator pengendalian hukum yang menyebabkan kumuh.



**Gambar 4.39** Nilai Bobot *Analysis Hierarchy Process* Faktor Kondisi Pengendalian Hukum Berdasarkan Dinas Cipta Karya dan Perumahan

*Sumber: Hasil Ekspert Choice , 2016*

**Tabel 4.44** Tingkatan Bobot Variabel Pengendalian Hukum Berdasarkan Dinas Cipta Karya dan Perumahan Kota Banjarmasin

No.	Variabel	Bobot Variabel
1.	Pengendalian Hukum	0,058
a.	Pengawasan Tanah Kurang Ketat	0,100
b.	Tingkat Pengetahuan dan Kesadaran Hukum	0,900

*Sumber: Hasil Analisa, 2016*

Menurut hasil analisa AHP (*Analytic Hierarchy Process*) diatas, diketahui bahwa indikator penyebab kumuh dari faktor pengendalian hukum yang memiliki prioritas penyebab paling tinggi pemerintah menurut Dinas Cipta Karya dan Perumahan Kota Banjarmasin adalah variabel tingkat pengetahuan dan kesadaran hukum dengan nilai bobot 0,900 serta pengawasan tanah kurang ketat memiliki nilai bobot 0,100. tingkat pengetahuan dan kesadaran hukum memiliki prioritas penyebab utama munculnya permukiman kumuh menurut Dinas Cipta Karya dan Perumahan Kota Banjarmasin. Dikarenakan kurangnya sosialisasi terhadap perundang-undangan penataan ruang serta kesadaran peran masyarakat dalam perencanaan permukiman.

#### 4.3.1.3 Hasil analisa faktor prioritas penyebab kumuh pada kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin Berdasarkan Dinas Tata Ruang & Bangunan

Kelembagaan pemerintah memiliki perspektif berbeda dalam menilai faktor prioritas penyebab kumuh. Penilaian tersebut diperoleh dari pemerintah yang berorientasi pada pemanfaatan dan peraturan dalam bidang penataan dan pengawasan bangunan skala Kota Banjarmasin.



**Gambar 4.40** Nilai Bobot *Analysis Hierarchy Process* Faktor Prioritas Penyebab Kumuh Berdasarkan Dinas Tata Ruang & Bangunan

*Sumber: Hasil Ekspert Choice , 2016*

**Tabel 4.45** Tingkatan Bobot Faktor Prioritas Penyebab Kumuh Berdasarkan Dinas Tata Ruang dan Bangunan

No.	Indikator	Bobot Indikator
1.	Kondisi Sarana dan Prasarana	0,562
2.	Pengendalian Hukum	0,293
3.	Kondisi Fisik Bangunan	0,101
4.	Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat	0,044
<b>Jumlah Bobot</b>		<b>1</b>

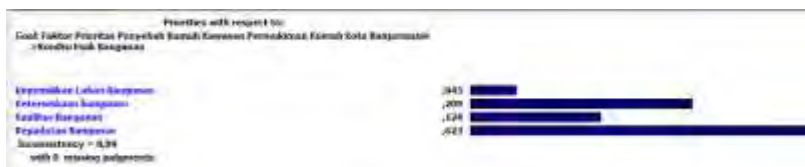
*Sumber: Hasil Analisa, 2016*

Berdasarkan hasil analisa AHP (*Analytic Hierarchy Process*) diatas, diketahui bahwa indikator penyebab kumuh

pada kawasan permukiman kumuh yang memiliki prioritas paling tinggi berdasarkan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Banjarmasin adalah indikator kondisi sarana dan prasarana dengan bobot 0,562; kemudian pengendalian hukum dengan bobot 0,293; kondisi fisik bangunan dengan bobot 0,101; dan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dengan bobot 0,044. Dari hasil tersebut diperoleh indikator faktor prioritas paling tinggi penyebab kumuh sebesar 56.2% yaitu kondisi sarana dan prasarana di permukiman kumuh.

### 1. Kondisi Fisik Bangunan

Dilihat dari pembobotan faktor prioritas penyebab kumuh. Kondisi fisik bangunan memiliki nilai bobot 0,101 dengan presentase prioritas (10.1%). Dari faktor penyebab kumuh berdasarkan indikator kondisi fisik bangunan diperjelas atas dasar variabel kepemilikan lahan bangunan, ketersediaan bangunan, kualitas bangunan serta kepadatan bangunan. Variabel tersebut menjadi parameter dalam indikator kondisi fisik bangunan yang menyebabkan kumuh.



**Gambar 4.41** Nilai Bobot *Analysis Hierarchy Process* Faktor Kondisi Fisik Bangunan Berdasarkan Dinas Tata Ruang & Bangunan  
*Sumber: Hasil Ekspert Choice , 2016*

**Tabel 4.46** Tingkatan Bobot Variabel Kondisi Fisik Bangunan Berdasarkan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Banjarmasin

No.	Variabel	Bobot Variabel
1.	Kondisi Fisik Bangunan	0,101
a.	Kepemilikan Lahan Bangunan	0,043
b.	Ketersediaan Bangunan	0,209
c.	Kualitas Bangunan	0,124
d.	Kepadatan Bangunan	0,623

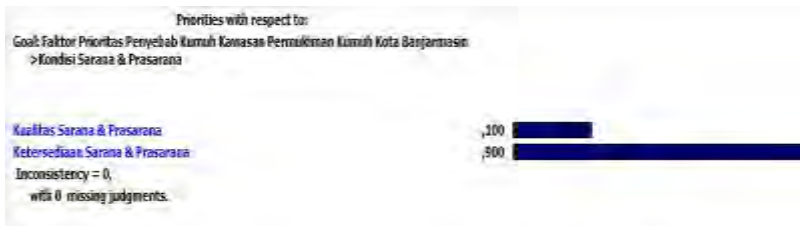
*Sumber: Hasil Analisa, 2016*

Menurut hasil analisa AHP (*Analytic Hierarchy Process*) diatas, diketahui bahwa indikator penyebab kumuh atas kondisi fisik bangunan yang memiliki prioritas paling tinggi dari pemerintah menurut Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Banjarmasin adalah indikator kepadatan bangunan 0,623; ketersediaan bangunan 0,209; kualitas bangunan 0,124; kepemilikan lahan bangunan 0,043. Dari variabel kepadatan bangunan yang memiliki bobot tinggi yaitu 0,623 dengan presentase (62,3%). Kepadatan bangunan memiliki dampak prioritas penyebab kumuh di kawasan permukiman kumuh. Dinilai dari jarak antar bangunan serta jumlah bangunan per luas wilayah keseluruhan. Dari parameter tersebut terlihat nilai kepadatan bangunan di kawasan permukiman kumuh.

## **2. Kondisi Sarana dan Prasarana**

Menurut hasil dari pembobotan faktor prioritas penyebab kumuh. Kondisi sarana dan prasarana memiliki nilai bobot 0,562 dengan presentase prioritas (56.2%). Dari faktor penyebab kumuh berdasarkan indikator kondisi sarana dan prasarana diukur dengan variabel kualitas sarana & prasarana serta ketersediaan sarana & prasarana. Variabel dinilai dari kualitas fisik bangunan fasilitas sarana & prasarana yang sudah layak

bagi pelayanan di kawasan permukiman kumuh serta ketersediaan sarana & prasarana dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai standar pelayanan minimum fasilitas. Variabel tersebut menjadi parameter dalam indikator kondisi sarana dan prasarana yang menyebabkan kumuh.



**Gambar 4.42** Nilai Bobot *Analysis Hierarchy Process* Faktor Kondisi Sarana & Prasarana Berdasarkan Dinas Tata Ruang & Bangunan

*Sumber: Hasil Ekspert Choice , 2016*

**Tabel 4.47** Tingkatan Bobot Variabel Kondisi Sarana dan Prasarana Berdasarkan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Banjarmasin

No.	Variabel	Bobot Variabel
1.	Kondisi Sarana dan Prasarana	0,562
a.	Ketersediaan Sarana dan Prasarana	0,900
b.	Kualitas Sarana dan Prasarana	0,100

*Sumber: Hasil Analisa, 2016*

Menurut hasil analisa AHP (*Analytic ierarchy Process*) diatas, diketahui bahwa indikator penyebab kumuh terkait kondisi sarana dan prasarana yang memiliki prioritas paling tinggi pemerintah menurut Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Banjarmasin adalah variabel ketersediaan sarana dan prasarana dengan nilai bobot 0,900 serta untuk kualitas sarana dan prasarana memiliki nilai bobot 0,100. Ketersediaan sarana



dan prasarana memiliki presentase 90% sebagai prioritas penyebab utama munculnya permukiman kumuh menurut Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Banjarmasin. Disebabkan ketersediaan sarana dan prasarana dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas-fasilitas seperti pendidikan, kesehatan, peribadatan, perdagangan jasa, rekreasi dan olahraga masih kurang di kawasan permukiman kumuh.

### 3. Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat

Dilihat dari pembobotan faktor prioritas penyebab kumuh. Kondisi sosial dan ekonomi memiliki nilai bobot 0,044 dengan presentase prioritas (4.4%). Dari faktor penyebab kumuh berdasarkan indikator kondisi sosial dan ekonomi masyarakat diperjelas atas dasar variabel pendapatan penghasilan penduduk, tingkat pendidikan, tingkat arus migrasi dan kepadatan penduduk. Variabel tersebut menjadi parameter indikator kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang menyebabkan kumuh.



**Gambar 4.43** Nilai Bobot *Analysis Hierarchy Process* Faktor Kondisi Sosial & Ekonomi Masyarakat Berdasarkan Dinas Tata Ruang & Bangunan

*Sumber: Hasil Ekspert Choice , 2016*

**Tabel 4.48** Tingkayan Bobot Variabel Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat Berdasarkan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Banjarmasin

No.	Variabel	Bobot Variabel
1.	Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat	0,044
a.	Pendapatan Penghasilan Penduduk	0,073
b.	Tingkat Pendidikan	0,124
c.	Tingkat Arus Migrasi	0,173
d.	Kepadatan Penduduk	0,629

*Sumber: Hasil Analisa, 2016*

Menurut hasil analisa AHP (*Analytic Hierarchy Process*) diatas, diketahui bahwa indikator penyebab kumuh terkait kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang memiliki prioritas paling tinggi pemerintah menurut Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Banjarmasin adalah variabel pendapatan penghasilan penduduk 0,073; tingkat pendidikan 0,125; Tingkat arus migrasi 0,173; serta kepadatan penduduk 0,629. Dari hasil analisa variabel kepadatan penduduk memiliki bobot tinggi yaitu 0,629 dengan presentase (62.9%). Kepadatan penduduk memiliki pengaruh terhadap semakin tingginya dan laju pertumbuhan penduduk kebutuhan di masyarakat menurut stakeholder.

#### **4. Pengendalian Hukum**

Hasil dari pembobotan faktor prioritas penyebab kumuh. Pengendalian Hukum memiliki nilai bobot 0,293 dengan presentase prioritas (29.3%). Dari faktor penyebab kumuh berdasarkan indikator pengendalian hukum diperjelas atas dasar variabel pengawasan tanah kurang ketat serta tingkat pengetahuan dan kesadaran hukum. Variabel tersebut menjadi

parameter indikator pengendalian hukum yang menyebabkan kumuh.



**Gambar 4.44** Nilai Bobot *Analysis Hierarchy Process* Faktor Kondisi Pengendalian Hukum Berdasarkan Dinas Tata Ruang & Bangunan

*Sumber: Hasil Ekspert Choice , 2016*

**Tabel 4.49** Tingkatan Bobot Variabel Pengendalian Hukum Berdasarkan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Banjarmasin

No.	Variabel	Bobot Variabel
1.	Pengendalian Hukum	0,293
a.	Pengawasan Tanah Kurang Ketat	0,500
b.	Tingkat Pengetahuan dan Kesadaran Hukum	0,500

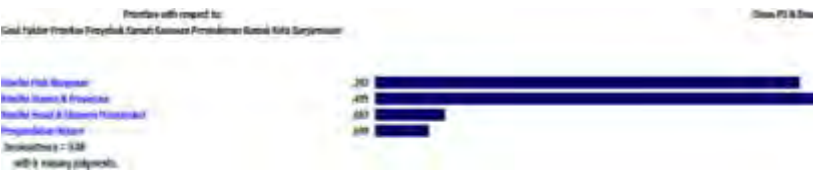
*Sumber: Hasil Analisa, 2016*

Menurut hasil analisa AHP (*Analytic Hierarchy Process*) diatas, diketahui bahwa indikator penyebab kumuh dari faktor pengendalian hukum yang memiliki prioritas penyebab paling tinggi pemerintah menurut Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Banjarmasin adalah variabel tingkat pengetahuan dan kesadaran hukum dengan nilai bobot 0,500 serta pengawasan tanah kurang ketat memiliki nilai bobot 0,500. Dari nilai yang diperoleh pembobotan sama besar antar variabel. Dikarenakan kurangnya sosialisasi terhadap perundang-undangan penataan ruang serta kesadaran peran masyarakat dalam perencanaan

memiliki nilai sama dengan kurangnya penegakan hukum dalam pelanggaran pemanfaatan ruang khususnya permukiman.

**4.3.1.4 Hasil analisa faktor prioritas penyebab kumuh pada kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin Berdasarkan Dinas PU & Bina Marga**

Menurut kelembagaan pemerintah memiliki perspektif berbeda dalam menilai faktor prioritas penyebab kumuh. Penilaian tersebut diperoleh dari pemerintah melalui Dinas PU & Bina Marga Kota Banjarmasin yang berorientasi pada pelayanan dan pengawasan infrastruktur jaringan jalan skala Kota Banjarmasin.



**Gambar 4.45** Nilai Bobot *Analysis Hierarchy Process* Faktor Prioritas Penyebab Kumuh Berdasarkan Dinas PU & Bina Marga  
*Sumber: Hasil Ekspert Choice , 2016*

**Tabel 4.50** Tingkatan Bobot Faktor Prioritas Penyebab Kumuh Berdasarkan Dinas PU & Bina Marga

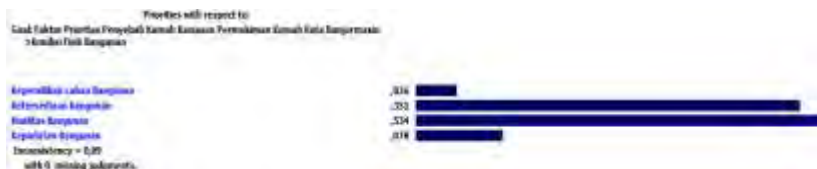
No.	Indikator	Bobot Indikator
1.	Kondisi Sarana dan Prasarana	0,495
2.	Kondisi Fisik Bangunan	0,393
3.	Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat	0,063
4.	Pengendalian Hukum	0,049
Jumlah Bobot		1

*Sumber: Hasil Analisa, 2016*

Berdasarkan hasil analisa AHP diatas, diketahui bahwa indikator penyebab kumuh pada kawasan permukiman kumuh yang memiliki prioritas paling tinggi berdasarkan Dinas PU & Bina Marga Kota Banjarmasin adalah indikator kondisi sarana dan prasarana dengan bobot 0,495; kemudian kondisi fisik bangunan dengan bobot 0,393; kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dengan bobot 0,063; dan pengendalian hukum dengan bobot 0,049. Dari hasil tersebut diperoleh indikator faktor prioritas paling tinggi penyebab kumuh sebesar 49.5% yaitu kondisi sarana dan prasarana di permukiman kumuh. Faktor tersebut dinilai atas dasar masih kurangnya sarana dan prasarana khususnya jaringan jalan hal tersebut sesuai dengan orientasi bidang stakeholder.

### 1. Kondisi Fisik Bangunan

Dilihat dari nilai pembobotan faktor prioritas penyebab kumuh. Kondisi fisik bangunan memiliki nilai bobot 0,393 dengan presentase prioritas (39.3%). Dari faktor penyebab kumuh berdasarkan indikator kondisi fisik bangunan diperjelas atas dasar variabel kepemilikan lahan bangunan, ketersediaan bangunan, kualitas bangunan serta kepadatan bangunan. Variabel tersebut menjadi parameter dalam indikator kondisi fisik bangunan yang menyebabkan kumuh.



**Gambar 4.46** Nilai Bobot *Analysis Hierarchy Process* Faktor Kondisi Fisik Bangunan Berdasarkan Dinas PU & Bina Marga

*Sumber: Hasil Ekspert Choice , 2016*

**Tabel 4.51** Tingkatan Bobot Variabel Kondisi Fisik Bangunan Berdasarkan Dinas PU & Bina Marga Kota Banjarmasin

No.	Variabel	Bobot Variabel
1.	Kondisi Fisik Bangunan	0,393
a.	Kepemilikan Lahan Bangunan	0,036
b.	Ketersediaan Bangunan	0,351
c.	Kualitas Bangunan	0,534
d.	Kepadatan Bangunan	0,078

*Sumber: Hasil Analisa, 2016*

Menurut hasil analisa AHP (*Analytic Hierarchy Process*) diatas, diketahui bahwa indikator penyebab kumuh atas kondisi fisik bangunan yang memiliki prioritas paling tinggi dari pemerintah menurut Dinas PU & Bina Marga Kota Banjarmasin adalah indikator kepadatan bangunan 0,078; ketersediaan bangunan 0,351; kualitas bangunan 0,534; kepemilikan lahan bangunan 0,036. Dari variabel kualitas bangunan yang memiliki bobot tinggi yaitu 0,534 dengan presentase (53.4%). Kualitas bangunan memiliki dampak prioritas penyebab kumuh di kawasan permukiman kumuh. Dinilai dari jenis material bangunan dari mulai lantai, dinding, atap, dan pencahayaan. Agar mengukur seberapa baik kualitas bangunan yang telah ada.

## **2. Kondisi Sarana dan Prasarana**

Menurut hasil dari pembobotan faktor prioritas penyebab kumuh. Kondisi sarana dan prasarana memiliki nilai bobot 0,495 dengan presentase prioritas (49.5%). Dari faktor penyebab kumuh berdasarkan indikator kondisi sarana dan prasarana diukur dengan variabel kualitas sarana & prasarana serta ketersediaan sarana & prasarana. Variabel dinilai dari kualitas fisik bangunan fasilitas sarana & prasarana yang sudah layak bagi pelayanan di kawasan permukiman kumuh serta ketersediaan sarana & prasarana dalam memenuhi kebutuhan

masyarakat sesuai standar pelayanan minimum fasilitas. Variabel tersebut menjadi parameter dalam indikator kondisi sarana dan prasarana yang menyebabkan kumuh.



**Gambar 4.47** Nilai Bobot *Analysis Hierarchy Process* Faktor Kondisi Sarana & Prasarana Berdasarkan Dinas PU & Bina Marga  
*Sumber: Hasil Ekspert Choice , 2016*

**Tabel 4.52** Tingkatan Bobot Variabel Kondisi Sarana dan Prasarana Berdasarkan Dinas PU & Bina Marga Kota Banjarmasin

No.	Variabel	Bobot Variabel
1.	Kondisi Sarana dan Prasarana	0,495
a.	Ketersediaan Sarana dan Prasarana	0,800
b.	Kualitas Sarana dan Prasarana	0,200

*Sumber: Hasil Analisa, 2016*

Menuru hasil analisa AHP (*Analytic Hierarchy Process*) diatas, diketahui bahwa indikator penyebab kumuh terkait kondisi sarana dan prasarana yang memiliki prioritas paling tinggi pemerintah menurut Dinas PU & Bina Marga Kota Banjarmasin adalah variabel ketersediaan sarana dan prasarana dengan nilai bobot 0,800 serta untuk kualitas sarana dan prasarana memiliki nilai bobot 0,200. Ketersediaan sarana dan prasarana memiliki presentase 80% sebagai variabel prioritas penyebab utama munculnya permukiman kumuh menurut Dinas PU & Bina Marga Kota Banjarmasin. Disebabkan ketersediaan sarana dan prasarana dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas-fasilitas seperti pendidikan, kesehatan,

peribadatan, perdagangan jasa, rekreasi dan olahraga masih kurang di kawasan permukiman kumuh.

### 3. Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat

Dilihat dari pembobotan faktor prioritas penyebab kumuh. Kondisi sosial dan ekonomi memiliki nilai bobot 0,063 dengan presentase prioritas (6.3%). Dari faktor penyebab kumuh berdasarkan indikator kondisi sosial dan ekonomi masyarakat diperjelas atas dasar variabel pendapatan penghasilan penduduk, tingkat pendidikan, tingkat arus migrasi dan kepadatan penduduk. Variabel tersebut menjadi parameter indikator kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang menyebabkan kumuh.



**Gambar 4.48** Nilai Bobot *Analysis Hierarchy Process* Faktor Kondisi Sosial & Ekonomi Masyarakat Berdasarkan Dinas PU & Bina Marga

*Sumber: Hasil Ekspert Choice , 2016*

**Tabel 4.53** Tingkatan Bobot Variabel Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat Berdasarkan Dinas PU & Bina Marga Kota Banjarmasin

No.	Variabel	Bobot Variabel
1.	Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat	0,063
a.	Pendapatan Penghasilan Penduduk	0,463
b.	Tingkat Pendidikan	0,159
c.	Tingkat Arus Migrasi	0,040
d.	Kepadatan Penduduk	0,338

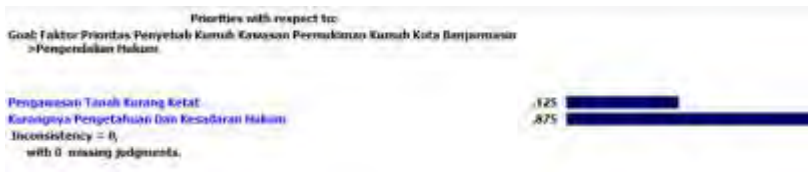
*Sumber: Hasil Analisa, 2016*



Menurut hasil analisa AHP (*Analytic Hierarchy Process*) diatas, diketahui bahwa indikator penyebab kumuh terkait kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang memiliki prioritas paling tinggi pemerintah menurut Dinas PU & Bina Marga Kota Banjarmasin adalah variabel pendapatan penghasilan penduduk 0,463; tingkat pendidikan 0,159; tingkat arus migrasi 0,040; serta kepadatan penduduk 0,338. Dari hasil analisa variabel pendapatan penghasilan penduduk yang memiliki bobot tinggi yaitu 0,463 dengan presentase (46.3%). Pendapatan penghasilan penduduk memiliki peran sebagai prioritas penyebab utama munculnya permukiman kumuh. Dimana pendapatan penghasilan penduduk dibawah rata-rata UMR Kota Banjarmasin memicu kondisi ekonomi yang rendah menurut stakeholder.

#### **4. Pengendalian Hukum**

Hasil dari pembobotan faktor prioritas penyebab kumuh. Pengendalian Hukum memiliki nilai bobot 0,049 dengan presentase prioritas (4.9%). Dari faktor penyebab kumuh berdasarkan indikator pengendalian hukum diperjelas atas dasar variabel pengawasan tanah kurang ketat serta tingkat pengetahuan dan kesadaran hukum. Variabel tersebut menjadi parameter indikator pengendalian hukum yang menyebabkan kumuh.



**Gambar 4.49** Nilai Bobot *Analysis Hierarchy Process* Faktor Kondisi Pengendalian Hukum Berdasarkan Dinas PU & Bina Marga  
*Sumber: Hasil Ekspert Choice , 2016*

**Tabel 4.54** Tingkatan Bobot Variabel Pengendalian Hukum Berdasarkan Dinas PU & Bina Marga Kota Banjarmasin

No.	Variabel	Bobot Variabel
1.	Pengendalian Hukum	0,049
a.	Pengawasan Tanah Kurang Ketat	0,125
b.	Tingkat Pengetahuan dan Kesadaran Hukum	0,875

*Sumber: Hasil Analisa, 2016*

Menurut hasil analisa AHP (*Analytic Hierarchy Process*) diatas, diketahui bahwa indikator penyebab kumuh dari faktor pengendalian hukum yang memiliki prioritas penyebab paling tinggi pemerintah menurut Dinas PU & Bina Marga Kota Banjarmasin adalah variabel tingkat pengetahuan dan kesadaran hukum dengan nilai bobot 0,875 serta pengawasan tanah kurang ketat memiliki nilai bobot 0,125. Tingkat pengetahuan dan kesadaran hukum memiliki prioritas penyebab utama munculnya permukiman kumuh menurut Dinas PU & Bina Marga Kota Banjarmasin. Dikarenakan kurangnya sosialisasi terhadap perundang-undangan penataan ruang serta kesadaran peran masyarakat dalam perencanaan khususnya permukiman.

#### 4.3.1.5 Hasil analisa faktor prioritas penyebab kumuh pada kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin Berdasarkan Kelurahan Belitung Selatan

Berawal dari kelembagaan pemerintah memiliki perspektif berbeda dalam menilai faktor prioritas penyebab kumuh. Penilaian tersebut diperoleh dari pemerintah melalui Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin yang berorientasi pengawas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat khususnya di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin.



**Gambar 4.50** Nilai Bobot *Analysis Hierarchy Process* Faktor Prioritas Penyebab Kumuh Berdasarkan Kelurahan Belitung Selatan  
*Sumber: Hasil Ekspert Choice , 2016*

**Tabel 4.55** Tingkatan Bobot Faktor Prioritas Penyebab Kumuh Berdasarkan Kelurahan Belitung Selatan

No.	Indikator	Bobot Indikator
1.	Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat	0,559
2.	Kondisi Fisik Bangunan	0,284
3.	Pengendalian Hukum	0,106
4.	Kondisi Sarana dan Prasarana	0,051
<b>Jumlah Bobot</b>		<b>1</b>

*Sumber: Hasil Analisa, 2016*

Berdasarkan hasil analisa AHP diatas, diketahui bahwa indikator penyebab kumuh pada kawasan permukiman kumuh yang memiliki prioritas paling tinggi berdasarkan Kelurahan

Belitung Selatan adalah indikator kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dengan bobot 0,559; kemudian kondisi fisik bangunan dengan bobot 0,284; pengendalian hukum dengan bobot 0,106; dan kondisi sarana dan prasarana dengan bobot 0,051. Dari pembobotan hasil tersebut diperoleh indikator faktor prioritas paling tinggi penyebab kumuh sebesar 55.9% yaitu kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di permukiman kumuh.

### 1. Kondisi Fisik Bangunan

Dilihat dari nilai pembobotan faktor prioritas penyebab kumuh. Kondisi fisik bangunan memiliki nilai bobot 0,284 dengan presentase prioritas (28.4%). Dari faktor penyebab kumuh berdasarkan indikator kondisi fisik bangunan diperjelas atas dasar variabel kepemilikan lahan bangunan, ketersediaan bangunan, kualitas bangunan serta kepadatan bangunan. Variabel tersebut menjadi parameter dalam indikator kondisi fisik bangunan yang menyebabkan kumuh.



**Gambar 4.51** Nilai Bobot *Analysis Hierarchy Process* Faktor Kondisi Fisik Bangunan Berdasarkan Kelurahan Belitung Selatan  
*Sumber: Hasil Ekspert Choice, 2016*

**Tabel 4.56** Tingkatan Bobot Variabel Kondisi Fisik Bangunan Berdasarkan Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin

No.	Variabel	Bobot Variabel
1.	Kondisi Fisik Bangunan	0,284
a.	Kepemilikan Lahan Bangunan	0,038
b.	Ketersediaan Bangunan	0,109

No.	Variabel	Bobot Variabel
c.	Kualitas Bangunan	0,230
d.	Kepadatan Bangunan	0,623

*Sumber: Hasil Analisa, 2016*

Menurut hasil analisa AHP (*Analytic Hierarchy Process*) diatas, diketahui bahwa indikator penyebab kumuh atas kondisi fisik bangunan yang memiliki prioritas paling tinggi dari pemerintah menurut Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin adalah indikator kepadatan bangunan 0,623; ketersediaan bangunan 0,109; kualitas bangunan 0,230; kepemilikan lahan bangunan 0,038. Dari variabel kepadatan bangunan yang memiliki bobot tinggi yaitu 0,623 dengan presentase (62,3%). Kepadatan bangunan memiliki dampak prioritas penyebab kumuh di kawasan permukiman kumuh. Dinilai dari jarak antar bangunan serta jumlah bangunan per luas wilayah keseluruhan. Dari parameter tersebut terlihat nilai kepadatan bangunan di kawasan permukiman kumuh.

## **2. Kondisi Sarana dan Prasarana**

Menurut hasil dari pembobotan faktor prioritas penyebab kumuh. Kondisi sarana dan prasarana memiliki nilai bobot 0,051 dengan presentase prioritas (5.1%). Dari faktor penyebab kumuh berdasarkan indikator kondisi sarana dan prasarana diukur dengan variabel kualitas sarana & prasarana serta ketersediaan sarana & prasarana. Variabel dinilai dari kualitas fisik bangunan fasilitas sarana & prasarana yang sudah layak bagi pelayanan di kawasan permukiman kumuh serta ketersediaan sarana & prasarana dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai standar pelayanan minimum fasilitas. Variabel tersebut menjadi parameter dalam indikator kondisi sarana dan prasarana yang menyebabkan kumuh.



**Gambar 4.52** Nilai Bobot *Analysis Hierarchy Process* Faktor Kondisi Sarana & Prasarana Berdasarkan Kelurahan Belitung Selatan

*Sumber: Hasil Ekspert Choice ,2016*

**Tabel 4.57** Tingkatan Bobot Variabel Kondisi Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin

No.	Variabel	Bobot Variabel
1.	Kondisi Sarana dan Prasarana	0,051
a.	Ketersediaan Sarana dan Prasarana	0,125
b.	Kualitas Sarana dan Prasarana	0,875

*Sumber: Hasil Analisa, 2016*

Menurut hasil analisa AHP (*Analytic Hierarchy Process*) diatas, diketahui bahwa indikator penyebab kumuh terkait kondisi sarana dan prasarana yang memiliki prioritas paling tinggi pemerintah menurut Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin adalah variabel ketersediaan sarana dan prasarana dengan nilai bobot 0,125 serta untuk kualitas sarana dan prasarana memiliki nilai bobot 0,875. Variabel kualitas sarana dan prasarana memiliki presentase 87,5% sebagai prioritas penyebab utama munculnya permukiman kumuh menurut Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin. Diperjelas kualitas fisik bangunan fasilitas serta pelayanan publik sarana dan prasarana fasilitas masih kurang baik di kawasan permukiman kumuh.

### 3. Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat

Dilihat dari pembobotan faktor prioritas penyebab kumuh. Kondisi sosial dan ekonomi memiliki nilai bobot 0,559 dengan presentase prioritas (55.9%). Dari faktor penyebab kumuh berdasarkan indikator kondisi sosial dan ekonomi masyarakat diperjelas atas dasar variabel pendapatan penghasilan penduduk, tingkat pendidikan, tingkat arus migrasi dan kepadatan penduduk. Variabel tersebut menjadi parameter indikator kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang menyebabkan kumuh.



**Gambar 4.53** Nilai Bobot *Analysis Hierarchy Process* Faktor Kondisi Sosial & Ekonomi Masyarakat Berdasarkan Kelurahan Belitung Selatan

*Sumber: Hasil Ekspert Choice, 2016*

**Tabel 4.58** Tingkatan Bobot Variabel Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat Berdasarkan Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin

No.	Variabel	Bobot Variabel
1.	Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat	0,559
a.	Pendapatan Penghasilan Penduduk	0,651
b.	Tingkat Pendidikan	0,053
c.	Tingkat Arus Migrasi	0,246
d.	Kepadatan Penduduk	0,050

*Sumber: Hasil Analisa, 2016*

Menurut hasil analisa AHP (*Analytic Hierarchy Process*) diatas, diketahui bahwa indikator penyebab kumuh terkait kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang memiliki prioritas paling tinggi pemerintah menurut Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin adalah variabel pendapatan penghasilan penduduk 0,651; tingkat pendidikan 0,053; tingkat arus migrasi 0,246; serta kepadatan penduduk 0,050. Dari hasil analisa variabel pendapatan penghasilan penduduk yang memiliki bobot tinggi yaitu 0,651 dengan presentase (65.1%). Pendapatan penghasilan penduduk memiliki peran sebagai prioritas penyebab utama munculnya permukiman kumuh. Dimana pendapatan penghasilan penduduk dibawah rata-rata UMR memicu kondisi ekonomi yang rendah menurut stakeholder.

#### 4. Pengendalian Hukum

Hasil dari pembobotan faktor prioritas penyebab kumuh. Pengendalian Hukum memiliki nilai bobot 0,106 dengan presentase prioritas (10.6%). Dari faktor penyebab kumuh berdasarkan indikator pengendalian hukum diperjelas atas dasar variabel pengawasan tanah kurang ketat serta tingkat pengetahuan dan kesadaran hukum. Variabel tersebut menjadi parameter indikator pengendalian hukum yang menyebabkan kumuh.



**Gambar 4.54** Nilai Bobot *Analysis Hierarchy Process* Faktor Kondisi Pengendalian Hukum Masyarakat Berdasarkan Kelurahan Belitung Selatan



*Sumber: Hasil Ekspert Choice ,2016*

**Tabel 4.59** Tingkatan Bobot Variabel Pengendalian Hukum Berdasarkan Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin

No.	Variabel	Bobot Variabel
1.	Pengendalian Hukum	0,106
a.	Pengawasan Tanah Kurang Ketat	0,125
b.	Tingkat Pengetahuan dan Kesadaran Hukum	0,875

*Sumber: Hasil Analisa, 2016*

Menurut hasil analisa AHP (*Analytic Hierarchy Process*) diatas, diketahui bahwa indikator penyebab kumuh dari faktor pengendalian hukum yang memiliki prioritas penyebab paling tinggi pemerintah menurut Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin adalah variabel tingkat pengetahuan dan kesadaran hukum dengan nilai bobot 0,875 serta pengawasan tanah kurang ketat memiliki nilai bobot 0,125. Tingkat pengetahuan dan kesadaran hukum memiliki prioritas penyebab utama munculnya permukiman kumuh menurut Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin. Dikarenakan kurangnya sosialisasi terhadap perundang-undangan penataan ruang serta kesadaran peran masyarakat dalam perencanaan khususnya permukiman.

#### **4.3.2 Analisis faktor prioritas penyebab kumuh pada kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin Berdasarkan Stakeholder Akademisi**

Dalam menganalisis untuk menentukan faktor prioritas penyebab kumuh diperlukan analisa stakeholder untuk memperoleh ekspert yang akan menentukan prioritas faktor berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruh dalam penentuan faktor prioritas penyebab kumuh. Dilakukan oleh pakar dalam

bidang perumahan dan permukiman yang menjadi responden dan tingkat kepentingannya dalam analisa Indikator faktor prioritas penyebab kumuh di Kelurahan Belitung Selatan berdasarkan analisa stakeholder dari akademisi.



**Gambar 4.55** Nilai Bobot *Analysis Hierarchy Process* Faktor Prioritas Penyebab Kumuh Berdasarkan Akademisi  
*Sumber: Hasil Ekspert Choice , 2016*

**Tabel 4.60** Tingkatan Bobot Faktor Prioritas Penyebab Kumuh Berdasarkan Stakeholder Akademisi Bidang Perumahan & Permukiman

No.	Indikator	Bobot Indikator
1.	Kondisi Fisik Bangunan	0,519
2.	Pengendalian Hukum	0,211
3.	Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat	0,158
4.	Kondisi Sarana dan Prasarana	0,112
<b>Jumlah Bobot</b>		<b>1</b>

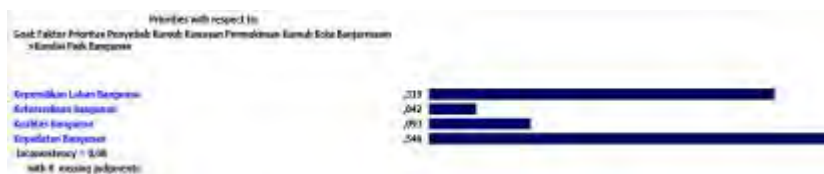
*Sumber: Hasil Analisa, 2016*

Berdasarkan hasil analisa AHP (*Analytic Hierarchy Process*) diatas, diketahui bahwa indikator penyebab kumuh pada kawasan permukiman kumuh yang memiliki prioritas paling tinggi berdasarkan *Stakeholder* Akademisi Bidang Perumahan dan Permukiman adalah indikator kondisi fisik bangunan dengan bobot 0,519; kemudian pengendalian hukum dengan bobot 0,211; kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dengan bobot 0,158; dan kondisi sarana dan prasarana dengan bobot 0,112. Dari hasil tersebut diperoleh indikator faktor

prioritas paling tinggi penyebab kumuh sebesar 51.9% yaitu kondisi fisik bangunan di permukiman kumuh.

### 1. Kondisi Fisik Bangunan

Dilihat dari nilai pembobotan faktor prioritas penyebab kumuh. Kondisi fisik bangunan memiliki nilai bobot 0,519 dengan presentase prioritas (51.9%). Dari faktor penyebab kumuh berdasarkan indikator kondisi fisik bangunan diperjelas atas dasar variabel kepemilikan lahan bangunan, ketersediaan bangunan, kualitas bangunan serta kepadatan bangunan. Variabel tersebut menjadi parameter dalam indikator kondisi fisik bangunan yang menyebabkan kumuh.



**Gambar 4.56** Nilai Bobot *Analysis Hierarchy Process* Faktor Kondisi Fisik Bangunan Berdasarkan Akademisi

*Sumber: Hasil Ekspert Choice , 2016*

**Tabel 4.61** Tingkatan Bobot Variabel Kondisi Fisik Bangunan Berdasarkan Akademisi Bidang Perumahan dan Permukiman

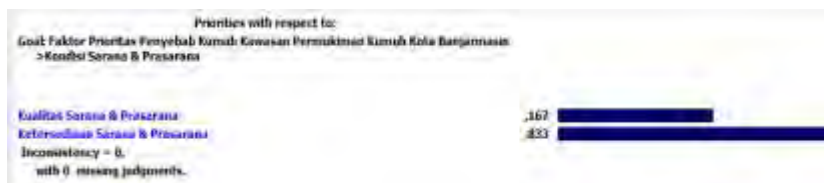
No.	Variabel	Bobot Variabel
1.	Kondisi Fisik Bangunan	0,519
a.	Kepemilikan Lahan Bangunan	0,319
b.	Ketersediaan Bangunan	0,042
c.	Kualitas Bangunan	0,093
d.	Kepadatan Bangunan	0,546

*Sumber: Hasil Analisa, 2016*

Menurut hasil analisa AHP (*Analytic Hierarchy Process*) diatas, diketahui bahwa indikator penyebab kumuh atas kondisi fisik bangunan yang memiliki prioritas paling tinggi dari Akademisi menurut Bidang Perumahan dan Permukiman adalah indikator kepadatan bangunan 0,546; ketersediaan bangunan 0,042; kualitas bangunan 0,093; kepemilikan lahan bangunan 0,319. Dari variabel kepadatan bangunan yang memiliki bobot tinggi yaitu 0,546 dengan presentase (54.6%). Kepadatan bangunan memiliki dampak prioritas penyebab kumuh di kawasan permukiman kumuh. Dinilai dari jarak antar bangunan serta jumlah bangunan per luas wilayah keseluruhan. Dari parameter tersebut terlihat nilai bobot kepadatan bangunan di kawasan permukiman kumuh.

## **2. Kondisi Sarana dan Prasarana**

Menurut hasil dari pembobotan faktor prioritas penyebab kumuh. Kondisi sarana dan prasarana memiliki nilai bobot 0,112 dengan presentase prioritas (11.2%). Dari faktor penyebab kumuh berdasarkan indikator kondisi sarana dan prasarana diukur dengan variabel kualitas sarana & prasarana serta ketersediaan sarana & prasarana. Variabel dinilai dari kualitas fisik bangunan fasilitas sarana & prasarana yang sudah layak bagi pelayanan di kawasan permukiman kumuh serta ketersediaan sarana & prasarana dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai standar pelayanan minimum fasilitas. Variabel tersebut menjadi parameter dalam indikator kondisi sarana dan prasarana yang menyebabkan kumuh.



**Gambar 4.57** Nilai Bobot *Analysis Hierarchy Process* Faktor Kondisi Sarana dan Prasarana Berdasarkan Akademisi  
*Sumber: Hasil Ekspert Choice , 2016*

**Tabel 4.62** Tingkatan Bobot Variabel Kondisi Sarana dan Prasarana Berdasarkan Akademisi Bidang Perumahan dan Permukiman

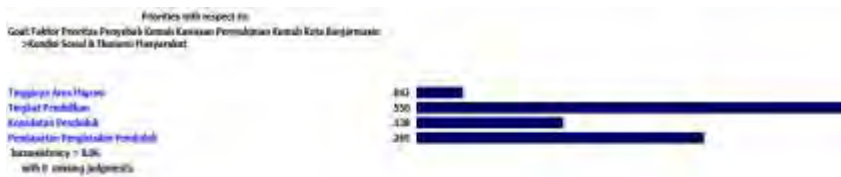
No.	Variabel	Bobot Variabel
1.	Kondisi Sarana dan Prasarana	0,112
a.	Ketersediaan Sarana dan Prasarana	0,833
b.	Kualitas Sarana dan Prasarana	0,167

*Sumber: Hasil Analisa, 2016*

Menurut hasil analisa AHP (*Analytic Hierarchy Process*) diatas, diketahui bahwa indikator penyebab kumuh terkait kondisi sarana dan prasarana yang memiliki prioritas cukup penting Akademisi menurut Bidang Perumahan dan Permukiman adalah variabel ketersediaan sarana dan prasarana dengan nilai bobot 0,833 serta untuk kualitas sarana dan prasarana memiliki nilai bobot 0,167. Ketersediaan sarana dan prasarana memiliki presentase 83.3% sebagai variabel prioritas penyebab utama munculnya permukiman kumuh menurut Akademisi Bidang Perumahan dan Permukiman. Disebabkan ketersediaan sarana dan prasarana dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas-fasilitas seperti pendidikan, kesehatan, peribadatan, perdagangan jasa, rekreasi dan olahraga masih kurang di kawasan permukiman kumuh.

### **3. Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat**

Dilihat dari pembobotan faktor prioritas penyebab kumuh. Kondisi sosial dan ekonomi memiliki nilai bobot 0,158 dengan presentase prioritas (15.8%). Dari faktor penyebab kumuh berdasarkan indikator kondisi sosial dan ekonomi masyarakat diperjelas atas dasar variabel pendapatan penghasilan penduduk, tingkat pendidikan, tingkat arus migrasi dan kepadatan penduduk. Variabel tersebut menjadi parameter indikator kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang menyebabkan kumuh.



**Gambar 4.58** Nilai Bobot *Analysis Hierarchy Process* Faktor Kondisi Sosial & Ekonomi Masyarakat Berdasarkan Akademisi  
*Sumber: Hasil Ekspert Choice , 2016*

**Tabel 4.63** Tingkatan Bobot Variabel Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat Berdasarkan Akademisi Bidang Perumahan dan Permukiman

No.	Variabel	Bobot Variabel
1.	Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat	0,158
a.	Pendapatan Penghasilan Penduduk	0,269
b.	Tingkat Pendidikan	0,550
c.	Tingkat Arus Migrasi	0,042
d.	Kepadatan Penduduk	0,138

*Sumber: Hasil Analisa, 2016*

Menurut hasil analisa AHP (*Analytic Hierarchy Process*) diatas, diketahui bahwa indikator penyebab kumuh terkait

kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang memiliki prioritas paling tinggi Akademisi menurut Bidang Perumahan dan Permukiman adalah variabel pendapatan penghasilan penduduk 0,269; tingkat pendidikan 0,550; tingkat arus migrasi 0,042; serta kepadatan penduduk 0,138. Dari hasil analisa variabel tingkat pendidikan yang memiliki bobot tinggi yaitu 0,550 dengan presentase (55.0%). Tingkat pendidikan memiliki pengaruh terhadap pengetahuan dan sikap masyarakat di lingkungan permukiman. Rendahnya tingkat pendidikan akan berdampak pada pola pikir dan kegiatan antar masyarakat atau terhadap lingkungan sekitar menurut stakeholder.

#### 4. Pengendalian Hukum

Hasil dari pembobotan faktor prioritas penyebab kumuh. Pengendalian Hukum memiliki nilai bobot 0,211 dengan presentase prioritas (21.1%). Dari faktor penyebab kumuh berdasarkan indikator pengendalian hukum diperjelas atas dasar variabel pengawasan tanah kurang ketat serta tingkat pengetahuan dan kesadaran hukum. Variabel tersebut menjadi parameter indikator pengendalian hukum yang menyebabkan kumuh.



**Gambar 4.59** Nilai Bobot *Analysis Hierarchy Process* Faktor Pengendalian Hukum Berdasarkan Akademisi  
*Sumber: Hasil Ekspert Choice , 2016*

**Tabel 4.64** Tingkatan Bobot Variabel Pengendalian Hukum Berdasarkan Akademisi Bidang Perumahan & Permukiman

No.	Variabel	Bobot Variabel
1.	Pengendalian Hukum	0,211
a.	Pengawasan Tanah Kurang Ketat	0,500
b.	Tingkat Pengetahuan dan Kesadaran Hukum	0,500

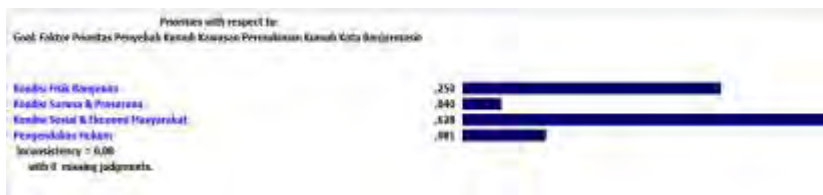
*Sumber: Hasil Analisa, 2016*

Menurut hasil analisa AHP (*Analytic Hierarchy Process*) diatas, diketahui bahwa indikator penyebab kumuh dari faktor pengendalian hukum yang memiliki prioritas penyebab paling tinggi pemerintah menurut Akademisi Bidang Perumahan dan Permukiman adalah variabel tingkat pengetahuan dan kesadaran hukum dengan nilai bobot 0,500 serta pengawasan tanah kurang ketat memiliki nilai bobot 0,500. Dari nilai yang diperoleh pembobotan sama besar antar variabel. Dikarenakan kurangnya sosialisasi terhadap perundang-undangan penataan ruang serta kesadaran peran masyarakat dalam perencanaan memiliki nilai sama dengan kurangnya penegakan hukum dalam pelanggaran pemanfaatan ruang khususnya permukiman.

#### **4.3.3 Analisis faktor prioritas penyebab kumuh pada kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin Berdasarkan Stakeholder Masyarakat**

Menentukan faktor penyebab kumuh diperlukan analisa stakeholder untuk memperoleh ekspert yang akan menentukan prioritas faktor berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruh dalam penentuan penyebab kumuh. Responden masyarakat sebagai yang bertempat tinggal di permukiman kumuh menjadi responden dan tingkat kepentingannya sebagai memberikan masukan dalam penanganan kawasan permukiman kumuh.





**Gambar 4.60** Nilai Bobot *Analysis Hierarchy Process* Faktor Prioritas Penyebab Kumuh Berdasarkan Stakeholder Masyarakat  
*Sumber: Hasil Ekspert Choice , 2016*

**Tabel 4.65** Tingkatan Bobot Faktor Prioritas Penyebab Kumuh Berdasarkan Stakeholder Masyarakat

No.	Indikator	Bobot Indikator
1.	Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat	0,628
2.	Kondisi Fisik Bangunan	0,250
3.	Pengendalian Hukum	0,081
4.	Kondisi Sarana dan Prasarana	0,040
<b>Jumlah Bobot</b>		<b>1</b>

*Sumber: Hasil Analisa, 2016*

Berdasarkan hasil analisa AHP diatas, diketahui bahwa indikator penyebab kumuh pada kawasan permukiman kumuh yang memiliki prioritas paling tinggi berdasarkan *Stakeholder* Masyarakat adalah indikator kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dengan bobot 0,628; kemudian kondisi fisik bangunan dengan bobot 0,250; pengendalian hukum dengan bobot 0,081; dan kondisi sarana dan prasarana dengan bobot 0,040. Dari pembobotan hasil tersebut diperoleh indikator faktor prioritas paling tinggi penyebab kumuh sebesar 62.8% yaitu kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di permukiman kumuh.

## 1. Kondisi Fisik Bangunan

Dilihat dari nilai pembobotan faktor prioritas penyebab kumuh. Kondisi fisik bangunan memiliki nilai bobot 0,250 dengan presentase prioritas (25.0%). Dari faktor penyebab kumuh berdasarkan indikator kondisi fisik bangunan diperjelas atas dasar variabel kepemilikan lahan bangunan, ketersediaan bangunan, kualitas bangunan serta kepadatan bangunan. Variabel tersebut menjadi parameter dalam indikator kondisi fisik bangunan yang menyebabkan kumuh.



**Gambar 4.61** Nilai Bobot *Analysis Hierarchy Process* Faktor Kondisi Fisik Bangunan Berdasarkan Stakeholder Masyarakat  
*Sumber: Hasil Ekspert Choice ,2016*

**Tabel 4.66** Tingkatan Bobot Variabel Fisik Bangunan Berdasarkan Stakeholder Masyarakat

No.	Variabel	Bobot Variabel
1.	Kondisi Fisik Bangunan	0,250
a.	Kepemilikan Lahan Bangunan	0,188
b.	Ketersediaan Bangunan	0,039
c.	Kualitas Bangunan	0,662
d.	Kepadatan Bangunan	0,111

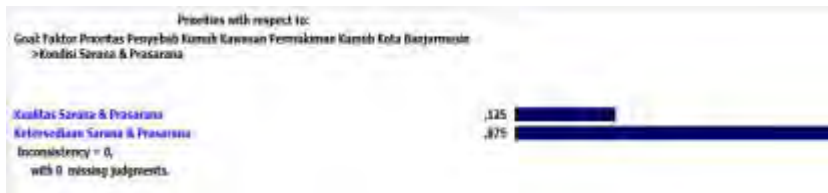
*Sumber: Hasil Analisa, 2016*

Menurut hasil analisa AHP (*Analytic Hierarchy Process*) diatas, diketahui bahwa indikator penyebab kumuh atas kondisi fisik bangunan yang memiliki prioritas paling tinggi menurut Masyarakat Kelurahan Belitung Selatan adalah indikator kualitas bangunan 0,662; kepadatan bangunan 0,111; kepemilikan lahan bangunan 0,188; dan ketersediaan bangunan 0,039. Dari variabel kualitas bangunan yang memiliki bobot tinggi yaitu 0,662 dengan presentase (66.2%). Kualitas bangunan memiliki dampak prioritas penyebab kumuh di kawasan permukiman kumuh. Dinilai dari jenis material bangunan dari mulai lantai, dinding, atap, dan pencahayaan. Parameter penilaian tersebut Agar mengukur kualitas bangunan yang telah ada.

## **2. Kondisi Sarana dan Prasarana**

Menurut hasil dari pembobotan faktor prioritas penyebab kumuh. Kondisi sarana dan prasarana memiliki nilai bobot 0,040 dengan presentase prioritas (4.0%). Dari faktor penyebab kumuh berdasarkan indikator kondisi sarana dan prasarana diukur dengan variabel kualitas sarana & prasarana serta ketersediaan sarana & prasarana. Variabel dinilai dari kualitas fisik bangunan fasilitas sarana & prasarana yang sudah layak bagi pelayanan di kawasan permukiman kumuh serta ketersediaan sarana &

prasarana dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai standar pelayanan minimum fasilitas. Variabel tersebut menjadi parameter dalam indikator kondisi sarana dan prasarana yang menyebabkan kumuh.



**Gambar 4.62** Nilai Bobot *Analysis Hierarchy Process* Faktor Kondisi Sarana dan Prasarana Berdasarkan Stakeholder Masyarakat  
*Sumber: Hasil Ekspert Choice, 2016*

**Tabel 4.67** Tingkatan Bobot Variabel Kondisi Sarana dan Prasarana Berdasarkan Stakeholder Masyarakat

No.	Variabel	Bobot Variabel
1.	Kondisi Sarana dan Prasarana	0,040
a.	Ketersediaan Sarana dan Prasarana	0,875
b.	Kualitas Sarana dan Prasarana	0,125

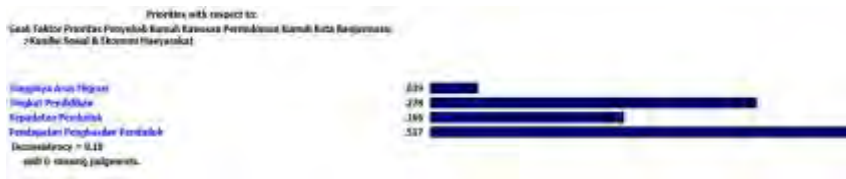
*Sumber: Hasil Analisa, 2016*

Menurut hasil analisa AHP (*Analytic Hierarchy Process*) diatas, diketahui bahwa indikator penyebab kumuh terkait kondisi sarana dan prasarana yang memiliki prioritas paling tinggi menurut Masyarakat Kelurahan Belitung Selatan adalah variabel ketersediaan sarana dan prasarana dengan nilai bobot 0,875 serta untuk kualitas sarana dan prasarana memiliki nilai bobot 0,125. Ketersediaan sarana dan prasarana memiliki presentase 87.5% sebagai variabel prioritas penyebab utama munculnya permukiman kumuh menurut Masyarakat. Disebabkan ketersediaan sarana dan prasarana dalam memenuhi

kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas-fasilitas seperti pendidikan, kesehatan, peribadatan, perdagangan jasa, rekreasi dan olahraga masih kurang di kawasan permukiman kumuh.

### 3. Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat

Dilihat dari pembobotan faktor prioritas penyebab kumuh. Kondisi sosial dan ekonomi memiliki nilai bobot 0,628 dengan presentase prioritas (62.8%). Dari faktor penyebab kumuh berdasarkan indikator kondisi sosial dan ekonomi masyarakat diperjelas atas dasar variabel pendapatan penghasilan penduduk, tingkat pendidikan, tingkat arus migrasi dan kepadatan penduduk. Variabel tersebut menjadi parameter indikator kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang menyebabkan kumuh.



**Gambar 4.63** Nilai Bobot *Analysis Hierarchy Process* Faktor Kondisi Sosial & Ekonomi Masyarakat Berdasarkan Stakeholder Masyarakat

*Sumber: Hasil Ekspert Choice ,2016*

**Tabel 4.68** Tingkatan Bobot Variabel Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat Berdasarkan Stakeholder Masyarakat

No.	Variabel	Bobot Variabel
1.	Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat	0,628
a.	Pendapatan Penghasilan Penduduk	0,517
b.	Tingkat Pendidikan	0,278
c.	Tingkat Arus Migrasi	0,039
d.	Kepadatan Penduduk	0,166

*Sumber: Hasil Analisa, 2016*

Menurut hasil analisa AHP (*Analytic Hierarchy Process*) diatas, diketahui bahwa indikator penyebab kumuh terkait kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang memiliki prioritas paling tinggi pemerintah menurut Masyarakat Kelurahan Belitung Selatan adalah variabel pendapatan penghasilan penduduk 0,517; tingkat pendidikan 0,278; tingkat arus migrasi 0,039; serta kepadatan penduduk 0,166. Dari hasil analisa variabel pendapatan penghasilan penduduk yang memiliki bobot tinggi yaitu 0,517 dengan presentase (51.7%). Pendapatan penghasilan penduduk memiliki peran sebagai prioritas penyebab utama munculnya permukiman kumuh. Dimana pendapatan penghasilan penduduk dibawah rata-rata khususnya UMR Kota Banjarmasin memicu kondisi ekonomi yang rendah menurut stakeholder.

#### 4. Pengendalian Hukum

Hasil dari pembobotan faktor prioritas penyebab kumuh. Pengendalian Hukum memiliki nilai bobot 0,081 dengan presentase prioritas (8.1%). Dari faktor penyebab kumuh berdasarkan indikator pengendalian hukum diperjelas atas dasar variabel pengawasan tanah kurang ketat serta tingkat pengetahuan dan kesadaran hukum. Variabel tersebut menjadi parameter indikator pengendalian hukum yang menyebabkan kumuh.



**Gambar 4.64** Nilai Bobot *Analysis Hierarchy Process* Faktor Pengendalian Hukum Berdasarkan Stakeholder Masyarakat

*Sumber: Hasil Ekspert Choice ,2016*

**Tabel 4.69** Tingkatan Bobot Variabel Pengendalian Hukum Berdasarkan Stakeholder Masyarakat

No.	Variabel	Bobot Variabel
1.	Pengendalian Hukum	0,081
a.	Pengawasan Tanah Kurang Ketat	0,143
b.	Tingkat Pengetahuan dan Kesadaran Hukum	0,857

*Sumber: Hasil Analisa, 2016*

Menurut hasil analisa AHP (*Analytic Hierarchy Process*) diatas, diketahui bahwa indikator penyebab kumuh dari faktor pengendalian hukum yang memiliki prioritas penyebab paling tinggi pemerintah menurut Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin adalah variabel tingkat pengetahuan dan kesadaran hukum dengan nilai bobot 0,857 serta pengawasan tanah kurang ketat memiliki nilai bobot 0,143. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum memiliki prioritas penyebab utama munculnya permukiman kumuh menurut Masyarakat Kelurahan Belitung Selatan. Dikarenakan kurangnya sosialisasi terhadap perundang-undangan penataan ruang serta kesadaran peran masyarakat dalam perencanaan khususnya permukiman.

#### **4.3.4 Hasil faktor prioritas penyebab kumuh pada kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin Berdasarkan Preferensi Keseluruhan Stakeholder**

Menentukan faktor penyebab kumuh diperlukan analisa stakeholder untuk memperoleh ekspert yang akan menentukan prioritas faktor berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruh dalam penentuan penyebab kumuh. Berdasarkan hasil analisa stakeholder dari komponen pemerintah, akademisi/pakar serta perwakilan masyarakat yang bertempat tinggal di permukiman kumuh. Maka dari itu dilakukan kombinasi pembobotan secara

keseluruhan. Terkait faktor prioritas penyebab kumuh di permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin.



**Gambar 4.65** Nilai Bobot *Analysis Hierarchy Process* Faktor Prioritas Penyebab Kumuh Berdasarkan *Combine Stakeholder*  
*Sumber: Hasil Ekspert Choice , 2016*

**Tabel 4.70** Tingkatan Bobot Permukiman Kumuh di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin Berdasarkan Kombinasi Seluruh Stakeholder

No.	Indikator	Bobot Indikator	Prioritas Penyebab Kumuh
1.	Kondisi Fisik Bangunan	0,365	I
2.	Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat	0,270	II
3.	Kondisi Sarana dan Prasarana	0,204	III
4.	Pengendalian Hukum	0,161	IV
<b>Jumlah Bobot</b>		<b>1</b>	

*Sumber: Hasil Analisa, 2016*

Berdasarkan hasil analisa AHP diatas, diketahui bahwa indikator penyebab kumuh pada kawasan permukiman kumuh yang memiliki prioritas paling tinggi berdasarkan Preferensi Keseluruhan *Stakeholder* adalah indikator kondisi fisik bangunan dengan bobot 0,365; kemudian kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dengan bobot 0,270; kondisi sarana dan prasarana dengan bobot 0,204; dan pengendalian hukum dengan bobot 0,161. Menurut hasil pembobotan faktor prioritas utama



penyebab kumuh yaitu kondisi fisik bangunan dengan presentase 36.5%.

1. Kondisi Fisik Bangunan

Dilihat dari pembobotan faktor prioritas penyebab kumuh. Kondisi fisik bangunan memiliki nilai bobot 0,365 dengan presentase prioritas (36.5%). Dari faktor penyebab kumuh berdasarkan indikator kondisi fisik bangunan diperjelas atas dasar variabel kepemilikan lahan bangunan, ketersediaan bangunan, kualitas bangunan serta kepadatan bangunan. Variabel tersebut menjadi parameter dalam indikator kondisi fisik bangunan yang menyebabkan kumuh.



**Gambar 4.66** Nilai Bobot *Analysis Hierarchy Process* Faktor Kondisi Fisik Bangunan Berdasarkan *Combine Stakeholder*  
*Sumber: Hasil Ekspert Choice , 2016*

**Tabel 4.71** Tingkatan Bobot Variabel Fisik Bangunan Berdasarkan Kombinasi Seluruh Stakeholder

No.	Variabel	Bobot Variabel	Prioritas Penyebab Kumuh
1.	Kondisi Fisik Bangunan Bobot Nilai (0,486)		
a.	Kepemilikan Lahan Bangunan	0,163	III
b.	Ketersediaan Bangunan	0,159	IV
c.	Kualitas Bangunan	0,358	I
d.	Kepadatan Bangunan	0,320	II

*Sumber: Hasil Analisa, 2016*

Menurut hasil analisa AHP (*Analytic Hierarchy Process*) diatas, diketahui bahwa indikator penyebab kumuh atas kondisi fisik bangunan yang memiliki prioritas paling tinggi dari menurut pembobotan keseluruhan setakeholder adalah indikator kualitas bangunan 0,358; kepadatan bangunan 0,320; kepemilikan lahan bangunan 0,163; dan ketersediaan bangunan 0,159. Dari variabel kualitas bangunan yang memiliki bobot tinggi yaitu 0,358 dengan presentase (35.8%). Kualitas bangunan memiliki dampak prioritas penyebab kumuh di kawasan permukiman kumuh. Dinilai dari jenis material bangunan dari mulai lantai, dinding, atap, dan pencahayaan. Agar mengukur seberapa baik kualitas bangunan yang telah ada.

## **2. Kondisi Sarana dan Prasarana**

Menurut hasil dari pembobotan faktor prioritas penyebab kumuh. Kondisi sarana dan prasarana memiliki nilai bobot 0,204 dengan presentase prioritas (20.4%). Dari faktor penyebab kumuh berdasarkan indikator kondisi sarana dan prasarana diukur dengan variabel kualitas sarana & prasarana serta ketersediaan sarana & prasarana. Variabel dinilai dari kualitas fisik bangunan fasilitas sarana & prasarana yang sudah layak bagi pelayanan di kawasan permukiman kumuh serta ketersediaan sarana & prasarana dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai standar pelayanan minimum fasilitas. Variabel tersebut menjadi parameter dalam indikator kondisi sarana dan prasarana yang menyebabkan kumuh.



**Gambar 4.67** Nilai Bobot *Analysis Hierarchy Process* Faktor Kondisi Sarana & Prasarana Berdasarkan *Combine Stakeholder*  
*Sumber: Hasil Ekspert Choice , 2016*

**Tabel 4.72** Tingkatan Bobot Variabel Kondisi Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kombinasi Seluruh Stakeholder

No.	Variabel	Bobot Variabel
1.	Kondisi Sarana dan Prasarana Nilai Bobot 0,204	
a.	Ketersediaan Sarana dan Prasarana	0,681
b.	Kualitas Sarana dan Prasarana	0,319

*Sumber: Hasil Analisa, 2016*

Menurut hasil analisa AHP (*Analytic Hierarchy Process*) diatas, diketahui bahwa indikator penyebab kumuh terkait kondisi sarana dan prasarana yang memiliki prioritas paling tinggi menurut pembobotan keseluruhan *stakeholder* adalah variabel ketersediaan sarana dan prasarana dengan nilai bobot 0,681 serta untuk kualitas sarana dan prasarana memiliki nilai bobot 0,319. Ketersediaan sarana dan prasarana memiliki presentase 68.1% sebagai variabel prioritas penyebab utama munculnya permukiman kumuh menurut *Stakeholder*. Disebabkan ketersediaan sarana dan prasarana dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas-fasilitas seperti pendidikan, kesehatan, peribadatan, perdagangan jasa, rekreasi dan olahraga masih kurang di kawasan permukiman kumuh.

### 3. Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat

Dilihat dari pembobotan faktor prioritas penyebab kumuh. Kondisi sosial dan ekonomi memiliki nilai bobot 0,270 dengan presentase prioritas (27.0%). Dari faktor penyebab kumuh berdasarkan indikator kondisi sosial dan ekonomi masyarakat diperjelas atas dasar variabel pendapatan penghasilan penduduk, tingkat pendidikan, tingkat arus migrasi dan kepadatan penduduk. Variabel tersebut menjadi parameter indikator kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang menyebabkan kumuh.



**Gambar 4.68** Nilai Bobot *Analysis Hierarchy Process* Faktor Kondisi Sosial & Ekonomi Masyarakat Berdasarkan *Combine Stakeholder*

*Sumber: Hasil Ekspert Choice ,2016*

**Tabel 4.73** Tingkatan Bobot Variabel Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat Berdasarkan Kombinasi Seluruh Stakeholder

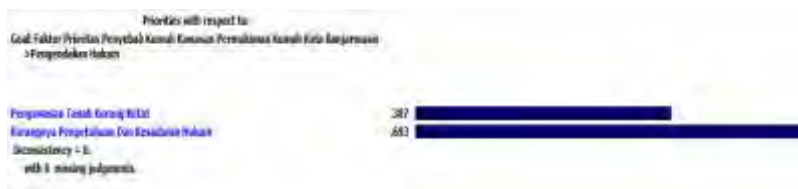
No.	Variabel	Bobot Variabel
1.	Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat Nilai Bobot (0,280)	
a.	Pendapatan Penghasilan Penduduk	0,479
b.	Tingkat Pendidikan	0,222
c.	Tingkat Arus Migrasi	0,093
d.	Kepadatan Penduduk	0,206

*Sumber: Hasil Analisa, 2016*

Menurut hasil analisa AHP (*Analytic Hierarchy Process*) diatas, diketahui bahwa indikator penyebab kumuh terkait kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang memiliki prioritas paling tinggi pemerintah menurut seluruh *stakeholder* adalah variabel pendapatan penghasilan penduduk 0,479; tingkat pendidikan 0,222; tingkat arus migrasi 0,093; serta kepadatan penduduk 0,206. Dari hasil analisa variabel pendapatan penghasilan penduduk yang memiliki bobot tinggi yaitu 0,479 dengan presentase (47.9%). Pendapatan penghasilan penduduk memiliki peran sebagai prioritas penyebab utama munculnya permukiman kumuh. Variabel pendapatan penghasilan penduduk dibawah rata-rata UMR Kota Banjarmasin memicu kondisi ekonomi yang rendah menurut keseluruhan *stakeholder*.

#### 4. Pengendalian Hukum

Hasil dari pembobotan faktor prioritas penyebab kumuh. Pengendalian Hukum memiliki nilai bobot 0,161 dengan presentase prioritas (16.1%). Dari faktor penyebab kumuh berdasarkan indikator pengendalian hukum diperjelas atas dasar variabel pengawasan tanah kurang ketat serta tingkat pengetahuan dan kesadaran hukum. Variabel tersebut menjadi parameter indikator pengendalian hukum yang menyebabkan kumuh.



**Gambar 4.69** Nilai Bobot *Analysis Hierarchy Process* Faktor Pengendalian Hukum Berdasarkan *Combine Stakeholder*  
*Sumber: Hasil Ekspert Choice ,2016*

**Tabel 4.74** Tingkatan Bobot Variabel Pengendalian Hukum Berdasarkan Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin

No.	Variabel	Bobot Variabel
1.	Pengendalian Hukum Nilai Bobot (0,161)	
a.	Pengawasan Tanah Kurang Ketat	0,307
b.	Tingkat Pengetahuan dan Kesadaran Hukum	0,693

*Sumber: Hasil Analisa, 2016*

Menurut hasil analisa AHP (*Analytic Hierarchy Process*) diatas, diketahui bahwa indikator penyebab kumuh dari faktor pengendalian hukum yang memiliki prioritas penyebab paling tinggi pemerintah menurut seluruh *stakeholder* adalah variabel tingkat pengetahuan dan kesadaran hukum dengan nilai bobot 0,693 serta pengawasan tanah kurang ketat memiliki nilai bobot 0,307. Tingkat pengetahuan dan kesadaran hukum memiliki prioritas penyebab utama munculnya permukiman kumuh menurut seluruh *stakeholder*. Dikarenakan kurangnya sosialisasi terhadap perundang-undangan penataan ruang serta kesadaran peran masyarakat dalam perencanaan khususnya permukiman.

#### **4.3.4.1 Hasil analisa variabel yang mempengaruhi faktor prioritas penyebab kumuh pada kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin Berdasarkan Preferensi Keseluruhan Stakeholder**

Berdasarkan hasil analisa para *stakeholder* dinilai melalui pembobotan secara sama dalam faktor prioritas penyebab kumuh. Dimana penilaian tersebut diperoleh dari Indikator dan variabel masing faktor penyebab. Selanjutnya dilakukan pembobotan yang berorientasi pada indikator variabel yang mempengaruhi. Setelah diketahui hasil pembobotan atribut Indikator untuk mengetahui seberapa besar prioritas yang

dimiliki atribut Indikator dalam mencapai tujuan. Hasil pembobotan antar variabel disajikan dalam bentuk tabel berdasarkan hasil penghitungan.



**Gambar 4.70** Nilai Bobot *Analysis Hierarchy Process* Keseluruhan Variabel Penyebab Kumuh Berdasarkan *Combine Stakeholder*  
*Sumber: Hasil Ekspert Choice ,2016*

**Tabel 4.75** Tingkatan Bobot Keseluruhan Variabel Penyebab Kumuh Berdasarkan Kombinasi Seluruh Stakeholder

No	Variabel	Presentase Nilai Bobot
1.	Kualitas Bangunan	17.2%
2.	Kepadatan Bangunan	15.4%
3.	Pendapatan Penghasilan Penduduk	12.8%
4.	Ketersediaan Sarana & Prasarana	9.6%
5.	Kepemilikan Lahan Bangunan	7.8%
6.	Ketersediaan Bangunan	7.7%
7.	Tingkat Pengetahuan Dan Kesadaran Hukum	7.6%
8.	Tingkat Pendidikan	5.9%
9.	Kepadatan Penduduk	5.5%
10.	Kualitas Sarana & Prasarana	4.5%
11.	Pengawasan Tanah Kurang Ketat	3.4%
12.	Tingkat Arus Migrasi	2.5%

*Sumber: Hasil Analisa, 2016*

Dari perhitungan pembobotan melalui analisa AHP (*Analytic Hierarchy Process*) bahwa variabel yang memiliki nilai bobot tertinggi hingga terendah variabel prioritas penyebab kumuh permukiman kumuh di Kelurahan Belitung Selatan adalah sebagai berikut :

**1. Kualitas Bangunan (Nilai bobot 0,172)**

Parameter penilaian kualitas bangunan di kawasan permukiman kumuh yang diukur berdasarkan dengan jenis material bangunan yang digunakan pada bagian lantai, dinding, atap serta ketersediaan sistem pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik pada setiap bangunan. Penilaian tersebut memberikan layak atau tidak layaknya bangunan yang masyarakat huni.

**2. Kepadatan Bangunan (Nilai Bobot 0,154)**

Pengukuran variabel yang dilakukan melihat jarak antar bangunan serta tingkat pertumbuhan bangunan pada setiap kawasan permukiman kumuh. Dimana semakin tinggi pertumbuhan bangunan maka semakin padat suatu kawasan.

**3. Pendapatan Penghasilan Penduduk (Nilai Bobot 0,128)**

Diukur melalui tingkat pendapatan penduduk per kapita dengan dibandingkan UMR skala Kota serta diperjelas berdasarkan jenis pekerjaan yang masyarakat yang akan menggambarkan dari segi kemampuan ekonomi masyarakat di kawasan permukiman kumuh.

**4. Ketersediaan Sarana & Prasarana (Nilai Bobot 0,096)**

Pengukuran parameter melalui ketersediaan sarana dan prasarana dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas-fasilitas seperti pendidikan, kesehatan, peribadatan, perdagangan jasa, rekreasi dan olahraga masih kurang di kawasan permukiman kumuh.



Dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di permukiman kumuh.

5. Kepemilikan Lahan Bangunan (**Nilai 0,078**)

Variabel yang dilihat dari status kepemilikan lahan pada bangunan yang telah didirikan. Mengukur seberapa besar kesesuaian status lahan dengan peruntukan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana di kawasan permukiman kumuh.

6. Ketersediaan Bangunan (**Nilai Bobot 0,077**)

Ketersediaan bangunan dinilai berdasarkan besaran ketersediaan lahan terhadap pemanfaatan lahan yang diperuntukan sebagai kawasan permukiman. Mengukur seberapa besar kebutuhan masyarakat terhadap lahan untuk kawasan permukiman.

7. Tingkat pengetahuan & kesadaran hukum (**Nilai Bobot 0,076**)

Kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum salah satu penyebab munculnya permukiman kumuh dalam faktor pengendalian hukum. Dikarenakan kurangnya sosialisasi perundang-undangan dan rencana tata ruang sebagai pengetahuan masyarakat terhadap penataan ruang serta kesadaran peran masyarakat dalam perencanaan khususnya permukiman.

8. Tingkat Pendidikan (**Nilai Bobot 0,059**)

Tingkat pendidikan memiliki pengaruh terhadap pengetahuan dan sikap masyarakat di lingkungan permukiman. Rendahnya tingkat pendidikan akan berdampak pada pola pikir dan kegiatan antar masyarakat menurunkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Serta berpengaruh pada kondisi ekonomi yang kurang dikarenakan standar pendidikan memiliki pengaruh dalam jenis pekerjaan yang dilakoni oleh masyarakat.

9. **Kepadatan Penduduk (Nilai Bobot 0,055)**

Pembobotan yang berdasarkan oleh tingkat pertumbuhan penduduk serta besaran tingkat kepadatan penduduk per luas wilayah kawasan permukiman kumuh.

10. **Kualitas Sarana & Prasana (Nilai Bobot 0,045)**

Kualitas sarana dan prasarana dinilai dari fisik bangunan fasilitas serta kualitas pelayanan publik sarana dan prasarana masih kurang baik terhadap masyarakat di kawasan permukiman kumuh.

11. **Pengawasan Tanah Kurang Ketat (Nilai Bobot 0,034)**

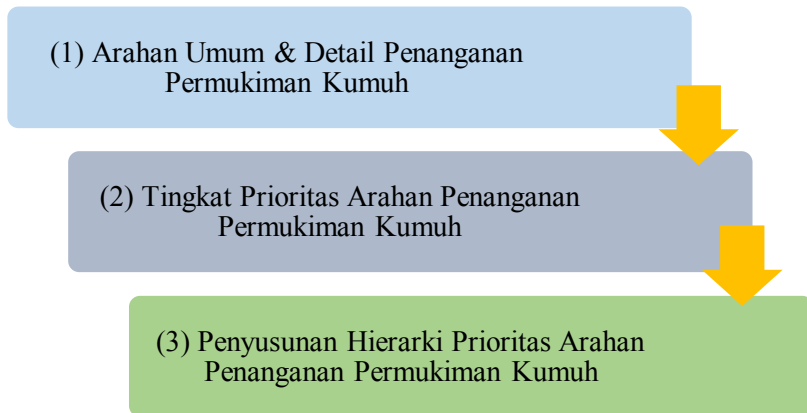
Pengawasan tanah kurang ketat menimbulkan banyak pertumbuhan bangunan yang kurang sesuai dengan pemanfaatan ruang. Serta masih belum adanya penegakan hukum terhadap penggunaan lahan yang masih belum sesuai dengan peruntukan awal dalam rencana kawasan khususnya di kawasan permukiman kumuh.

12. **Tingkat Arus Migrasi (Nilai Bobot 0,025)**

Besaran tingkat perpindahan penduduk dari daerah lain menuju kawasan permukiman kumuh. Disebabkan oleh keterikatan masyarakat antara tempat tinggal dengan aktivitas ekonomi atau lokasi pekerjaan sehingga menimbulkan perpindahan penduduk.

#### 4.4 Arahan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin

Perumusan arahan penanganan permukiman kumuh bertujuan untuk mendapatkan arahan yang sesuai dengan konsep penataan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam perumusan arahan penanganan adalah sebagai berikut.



**Gambar 4.71** Tahapan Perumusan Arahan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan Belitung Selatan

*Sumber : Hasil Peneliti, 2016*

Berikut tahapan dalam perumusan tingkatan prioritas arahan penanganan kawasan permukiman kumuh :

1. Merumuskan tingkatan prioritas berdasarkan hasil pembobotan AHP (*Analytic Hierarchy Process*).
2. Menentukan nilai kuartil untuk masing-masing tingkatan prioritas arahan penanganan.
3. Mengklasifikasikan arahan penanganan berdasarkan jenis arahan, yaitu bertujuan sebagai peningkatan ataupun pengendalian.

Perumusan arahan penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Belitung Selatan diklasifikasikan ke dalam arahan penanganan melalui penentuan faktor prioritas penyebab kumuh yang berdasarkan tingkatan kategori kumuh. Hal ini bertujuan untuk memudahkan proses perencanaan dan penanganan di mana kategori kumuh yang dinilai dari tingkat prioritas.

**Tabel 4.76** Faktor Prioritas Penyebab Kumuh Berdasarkan Hasil Nilai Bobot Oleh *Stakeholder*

No.	Indikator	Bobot Indikator
1.	Kondisi Fisik Bangunan	0,365
2.	Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat	0,270
3.	Kondisi Sarana dan Prasarana	0,204
4.	Pengendalian Hukum	0,161
<b>Jumlah Bobot</b>		<b>1</b>

*Sumber: Hasil Analisa, 2016*

**Tabel 4.77** Variabel Penyebab Kumuh Berdasarkan Hasil Nilai Bobot Oleh *Stakeholder*

No	Variabel	Presentase Nilai Bobot
1.	Kualitas Bangunan	17.2%
2.	Kepadatan Bangunan	15.4%
3.	Pendapatan Penghasilan Penduduk	12.8%
4.	Ketersediaan Sarana & Prasarana	9.6%
5.	Kepemilikan Lahan Bangunan	7.8%
6.	Ketersediaan Bangunan	7.7%
7.	Tingkat Pengetahuan Dan Kesadaran Hukum	7.6%
8.	Tingkat Pendidikan	5.9%
9.	Kepadatan Penduduk	5.5%
10.	Kualitas Sarana & Prasarana	4.5%

No	Variabel	Presentase Nilai Bobot
11.	Pengawasan Tanah Kurang Ketat	3.4%
12.	Tingkat Arus Migrasi	2.5%
Total		100%

*Sumber: Hasil Analisa, 2016*

Hasil terkait validasi arahan umum dan detail yang relevan yang telah dirumuskan dengan tiga acuan ini akan memberikan informasi terkait valid atau tidaknya arahan penanganan secara umum jika diterapkan serta dapat memperkaya arahan umum dengan adanya arahan rinci yang bersifat lebih teknis. Serta arahan detail yang mencakup indikasi program yang diperoleh dari hasil analisa variabel pada masing-masing faktor. Arahan tersebut juga disesuaikan dengan kebijakan serta konsep penanganan permukiman kumuh. Dari situ akan menghasilkan program dengan tingkatan prioritas penanganan kawasan permukiman kumuh dalam kurun waktu yang ditentukan.

Tabel 4.78 Arahan Penanganan Umum dan Detail Berdasarkan Variabel Penyebab Kumuh dengan Perbandingan Komparasi Data

Variabel	Hasil Identifikasi & Analisa Penelitian	Kebijakan	Arahan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh
<b>Kualitas Bangunan</b> (Nilai Bobot Penyebab Kumuh 17.2%)	Kualitas bangunan yang dinilai hasil pembobotan ditinjau karakteristik bangunan : 1) Bangunan mengalami kebocoran diakibatkan kerusakan seperti berlubang disebabkan umur material seng yang sudah cukup lama dan mengalami korosi diakibatkan air hujan. 2) Bangunan papan kayu dengan kondisi pada beberapa rumah mengalami kerusakan diakibatkan pelapukan usia kayu disebabkan umur material yang sudah cukup lama. 3) Material lantai berbahan ubin kayu dengan lapisan karpet plastic. kondisi pada beberapa lantai rumah masih dalam kondisi baik dilihat masih kuatnya kayu yang digunakan.	Peremajaan itu sendiri diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas melalui kegiatan perombakan dengan perubahan yang mendasar dan penataan yang menyeluruh terhadap kawasan hunian yang tidak layak huni tersebut. Upaya yang dilakukan dalam rangka peremajaan: ✓ Secara bertahap dan sering kali mengakibatkan perubahan yang mendasar, ✓ Bersifat menyeluruh dalam suatu kawasan permukiman yang sangat tidak layak huni, yang secara fisik sering tidak sesuai lagi dengan fungsi kawasan semula. (RP3KP Kota Banjarmasin Tahun 2012-2032).  Kegiatan program ini dilakukan dengan pendekatan TRIDAYA (Daya Manusia, Daya Usaha, dan Daya Lingkungan Komunitas) yang dilaksanakan oleh berbagai instansi terkait untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kemampuan pengelolaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana yang telah dibangun.	<b>Arahan Umum Penanganan (Ruang Lingkup Perkotaan) :</b> 1) <b>Kategori Kumuh Sedang Renovasi (perubahan sebagian atau beberapa bagian)</b> melakukan perubahan sebagian atau beberapa komponen pembentuk permukiman agar dapat beradaptasi dan menampung fungsi baru tetapi tetap memiliki fungsi yang sama. 2) <b>Kategori Kumuh Ringan Revitalisasi (perbaikan dan peningkatan nilai bangunan)</b> peningkatan vitalitas melalui peningkatan kualitas lingkungan, bertujuan untuk memperbaiki dan mendorong ekonomi kawasan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada.  <b>Arahan Detail Penanganan (Ruang Lingkup Kawasan Kumuh/RT) :</b> 1) Arahan melalui penggunaan material atap bangunan yang dilakukan peremajaan material berupa seng. 2) Arahan Melalui penggunaan kayu berjenis (Ulin) sebagai bahan bangunan diingat daya tahan terhadap air yang cukup baik.

Variabel	Hasil Identifikasi & Analisa Penelitian	Kebijakan	Arahan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh
<b>Kepadatan Bangunan</b> (Nilai Bobot Penyebab Kumuh 15.4%)	Kawasan permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan memiliki tingkat kepadatan bangunan yang merata pada seluruh kawasan permukiman kumuh. Tingkat kepadatan tertinggi terdapat di RT.06 sebesar 10.26 Unit/Ha. Sedangkan tingkat kepadatan rata-rata bangunan di perkampungan Kelurahan Belitung Selatan sebesar 72.84 unit/Ha. Angka tersebut memiliki arti bahwa secara umum, Kelurahan Belitung Selatan memiliki tingkat kepadatan bangunan yang sedang.	Menurut Panduan Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh tahun 2006. Terkait Pedoman Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Daerah Penyangga Kota Metropolitan : 1. Kepadatan rendah : (<60 unit/Ha) 2. Kepadatan sedang : (60 – 100 unit/Ha) 3. Kepadatan tinggi : (>100 unit/Ha)	<b>Arahan Detail Penanganan (Ruang Lingkup Perkotaan) :</b> 1) Hal ini perlu adanya pengawasan dari pihak pemerintah kota yang menerbitkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sehingga sebaiknya tidak ada penambahan bangunan baru yang akan menambah kepadatan yang sudah ada. 2) Pemberlakuan peraturan yang lebih ketat pada kawasan yang sudah direncanakan tata ruangnya
<b>Pendapatan Penghasilan Penduduk</b> (Nilai Bobot Penyebab Kumuh 12.8%)	Pendapatan masyarakat di permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan masih kurang dari UMK Kota Banjarmasin sebesar Rp 2.150.000,-. Dilihat dari total responden keseluruhan sebanyak 63 responden atau 75,90% memiliki tingkat pendapatan masih dibawah UMK Kota Banjarmasin. Berartinya hanya sebesar 20 responden atau 24,09% yang memiliki tingkat pendapatan diatas UMK yang telah ditetapkan. Berdasarkan presentase tersebut terlihat masih tingginya juga tingkat masyarakat pra sejahtera di kawasan permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan. Yang disebabkan oleh 75.90% masih berpendapatan dibawah UMK. Dari kondisi tersebut perlunya penanganan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat yang masih kurang agar menurunkan tingkat keluarga pra sejahtera.	Kegiatan program ini dilakukan dengan pendekatan TRIDAYA (Daya Manusia, Daya Usaha, dan Daya Lingkungan Komunitas) yang dilaksanakan oleh berbagai instansi terkait untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kemampuan pengelolaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana yang telah dibangun. (Panduan Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh, 2006)	<b>Arahan Umum Penanganan (Ruang Lingkup Perkotaan) :</b> Diperlukan lingkungan baru untuk meningkatkan pendapatan masyarakat kasawasan kumuh Kelurahan Belitung Selatan. Melalui relokasi permukiman tersebut ke lokasi permukiman baru yang sesuai dengan peruntukan dengan tetap memperhatikan kesinambungan kerja penghuni dan meningkatkan pendapatan masyarakat penghuni asal.  <b>Arahan Detail Penanganan (Ruang Lingkup Perkotaan) :</b> 1) Perlu adanya kolaborasi antara pemerintah kota dengan masyarakat dalam menyediakan kawasan pengembangan permukiman baru yang murah dan layak huni bertujuan mendorong ekonomi masyarakat yang sesuai dengan tata ruang, serta didorong oleh peran swasta. 2) Pemberian latihan kepada masyarakat yang ingin meningkatkan keterampilannya dan mampu meningkatkan pendapatan.

<p><b>Ketersediaan Sarana &amp; Prasarana</b> (Nilai Bobot Penyebab Kumuh 9.6%)</p>	<p>Hasil analisa variabel dan karakteristik kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Belitung Selatan :</p> <p><b>a) Sarana Fasilitas Pendidikan</b> Berdasarkan jumlah fasilitas pendidikan yang tersedia hanya TK &amp; SD. Sehingga untuk melanjutkan ke tingkat pendidikan selanjutnya penduduk permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan harus ke fasilitas pendidikan di Kecamatan lainnya.</p> <p><b>b) Sarana Fasilitas Peribadatan</b> Fasilitas peribadatan yang tersebar di permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan berupa 2 musholla dan 1 masjid. Untuk kebutuhan berdasarkan penduduk masih kurang mencukupi tetapi dari kondisi fisik fasilitas dapat dinilai layak.</p> <p><b>c) Sarana Fasilitas Kesehatan</b> Fasilitas kesehatan yang tersebar di permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan berupa posyandu yang terletak di setiap RT. Untuk kebutuhan berdasarkan penduduk masih kurang mencukupi tetapi dari kondisi fisik fasilitas dapat dinilai kurang layak.</p> <p><b>d) Sarana Fasilitas Perdagangan &amp; Jasa</b> Berdasarkan hasil kusioner dan observasi di Kelurahan Belitung Selatan terdapat karakteristik sarana fasilitas peribadatan 2 musholla dan 1 masjid. Untuk sarana failitas perdagangan jasa berupa 1 pasar dan sarana fasilitas kesehatan 2 posyandu. Serta sarana fasilitas pendidikan berupa SD dan TK. Dari kondisi.</p> <p><b>e) Prasarana Jaringan Drainase</b> Di keseluruhan kawasan permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan tidak memiliki jaringan drainase disebabkan minimnya sepadan jalan tersedia serta jarak antar bangunan yang sangat padat sehingga tidak dapat dibangunnya selokan atau gorong2 sebagai drainase lingkungan permukiman.</p>	<p>Kegiatan program ini dilakukan dengan pendekatan TRIDAYA (Daya Manusia, Daya Usaha, dan Daya Lingkungan Komunitas) yang dilaksanakan oleh berbagai instansi terkait untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kemampuan pengelolaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana yang telah dibangun. (Panduan Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh, 2006).</p>	<p><b>Arahan Detail Penanganan (Ruang Lingkup Kawasan Kumuh/RT) :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perbaikan fasilitas pendidikan dengan kualitas pendidikan hingga minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat di wilayah penelitian melalui program-program pendidikan baik formal maupun informal.</li> <li>2) Pembangunan Infrastruktur dengan dilakukannya renovasi fasilitas kesehatan serta peribadatan yang Dibutuhkan Oleh Masyarakat Seperti posyandu atau puskesmas.</li> <li>3) Perbaikan lingkungan paada area fasilitas perdagangan dan jasa seperti pasar di RT.13 Kelurahan Belitung Selatan sehingga tidak menimbulkan kesan kumuh sesuai yang dibutuhkan oleh masyarakat.</li> <li>4) Pembangunan penyediaan jaringan drainase yaitu berupa selokan atau gorong di keseluruhan lingkungan kawasan permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan sebagai jaringan pembuangan limbah maupun penampungan resapan air.</li> </ol>
---	--	---	--



Variabel	Hasil Identifikasi & Analisa Penelitian	Kebijakan	Arahan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh
<b>Kepemilikan Lahan Bangunan</b> (Nilai Bobot Penyebab Kumuh 7.8%)	Mayoritas masyarakat Kelurahan Belitung Selatan telah memiliki legalitas status tanah berupa hak milik serta hak sewa dilihat hasil dari 66,22% responden memiliki status tersebut. Hal itu dilihat juga lama jangka waktu masyarakat Kelurahan Belitung Selatan telah bertempat tinggal dilokasi tersebut. Dimana rata-rata 16 – 20 tahun hingga >20 tahun dilihat dari presentase responden sebesar 85.53%.	Kegiatan program ini dilakukan dengan pendekatan TRIDAYA (Daya Manusia, Daya Usaha, dan Daya Lingkungan Komunitas) yang dilaksanakan oleh berbagai instansi terkait untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kemampuan pengelolaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana yang telah dibangun. (Panduan Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh, 2006)	<b>Arahan Detail Penanganan (Ruang Lingkup Perkotaan) :</b> Mempertahankan status hak atas tanah yakni hak pakai pada masyarakat di wilayah penelitian sebagai bentuk instrumen pengendalian terhadap kemungkinan adanya pelanggaran pemanfaatan ruang di wilayah penelitian. 1) Pendataan/kontrol bangunan yang berdiri di wilayah penelitian tidak hanya pada awal berdirinya bangunan, akan tetapi juga secara berkala setiap ijin diperpanjang agar kesesuaian pemanfaatan lahan dapat tetap terkontrol. 2) Pemberian langkah disinsentif pada penghuni yang melanggar pemanfaatan ruang atau pelanggaran lain berupa teguran hingga pencabutan ijin pemanfaatan tanah.
<b>Ketersediaan Bangunan</b> (Nilai Bobot Penyebab Kumuh 7.7%)	Menigkatnya kebutuhan penduduk terhadap kepemilikan rumah tidak sejalan dengan ketersediaan lahan yang diperuntukan bagi permukiman masyarakat. Hal itu ditambah pula dengan semakin mahalnya harga lahan di wilayah perkotaan Kota Banjarmasin.	Kegiatan program ini dilakukan dengan pendekatan TRIDAYA (Daya Manusia, Daya Usaha, dan Daya Lingkungan Komunitas) yang dilaksanakan oleh berbagai instansi terkait untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kemampuan pengelolaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana yang telah dibangun. (Panduan Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh, 2006)	<b>Arahan Detail Penanganan (Ruang Lingkup Perkotaan) :</b>  Penyediaan rumah susun sebagai solusi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat permukiman kumuh untuk rumah layak huni.

Variabel	Hasil Identifikasi & Analisa Penelitian	Kebijakan	Arahan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh
<b>Tingkat Pengetahuan Dan Kesadaran Hukum</b> (Nilai Bobot Penyebab Kumuh 7.6%)	Masyarakat permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan masih memiliki kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum. Dilihat dari masih adanya beberapa pelanggaran seperti beberapa bangunan rumah yang berdiri pada daerah sepadan sungai, sistem persampahan yang masih belum terintegrasi karena masih kurangnya kepekaan masyarakat serta tata cara pembuangan air limbah secara langsung ke lingkungan masyarakat di kawasan permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan.	Kegiatan program ini dilakukan dengan pendekatan TRIDAYA (Daya Manusia, Daya Usaha, dan Daya Lingkungan Komunitas) yang dilaksanakan oleh berbagai instansi terkait untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kemampuan pengelolaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana yang telah dibangun. (Panduan Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh, 2006)	<b>Arahan Detail Penanganan (Ruang Lingkup Kawasan Kumuh/RT) :</b>  Perlu adanya partisipasi masyarakat yang lebih aktif berdasarkan pemberian kekuasaan oleh pihak pemerintah agar mampu menjaga dan merawat lingkungannya tetap sehat.
<b>Tingkat Pendidikan</b> (Nilai Bobot Penyebab Kumuh 5.9%)	Tingginya masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan rendah. Diukur dari hampir 60.24% responden atau masyarakat di permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan yang berpendidikan masih sangat rendah. Ini juga disebabkan masih kurangnya fasilitas pendidikan serta pelayanan fasilitas pendidikan yang kurang baik.	Kegiatan program ini dilakukan dengan pendekatan TRIDAYA (Daya Manusia, Daya Usaha, dan Daya Lingkungan Komunitas) yang dilaksanakan oleh berbagai instansi terkait untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kemampuan pengelolaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana yang telah dibangun. (Panduan Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh, 2006)	<b>Arahan Detail Penanganan (Ruang Lingkup Kawasan Kumuh/RT) :</b>  <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mendukung peningkatan kualitas pendidikan dengan pelatihan-pelatihan keahlian bagi masyarakat permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan.</li> <li>2) Melibatkan pihak-pihak terkait guna mendukung sistem pembiayaan (<i>Public, private, partnership</i>) dalam pendidikan masyarakat di permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan.</li> <li>3) Pembekalan pendidikan kepada anak usia dini terkait pengetahuan kepedulian lingkungan rumah (Kebersihan, Keindahan dan Kenyamanan) secara berkelanjutan di permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan.</li> </ol>
<b>Kepadatan Penduduk</b> (Nilai Bobot Penyebab Kumuh 5.5%)	Kawasan permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan memiliki rata-rata penduduk 192 jiwa/Ha kepadatan penduduk dalam kategori sedang. Dengan laju pertumbuhan penduduk setiap tahunnya 0.01% setiap tahun.	SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan, tingkat kepadatan penduduk dikategorikan ke dalam 4 klasifikasi sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Rendah : &lt; 150 jiwa/Ha</li> <li>2) Sedang : 151 sampai 200 jiwa/Ha</li> </ol>	<b>Arahan Detail Penanganan (Ruang Lingkup Perkotaan) :</b>  Perlu ada tinjauan kebijakan terkait rencana pengembangan kawasan perkotaan. Untuk difokuskan pengembangan pada kawasan inti baru daerah perkotaan. Agar tidak terjadi desentralisasi kawasan perkotaan di Kota Banjarmasin.

Variabel	Hasil Identifikasi & Analisa Penelitian	Kebijakan	Arahan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh
		3)Tinggi : 201 sampai 400 jiwa/Ha 4)Sangat Padat : >400 jiwa/Ha	
<b>Kualitas Sarana &amp; Prasarana</b> (Nilai Bobot Penyebab Kumuh 4.5%)	<p>Hasil analisa variabel dan karakteristik kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Belitung Selatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. sistem drainase dan pengendalian banjir tidak tersedia di kawasan permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan. Sehingga dinilai sangat kurang dalam kualitas serta penyediaan sistem drainase.</li> <li>2. kualitas jaringan air di kawasan permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan sudah baik. Hal ini dinilai dari telah terlayannya jaringan air melalui PDAM yang mencapai 81.92%. Sehingga karakteristik kaawasan kumuh terkait ketersediaan serta kualitas jaringan air bersih telah cukup terpenuhi.</li> <li>3. kualitas sistem pembuangan air limbah sudah cukup baik. Ini dinilai dari penggunaan WC di setiap rumah yang mencapai 85.54% serta penggunaan septic tank sebesar 63.85% di kawansan permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan.</li> </ol>	<p>Kegiatan program ini dilakukan dengan pendekatan TRIDAYA (Daya Manusia, Daya Usaha, dan Daya Lingkungan Komunitas) yang dilaksanakan oleh berbagai instansi terkait untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kemampuan pengelolaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana yang telah dibangun. (Panduan Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh, 2006)</p>	<p><b>Arahan Umum Penanganan (Ruang Lingkup Perkotaan) :</b></p> <p>Konsep Penataan Sarana dan Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Peningkatan pelayanan air bersih, baik kualitas maupun kapasitas pelayanannya, mengingat bahwa air bersih ini merupakan kebutuhan dasar penduduk yang sangat penting.</li> <li>2) Mengingat air limbah merupakan buangan yang tidak dapat dipergunakan lagi tanpa mengalami proses pengelolaan terlebih dahulu dan penambahan kapasitas air limbah sebagai akibat dari meningkatnya jumlah penduduk, maka perlu dibuat suatu sistem jaringan riolering yang lebih baik, yang dapat menampung seluruh air buangan dan jika diperlukan sekali dapat dikembangkan suatu instalasi pengelolaan air limbah (sewerage treatment).</li> <li>3) Peningkatan sarana prasarana sanitasi dengan pembuatan MCK umum bagi masyarakat yang belum memiliki MCK, serta mensosialisasikan MCK tersebut pada masyarakat yang belum mengerti manfaat MCK bagi kehidupan dan kebersihan lingkungan sekitarnya.</li> <li>4) Mengembangkan sistem jaringan drainase yang lebih baik dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas dimensi saluran, sehingga mampu menampung seluruh debit air hujan.</li> <li>5) Mengembangkan dan meningkatkan sistem pengelolaan sampah yang menyangkut : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penentuan lokasi pengumpulan awal</li> <li>b. Peningkatan cara pengangkutan</li> <li>c. Penentuan lokasi pengumpulan akhir</li> <li>d. Pemilihan cara atau sistem pembuangan akhir</li> </ol> </li> <li>6) Meningkatkan sarana dan prasarana jaringan jalan yang menyangkut perbaikan material jalan dibeberapa titik jalan lingkungan.</li> </ol>

Variabel	Hasil Identifikasi & Analisa Penelitian	Kebijakan	Arahan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh
			<p><b>Arahan Detail Penanganan (Ruang Lingkup Kawasan Kumuh/RT) :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penyediaan kran umum serta sistem jaringan perpipaan air dengan pompa untuk memperluas jangkauan pelayanan serta tetap mempertahankan kualitas sumber air pada yang telah tersedia dengan memperhatikan kelestarian, keberlanjutan, dan keterpaduan di seluruh kawasan permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan</li> <li>2) Penyediaan Fasilitas MCK umum (SANIMAS) dengan pelibatan masyarakat sebagai upaya mengurangi pencemaran sungai. Dibangun pada lahan tak terbangun Sesuai dengan Kebutuhan Pengguna khususnya di kawasan permukiman kumuh sedang RT 6 dan kumuh ringan di RT 8.</li> <li>3) Memperhatikan Daya Jangkau atau akses Masyarakat Terhadap Fasilitas pendidikan, kesehatan, perdagangan jasa yang telah disediakan. Diiringi dengan perbaikan kualitas dan pengembangan aspek sanitasi berkelanjutan kedepannya di seluruh kawasan permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan.</li> <li>4) Penyediaan TPS yang Layak dan Sesuai Standar sebagai perbaikan penanganan sampah dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan terutama kualitas lingkungan daerah aliran sungai baik bantaran sungai atau aliran sungai itu sendiri. Kedepan perlu didukung dengan adanya pengembangan sistem daur ulang (bank sampah) sebagai upaya pengurangan sampah di kawasan permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan.</li> <li>5) Terdapat sistem pengelolaan kebersihan seluruh kawasan permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan pemerintah, seperti: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya sistem gotong-royong yang intensif.</li> <li>b. Adanya sistem integrasi sampah dan pengangkutan sampah secara berkala.</li> </ol> </li> <li>6) Perbaikan material perkerasan jalan di beberapa titik jalan lingkungan yang berada di RT.11 dan RT.6</li> </ol>

Variabel	Hasil Identifikasi & Analisa Penelitian	Kebijakan	Arahan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh
<b>Pengawasan Tanah Kurang Ketat</b> (Nilai Bobot Penyebab Kumuh 3.4%)	Masih adanya beberapa pelanggaran seperti beberapa bangunan rumah yang berdiri pada daerah sepadan sungai. Khususnya pada area RT (6,8,9 dan 11)	Kegiatan program ini dilakukan dengan pendekatan TRIDAYA (Daya Manusia, Daya Usaha, dan Daya Lingkungan Komunitas) yang dilaksanakan oleh berbagai instansi terkait untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kemampuan pengelolaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana yang telah dibangun. (Panduan Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh, 2006)	<p><b>Arahan Umum Penanganan (Ruang Lingkup Perkotaan) :</b> Arahan Penanganan melalui daya Manusia di lingkungan masyarakat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi pengetahuan dan kesadaran hukum dengan melakukan pendampingan dari pemerintah</li> <li>b) Mengikut sertakan peran masyarakat dalam perencanaan kawaasan dengan melalui MUSREMBANG tingkat Kota Banjarmasin</li> </ul> <p><b>Arahan Detail Penanganan (Ruang Lingkup Perkotaan) :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan evaluasi terkait dengan himbauan yang telah dilakukan sebelumnya.</li> <li>2. Melakukan sosialisasi terkait sanksi dan kebijakan disinsentif kepada masyarakat yang berdomisili di wilayah penelitian termasuk didalamnya dijelaskan terkait dengan kategorisasi pelanggaran dan sanksinya.</li> </ol>
<b>Tingkat Arus Migrasi</b> (Nilai Bobot Penyebab Kumuh 2.5%)	Arus migrasi di permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan masih tergolong rendah. Karena hal itu dilihat juga lama jangka waktu masyarakat Kelurahan Belitung Selatan telah bertempat tinggal dilokasi tersebut. Dimana rata-rata 16 – 20 tahun hingga >20 tahun	Kegiatan program ini dilakukan dengan pendekatan TRIDAYA (Daya Manusia, Daya Usaha, dan Daya Lingkungan Komunitas) yang dilaksanakan oleh berbagai instansi terkait untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kemampuan pengelolaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana yang telah dibangun. (Panduan Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh, 2006)	<p><b>Arahan Umum Penanganan (Ruang Lingkup Perkotaan) :</b></p> <p>Perlu adanya pengawasan jumlah penduduk migrasi yang datang masuk atau keluar Kelurahan Belitung Selatan agar kebutuhan/penggunaan lahan tidak semakin tinggi. Hal tersebut bisa dilakukan dengan pendataan secara berskala oleh Kelurahan Belitung Selatan.</p>

Sumber: Hasil Permumusan Peneliti, 2016

#### 4.4.1 Tingkatan Prioritas Arahan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan Belitung Selatan

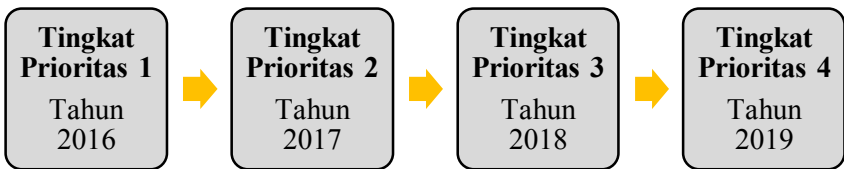
Penentuan arahan disesuaikan dengan agenda program permukiman berkelanjutan 100-0-100 Tahun 2015-2019 oleh Kementerian PU Direktorat Jendral Cipta Karya, dimana faktor dan variabel penyebab kumuh dengan nilai bobot paling besar akan memiliki tingkatan prioritas utama.



**Gambar 4.72** Grand Desain Program Permukiman Berkelanjutan 100-0-100 Tahun 2015 - 2019

*Sumber : Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, 2016*

Grand desain program ini juga bertujuan dalam memenuhi target kota tanpa kumuh. Program permukiman berkelanjutan ini juga terbagi atas beberapa bidang strategi penanganan kumuh yang berfokus pada permasalahan akses air minum, besar luasan kawasan permukiman kumuh, dan akses sanitasi. Ketercapaian sasaran tersebut akan dilaksanakan di kawasan permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan dalam kurun waktu periode 4 tahun.



**Gambar 4.73** Tingkatan Prioritas Arahan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh

*Sumber : Hasil Peneliti, 2016*

Penentuan tingkat prioritas arahan penanganan di kawasan permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan juga dilakukan melalui klasifikasi arahan penanganan untuk menentukan jenis arahan yang dibagi sebagai berikut, yaitu :

- a) Arahan Peningkatan : Perbaikan fisik dan penyelenggaraan kegiatan di kawasan permukiman kumuh yang bertujuan meningkatkan kualitas serta kuantitas fisik dan lingkungan kawasan.
- b) Arahan Pengendalian : Pengawasan dalam kegiatan kawasan permukiman yang ditinjau dari segi kebijakan serta evaluasi kinerja kegiatan yang telah berjalan di kawasan permukiman kumuh.

Arahan penanganan meliputi pengembangan dan pengaturan kebijakan, pendampingan dan pembinaan, Pelaksanaan program penanganan serta pengawasan dan evaluasi. Berikut tingkatan prioritas dan klasifikasi arahan penanganan permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin dilihat pada **Tabel 4.80**

**Tabel 4.79 Pelaksanaan Arahan Penanganan Berdasarkan Tingkat Prioritas dan Periode Waktu**

No	Variabel	Tingkatan Prioritas	Arahan Penanganan	Klasifikasi Arahan	Periode Waktu
1.	Kualitas Bangunan (17.2%)	I	Arahan melalui penggunaan material atap bangunan yang dilakukan peremajaan material berupa seng.	Arahan Peningkatan	Tahun 2016
			Arahan melalui penggunaan kayu berjenis (Ulin) sebagai bahan bangunan diingat daya tahan terhadap air yang cukup baik.	Arahan Peningkatan	
2.	Kepadatan Bangunan (15.4%)	I	Hal ini perlu adanya pengawasan dari pihak pemerintah kota yang menerbitkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sehingga sebaiknya tidak ada penambahan bangunan baru yang akan menambah kepadatan yang sudah ada.	Arahan Pengendalian	Tahun 2016
			Pemberlakuan peraturan yang lebih ketat pada kawasan yang sudah direncanakan tata ruangnya	Arahan Pengendalian	
3.	Pendapatan Penghasilan Penduduk (12.8%)	I	Perlu adanya kolaborasi antara pemerintah kota dengan masyarakat dalam menyediakan kawasan pengembangan permukiman baru yang murah dan layak huni bertujuan mendorong ekonomi masyarakat yang sesuai dengan tata ruang, serta didorong oleh peran swasta.	Arahan Pengendalian	Tahun 2016



No	Variabel	Tingkatan Prioritas	Arahan Penanganan	Klasifikasi Arahan	Periode Waktu
			Pemberian latihan kepada masyarakat yang ingin meningkatkan keterampilannya dan mampu meningkatkan pendapatan.	Arahan Peningkatan	
4.	Ketersediaan Sarana & Prasarana (9.6%)	II	Perbaikan fasilitas pendidikan dengan kualitas pendidikan hingga minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat di wilayah penelitian melalui program-program pendidikan baik formal maupun informal.	Arahan Peningkatan	Tahun 2016-2017
			Pembangunan Infrastruktur dengan dilakukannya renovasi fasilitas kesehatan serta peribadatan yang Dibutuhkan Oleh Masyarakat Seperti posyandu atau puskesmas	Arahan Peningkatan	
			Perbaikan lingkungan pada area fasilitas perdagangan dan jasa seperti pasar di RT.13 Kelurahan Belitung Selatan sehingga tidak menimbulkan kesan kumuh sesuai yang dibutuhkan oleh masyarakat.	Arahan Peningkatan	
			Pembangunan penyediaan jaringan drainase yaitu berupa selokan atau gorong di keseluruhan lingkungan kawasan permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan sebagai jaringan pembuangan limbah maupun penampungan resapan air.	Arahan Peningkatan	

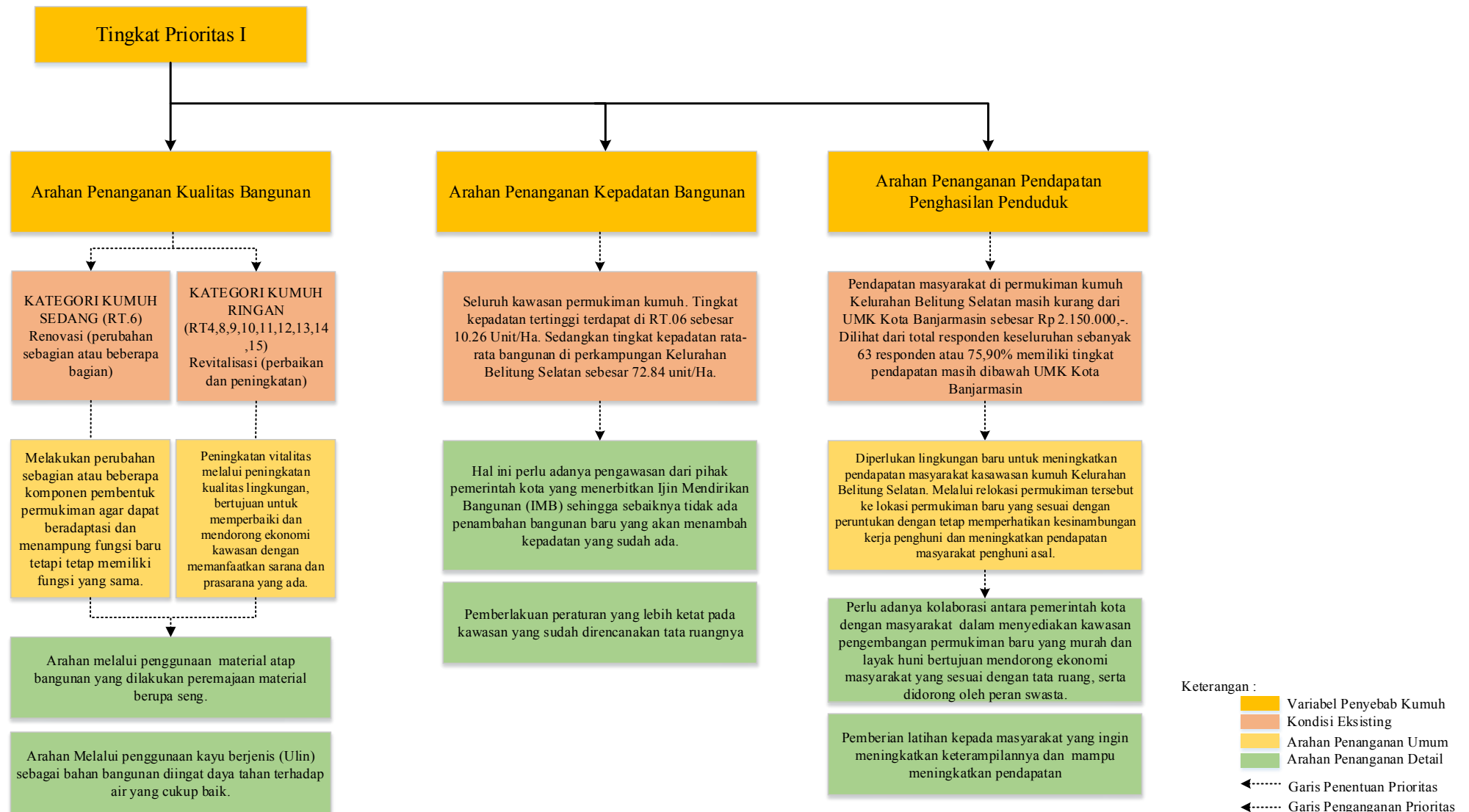
No	Variabel	Tingkatan Prioritas	Arahan Penanganan	Klasifikasi Arahan	Periode Waktu
5.	Kepemilikan Lahan Bangunan (7.8%)	III	<p>Mempertahankan status hak atas tanah yakni hak pakai pada masyarakat di wilayah penelitian sebagai bentuk instrumen pengendalian terhadap kemungkinan adanya pelanggaran pemanfaatan ruang di wilayah penelitian</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pendataan/kontrol bangunan yang berdiri di wilayah penelitian tidak hanya pada awal berdirinya bangunan, akan tetapi juga secara berkala setiap ijin diperpanjang agar kesesuaian pemanfaatan lahan dapat tetap terkontrol.</li> <li>2) Pemberian langkah disinsentif pada penghuni yang melanggar pemanfaatan ruang atau pelanggaran lain berupa teguran hingga pencabutan ijin pemanfaatan tanah.</li> </ol>	Arahan Pengendalian	Tahun 2016-2018
6.	Ketersediaan Bangunan (7.7%)	III	Penyediaan rumah susun sebagai solusi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat permukiman kumuh untuk rumah layak huni.	Arahan Peningkatan	Tahun 2016-2018
7.	Tingkat Pengetahuan Dan Kesadaran Hukum (7.6%)	III	Perlu adanya partisipasi masyarakat yang lebih aktif berdasarkan pemberian kekuasaan oleh pihak pemerintah agar mampu menjaga dan merawat lingkungannya tetap sehat.	Arahan Pengendalian	Tahun 2016-2018

No	Variabel	Tingkatan Prioritas	Arahan Penanganan	Klasifikasi Arahan	Periode Waktu
8.	Tingkat Pendidikan (5.9%)	III	Mendukung peningkatan kualitas pendidikan dengan pelatihan-pelatihan keahlian bagi masyarakat permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan.	Arahan Peningkatan	Tahun 2016-2018
			Melibatkan pihak-pihak terkait guna mendukung sistem pembiayaan ( <i>Public, private, partnership</i> ) dalam pendidikan masyarakat di permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan.	Arahan Pengendalian	
			Pembekalan pendidikan kepada anak usia dini terkait pengetahuan kepedulian lingkungan rumah (Kebersihan, Keindahan dan Kenyamanan) secara berkelanjutan di permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan.	Arahan Pengendalian	
9.	Kepadatan Penduduk (5.5%)	III	Perlu ada tinjauan kebijakan terkait rencana pengembangan kawasan perkotaan. Untuk difokuskan pengembangan pada kawasan inti baru daerah perkotaan. Agar tidak terjadi desentralisasi kawasan perkotaan di Kota Banjarmasin.	Arahan Pengendalian	Tahun 2016-2018
10.	Kualitas Sarana & Prasarana (4.5%)	III	1) Penyediaan kran umum serta sistem jaringan perpipaan air dengan pompa untuk memperluas jangkauan pelayanan serta tetap mempertahankan kualitas sumber air pada yang telah tersedia dengan memperhatikan kelestarian, keberlanjutan, dan keterpaduan di seluruh kawasan permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan	Arahan Peningkatan	Tahun 2016-2018

No	Variabel	Tingkatan Prioritas	Arahan Penanganan	Klasifikasi Arahan	Periode Waktu
			<p>2) Penyediaan Fasilitas MCK umum (SANIMAS) dengan pelibatan masyarakat sebagai upaya mengurangi pencemaran sungai. Dibangun pada lahan tak terbangun Sesuai dengan Kebutuhan Pengguna khususnya di kawasan permukiman kumuh sedang RT 6 dan kumuh ringan di RT 8.</p> <p>3) Memperhatikan Daya Jangkau atau akses Masyarakat Terhadap Fasilitas pendidikan, kesehatan, perdagangan jasa yang telah disediakan. Diiringi dengan perbaikan kualitas dan pengembangan aspek sanitasi berkelanjutan kedepannya di seluruh kawasan permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan.</p> <p>4) Penyediaan TPS yang Layak dan Sesuai Standar sebagai perbaikan penanganan sampah dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan terutama kualitas lingkungan daerah aliran sungai baik bantaran sungai atau aliran sungai itu sendiri. Kedepan perlu didukung dengan adanya pengembangan sistem daur ulang (bank sampah) sebagai upaya pengurangan sampah di kawasan permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan.</p> <p>5) Terdapat sistem pengelolaan kebersihan seluruh kawasan permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan pemerintah, seperti:</p>		

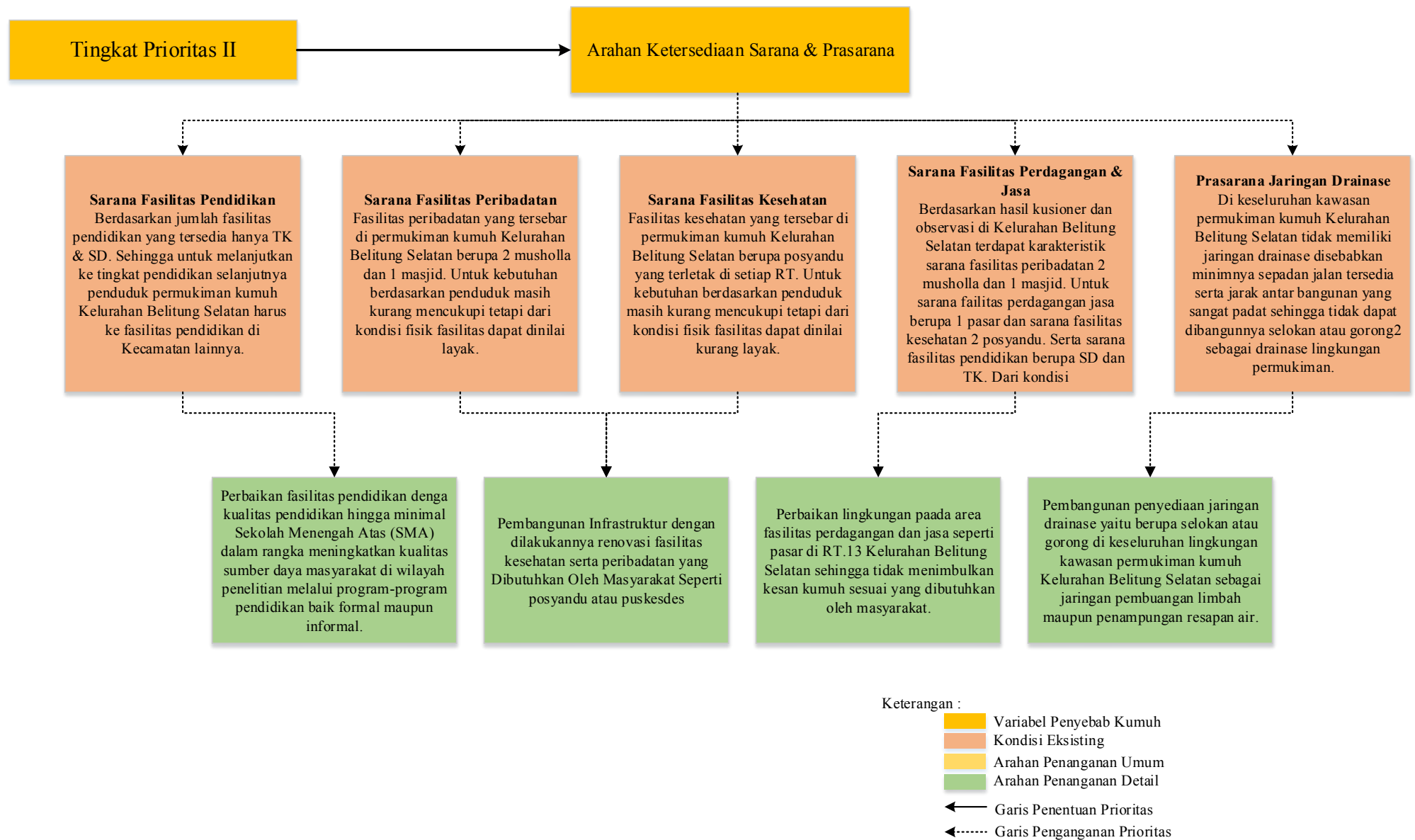
No	Variabel	Tingkatan Prioritas	Arahan Penanganan	Klasifikasi Arahan	Periode Waktu
			<p>c. Adanya sistem gotong-royong yang intensif.</p> <p>d. Adanya sistem integrasi sampah dan pengangkutan sampah secara berkala.</p> <p>6) Perbaiki material perkerasan jalan di beberapa titik jalan lingkungan yang berada di RT.11 dan RT.6</p>		
11.	Pengawasan Tanah Kurang Ketat (3.4%)	IV	<p>1) Melakukan evaluasi terkait dengan himbauan yang telah dilakukan sebelumnya.</p> <p>2) Melakukan sosialisasi terkait sanksi dan kebijakan disinsentif kepada masyarakat yang berdomisili di wilayah penelitian termasuk didalamnya dijelaskan terkait dengan kategorisasi pelanggaran dan sanksinya.</p>	Arahan Pengendalian	Tahun 2016-2019
12.	Tingkat Arus Migrasi (2.5%)	IV	Perlu adanya pengawasan jumlah penduduk migrasi yang datang masuk atau keluar Kelurahan Belitung Selatan agar kebutuhan/penggunaan lahan tidak semakin tinggi. Hal tersebut bisa dilakukan dengan pendataan secara berskala oleh Kelurahan Belitung Selatan.	Arahan Pengendalian	Tahun 2016-2019

*Sumber : Hasil Peneliti, 2016*



**Gambar 4.74** Arahan Penanganan Tingkat Prioritas I Kawasan Permukiman Kumuh Belitung Selatan  
Sumber : Hasil Peneliti, 2016

*“Halaman sengaja dikosongkan.”*

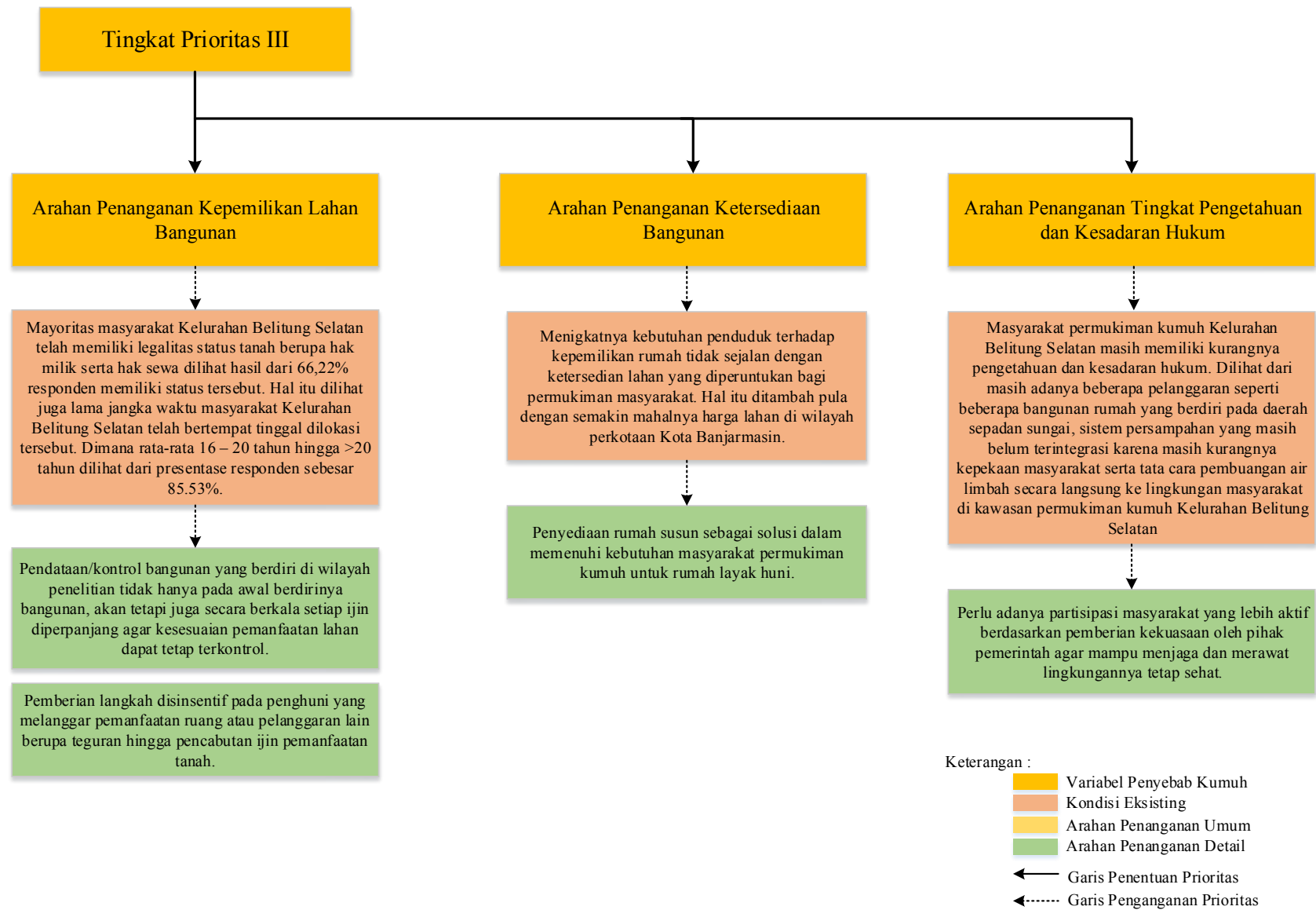


**Gambar 4.75** Arahan Penanganan Tingkat Prioritas II Kawasan Permukiman Kumuh Belitung Selatan

Sumber : Hasil Peneliti, 2016



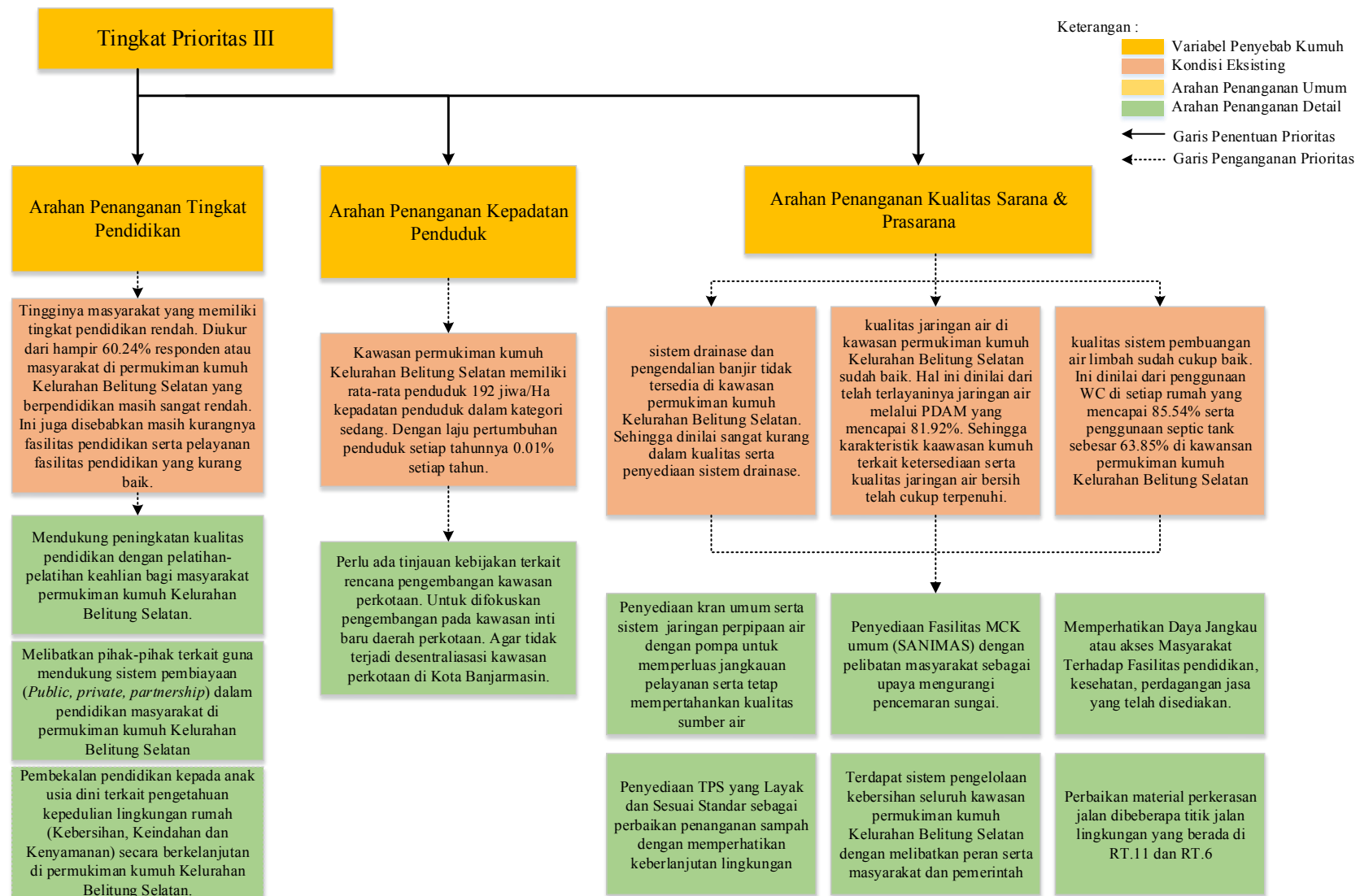
*“Halaman sengaja dikosongkan.”*



**Gambar 4.76** Arahan Penanganan Tingkat Prioritas III Kawasan Permukiman Kumuh Belitung Selatan

*Sumber : Hasil Peneliti, 2016*

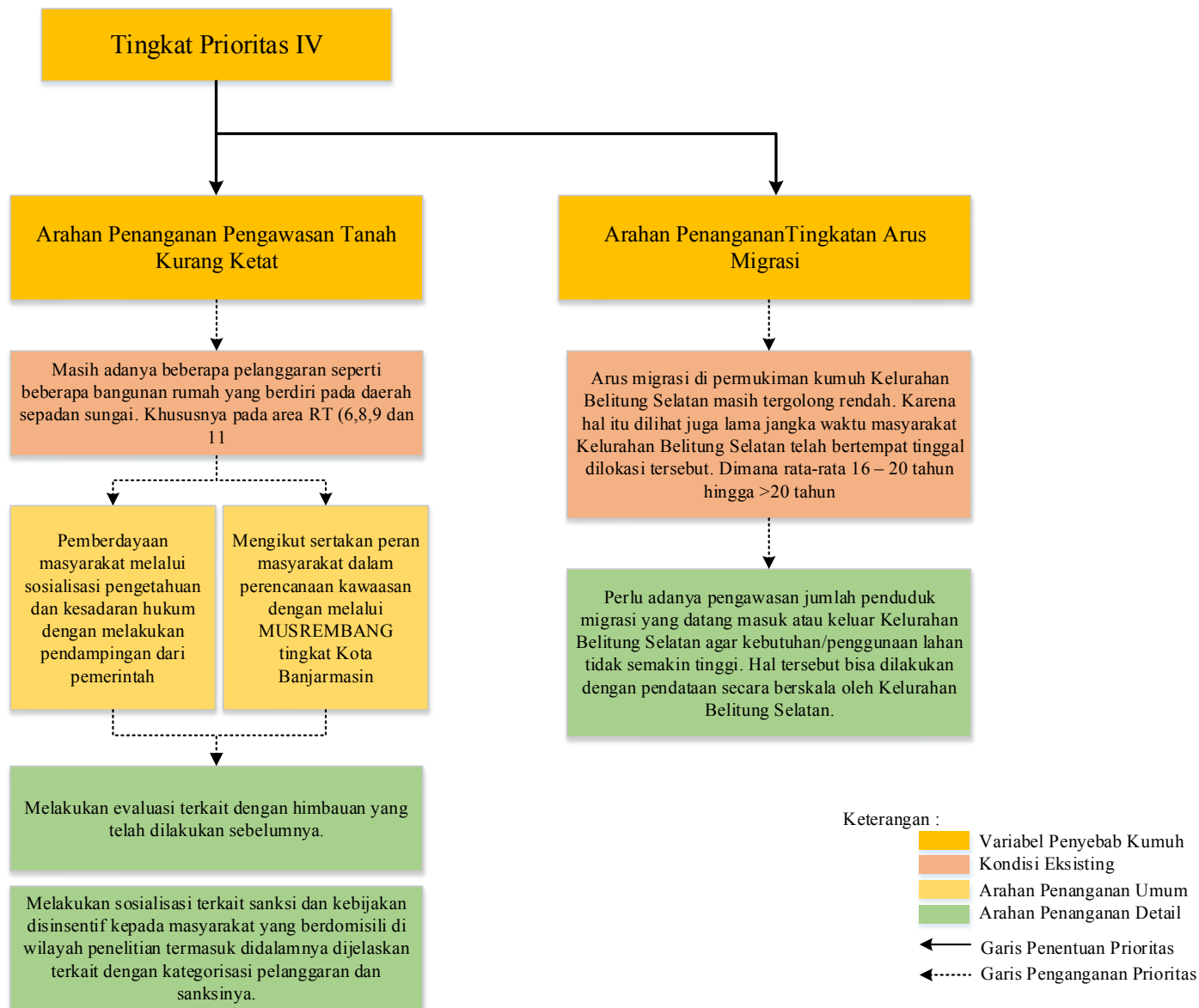
*“Halaman sengaja dikosongkan.”*



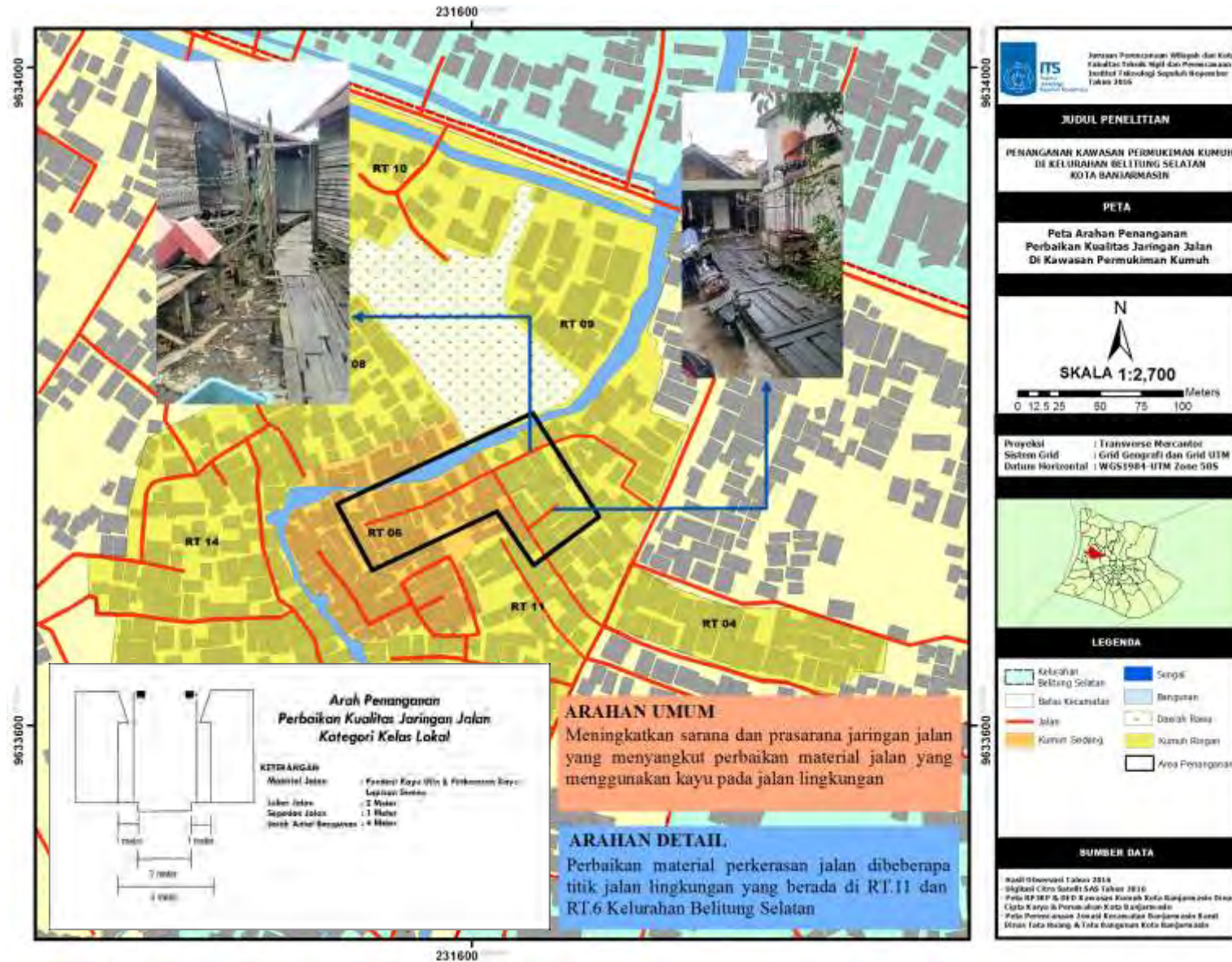
**Gambar 4.77** Arahan Penanganan Tingkat Prioritas III Kawasan Permukiman Kumuh Belitung Selatan

*Sumber : Hasil Peneliti, 2016*

*“Halaman sengaja dikosongkan.”*



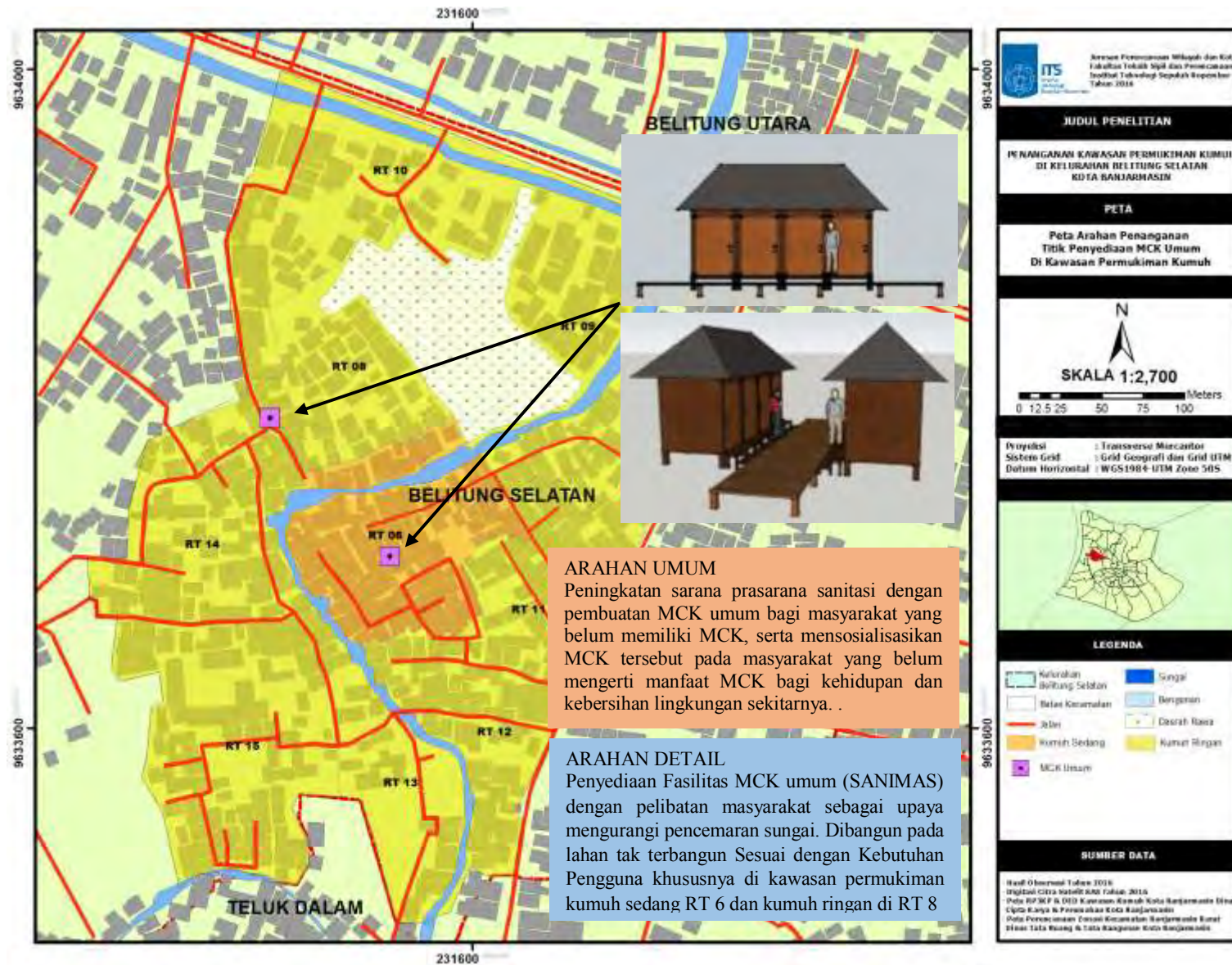
*“Halaman sengaja dikosongkan.”*



Gambar 4.79 Peta Arahan Penanganan Perbaikan Kualitas Jaringan Jalan  
Sumber : Hasil Peneliti, 2016



*“Halaman sengaja dikosongkan.”*



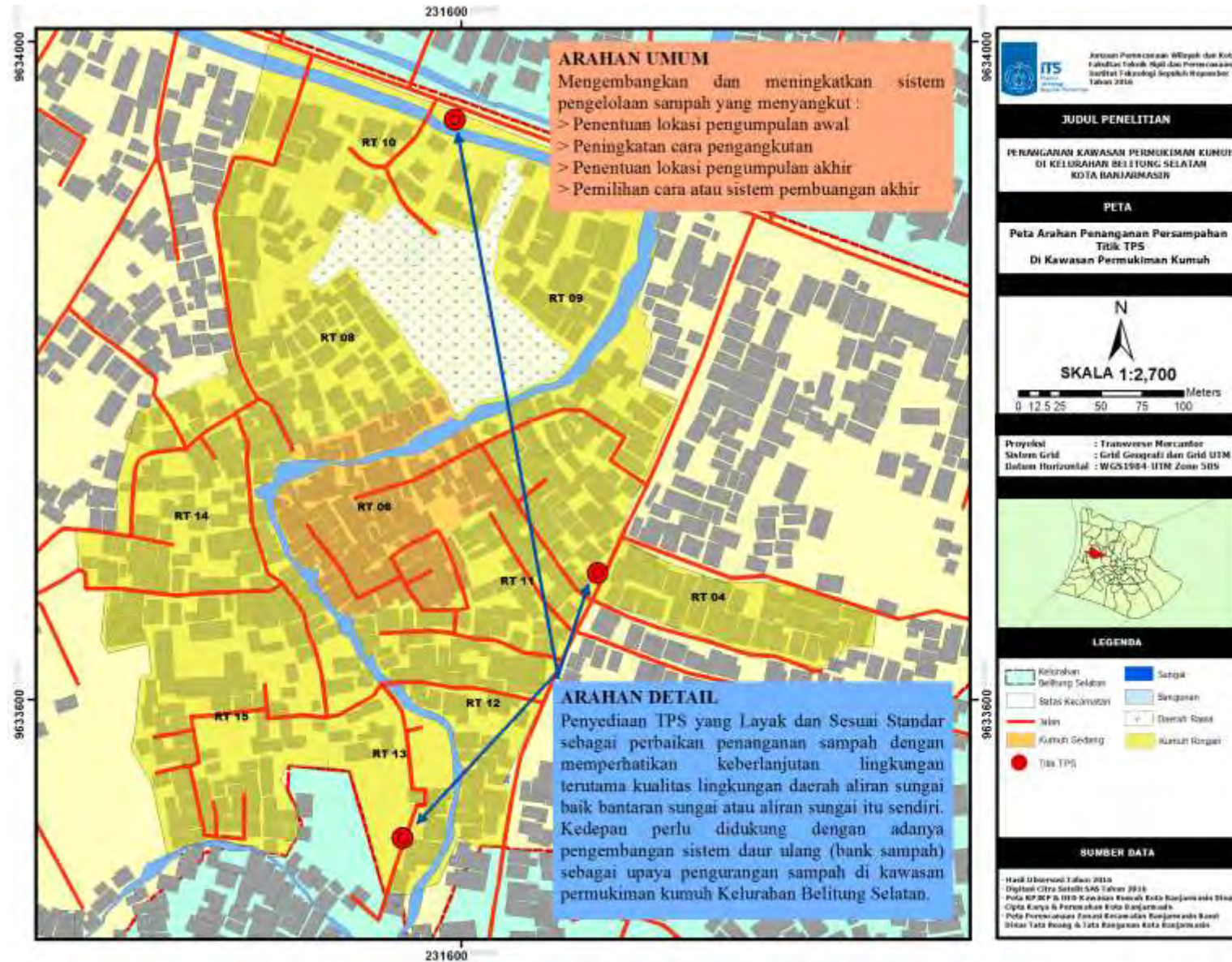
**Gambar 4.80** Peta Arahan Penanganana Perbaikan Kualitas Akses Sanitasi MCK  
Sumber : Hasil Peneliti, 2016

*“Halaman sengaja dikosongkan.”*

**Gambar 4.81** Peta Arahan Penanganana Penyediaan Jaringan Drainase  
*Sumber : Hasil Peneliti, 2016*

*“Halaman sengaja dikosongkan.”*





Gambar 4.82 Peta Arahana Penanganan Penyediaan Jaringan Drainase  
 Sumber : Hasil Peneliti, 2016

*“Halaman sengaja dikosongkan.”*





## LAMPIRAN A

Tabel Desain Survey &amp; Inventaris Data Penelitian

Indikator	Variabel	Sumber Data	Jenis Data
Kepadatan Penduduk	Tingkat kepadatan penduduk	Kecamatan Dalam Angka / Data Monografi Kelurahan	Survei Sekunder
Pertumbuhan Penduduk	Tingkat pertumbuhan penduduk	Kecamatan Dalam Angka / Data Monografi Kelurahan	Survei Sekunder
Kualitas Tanah	Jenis Tanah	Kecamatan Dalam Angka / Data Monografi Kelurahan / Observasi	Survei Sekunder / Survei Primer
Kepemilikan Lahan	Status Kepemilikan Tanah	Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarmasin / Wawancara	Survei Sekunder / Survei Primer
Kualitas Bangunan	Jenis bentuk fisik bangunan	RP3KP Kota Banjarsin / SPIPP Kota Banjarmasin / Observasi	Survei Sekunder / Survei Primer
Kepadatan Bangunan	Tingkat kepadatan bangunan dilihat berdasarkan Koefisien Dasar Bangunan (KDB)	RP3KP Kota Banjarsin / SPIPP Kota Banjarmasin / Observasi	Survei Sekunder / Survei Primer
Pertambahan Bangunan Kumuh	Tingkat resiko pertambahan bangunan	RP3KP Kota Banjarsin / SPIPP Kota Banjarmasin / Bappeda Kota Banjarmasin / Observasi	Survei Sekunder / Survei Primer
Jarak Antar Bangunan	Jarak antar sisi bangunan	Observasi / Kusioner	Survei Primer
Kualitas Jalan Lingkungan	Kualitas Jalan Lingkungan	RP3KP Kota Banjarsin / SPIPP Kota Banjarmasin / Observasi / Wawancara	Survei Sekunder / Survei Primer
Kualitas Drainase	Kualitas Drainase	RP3KP Kota Banjarsin / SPIPP Kota Banjarmasin / Observasi / Wawancara	Survei Sekunder / Survei Primer
Kualitas Air Minum	Kualitas Jaringan Air Minum	RP3KP Kota Banjarsin / SPIPP Kota Banjarmasin / Observasi / Wawancara	Survei Sekunder / Survei Primer

Indikator	Variabel	Sumber Data	Jenis Data
Kualitas Persampahan	Kualitas Persampahan	RP3KP Kota Banjarsin / SPIPP Kota Banjarmasin / Observasi / Wawancara	Survei Sekunder / Survei Primer
Kualitas Air limbah	Kualitas Air limbah	RP3KP Kota Banjarsin / SPIPP Kota Banjarmasin / Observasi / Wawancara	Survei Sekunder / Survei Primer
Kesesuaian dengan perundang-undangan dan dasar penataan ruang	Ketidaksesuaian pemanfaatan lahan dengan dokumen perencanaan	RP3KP Kota Banjarsin / SPIPP Kota Banjarmasin / Bappeda Kota Banjarmasin / Observasi / Wawancara	Survei Sekunder / Survei Primer
kondisi sosial rendah	Ketersediaan fasilitas sosial	RP3KP Kota Banjarsin / SPIPP Kota Banjarmasin / Observasi / Wawancara	Survei Sekunder / Survei Primer
Rendahnya tingkat pendidikan	Tingkat Pendidikan Penduduk	Kecamatan Dalam Angka / Data Monografi Kelurahan / Kusioner	Survei Sekunder / Survei Primer
pola mata pencaharian heterogen	Jenis Mata Pencaharian Penduduk	Kecamatan Dalam Angka / Data Monografi Kelurahan / Kusioner	Survei Sekunder / Survei Primer
Pendapatan Penduduk	Tingkat Pendapatan Penduduk	Kecamatan Dalam Angka / Data Monografi Kelurahan / Kusioner	Survei Sekunder / Survei Primer

*Sumber : Hasil Penulis, 2016*

**LAMPIRAN B**  
**LAMPIRAN (ANALISA STAKEHOLDER)**

Tabel Daftar Kelompok-Kelompok yang Kemungkinan Merupakan *Stakeholder* dalam penanganan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Belitung Selatan

Kelompok Stakeholders	Interest Stakeholders Terhadap Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	Pengaruh (Influence) Stakeholders Terhadap Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	Dampak Program Terhadap Interest (+) (0) (-)	Kepentingan (Importance) Stakeholders Terhadap Kesesuaian Program 1 = Little / No Importance 2 = Some Importance 3 = Moderate Importance 4 = Very Importance 5 = Critical Player	Pengaruh (Influence) 1 = Little/No Influence 2 = Some Influence 3 = Moderate Influence 4 = Significant Influence 5 = Very Influential
<b>Kelompok Pemerintah / Regulator</b>					
Bappeda Kota Banjarmasin	✓ Mengoptimalkan pemanfaatan ruang kota dengan menyusun kebijakan penataan ruang	➔ Mengkoordinasi di dalam manajemen permukiman perkotaan dalam penataan ruang. ➔ Terlibat di dalam perencanaan kawasan permukiman dalam penataan ruang.	+	5	5
Dinas Cipta Karya dan Perumahan Kota Banjarmasin	✓ Penyusunan kebijakan teknis di bidang tata kota dan permukiman	➔ Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang permukiman. ➔ Pelaksanaan rencana program dan teknis di bidang permukiman. ➔ Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang permukiman.	+	5	5
Dinas PU & Bina Marga Kota Banjarmasin	✓ Penyusunan kebijakan teknis di bidang pembangunan fisik dan infrastruktur	➔ Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang infrastruktur permukiman. ➔ Pelaksanaan rencana program dan teknis di bidang pembangunan fisik dan infrastruktur.	+	5	5

Kelompok Stakeholders	Interest Stakeholders Terhadap Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	Pengaruh (Influence) Stakeholders Terhadap Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	Dampak Program Terhadap Interest (+) (0) (-)	Kepentingan (Importance) Stakeholders Terhadap Kesesuaian Program 1 = Little / No Importance 2 = Some Importance 3 = Moderate Importance 4 = Very Importance 5 = Critical Player	Pengaruh (Influence) 1 = Little/No Influence 2 = Some Influence 3 = Moderate Influence 4 = Significant Influence 5 = Very Influential
		→ Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang pembangunan fisik dan infrastruktur			
Dinas Tata Ruang & Tata Bangunan	✓ Mempertimbangkan kepentingan terkait peruntukan dan Pola Ruang pada lokasi permukiman	→ Mempertimbangkan kepentingan dalam Pola Ruang pada lokasi permukiman. → Pengawasan terhadap kepentingan dalam Pola Ruang pada lokasi permukiman.	+	4	3
Kelurahan Belitung Selatan	✓ Mempertimbangkan kepentingan masyarakat dalam kondisi sosial & budaya terhadap permukiman di lokasi.	→ Mempertimbangkan terhadap kepentingan masyarakat Kelurahan Belitung Selatan dalam kondisi sosial & budaya terhadap permukiman di lokasi. → Pengawasan terhadap kepentingan masyarakat Kelurahan Belitung Selatan dalam kondisi sosial & budaya terhadap permukiman di lokasi.	+	4	3
<b>Kelompok Akademisi</b>					
Akademisi	✓ Pakar bidang perumahan dan permukiman	Berkepentingan dalam memberikan sudut pandang keilmuan terkait penanganan permukiman &	+	3	4

Kelompok Stakeholders	Interest Stakeholders Terhadap Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	Pengaruh (Influence) Stakeholders Terhadap Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	Dampak Program Terhadap Interest (+) (0) (-)	Kepentingan (Importance) Stakeholders Terhadap Kesesuaian Program 1 = Little / No Importance 2 = Some Importance 3 = Moderate Importance 4 = Very Importance 5 = Critical Player	Pengaruh (Influence) 1 = Little/No Influence 2 = Some Influence 3 = Moderate Influence 4 = Significant Influence 5 = Very Influential
		Perumahan terhadap permasalahan permukiman kumuh			
<b>Kelompok Masyarakat</b>					
Masyarakat penerima dampak (Decision Maker)	✓ Kebutuhan terhadap permukiman yang sesuai dengan kondisi masyarakat sebagai tempat tinggal.	➔ Memberikan masukan dalam penanganan kawasan permukiman kumuh di lokasi.	+	3	4

**Tabel 2.** Pemetaan Stakeholders Berdasarkan Pengaruh (Influence) Dan Kepentingan (Importance)

Influence of Stakeholders	Importance Of Activity To Stakeholders				
	Little/No Influence	Some Influence	Moderate Influence	Significant Influence	Very Influential
Little / No Importance					
Some Importance					
Moderate Importance					
Very Importance			➔ Masyarakat Penerima Dampak	✓ Kelurahan Belitung Selatan ✓ Akademisi	
Critical Player					➔ Bappeda Kota Banjarmasin ➔ Dinas PU dan Bina Marga ➔ Dinas Cipta Karya dan Perumahan ➔ Dinas Tata Ruang & Tata Bangunan

Keterangan :



: Stakeholders Kunci



: Stakeholders Pendukung

*“Halaman sengaja dikosongkan.”*

## LAMPIRAN C

**DESAIN KUSIONER**  
**(KUSIONER STATISTIK DESKRIPTIF KUALITATIF)**  
**WAWANCARA KUESIONER MASYARAKAT**  
**PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DI KELURAHAN BELITUNG**  
**SELATAN KOTA BANJARMASIN**



**ITS**  
Institut  
Teknologi  
Sepuluh Nopember

**JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA**  
**FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN**  
**INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER SURABAYA**  
**TAHUN 2016**

**BIODATA PENELITI**

Nama : Abi Syarwan Wimardana  
NRP : 3612100067  
No. Telpn : 085750090094  
Jurusan : Perencanaan Wilayah dan Kota  
Fakultas : Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan ITS Surabaya  
Judul Penelitian : Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin  
Dosen Pembimbing : Rulli Pratiwi Setiawan, ST., M.Sc.

**A. PENDAHULUAN**

Bapak/Ibu yang saya hormati,

Saya Abi Syarwan Wimardana selaku mahasiswa jurusan perencanaan wilayah dan kota ITS yang sedang mengadakan penelitian Tugas Akhir tentang *Penaganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin*. Penelitian yang saya lakukan ini terkait dengan persepsi anda sebagai stakeholder didalam penentuan karakteristik permukiman kumuh di wilayah penelitian. Serta penunjang dalam mengkaji penentuan faktor prioritas penyebab kekumuhan di Kelurahan Belitung Selatan. Atas bantuan Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

**B. IDENTITAS RESPONDEN**

Nama :  
Usia :  
Alamat :  
Asal Daerah :  
Jenis Kelamin :

**C. DAFTAR PERTANYAAN**

(jawaban dilakukan dengan melingkari pilihan jawaban yang sesuai)

**Keperluan Data Penunjang (Responden)**

1. Sudah berapa lama Bapak/Ibu tinggal disini?
  - a) < 5 tahun
  - b) 5 – 10 tahun
  - c) 11 – 15 tahun
  - d) 16 – 20 tahun
  - e) > 20 tahun

2. Bagaimana Bapak/Ibu mendapatkan rumah yang sekarang ditinggali?
  - a) Warisan milik orangtua
  - b) Membangun secara perlahan.
  - c) Membeli.
  - d) Menyewa/kontrak
  - e) Lain-lain .....
3. Berapa jumlah orang yang tinggal di rumah Bapak/Ibu?
  - a) 1 – 2 orang
  - b) 3 – 4 orang
  - c) 5 – 6 orang
  - d) 7 – 8 orang
  - e) > 8 orang
4. Berapa jumlah KK yang tinggal di rumah Bapak/Ibu?
  - a) 1 KK
  - b) 2 KK
  - c) 3 KK
  - d) > 3 KK
5. Apa alasan Bapak/Ibu memilih tempat bermukim disini?
  - a) Mendekati tempat kerja
  - b) Memanfaatkan lahan kosong yang ada
  - c) Harga tanah dapat dijangkau
  - d) Sudah turun temurun
  - e) Lain-lain .....

**Kondisi Fisik Bangunan Tempat Tinggal (Responden)**

1. Berapa luas bangunan rumah yang Bapak/Ibu tempati :  
..... M<sup>2</sup>
2. Berapa jarak antar rumah yang Bapak/Ibu tempati?
  - a. < 1 meter
  - b. 1 – 2 meter
  - c. 3 – 4 meter
  - d. 5 – 6 meter
  - e. > 6 meter
3. Apakah bangunan yang anda tempati memiliki penghawaan/ventilasi sirkulasi udara?
  - a. Ada
  - b. Tidak ada
4. Berapa banyak bangunan anda memiliki penghawaan/ventilasi sirkulasi udara?
  - a. < 5 Ventilasi
  - b. 5 – 10 Ventilasi
  - c. >10 Ventilasi
5. Apakah bangunan yang anda tempati memiliki sistem pencahayaan (*seperti jendela, ventilasi kaca,dll*)?
  - a. Ada
  - b. Tidak ada
6. Terbuat dari apakah atap rumah Bapak/Ibu?
  - a. Sirap
  - b. Genteng
  - c. Seng
  - d. PVC
  - e. Lain-lain .....
7. Terbuat dari apakah dinding rumah Bapak/Ibu?
  - a. Tembok (batu bata merah)
  - b. Setengah bata merah
  - c. Triplek
  - d. Papan kayu
  - e. Sesek/gedek
  - f. Lain-lain .....
8. Besaran proporsi material campuran dinding bangunan rumah bapak/ibu?
  - a. ≤ 25%
  - b. 25% - 50%
  - c. 50% - 75%



- d.  $\geq 75\%$   
Keterangan Material Campuran : .....
9. Terbuat dari apakah lantai rumah Bapak/Ibu?
- Keramik
  - Batuan
  - Tegel/ubin
  - Lain-lain .....
10. Besaran proporsi material campuran lantai bangunan rumah bapak/ibu?
- $\leq 25\%$
  - 25% - 50%
  - 50% - 75%
  - $\geq 75\%$
- Keterangan Material Campuran : .....
11. Apa status tanah yang Bapak/Ibu tempati pada saat ini?
- Girik
  - Hak milik
  - Hak Sewa
  - Hak Guna Bangunan
  - Lain-lain .....

#### **Keadaan Sosial Masyarakat (Responden)**

- Apa pendidikan terakhir yang anda telah tempuh ?
  - Tidak sekolah
  - Tidak tamat SD/ sederajat
  - Tamat SD/ sederajat
  - SLTP/ sederajat
  - SLTA/ sederajat
  - Perguruan Tinggi (D1, D3, D4/S1, S2, S3)
- Apakah sering diadakan kegiatan gotong royong di lingkungan sekitar ?
  - Tidak pernah
  - 1 minggu sekali
  - 2 minggu sekali
  - 3 minggu sekali
  - Lain-lain .....
- Jenis bentuk kegiatan apakah yang dilakukan pada saat gotong royong di lingkungan sekitar :  
.....

#### **Keadaan Sosial Masyarakat (Responden)**

- Apa jenis pekerjaan yang anda tekuni?
  - Tidak bekerja
  - Pedagang
  - Jasa.
  - Tukang
  - PNS
  - TNI/Polri
  - Wiraswasta
  - Pegawai Swasta
  - Buruh
  - Lain-lain .....
- Berapa rata-rata pendapatan Bapak/Ibu selama 1 bulan?
  - < 500.000
  - 500.001 – 1.250.000
  - 1.250.001 – 2.000.000
  - > 2.000.000

**Kondisi Kualitas Sarana dan Prasarana Permukiman (Responden)**

Silahkan Bapak/Ibu mengisi dengan memberikan tanda centang (v) pada kriteria yang sesuai dengan kondisi lingkungan Bapak/Ibu.

**A. Sarana**

No	Jenis Sarana	Kondisi Fisik Sarana			Uraian Kondisi
		Kurang	Cukup	Baik	
1.	Pendidikan				
2.	Kesehatan				
3.	Peribadatan				
4.	Perdagangan dan jasa				

**B. Prasarana**

No	Kriteria Prasarana	Checklist
<b>Jalan Lingkungan</b>		
1	Lebar	
	a) < 2 Meter	
	b) 2- 5 Meter	
	c) > 5 Meter	
2	Akses	
	a) Hanya dapat dilewati sepeda motor, pejalan kaki, dan gerobak dorong.	
	b) Hanya dapat dilewati pejalan kaki dan gerobak dorong.	
3	Jenis Perekerasan Jalan	
	a) Titian Kayu	
	b) Tanah Pasir kerikil	
	c) Paving	
	d) Aspal	
	e) Lain-lain : .....	
<b>Air Limbah</b>		
1	Sarana sanitasi (toilet/jamban/MCK/septic tank)	
	a) individu	
	b) komunal	
	c) tidak ada	
2	Letak sarana sanitasi (toilet/jamban/MCK/septic tank)	
	a) Menyatu bangunan rumah	
	b) Terpisah bangunan rumah	
3	Tersedianya septic tank pembuangan limbah rumah	
	a) ada	
	b) tidak ada	
<b>Drainase dan Pengendalian Banjir</b>		
1	Tinggi genangan	
	a) tidak ada	
	b) $\leq 30$ cm	
	c) $> 30$ cm	
2	Lama genangan	
	a) tidak ada	
	b) $\leq 2$ jam	
	c) $> 2$ jam	
3	Frekuensi kejadian banjir	
	a) tidak ada	
	b) $\leq 2$ kali setahun	
	c) $> 2$ kali setahun	
4	Bangunan pelengkap (gorong-gorong/pompa/pintu air)	
	a) ada	
	b) tidak ada	
<b>Persampahan</b>		
1	Sistem pengangkutan sampah (diolah sendiri, pemisahan, dll)	
	a) ada	
	b) tidak ada	
2	Integrasi (pewadahan-pengumpulan-gerobak-TPS)	
	a) ada	
	b) tidak ada	

3	Mekanisme pembuangan sampah	
	a) Ditimbun	
	b) Dibakar	
	c) Dibuang sembarang tempat	
	d) Dibuang ke sungai	
	e) Dibuang pada bak penampungan sampah	
4	Frekuensi pengangkutan sampah	
	a) $\leq 3x$ seminggu secara berkala	
	b) $> 3x$ seminggu secara berkala	
	c) waktu pengangkutan tidak menentu, tidak berkala	
<b>Air Bersih</b>		
1	Sumber air	
	a) perpipaan (PDAM)	
	b) perpipaan (Non PDAM)	
	c) air permukaan/air tanah dalam/air sumur	
	d) air dari sungai	
	e) lain-lain : .....	
2	Sambungan rumah	
	a) terlayani	
	b) tidak terlayani	
3	Kualitas air	
	a) tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa	
	b) berbau, berwarna, dan berasa	
4	Konsumsi air	
	a) $>130$ lt/per kapita/hari (bisa untuk mandi, mencuci, dll)	
	b) 110-130 lt/per kapita/hari (bisa untuk mencuci 1x, mandi 2x, dan cuci piring)	
	c) $<110$ lt/per kapita/hari (penggunaan terbatas)	

#### **Kondisi Kebencanaan dan Mitigasi Bencana di Kawasan Permukiman (Responden)**

Silahkan Bapak/Ibu mengisi dengan memberikan tanda centang (v) pada kriteria yang sesuai dengan kondisi lingkungan Bapak/Ibu.

No	Kebencanaan	Checklist
<b>Jenis Bencana</b>		
1	Jenis Bencana yang terjadi	
	a) Banjir	
	b) Kebakaran	
	c) Tanah Longsor	
	d) Lain-lain : .....	
2	Frekuensi terjadinya bencana	
	a) 1 – 2 Bulan Sekali	
	b) 3 – 4 Bulan Sekali	
	c) 5 – 6 Bulan Sekali	
	d) Lain-lain : .....	
<b>Mitigasi Bencana</b>		
1.	Ketersediaan jalur evakuasi bencana	
	a) Tidak ada	
	b) Ada	
2.	Terdapatnya program & pelatihan terkait mitigasi bencana	
	a) Tidak ada	
	b) Ada	

*“Halaman sengaja dikosongkan.”*

**LAMPIRAN D****DESAIN KUSIONER****LAMPIRAN 3 (KUSIONER AHP MENGANALISIS FAKTOR PRIORITAS PENYEBAB KUMUH PADA KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DI KELURAHAN BELITUNG SELATAN KOTA BANJARMASIN)****WAWANCARA KUESIONER AHP****PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DI KELURAHAN BELITUNG SELATAN KOTA BANJARMASIN**

**JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA  
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER SURABAYA  
TAHUN 2015**

**BIODATA PENELITIAN**

Nama : Abi Syarwan Wimardana  
NRP : 3612100067  
No. HP : 085750090094  
Jurusan : Perencanaan Wilayah dan Kota  
Fakultas : Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan  
Judul Penelitian : Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin  
Dosen Pembimbing : Rulli Pratiwi Setiawan, ST., M.Sc.

Bapak/Ibu yang saya hormati,

Saya Abi Syarwan Wimardana selaku mahasiswa ITS yang sedang mengadakan penelitian Tugas Akhir tentang *Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin*. Penelitian yang saya lakukan ini terkait dengan persepsi anda sebagai stakeholder didalam mengkaji faktor prioritas penyebab kekumuhan di kawasan permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan. Atas bantuan Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

**Kuesioner Untuk Pemerintah**

Kuesioner ini terdiri dari 2 bagian, yaitu :

1. Data Identitas Responden
2. Data Kuesioner

**I. Identitas Responden****STAKEHOLDER**

Dinas/Badan/Kantor : .....  
Jabatan : .....

**BIODATA**

Nama : .....  
Alamat : .....  
No. HP : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Usia : .....  
Tanggal Pengisian : .....

### **Petunjuk Pengisian**

Kuesioner ini bertujuan untuk melakukan pembobotan kriteria faktor prioritas penyebab kumuh di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin yang berdasarkan tingkat kepentingannya, pembobotan kriteria dibagi menjadi 9 kategori atau tingkatan sebagai berikut:

<b>Intensitas Kepentingan</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Penjelasan</b>
1	Kedua faktor memiliki pengaruh yang sama dalam faktor prioritas penyebab kumuh kawasan	Kedua faktor yang diuji memiliki karakteristik dan tingkat kepentingan yang sama, sehingga dapat dikatakan bahwa kedua faktor berada pada tingkatan prioritas yang sama.
3	Faktor sedikit lebih penting dan berpengaruh dibandingkan dengan faktor yang lain dalam faktor prioritas penyebab kumuh kawasan	Keberadaan faktor memiliki sedikit pengaruh yang patut dipertimbangkan sehingga faktor dapat menjadi faktor yang sedikit berpengaruh dan sedikit lebih diprioritaskan daripada faktor pembandingnya dalam faktor prioritas penyebab kumuh kawasan
5	Faktor jelas lebih penting dan berpengaruh daripada faktor yang lain dalam faktor prioritas penyebab kumuh kawasan	Keberadaan faktor memiliki cukup banyak pengaruh yang patut dipertimbangkan sehingga faktor menjadi faktor yang lebih berpengaruh dan lebih diprioritaskan dibandingkan faktor pembandingnya dalam faktor prioritas penyebab kumuh kawasan
7	Faktor sangat jelas lebih penting dan berpengaruh daripada faktor yang lain dalam faktor prioritas penyebab kumuh kawasan	Keberadaan faktor memiliki lebih banyak pengaruh yang patut dipertimbangkan sehingga perbandingan antar faktor dapat dengan mudah diketahui tingkat pengaruh dan prioritasnya dalam faktor prioritas penyebab kumuh kawasan
9	Faktor mutlak lebih penting dan berpengaruh dibandingkan dengan faktor yang lain dalam faktor prioritas penyebab kumuh kawasan	Keberadaan faktor sangat banyak memiliki pengaruh yang patut dipertimbangkan sehingga perbandingan antar dua faktor yang diuji dapat dengan mudah diketahui bahwa faktor jelas sangat lebih berpengaruh dan lebih penting serta sangat diprioritaskan dalam faktor prioritas penyebab kumuh kawasan
2,4,6,8	Faktor antara 2 nilai pertimbangan yang berdekatan sehingga ragu-ragu dalam prioritas penyebab kumuh kawasan karena saling berdekatan.	Faktor memiliki tingkatan nilai yang saling berdekatan antara nilai dibawah dan diatasnya dimana faktor yang diberikan bila ada 2 kompromi diantara 2 pilihan.

**Contoh :**

**Manakah yang lebih penting dari kriteria penentu lokasi pengembangan perumahan dibawah ini.**

Faktor/Variabel A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Faktor/Variabel B
Kondisi Fisik Bangunan	X																	Kondisi Sarana & Prasarana

Hal ini berarti bahwa kondisi sosial dan ekonomi sangat penting daripada tingkat pendapatan. Dengan ini saya mengharapkan ketersediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menjawab daftar pertanyaan ini sesuai dengan pengalaman anda.

### **Level Kriteria Tingkat I**

Berikut ini terdapat kriteria yang akan dibobotkan untuk mendapatkan kriteria utama penentu yang dapat digunakan dalam membantu menentukan faktor prioritas penyebab kumuh. kriteria ini disusun berdasarkan hasil sintesa pustaka yang telah dilakukan peneliti sebelumnya.

**Keterangan :**

<b>Faktor</b>	<b>Deskripsi</b>
Kondisi Fisik Bangunan	Kondisi fisik bangunan adalah faktor prioritas penyebab kumuh yang dijelaskan dengan variabel kepemilikan lahan bangunan, ketersediaan rumah, Kualitas bangunan, kepadatan bangunan
Kondisi Sarana & Prasarana	Kondisi sarana & prasarana merupakan komponen faktor prioritas penyebab kumuh yang dijelaskan dengan variabel ketersediaan sarana & prasarana, kualitas sarana & prasarana.

Kondisi Sosial & Ekonomi Masyarakat	Kondisi sosial & Ekonomi masyarakat adalah faktor prioritas penyebab kumuh yang dijelaskan dengan variabel tingginya arus migrasi, tingkat pendidikan, kepadatan penduduk, pendapatan penghasilan penduduk.
Pengendalian Hukum	Pengendalian Hukum adalah pengawasan dan ketersediaan rencana kebijakan terhadap kawasan kumuh yang ditinjau dengan kebijakan, dokumen perencanaan serta undang-undang oleh pihak pengampu kebijakan.

### 1. Kondisi Fisik Bangunan

Faktor	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Faktor
Kondisi Fisik Bangunan																		Kondisi Sarana & Prasarana
Kondisi Fisik Bangunan																		Kondisi Sosial & Ekonomi Masyarakat
Kondisi Fisik Bangunan																		Pengendalian Hukum

### 2. Kondisi Sarana & Prasarana

Faktor	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Faktor
Kondisi Sarana & Prasarana																		Kondisi Sosial & Ekonomi Masyarakat
Kondisi Sarana & Prasarana																		Pengendalian Hukum

### 3. Kondisi Sosial & Ekonomi Masyarakat

Faktor	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Faktor
Kondisi Sosial & Ekonomi Masyarakat																		Pengendalian Hukum

### Level Kriteria Tingkat II

Berikut ini terdapat sub - kriteria berupa variabel yang akan dibobotkan untuk mendapatkan faktor prioritas utama penentu yang dapat digunakan dalam membantu menentukan faktor prioritas penyebab kumuh. kriteria ini disusun berdasarkan hasil sintesa pustaka yang telah dilakukan peneliti sebelumnya.

#### A. Kondisi Fisik Bangunan

Variabel	Deskripsi
Kepemilikan Lahan Bangunan	Kepemilikan lahan bangunan yang mempengaruhi terhadap faktor prioritas penyebab kumuh kawasan yang dinilai dari Status kategori kepemilikan tanah dan Izin Mendirikan Bangunan yaitu sertifikat tanah yang dimiliki.
Ketersediaan Rumah	Ketersediaan rumah yang mempengaruhi terhadap faktor prioritas penyebab kumuh kawasan yang dinilai dari Besaran Ketersediaan Lahan Peruntukan Perumahan (luas lahan/Ha)
Kualitas Bangunan	Kualitas Bangunan yang mempengaruhi terhadap faktor prioritas penyebab kumuh kawasan yang dinilai dari berdasarkan material jenis & konstruksi bentuk bangunan seperti atap, dinding, pencahayaan.
Kepadatan Bangunan	Kepadatan Bangunan yang mempengaruhi terhadap faktor prioritas penyebab kumuh kawasan yang dinilai dari tingkat kepadatan

	bangunan yang diukur melalui koefisien dasar bangunan (KDB) dan jarak antar bangunan di wilayah penelitian.
--	---

### 1) Kepemilikan Lahan Bangunan

Variabel	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Variabel
Kepemilikan Lahan Bangunan																		Ketersediaan rumah
Kepemilikan Lahan Bangunan																		Kualitas Bangunan
Kepemilikan Lahan Bangunan																		Kepadatan Bangunan

### 2) Ketersedian Rumah

Variabel	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Variabel
Ketersediaan rumah																		Kualitas Bangunan
Ketersediaan rumah																		Kepadatan Bangunan

### 3) Kualitas Bangunan

Variabel	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Variabel
Kualitas Bangunan																		Kepadatan Bangunan

## B. Kondisi Sarana & Prasarana

Variabel	Deskripsi
Kualitas Sarana & Prasarana	Kualitas Sarana & Prasarana yang mempengaruhi terhadap faktor prioritas penyebab kumuh kawasan yang dinilai dari Tingkat Pelayanan Sarana & Prasarana yaitu jangkauan jarak sarana & Prasarana serta tingkat kepuasan pelayanan oleh masyarakat
Ketersediaan Sarana & Prasarana	Ketersediaan sarana & prasarana yang mempengaruhi terhadap faktor prioritas penyebab kumuh kawasan yang dinilai dari Besaran Ketersedian jumlah sarana & prasarana (jumlah fasilitas)

### 1) Kualitas Sarana & Prasarana

Variabel	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Variabel
Kualitas Sarana & Prasarana																		Ketersediaan Sarana & Prasarana

## C. Kondisi Sosial & Ekonomi Masyarakat

Variabel	Deskripsi
Tingginya Arus Migrasi	Tingginya Arus Migrasi yang mempengaruhi terhadap faktor prioritas penyebab kumuh kawasan yang dinilai dari Besaran laju migrasi penduduk setiap tahunnya (Jiwa/Tahun)
Tingkat Pendidikan	Tingkat Pendidikan yang mempengaruhi terhadap faktor prioritas penyebab kumuh kawasan yang dinilai dari Penduduk Berdasarkan Pendidikan Terakhir yaitu tamat SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi.



Kepadatan Penduduk	Kepadatan penduduk yang mempengaruhi terhadap faktor prioritas penyebab kumuh kawasan yang dinilai dari Tingkat kepadatan penduduk per (Jiwa/Ha)
Pendapatan penghasilan penduduk	Pendapatan penghasilan penduduk yang mempengaruhi terhadap faktor prioritas penyebab kumuh kawasan yang dinilai dari Besaran Pendapatan Penduduk.

### 1) Tingginya Arus Migrasi

Variabel	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Variabel
Tingginya Arus Migrasi																		Tingkat Pendidikan
Tingginya Arus Migrasi																		Kepadatan Penduduk
Tingginya Arus Migrasi																		Pendapatan penghasilan penduduk

### 2) Tingkat Pendidikan

Variabel	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Variabel
Tingkat Pendidikan																		Kepadatan Penduduk
Tingkat Pendidikan																		Pendapatan penghasilan penduduk

### 3) Kepadatan Penduduk

Variabel	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Variabel
Kepadatan Penduduk																		Pendapatan penghasilan penduduk

## D. Pengendalian Hukum

Variabel	Deskripsi
Pengawasan tanah kurang ketat	Pengawasan tanah kurang ketat yang mempengaruhi terhadap faktor prioritas penyebab kumuh kawasan yang dinilai dari Besaran Bangunan yg tidak sesuai dengan pemanfaatan Lahan (Persil/Ha)
Kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum	Kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum yang mempengaruhi terhadap faktor prioritas penyebab kumuh kawasan yang dinilai dari ketersediaan dokumen perencanaan kawasan permukiman.

### 1) Pengawasan tanah kurang ketat

Variabel	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Variabel
Pengawasan tanah kurang ketat																		Kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum

*“Halaman sengaja dikosongkan.”*

## LAMPIRAN E

## Rekapitulasi Hasil Kusioner Statistik Deskriptif Kualitatif I

No.	Nama	Alamat	Keperluan Data Penunjang					Kondisi Fisik Bangunan										Keadaan Sosial Masyarakat			
			Lama Tinggal	Cara Mendapatkan Rumah	Jumlah Orang	Jumlah KK	Alasan Tinggal	Jarak Bangunan	Ventilasi	Jumlah Ventilasi	Sistem Pencapaian	Atap	Dinding	Proporsi	Lantai	Proporsi	Status Tanah	Tingkat Pendidikan	Intensitas Gotong Royong	Pekerjaan	Pendapatan
1	Haulik	Jl. Saka Permai Gg. Rindu RT.6 No.33	E	C	B	A	D	A	A	B	A	C	D	A	C	A	B	E	E	H	B
2	Abdul Hakim	Jl. Saka Permai Gg. Rindu RT.6 No.21	E	A	C	A	D	A	A	A	B	A	D	A	C	A	A	D	A	B	B
3	Mursyid	Jl. Saka Permai Gg. Rindu RT.6 No.20	E	A	B	A	D	A	A	A	B	C	D	A	C	A	A	C	A	D	B
4	Arsyad Jauhari	Jl. Saka Permai Gg. Rindu RT.6 No.19	E	B	C	A	B	A	A	A	B	A	D	A	C	A	A	C	A	D	B
5	M. Halim	Jl. Saka Permai Gg. Rindu RT.6 No.18	E	A	B	A	D	A	A	A	B	A	D	A	C	A	A	C	A	D	B
6	Subari	Jl. Saka Permai Gg. Rindu RT.6 No.35	E	A	B	A	D	A	A	B	A	C	D	B	C	A	A	E	A	I	C
7	Ahmad Zanuri	Jl. Saka Permai Gg. Rindu RT.6 No.37	E	A	C	A	D	A	A	A	A	C	D	A	C	A	A	D	A	C	C
8	Zaini	Jl. Saka Permai Gg. Rindu RT.6 No.38	D	A	B	A	D	A	A	A	A	A	D	A	C	A	A	D	A	D	B
9	M. Hadi	Jl. Saka Permai Gg. Rindu RT.6 No.39	E	A	C	A	D	A	A	A	A	A	D	A	C	A	B	E	A	D	D
10	Ahmad Mundiari	Jl. Saka Permai Gg. Rindu RT.6 No.41	D	C	C	A	A	A	A	A	A	C	D	A	C	A	A	D	A	C	C
11	Darmasny Effendi	Jl. Saka Permai Gg. Rindu RT.6 No.22	E	B	D	A	B	A	A	A	A	C	D	A	C	A	A	C	A	D	C
12	Muhlis	Jl. Saka Permai Gg. Amilin RT.12 No.11	E	A	B	A	B	A	A	A	A	C	D	A	C	A	B	E	E	D	C

No.	Nama	Alamat	Keperluan Data Penunjang					Kondisi Fisik Bangunan										Keadaan Sosial Masyarakat			
			Lama Tinggal	Cara Mendapatkan Rumah	Jumlah Orang	Jumlah KK	Alasan Tinggal	Jarak Bangunan	Ventilasi	Jumlah Ventilasi	Sistem Pencapaian	Atap	Dinding	Proporsi	Lantai	Proporsi	Status Tanah	Tingkat Pendidikan	Intensitas Gotong Royong	Pekerjaan	Pendapatan
13	Zaini	Jl. Saka Permai Gg.Amilin RT.12 No.3	D	C	B	A	D	A	A	A	A	C	D	A	C	A	B	E	E	J	A
14	Lina Marlina	Jl. Saka Permai Gg.Amilin RT.12 No.4	E	B	B	A	D	A	A	A	A	C	D	A	C	A	B	C	E	B	C
15	Rahimah	Jl. Saka Permai Gg.Amilin RT.12 No.5	E	A	B	A	B	B	A	B	A	E	D	A	C	A	B	F	D	J	C
16	Tina	Jl. Saka Permai Gg.Amilin RT.12 No.12	E	B	D	B	B	B	A	B	A	B	D	A	C	A	B	B	C	J	A
17	Fakhrudin	Jl. Saka Permai Gg.Amilin RT.12 No.7	E	A	C	A	D	B	A	A	A	C	D	A	C	A	B	E	A	B	C
18	Rusniah	Jl. Saka Permai Gg.Amilin RT.12 No.10	E	A	B	A	D	A	A	A	A	A	D	A	C	A	B	E	A	B	B
19	Adriyansyah	Jl. Saka Permai Gg.Amilin RT.12 No.9	E	A	C	A	D	B	A	A	A	C	D	A	C	A	B	E	A	I	B
20	Atmadin	Jl. Saka Permai Gg.Amilin RT.11 No.31	E	B	B	A	B	B	A	A	A	C	D	A	C	A	A	B	A	C	B
21	Nurul	Jl. Saka Permai Gg.Amilin RT.11 No.46	B	B	C	B	B	A	A	A	A	C	D	A	C	A	B	C	A	B	D
22	Hanif	Jl. Saka Permai Gg.Amilin RT.11 No.34	A	C	B	A	A	A	A	A	A	C	D	A	C	A	B	E	A	I	B
23	Marfuad	Jl. Saka Permai Gg.Amilin RT.11 No.35	D	A	C	A	D	B	A	A	A	A	D	A	C	A	B	D	A	D	B
24	Akhmad	Jl. Saka Permai Gg.Amilin RT.11 No.32	D	B	C	A	B	B	A	A	A	A	D	A	C	A	B	D	A	B	B
25	Riyadi	Jl. Saka Permai Gg.Amilin RT.11 No.44	E	A	B	A	D	B	A	A	A	C	D	A	C	A	B	E	A	B	C
26	Muhammad Ardie	Jl. Saka Permai Gg.Amilin RT.11 No.37	B	C	B	A	A	B	A	A	A	C	D	A	C	A	B	E	A	I	C

No.	Nama	Alamat	Keperluan Data Penunjang					Kondisi Fisik Bangunan										Keadaan Sosial Masyarakat			
			Lama Tinggal	Cara Mendapatkan Rumah	Jumlah Orang	Jumlah KK	Alasan Tinggal	Jarak Bangunan	Ventilasi	Jumlah Ventilasi	Sistem Pencapaian	Atap	Dinding	Proporsi	Lantai	Proporsi	Status Tanah	Tingkat Pendidikan	Intensitas Gotong Royong	Pekerjaan	Pendapatan
27	Hisnatul Jannah	Jl. Saka Permai Gg.Amlin RT.11 no.39	E	A	C	A	D	B	A	A	A	C	D	A	C	A	B	D	A	C	B
28	Asmani	Jl. Saka Permai Gg.Rindu RT.9 No.1	E	A	E	D	D	B	A	A	A	C	D	A	C	A	A	C	D	D	B
29	Susilawati	Jl. Saka Permai Gg.Rindu RT.9 No.2	E	A	B	A	D	B	A	A	A	C	D	A	C	A	B	C	A	B	A
30	Siti Aisyah	Jl. Saka Permai Gg.Rindu RT.9 No.27	E	B	B	A	D	B	A	A	B	C	D	A	C	A	B	A	E	C	A
31	Rama	Jl. Saka Permai Gg.Rindu RT.9 No.12	E	A	A	A	D	D	A	A	A	C	D	A	C	A	B	D	A	B	C
32	Ratna	Jl. Saka Permai Gg.Rindu RT.9 No.26	B	C	B	A	A	A	A	A	A	C	D	A	C	A	A	E	A	A	B
33	Norlaila Fitriani	Jl. Saka Permai Gg.Rindu RT.9 No.10	E	A	B	A	D	B	A	A	A	C	C	A	C	A	B	E	A	A	A
34	Lina Lusiana	Jl. Saka Permai Gg.Rindu RT.9 No.13	D	D	C	A	A	B	A	A	A	C	D	A	C	A	B	C	E	C	D
35	Herwansyah	Jl. Saka Permai Gg.Rindu RT.9 No.3	D	A	B	A	D	B	A	A	A	C	D	A	C	A	B	C	A	I	B
36	Damanhuri, SH	Jl. Belitung Darat Gg.Keluarga RT.10 No.16	E	B	B	A	D	B	A	A	A	C	D	A	C	A	B	F	E	J	D
37	Rasmani	Jl. Belitung Darat Gg.Keluarga RT.10 No.18	B	D	C	A	A	B	A	A	A	A	D	A	C	A	C	A	D	H	D
38	Syaiful Anwar	Jl. Belitung Darat Gg.Keluarga RT.10 No.15	D	A	B	A	D	B	B	A	A	C	D	A	C	A	B	E	A	B	D
39	Arif Zakir	Jl. Belitung Darat	E	A	C	A	D	B	A	A	A	A	D	A	C	A	B	D	A	I	C

No.	Nama	Alamat	Keperluan Data Penunjang					Kondisi Fisik Bangunan										Keadaan Sosial Masyarakat			
			Lama Tinggal	Cara Mendapatkan Rumah	Jumlah Orang	Jumlah KK	Alasan Tinggal	Jarak Bangunan	Ventilasi	Jumlah Ventilasi	Sistem Pencapaian	Atap	Dinding	Proporsi	Lantai	Proporsi	Status Tanah	Tingkat Pendidikan	Intensitas Gotong Royong	Pekerjaan	Pendapatan
		Gg.Keluarga RT.10 No.19																			
40	Zumaidi	Jl. Belitung Darat Gg.Keluarga RT.10 No.14	D	A	B	A	D	B	A	A	A	C	D	A	C	A	B	C	A	D	B
41	Syauci Firman syah	Jl. Belitung Darat Gg.Keluarga RT.10 No.17	D	A	C	A	D	B	A	A	A	C	D	A	C	A	B	D	A	I	C
42	Ahmad Ardian syah	Jl. Belitung Darat Gg.Keluarga RT.10 No.20	E	A	C	A	D	B	A	A	A	A	D	A	C	A	B	D	A	I	C
43	Supriah nsyah	Jl. Belitung Darat Gg.Keluarga RT.10 No.21	D	A	B	A	D	B	A	A	A	C	D	A	C	A	B	C	A	D	B
44	M. Misran S	Jl. Batu Benawa 2 Ujung RT.15 No.40	E	B	A	A	C	A	A	B	A	A	D	A	C	A	B	E	E	A	A
45	Maiadi ah	Jl. Batu Benawa 2 Ujung RT.15 No.1	E	B	B	A	C	A	A	A	A	C	D	A	C	A	B	C	D	B	C
46	Muqris Wiraguna	Jl. Batu Benawa 2 Ujung RT.15 No.42	B	A	C	B	E	A	A	B	A	C	D	A	C	A	B	E	D	I	B
47	Marzuki	Jl. Batu Benawa 2 Ujung RT.15 No.45	D	C	B	A	A	A	A	A	A	C	D	A	C	A	B	A	D	C	B
48	Hendriyanto	Jl. Batu Benawa 2 Ujung RT.15 No.33	E	A	C	A	D	A	A	A	A	C	D	A	C	A	B	E	D	A	A
49	Ahmad Al Hauri	Jl. Batu Benawa 2 Ujung RT.15 No.3	D	A	B	A	D	B	A	A	A	C	D	A	C	A	B	C	A	D	B
50	Ahdianoor Fahraini	Jl. Batu Benawa 2 Ujung RT.15 No.41	E	B	A	A	C	A	A	B	A	A	D	A	C	A	B	E	E	A	A

No.	Nama	Alamat	Keperluan Data Penunjang					Kondisi Fisik Bangunan										Keadaan Sosial Masyarakat			
			Lama Tinggal	Cara Mendapatkan Rumah	Jumlah Orang	Jumlah KK	Alasan Tinggal	Jarak Bangunan	Ventilasi	Jumlah Ventilasi	Sistem Pencapaian	Atap	Dinding	Proporsi	Lantai	Proporsi	Status Tanah	Tingkat Pendidikan	Intensitas Gotong Royong	Pekerjaan	Pendapatan
51	Fathur Rahman	Jl. Batu Benawa 2 Ujung RT.15 No.4	E	B	B	A	C	A	A	A	A	C	D	A	C	A	B	C	D	B	C
52	H. Musemin	Jl. Saka Permai Gg.Abdul Hamid RT.13 No.14	E	B	B	A	B	C	A	A	A	A	D	A	C	A	B	E	E	I	C
53	Abdul Sukur	Jl. Saka Permai Gg.Abdul Hamid RT.13 No.16	E	B	C	A	B	B	A	B	A	C	D	A	C	A	B	D	E	E	D
54	Irawan	Jl. Saka Permai Gg.Abdul Hamid RT.13 No.17	B	B	A	A	B	B	A	B	A	C	A	B	A	B	B	E	E	J	D
55	Mahdalena	Jl. Saka Permai Gg.Abdul Hamid RT.13 No.20	E	A	B	A	D	A	A	A	A	C	D	A	C	A	B	C	E	A	A
56	Muniah	Jl. Saka Permai Gg.Abdul Hamid RT.13 No.18	E	A	C	A	D	A	A	C	A	A	D	A	C	A	B	D	E	B	B
57	Ruwaidah Saweni	Jl. Saka Permai Gg.Abdul Hamid RT.13 No.22	E	B	C	A	B	B	A	B	A	C	D	A	C	A	B	D	E	E	D
58	Ulul Azmi	Jl. Saka Permai Gg.Abdul Hamid RT.13 No.23	B	B	A	A	B	B	A	B	A	C	A	B	A	B	B	E	E	J	D
59	Rahman	Jl. Saka Permai Gg.Abdul Hamid RT.13 No.15	E	A	B	A	D	A	A	A	A	C	D	A	C	A	B	C	E	A	A
60	Firman syah	Jl. Belitung Darat Gg. Keluarga RT.14 No.28	E	A	C	A	D	B	A	A	A	C	D	A	C	A	A	C	A	I	B
61	Ahmad Syarif	Jl. Belitung Darat Gg.	A	D	B	A	E	A	A	A	A	C	D	A	C	A	C	E	E	I	B

No.	Nama	Alamat	Keperluan Data Penunjang					Kondisi Fisik Bangunan										Keadaan Sosial Masyarakat			
			Lama Tinggal	Cara Mendapatkan Rumah	Jumlah Orang	Jumlah KK	Alasan Tinggal	Jarak Bangunan	Ventilasi	Jumlah Ventilasi	Sistem Pencapaian	Atap	Dinding	Proporsi	Lantai	Proporsi	Status Tanah	Tingkat Pendidikan	Intensitas Gotong Royong	Pekerjaan	Pendapatan
		Keluarga RT.14 No.29																			
62	Fahrul	Jl. Belitung Darat Gg. Keluarga RT.14 No.31	E	A	C	A	D	A	A	A	A	C	D	A	C	A	A	E	A	H	D
63	M. Bahrul Ulum	Jl. Belitung Darat Gg. Keluarga RT.14 No.33	E	B	C	A	B	B	A	B	A	C	D	A	C	A	B	D	E	E	D
64	Ahmad Fahrhan	Jl. Belitung Darat Gg. Keluarga RT.14 No.34	B	B	A	A	B	B	A	B	A	C	A	B	A	B	B	E	E	J	D
65	Muhammad Rizkiannur	Jl. Belitung Darat Gg. Keluarga RT.14 No.36	E	A	B	A	D	A	A	A	A	C	D	A	C	A	B	C	E	A	A
66	Muhammad Ilmi	Jl. Belitung Darat Gg. Keluarga RT.14 No.37	E	A	C	A	D	B	A	A	A	C	D	A	C	A	A	C	A	I	B
67	Norhayati	Jl. Belitung Darat Gg. Keluarga RT.14 No.38	A	D	B	A	E	A	A	A	A	C	D	A	C	A	C	E	E	I	B
68	Khairil Anwar	Jl. Belitung Darat Gg. Keluarga RT.8 No.27	E	A	B	A	D	B	A	A	A	A	D	A	C	A	A	F	E	G	C
69	Suriansyah	Jl. Belitung Darat Gg. Keluarga RT.8 No.9	E	A	B	A	D	A	A	A	A	C	D	A	C	A	A	D	E	C	D
70	Abdul Nafi	Jl. Belitung Darat Gg. Keluarga RT.8 No.23	E	A	D	A	D	A	A	AA	A	C	D	A	C	A	B	D	A	B	D
71	Arbaini	Jl. Belitung Darat Gg. Keluarga RT.8 No.5	E	A	D	A	A	B	A	A	A	A	D	A	C	A	C	D	A	I	D



No.	Nama	Alamat	Keperluan Data Penunjang					Kondisi Fisik Bangunan										Keadaan Sosial Masyarakat			
			Lama Tinggal	Cara Mendapatkan Rumah	Jumlah Orang	Jumlah KK	Alasan Tinggal	Jarak Bangunan	Ventilasi	Jumlah Ventilasi	Sistem Pencapaian	Atap	Dinding	Proporsi	Lantai	Proporsi	Status Tanah	Tingkat Pendidikan	Intensitas Gotong Royong	Pekerjaan	Pendapatan
72	Sadida n Rabbiah	Jl. Belirtung Darat Gg. Keluarga RT.8 No.24	E	B	A	A	C	A	A	B	A	A	D	A	C	A	B	E	E	A	A
73	Rusimah	Jl. Belirtung Darat Gg. Keluarga RT.8 No.25	E	B	B	A	C	A	A	A	A	C	D	A	C	A	B	C	D	B	C
74	Ilham Setiawan	Jl. Belirtung Darat Gg. Keluarga RT.8 No.6	E	B	B	A	B	C	A	A	A	A	D	A	C	A	B	E	E	I	C
75	Ana Noviana	Jl. Belirtung Darat Gg. Keluarga RT.8 No.7	E	B	C	A	B	B	A	B	A	C	D	A	C	A	B	D	E	E	D
76	Said Akhmad	Jl. Saka Permai Gg. Muntazah RT.4 No.6	E	A	B	A	D	A	A	A	A	C	D	A	C	A	B	C	E	A	A
77	Budi Setiawan	Jl. Saka Permai Gg. Muntazah RT.4 No.8	E	A	C	A	D	A	A	C	A	A	D	A	C	A	B	D	E	B	B
78	Ahmad Syah Arifudin	Jl. Saka Permai Gg. Muntazah RT.4 No.11	E	B	C	A	B	B	A	B	A	C	D	A	C	A	B	D	E	E	D
79	Surya Rahmida	Jl. Saka Permai Gg. Muntazah RT.4 No.12	B	B	A	A	B	B	A	B	A	C	A	B	A	B	B	E	E	J	D
80	M. Fajri Ismail	Jl. Saka Permai Gg. Muntazah RT.4 No.13	E	A	B	A	D	A	A	A	A	C	D	A	C	A	B	C	E	A	A
81	Mirna Isdayanti	Jl. Saka Permai Gg. Muntazah RT.4 No.17	E	A	C	A	D	B	A	A	A	C	D	A	C	A	A	C	A	I	B
82	Fatimah	Jl. Saka Permai Gg. Muntazah RT.4 No.18	A	D	B	A	E	A	A	A	A	C	D	A	C	A	C	E	E	I	B
83	Ari Punardi	Jl. Saka Permai Gg. Muntazah RT.4 No.5	E	A	C	A	D	A	A	A	A	C	D	A	C	A	A	E	A	H	D

## Rekapitulasi Hasil Kusioner Statistik Deskriptif Kualitatif II

No.	Nama	Alamat/RT	Kondisi Fisik Sarana				Kondisi Jalan Lingkungan			Kondisi Air Limbah			Kondisi Drainase Dan Pengendalian Banjir				Kondisi Persampahan				Kondisi Air bersih			
			Pendidikan	Kesehatan	Peribadatan	Perdagangan & Jasa	Lebar	Akses	Jenis Perkerasan	Sistem Sanitasi	Letak	Septic Tank	Tinggi	Lama	Frekuensi	Bangunan Pelengkap	Sistem	Integrasi	Mekanisme	Frekuensi	Sumber	Sambungan	Kualitas	Konsumsi
1	Haulik	Jl. Saka Permai Gg. Rindu RT.6 No.33	Kurang	Kurang	Cukup	Cukup	A	A	D	A	B	B	A	A	A	B	A	A	E	A	A	A	A	A
2	Abdul Hakim	Jl. Saka Permai Gg. Rindu RT.6 No.21	Kurang	Cukup	Cukup	Cukup	A	A	C	A	A	B	A	B	B	B	B	A	E	A	D	B	B	B
3	Mursyid	Jl. Saka Permai Gg. Rindu RT.6 No.20	Kurang	Cukup	Cukup	Cukup	A	A	C	B	B	B	B	B	A	B	B	A	E	A	D	B	B	B
4	Arsyad Jauhari	Jl. Saka Permai Gg. Rindu RT.6 No.19	Kurang	Cukup	Cukup	Cukup	A	A	C	B	B	B	A	A	A	B	A	A	E	A	D	B	B	B
5	M. Halim	Jl. Saka Permai Gg. Rindu RT.6 No.18	Kurang	Cukup	Cukup	Cukup	A	A	C	B	B	B	B	B	A	B	A	A	E	A	D	B	B	B
6	Subari	Jl. Saka Permai Gg. Rindu RT.6 No.35	Kurang	Cukup	Cukup	Cukup	A	A	C	A	A	A	A	A	A	B	A	A	E	B	A	A	A	A
7	Ahmad Zanuri	Jl. Saka Permai Gg. Rindu RT.6 No.37	Kurang	Cukup	Cukup	Cukup	A	A	C	A	A	A	A	A	A	B	B	A	E	A	A	A	A	A
8	Zaini	Jl. Saka Permai Gg. Rindu RT.6 No.38	Kurang	Cukup	Cukup	Cukup	A	A	C	A	A	B	A	A	A	B	B	A	E	A	A	A	A	A
9	M. Hadi	Jl. Saka Permai Gg. Rindu RT.6 No.39	Kurang	Cukup	Cukup	Cukup	A	A	C	A	B	B	B	B	B	B	B	A	E	A	A	A	A	A
10	Ahmad Mundari	Jl. Saka Permai Gg. Rindu RT.6 No.41	Kurang	Cukup	Cukup	Cukup	A	A	C	A	A	B	A	A	A	B	B	A	E	A	A	A	A	A
11	Darmansyah Effendi	Jl. Saka Permai Gg. Rindu RT.6 No.22	Kurang	Cukup	Cukup	Cukup	A	A	C	A	A	B	A	A	A	B	B	A	E	A	A	A	A	A
12	Muhlis	Jl. Saka Permai Gg. Amilin RT.12 No.11	Kurang	Baik	Baik	Baik	A	A	D	A	A	A	B	C	A	B	A	A	E	B	A	A	A	A

13	Zaini	Jl. Saka Permai Gg.Amin RT.12 No.3	Kurang	Cukup	Cukup	Cukup	A	A	C	A	A	A	B	B	B	B	B	A	E	A	A	A	A	A
14	Lina Marlina	Jl. Saka Permai Gg.Amin RT.12 No.4	Kurang	Cukup	Cukup	Kurang	A	A	E	A	A	A	B	B	A	B	A	A	E	A	A	A	A	A
15	Rahimah	Jl. Saka Permai Gg.Amin RT.12 No.5	Baik	Baik	Baik	Baik	A	A	D	A	A	A	A	A	A	B	B	A	E	B	A	A	A	A
16	Tina	Jl. Saka Permai Gg.Amin RT.12 No.12	Baik	Baik	Baik	Baik	A	A	D	A	A	A	A	B	A	B	A	A	E	B	A	A	A	A
17	Fakhrudin	Jl. Saka Permai Gg.Amin RT.12 No.7	Kurang	Cukup	Baik	Baik	A	A	C	A	A	A	A	A	A	B	B	A	E	A	A	A	A	A
18	Rusniah	Jl. Saka Permai Gg.Amin RT.12 No.10	Kurang	Cukup	Baik	Cukup	A	A	C	A	A	A	A	A	A	B	B	A	E	A	A	A	A	A
19	Adriyansyah	Jl. Saka Permai Gg.Amin RT.12 No.9	Kurang	Baik	Cukup	Cukup	A	A	C	A	A	A	A	A	A	B	B	A	E	A	A	A	A	A
20	Atmadin	Jl. Saka Permai Gg.Amin RT.11 No.31	Kurang	Kurang	Cukup	Kurang	A	A	A	B	B	A	A	A	A	B	A	A	E	A	A	A	A	A
21	Nurul	Jl. Saka Permai Gg.Amin RT.11 No.46	Kurang	Cukup	Cukup	Cukup	A	A	C	A	A	B	A	A	A	B	A	A	E	A	A	A	A	A
22	Hanif	Jl. Saka Permai Gg.Amin RT.11 No.34	Kurang	Cukup	Cukup	Cukup	A	A	C	A	A	B	A	A	A	B	B	A	E	A	A	A	A	A
23	Marfuad	Jl. Saka Permai Gg.Amin RT.11 No.35	Kurang	Cukup	Cukup	Kurang	A	A	C	A	A	B	A	A	A	B	B	A	E	A	A	A	A	A
24	Akhmadi	Jl. Saka Permai Gg.Amin RT.11 No.32	Kurang	Cukup	Cukup	Cukup	A	A	C	A	A	B	A	A	A	B	B	A	E	A	A	A	A	A
25	Riyadi	Jl. Saka Permai Gg.Amin RT.11 No.44	Kurang	Cukup	Cukup	Cukup	A	A	C	A	A	A	A	A	A	B	B	A	E	A	A	A	A	A
26	Muhammad Ardie	Jl. Saka Permai Gg.Amin RT.11 No.37	Kurang	Cukup	Cukup	Kurang	A	A	C	A	A	A	A	A	A	B	B	A	E	A	A	A	A	A
27	Hisnatul Jannah	Jl. Saka Permai Gg.Amin RT.11 no.39	Kurang	Cukup	Cukup	Cukup	A	A	C	A	A	A	A	A	A	B	B	A	E	A	A	A	A	A
28	Asmani	Jl. Saka Permai Gg.Rindu RT.9 No.1	Cukup	Kurang	Kurang	Kurang	A	A	C	A	B	B	A	A	A	B	A	A	E	B	A	A	A	A

29	Susilawati	Jl. Saka Permai Gg.Rindu RT.9 No2	Kurang	Cukup	Kurang	Kurang	A	A	C	A	A	B	B	C	B	B	B	A	E	A	A	A	A	A
30	Siti Aisyah	Jl. Saka Permai Gg.Rindu RT.9 No.27	Cukup	Kurang	Kurang	Cukup	A	A	C	B	B	B	B	B	B	B	A	A	E	A	D	B	B	B
31	Rama	Jl. Saka Permai Gg.Rindu RT.9 No.12	Cukup	Kurang	Kurang	Cukup	A	A	C	B	B	B	A	A	A	B	A	A	E	A	D	A	B	B
32	Ratna	Jl. Saka Permai Gg.Rindu RT.9 No.26	Cukup	Kurang	Kurang	Cukup	A	A	C	B	B	A	A	A	A	B	B	A	E	A	A	A	A	A
33	Norlaila Fitriani	Jl. Saka Permai Gg.Rindu RT.9 No.10	Cukup	Kurang	Kurang	Cukup	A	A	C	A	A	B	A	A	A	B	A	A	E	A	A	A	A	A
34	Lina Lusiana	Jl. Saka Permai Gg.Rindu RT.9 No.13	Cukup	Kurang	Kurang	Cukup	A	A	C	B	B	B	A	A	A	B	A	A	E	C	E	B	A	A
35	Herwansya h	Jl. Saka Permai Gg.Rindu RT.9 No.3	Cukup	Kurang	Kurang	Cukup	A	A	C	A	A	B	A	A	A	B	B	A	E	A	A	A	A	A
36	Damanhuri e, SH	Jl. Belitung Darat Gg.Keluarga RT.10 No.16	Kurang	Cukup	Baik	Cukup	A	A	C	A	B	A	B	B	B	B	B	A	E	A	A	A	A	A
37	Rasmani	Jl. Belitung Darat Gg.Keluarga RT.10 No.18	Kurang	Cukup	Baik	Cukup	B	A	C	A	A	A	B	B	B	B	B	A	E	A	A	A	B	B
38	Syaiful Anwar	Jl. Belitung Darat Gg.Keluarga RT.10 No.15	Kurang	Cukup	Baik	Kurang	A	A	C	A	A	A	A	A	A	B	B	A	E	A	A	A	A	A
39	Arif Zakir	Jl. Belitung Darat Gg.Keluarga RT.10 No.19	Kurang	Cukup	Baik	Cukup	A	A	C	A	A	A	A	A	A	B	B	A	E	A	A	A	A	A
40	Zumaidi	Jl. Belitung Darat Gg.Keluarga RT.10 No.14	Kurang	Cukup	Baik	Cukup	A	A	C	A	A	A	A	A	A	B	B	A	E	A	A	A	A	A
41	Syauki Firmansyah	Jl. Belitung Darat Gg.Keluarga RT.10 No.17	Kurang	Cukup	Baik	Cukup	A	A	C	A	A	A	A	A	A	B	B	A	E	A	A	A	A	A
42	Ahmad Ardiansyah	Jl. Belitung Darat Gg.Keluarga RT.10 No.20	Kurang	Cukup	Baik	Cukup	B	A	C	A	A	A	B	B	B	B	B	A	E	A	A	A	B	B
43	Supriansya h	Jl. Belitung Darat Gg.Keluarga RT.10 No.21	Kurang	Cukup	Baik	Kurang	A	A	C	A	A	A	A	A	A	B	B	A	E	A	A	A	A	A
44	M. Misran S	Jl. Batu Benawa 2 Ujung RT.15 No.40	Kurang	Kurang	Cukup	Cukup	A	C	A	A	B	A	A	A	B	B	B	B	E	A	A	A	A	A

45	Maiadiah	Jl. Batu Benawa 2 Ujung RT.15 No.1	Kurang	Kurang	Cukup	Cukup	A	A	C	A	A	A	A	A	A	B	B	B	E	A	A	A	A	A
46	Muqris Wiraguna	Jl. Batu Benawa 2 Ujung RT.15 No.42	Kurang	Kurang	Cukup	Cukup	A	A	C	A	A	A	A	A	A	B	B	B	E	A	A	A	A	A
47	Marzuki	Jl. Batu Benawa 2 Ujung RT.15 No.45	Kurang	Kurang	Cukup	Cukup	A	A	C	A	A	A	A	A	A	B	B	B	E	A	A	A	A	A
48	Hendriyanto	Jl. Batu Benawa 2 Ujung RT.15 No.33	Kurang	Kurang	Cukup	Cukup	A	A	C	A	A	A	A	A	A	B	B	B	E	A	A	A	A	A
49	Ahmad Al Hauri	Jl. Batu Benawa 2 Ujung RT.15 No.3	Kurang	Kurang	Cukup	Cukup	A	A	C	A	A	A	A	A	A	B	B	B	E	A	A	A	A	A
50	Ahdianoor Fahraini	Jl. Batu Benawa 2 Ujung RT.15 No.41	Kurang	Kurang	Cukup	Cukup	A	A	C	A	A	A	A	A	A	B	B	B	E	A	A	A	A	A
51	Fathur Rahman	Jl. Batu Benawa 2 Ujung RT.15 No.4	Kurang	Kurang	Cukup	Cukup	A	A	C	A	A	A	A	A	A	B	B	B	E	A	A	A	A	A
52	H. Musemin	Jl. Saka Permai Gg.Abdul Hamid RT.13 No.14	Baik	Baik	Baik	Baik	A	A	D	A	A	A	A	A	A	A	B	B	E	C	A	A	A	A
53	Abdul Sukur	Jl. Saka Permai Gg.Abdul Hamid RT.13 No.16	Baik	Baik	Baik	Baik	B	A	D	A	A	A	A	A	A	A	A	B	E	C	A	A	A	A
54	Irawan	Jl. Saka Permai Gg.Abdul Hamid RT.13 No.17	Baik	Baik	Baik	Baik	B	A	E	A	A	A	A	A	A	A	B	B	E	C	D	B	B	B
55	Mahdalena	Jl. Saka Permai Gg.Abdul Hamid RT.13 No.20	Cukup	Kurang	Kurang	Cukup	A	A	C	B	A	A	B	B	A	B	A	A	E	A	D	B	B	B
56	Muniah	Jl. Saka Permai Gg.Abdul Hamid RT.13 No.18	Cukup	Kurang	Kurang	Cukup	A	A	C	A	A	A	B	B	A	B	A	A	E	A	A	A	A	A
57	Ruwaydah Saweni	Jl. Saka Permai Gg.Abdul Hamid RT.13 No.22	Baik	Baik	Baik	Baik	B	A	E	A	A	A	A	A	A	A	B	B	E	C	D	B	B	B
58	Ulul Azmi	Jl. Saka Permai Gg.Abdul Hamid RT.13 No.23	Cukup	Kurang	Kurang	Cukup	A	A	C	B	A	A	B	B	A	B	A	A	E	A	D	B	B	B
59	Rahman	Jl. Saka Permai Gg.Abdul Hamid RT.13 No.15	Cukup	Kurang	Kurang	Cukup	A	A	C	A	A	A	B	B	A	B	A	A	E	A	A	A	A	A
60	Firmansyah	Jl. Belitung Darat Gg. Keluarga RT.14 No.28	Cukup	Cukup	Cukup	Cukup	A	A	C	A	A	A	B	A	B	B	B	A	E	A	A	A	A	A
61	Ahmad Syarif	Jl. Belitung Darat Gg. Keluarga RT.14 No.29	Cukup	Cukup	Cukup	Cukup	A	A	C	A	A	A	A	A	B	B	A	A	E	B	A	A	A	A

62	Fahrul	Jl. Belitung Darat Gg. Keluarga RT.14 No.31	Cukup	Cukup	Cukup	Cukup	A	A	C	A	A	A	B	B	B	B	A	A	E	A	A	A	A	A
63	M. Bahrul Ulum	Jl. Belitung Darat Gg. Keluarga RT.14 No.33	Cukup	Kurang	Kurang	Cukup	A	A	C	A	A	B	A	A	A	B	A	A	E	A	A	A	A	A
64	Ahmad Fahrian	Jl. Belitung Darat Gg. Keluarga RT.14 No.34	Cukup	Kurang	Kurang	Cukup	A	A	C	B	B	B	A	A	A	B	A	A	E	C	E	B	A	A
65	Muhammad Rizkiannur	Jl. Belitung Darat Gg. Keluarga RT.14 No.36	Cukup	Kurang	Kurang	Cukup	A	A	C	A	A	B	A	A	A	B	B	A	E	A	A	A	A	A
66	Muhammad Ilmi	Jl. Belitung Darat Gg. Keluarga RT.14 No.37	Cukup	Cukup	Cukup	Cukup	A	A	C	A	A	A	B	B	B	B	A	A	E	A	A	A	A	A
67	Norhayati	Jl. Belitung Darat Gg. Keluarga RT.14 No.38	Cukup	Kurang	Kurang	Cukup	A	A	C	A	A	B	A	A	A	B	A	A	E	A	A	A	A	A
68	Khairil Anwar	Jl. Belitung Darat Gg. Keluarga RT.8 No.27	Cukup	Cukup	Cukup	Baik	A	A	C	A	B	A	B	B	B	C	B	A	E	A	B	A	A	B
69	Suriansyah	Jl. Belitung Darat Gg. Keluarga RT.8 No.9	Kurang	Cukup	Cukup	Cukup	A	A	C	A	A	B	B	B	B	B	B	A	E	A	A	A	A	A
70	Abdul Nafi	Jl. Belitung Darat Gg. Keluarga RT.8 No.23	Kurang	Cukup	Cukup	Cukup	A	A	C	A	A	A	A	A	A	B	A	A	E	A	A	A	A	A
71	Arbaini	Jl. Belitung Darat Gg. Keluarga RT.8 No.5	Kurang	Kurang	Cukup	Cukup	A	A	C	A	A	A	B	B	B	B	B	A	E	A	C	B	A	B
72	Sadidan Rabiah	Jl. Belitung Darat Gg. Keluarga RT.8 No.24	Kurang	Cukup	Cukup	Cukup	A	A	C	A	A	B	B	B	B	B	B	A	E	A	A	A	A	A
73	Rusimah	Jl. Belitung Darat Gg. Keluarga RT.8 No.25	Kurang	Cukup	Cukup	Cukup	A	A	C	A	A	A	A	A	A	B	A	A	E	A	A	A	A	A
74	Ilham Setiawan	Jl. Belitung Darat Gg. Keluarga RT.8 No.6	Kurang	Kurang	Cukup	Cukup	A	A	C	A	A	A	B	B	B	B	B	A	E	A	C	B	A	B
75	Ana Noviana	Jl. Belitung Darat Gg. Keluarga RT.8 No.7	Kurang	Cukup	Cukup	Cukup	A	A	C	A	A	B	B	B	B	B	B	A	E	A	A	A	A	A
76	Said Akhmad	Jl. Saka Permai Gg. Muntazah RT.4 No.6	Cukup	Cukup	Cukup	Cukup	A	A	C	A	A	A	B	A	B	B	B	A	E	A	A	A	A	A
77	Budi Setiawan	Jl. Saka Permai Gg. Muntazah RT.4 No.8	Cukup	Cukup	Cukup	Cukup	A	A	C	A	A	A	A	A	B	B	A	A	E	B	A	A	A	A

78	Ahmad Syah Arifuddin	Jl. Saka Permai Gg. Muntazah RT.4 No.11	Cukup	Cukup	Cukup	Cukup	A	A	C	A	A	A	B	B	B	B	A	A	E	A	A	A	A	A
79	Surya Rahmaida	Jl. Saka Permai Gg. Muntazah RT.4 No.12	Cukup	Kurang	Kurang	Cukup	A	A	C	A	A	B	A	A	A	B	A	A	E	A	A	A	A	A
80	M. Fajri Ismail	Jl. Saka Permai Gg. Muntazah RT.4 No.13	Cukup	Kurang	Kurang	Cukup	A	A	C	B	B	B	A	A	A	B	A	A	E	C	E	B	A	A
81	Mirna Isdayanti	Jl. Saka Permai Gg. Muntazah RT.4 No.17	Cukup	Kurang	Kurang	Cukup	A	A	C	A	A	B	A	A	A	B	B	A	E	A	A	A	A	A
82	Fatimah	Jl. Saka Permai Gg. Muntazah RT.4 No.18	Cukup	Cukup	Cukup	Cukup	A	A	C	A	A	A	B	B	B	B	A	A	E	A	A	A	A	A
83	Ari Punardi	Jl. Saka Permai Gg. Muntazah RT.4 No.5	Cukup	Kurang	Kurang	Cukup	A	A	C	A	A	B	A	A	A	B	A	A	E	A	A	A	A	A

## Rekapitulasi Hasil Kusioner Statistik Deskriptif Kualitatif III

No	Nama	Alamat/RT	Jenis Bencana		Mitigasi Bencana	
			Jenis Bencana	Frekuensi	Ketersediaan	Program
1	Haulik	Jl. Saka Permai Gg. Rindu RT.6 No.33	D	D	A	A
2	Abdul Hakim	Jl. Saka Permai Gg. Rindu RT.6 No.21	B	D	A	B
3	Mursyid	Jl. Saka Permai Gg. Rindu RT.6 No.20	B	D	A	B
4	Arsyad Jauhari	Jl. Saka Permai Gg. Rindu RT.6 No.19	B	D	A	B
5	M. Halim	Jl. Saka Permai Gg. Rindu RT.6 No.18	B	D	A	B
6	Subari	Jl. Saka Permai Gg. Rindu RT.6 No.35	B	D	A	B
7	Ahmad Zanuri	Jl. Saka Permai Gg. Rindu RT.6 No.37	B	D	A	B
8	Zaini	Jl. Saka Permai Gg. Rindu RT.6 No.38	B	D	A	B
9	M. Hadi	Jl. Saka Permai Gg. Rindu RT.6 No.39	B	D	A	B
10	Ahmad Mundari	Jl. Saka Permai Gg. Rindu RT.6 No.41	B	D	A	B
11	Darmansyah Effendi	Jl. Saka Permai Gg. Rindu RT.6 No.22	B	D	A	B
12	Muhlis	Jl. Saka Permai Gg. Amilin RT.12 No.11	D	D	A	B
13	Zaini	Jl. Saka Permai Gg. Amilin RT.12 No.3	D	D	A	B
14	Lina Marlina	Jl. Saka Permai Gg. Amilin RT.12 No.4	D	D	A	A
15	Rahimah	Jl. Saka Permai Gg. Amilin RT.12 No.5	D	D	A	A
16	Tina	Jl. Saka Permai Gg. Amilin RT.12 No.12	B	D	A	A
17	Fakhrudin	Jl. Saka Permai Gg. Amilin RT.12 No.7	D	D	A	B
18	Rusniah	Jl. Saka Permai Gg. Amilin RT.12 No.10	D	D	A	B
19	Adriyansyah	Jl. Saka Permai Gg. Amilin RT.12 No.9	D	D	A	B
20	Atmadin	Jl. Saka Permai Gg. Amilin RT.11 No.31	D	D	A	B
21	Nurul	Jl. Saka Permai Gg. Amilin RT.11 No.46	D	D	A	B
22	Hanif	Jl. Saka Permai Gg. Amilin RT.11 No.34	D	D	A	B
23	Marfuad	Jl. Saka Permai Gg. Amilin RT.11 No.35	D	D	A	B
24	Akhmadi	Jl. Saka Permai Gg. Amilin RT.11 No.32	D	C	A	B
25	Riyadi	Jl. Saka Permai Gg. Amilin RT.11 No.44	D	D	A	B



No	Nama	Alamat/RT	Jenis Bencana		Mitigasi Bencana	
			Jenis Bencana	Frekuensi	Ketersediaan	Program
26	Muhammad Ardie	Jl. Saka Permai Gg.Amilin RT.11 No.37	D	D	A	B
27	Hisnatul Jannah	Jl. Saka Permai Gg.Amilin RT.11 no.39	D	D	A	B
28	Asmani	Jl. Saka Permai Gg.Rindu RT.9 No.1	B	D	A	B
29	Susilawati	Jl. Saka Permai Gg.Rindu RT.9 No2	A	D	A	B
30	Siti Aisyah	Jl. Saka Permai Gg.Rindu RT.9 No.27	A	D	A	B
31	Rama	Jl. Saka Permai Gg.Rindu RT.9 No.12	B	D	A	B
32	Ratna	Jl. Saka Permai Gg.Rindu RT.9 No.26	B	D	A	B
33	Norlaila Fitriani	Jl. Saka Permai Gg.Rindu RT.9 No.10	B	D	A	B
34	Lina Lusiana	Jl. Saka Permai Gg.Rindu RT.9 No.13	B	D	A	B
35	Herwansyah	Jl. Saka Permai Gg.Rindu RT.9 No.3	B	D	A	B
36	Damanhurie, SH	Jl. Belitung Darat Gg.Keluarga RT.10 No.16	B	D	A	A
37	Rasmani	Jl. Belitung Darat Gg.Keluarga RT.10 No.18	D	D	A	B
38	Syaiful Anwar	Jl. Belitung Darat Gg.Keluarga RT.10 No.15	D	D	A	B
39	Arif Zakir	Jl. Belitung Darat Gg.Keluarga RT.10 No.19	D	D	A	B
40	Zumaidi	Jl. Belitung Darat Gg.Keluarga RT.10 No.14	B	D	A	B
41	Syauki Firmansyah	Jl. Belitung Darat Gg.Keluarga RT.10 No.17	B	D	A	B
42	Ahmad Ardiansyah	Jl. Belitung Darat Gg.Keluarga RT.10 No,20	D	D	A	B
43	Supriansyah	Jl. Belitung Darat Gg.Keluarga RT.10 No.21	D	D	A	B
44	M. Misran S	Jl. Batu Benawa 2 Ujung RT.15 No.40	D	D	A	A
45	Maiadih	Jl. Batu Benawa 2 Ujung RT.15 No.1	D	D	A	A
46	Muqris Wiraguna	Jl. Batu Benawa 2 Ujung RT.15 No.42	D	D	A	A
47	Marzuki	Jl. Batu Benawa 2 Ujung RT.15 No.45	D	D	A	A
48	Hendriyanto	Jl. Batu Benawa 2 Ujung RT.15 No.33	D	D	A	A
49	Ahmad Al Hauri	Jl. Batu Benawa 2 Ujung RT.15 No.3	D	D	A	A
50	Ahdianoor Fahraini	Jl. Batu Benawa 2 Ujung RT.15 No.41	D	D	A	A
51	Fathur Rahman	Jl. Batu Benawa 2 Ujung RT.15 No.4	D	D	A	A
52	H. Musemin	Jl. Saka Permai Gg.Abdul Hamid RT.13 No.14	B	D	A	A

No	Nama	Alamat/RT	Jenis Bencana		Mitigasi Bencana	
			Jenis Bencana	Frekuensi	Ketersediaan	Program
53	Abdul Sukur	Jl. Saka Permai Gg. Abdul Hamid RT.13 No.16	B	D	A	A
54	Irawan	Jl. Saka Permai Gg. Abdul Hamid RT.13 No.17	B	D	A	A
55	Mahdalena	Jl. Saka Permai Gg. Abdul Hamid RT.13 No.20	D	D	A	A
56	Muniah	Jl. Saka Permai Gg. Abdul Hamid RT.13 No.18	B	D	A	A
57	Ruwaydah Saweni	Jl. Saka Permai Gg. Abdul Hamid RT.13 No.22	B	D	A	A
58	Ulul Azmi	Jl. Saka Permai Gg. Abdul Hamid RT.13 No.23	B	D	A	A
59	Rahman	Jl. Saka Permai Gg. Abdul Hamid RT.13 No.15	D	D	A	A
60	Firmansyah	Jl. Belitung Darat Gg. Keluarga RT.14 No.28	B	D	A	B
61	Ahmad Syarif	Jl. Belitung Darat Gg. Keluarga RT.14 No.29	B	D	A	B
62	Fahrul	Jl. Belitung Darat Gg. Keluarga RT.14 No.31	B	D	A	B
63	M. Bahrul Ulum	Jl. Belitung Darat Gg. Keluarga RT.14 No.33	B	D	A	B
64	Ahmad Fahrian	Jl. Belitung Darat Gg. Keluarga RT.14 No.34	B	D	A	B
65	Muhammad Rizkiannur	Jl. Belitung Darat Gg. Keluarga RT.14 No.36	D	D	A	B
66	Muhammad Ilmi	Jl. Belitung Darat Gg. Keluarga RT.14 No.37	D	D	A	B
67	Norhayati	Jl. Belitung Darat Gg. Keluarga RT.14 No.38	D	D	A	B
68	Khairil Anwar	Jl. Belirtung Darat Gg. Keluarga RT.8 No.27	B	D	A	B
69	Suriansyah	Jl. Belirtung Darat Gg. Keluarga RT.8 No.9	B	D	A	B
70	Abdul Nafi	Jl. Belirtung Darat Gg. Keluarga RT.8 No.23	B	D	A	B
71	Arbaini	Jl. Belirtung Darat Gg. Keluarga RT.8 No.5	B	D	A	B
72	Sadidan Rabiah	Jl. Belirtung Darat Gg. Keluarga RT.8 No.24	B	D	A	B
73	Rusimah	Jl. Belirtung Darat Gg. Keluarga RT.8 No.25	B	D	A	B
74	Ilham Setiawan	Jl. Belirtung Darat Gg. Keluarga RT.8 No.6	B	D	A	B
75	Ana Noviana	Jl. Belirtung Darat Gg. Keluarga RT.8 No.7	B	D	A	B
76	Said Akhmad	Jl. Saka Permai Gg. Muntazah RT.4 No.6	B	D	A	A
77	Budi Setiawan	Jl. Saka Permai Gg. Muntazah RT.4 No.8	B	D	A	A
78	Ahmad Syah Arifuddin	Jl. Saka Permai Gg. Muntazah RT.4 No.11	B	D	A	A
79	Surya Rahmaida	Jl. Saka Permai Gg. Muntazah RT.4 No.12	D	D	A	A

No	Nama	Alamat/RT	Jenis Bencana		Mitigasi Bencana	
			Jenis Bencana	Frekuensi	Ketersediaan	Program
80	M. Fajri Ismail	Jl. Saka Permai Gg. Muntazah RT.4 No.13	B	D	A	A
81	Mirna Isdayanti	Jl. Saka Permai Gg. Muntazah RT.4 No.17	B	D	A	A
82	Fatimah	Jl. Saka Permai Gg. Muntazah RT.4 No.18	B	D	A	A
83	Ari Punardi	Jl. Saka Permai Gg. Muntazah RT.4 No.5	D	D	A	A

*“Halaman sengaja dikosongkan.”*

**LAMPIRAN F**

**RESPONDEN 1 (DINAS CIPTA KARYA & PERMUKIMAN KOTA BANJARMASIN)  
KUSIONER AHP (ANALYSIS HIERARCHY PROCESS)  
ANALISIS FAKTOR PRIORITAS PENYEBAB KUMUH  
PADA KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DI KELURAHAN BELITUNG SELATAN KOTA  
BANJARMASIN**



**ITS**  
Institut  
Teknologi  
Sepuluh Nopember

**JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA  
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER SURABAYA  
TAHUN 2015**

**BIODATA PENELITI**

Nama	: Abi Syarwan Wimardana
NRP	: 3612100067
No. HP	: 085750090094
Jurusan	: Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas	: Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
Judul Penelitian	: Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin
Dosen Pembimbing	: Rulli Pratiwi Setiawan, ST., M.Sc.

Bapak/Ibu yang saya hormati,

Saya Abi Syarwan Wimardana selaku mahasiswa ITS yang sedang mengadakan penelitian Tugas Akhir tentang *Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin*. Penelitian yang saya lakukan ini terkait dengan persepsi anda sebagai stakeholder didalam mengkaji faktor prioritas penyebab kekumuhan di kawasan permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan. Atas bantuan Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

**Kuesioner Untuk Pemerintah**

Kuesioner ini terdiri dari 2 bagian, yaitu :

1. Data Identitas Responden
2. Data Kuesioner

**II. Identitas Responden**

**STAKEHOLDER**

Dinas/Badan/Kantor : Dinas Cipta Karya dan Permukiman  
Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Permukiman & PBL

### BIODATA

Nama : Lisda Maymunah  
 Alamat : Jl. Rawasari VII Banjarmasin  
 No. HP : 081348348058  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Usia : 49 Tahun  
 Tanggal Pengisian : Senin, 14 Maret 2016



### Petunjuk Pengisian

Kuesioner ini bertujuan untuk melakukan pembobotan kriteria faktor prioritas penyebab kumuh di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin yang berdasarkan tingkat kepentingannya, pembobotan kriteria dibagi menjadi 9 kategori atau tingkatan sebagai berikut:

Intensitas Kepentingan	Keterangan	Penjelasan
1	Kedua faktor memiliki pengaruh yang sama dalam faktor prioritas penyebab kumuh kawasan	Kedua faktor yang diuji memiliki karakteristik dan tingkat kepentingan yang sama, sehingga dapat dikatakan bahwa kedua faktor berada pada tingkatan prioritas yang sama.
3	Faktor sedikit lebih penting dan berpengaruh dibandingkan dengan faktor yang lain dalam faktor prioritas penyebab kumuh kawasan	Keberadaan faktor memiliki sedikit pengaruh yang patut dipertimbangkan sehingga faktor dapat menjadi faktor yang sedikit berpengaruh dan sedikit lebih diprioritaskan daripada faktor pembandingnya dalam faktor prioritas penyebab kumuh kawasan
5	Faktor jelas lebih penting dan berpengaruh daripada faktor yang lain dalam faktor prioritas penyebab kumuh kawasan	Keberadaan faktor memiliki cukup banyak pengaruh yang patut dipertimbangkan sehingga faktor menjadi faktor yang lebih berpengaruh dan lebih diprioritaskan dibandingkan faktor pembandingnya dalam faktor prioritas penyebab kumuh kawasan
7	Faktor sangat jelas lebih penting dan berpengaruh daripada faktor yang lain dalam faktor prioritas penyebab kumuh kawasan	Keberadaan faktor memiliki lebih banyak pengaruh yang patut dipertimbangkan sehingga perbandingan antar faktor dapat dengan mudah diketahui tingkat pengaruh dan prioritasnya dalam faktor prioritas penyebab kumuh kawasan
9	Faktor mutlak lebih penting dan berpengaruh dibandingkan dengan faktor yang lain dalam faktor prioritas penyebab kumuh kawasan	Keberadaan faktor sangat banyak memiliki pengaruh yang patut dipertimbangkan sehingga perbandingan antar dua faktor yang diuji dapat dengan mudah diketahui bahwa faktor jelas sangat lebih berpengaruh dan lebih penting serta sangat diprioritaskan dalam faktor prioritas penyebab kumuh kawasan
2,4,6,8	Faktor antara 2 nilai pertimbangan yang berdekatan sehingga ragu-ragu dalam prioritas penyebab kumuh kawasan karena saling berdekatan.	Faktor memiliki tingkatan nilai yang saling berdekatan antara nilai dibawah dan diatasnya dimana faktor yang diberikan bila ada 2 kompromi diantara 2 pilihan.

### Level Kriteria Tingkat I

Berikut ini terdapat kriteria yang akan dibobotkan untuk mendapatkan kriteria utama penentu yang dapat digunakan dalam membantu menentukan faktor prioritas penyebab kumuh. kriteria ini disusun berdasarkan hasil sintesa pustaka yang telah dilakukan peneliti sebelumnya.

Keterangan :

Faktor	Deskripsi
Kondisi Fisik Bangunan	Kondisi fisik bangunan adalah faktor prioritas penyebab kumuh yang dijelaskan dengan variabel kepemilikan lahan bangunan, ketersediaan rumah, Kualitas bangunan, kepadatan bangunan
Kondisi Sarana & Prasarana	Kondisi sarana & prasarana merupakan komponen faktor prioritas penyebab kumuh yang dijelaskan dengan variabel ketersediaan sarana & prasarana, kualitas sarana & prasarana.
Kondisi Sosial & Ekonomi Masyarakat	Kondisi sosial & Ekonomi masyarakat adalah faktor prioritas penyebab kumuh yang dijelaskan dengan variabel tingginya arus migrasi, tingkat pendidikan, kepadatan penduduk, pendapatan penghasilan penduduk.

Faktor	Deskripsi
Pengendalian Hukum	Pengendalian Hukum adalah pengawasan dan ketersediaan rencana kebijakan terhadap kawasan kumuh yang ditinjau dengan kebijakan, dokumen perencanaan serta undang-undang oleh pihak pengampu kebijakan.

### 1. Kondisi Fisik Bangunan

Faktor	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Faktor
Kondisi Fisik Bangunan								X										Kondisi Sarana & Prasarana
Kondisi Fisik Bangunan			X															Kondisi Sosial & Ekonomi Masyarakat
Kondisi Fisik Bangunan					X													Pengendalian Hukum

### 2. Kondisi Sarana & Prasarana

Faktor	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Faktor
Kondisi Sarana & Prasarana		X																Kondisi Sosial & Ekonomi Masyarakat
Kondisi Sarana & Prasarana			X															Pengendalian Hukum

### 3. Kondisi Sosial & Ekonomi Masyarakat

Faktor	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Faktor
Kondisi Sosial & Ekonomi Masyarakat								X										Pengendalian Hukum

### Level Kriteria Tingkat II

Berikut ini terdapat sub - kriteria berupa variabel yang akan dibobotkan untuk mendapatkan faktor prioritas utama penentu yang dapat digunakan dalam membantu menentukan faktor prioritas penyebab kumuh. kriteria ini disusun berdasarkan hasil sintesa pustaka yang telah dilakukan peneliti sebelumnya.

#### A. Kondisi Fisik Bangunan

Variabel	Deskripsi
Kepemilikan Lahan Bangunan	Kepemilikan lahan bangunan yang mempengaruhi terhadap faktor prioritas penyebab kumuh kawasan yang dinilai dari Status kategori kepemilikan tanah dan Izin Mendirikan Bangunan yaitu sertifikat tanah yang dimiliki.
Ketersediaan Rumah	Ketersediaan rumah yang mempengaruhi terhadap faktor prioritas penyebab kumuh kawasan yang dinilai dari Besaran Ketersediaan Lahan Peruntukan Perumahan (luas lahan/Ha)
Kualitas Bangunan	Kualitas Bangunan yang mempengaruhi terhadap faktor prioritas penyebab kumuh kawasan yang dinilai dari berdasarkan material jenis & konstruksi bentuk bangunan seperti atap, dinding, pencahayaan.
Kepadatan Bangunan	Kepadatan Bangunan yang mempengaruhi terhadap faktor prioritas penyebab kumuh kawasan yang dinilai dari tingkat kepadatan bangunan yang diukur melalui koefisien dasar bangunan (KDB) dan jarak antar bangunan di wilayah penelitian.

1) **Kepemilikan Lahan Bangunan**

Variabel	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Variabel
Kepemilikan Lahan Bangunan							X											Ketersediaan rumah
Kepemilikan Lahan Bangunan																X		Kualitas Bangunan
Kepemilikan Lahan Bangunan											X							Kepadatan Bangunan

2) **Ketersedian Rumah**

Variabel	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Variabel
Ketersediaan rumah															X			Kualitas Bangunan
Ketersediaan rumah										X								Kepadatan Bangunan

3) **Kualitas Bangunan**

Variabel	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Variabel
Kualitas Bangunan							X											Kepadatan Bangunan

**B. Kondisi Sarana & Prasarana**

Variabel	Deskripsi
Kualitas Sarana & Prasarana	Kualitas Sarana & Prasarana yang mempengaruhi terhadap faktor prioritas penyebab kumuh kawasan yang dinilai dari Tingkat Pelayanan Sarana & Prasarana yaitu jangkauan jarak sarana & Prasarana serta tingkat kepuasan pelayanan oleh masyarakat
Ketersediaan Sarana & Prasarana	Ketersediaan sarana & prasarana yang mempengaruhi terhadap faktor prioritas penyebab kumuh kawasan yang dinilai dari Besaran Ketersedian jumlah sarana & prasarana (jumlah fasilitas)

1) **Kualitas Sarana & Prasarana**

Variabel	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Variabel
Kualitas Sarana & Prasarana		X																Ketersediaan Sarana & Prasarana

**C. Kondisi Sosial & Ekonomi Masyarakat**

Variabel	Deskripsi
Tingginya Arus Migrasi	Tingginya Arus Migrasi yang mempengaruhi terhadap faktor prioritas penyebab kumuh kawasan yang dinilai dari Besaran laju migrasi penduduk setiap tahunnya (Jiwa/Tahun)
Tingkat Pendidikan	Tingkat Pendidikan yang mempengaruhi terhadap faktor prioritas penyebab kumuh kawasan yang dinilai dari Penduduk Berdasarkan Pendidikan Terakhir yaitu tamat SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi.
Kepadatan Penduduk	Kepadatan penduduk yang mempengaruhi terhadap faktor prioritas penyebab kumuh kawasan yang dinilai dari Tingkat kepadatan penduduk per (Jiwa/Ha)



Variabel	Deskripsi
Pendapatan penghasilan penduduk	Pendapatan penghasilan penduduk yang mempengaruhi terhadap faktor prioritas penyebab kumuh kawasan yang dinilai dari Besaran Pendapatan Penduduk.

### 1) Tingginya Arus Migrasi

Variabel	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Variabel
Tingginya Arus Migrasi										X								Tingkat Pendidikan
Tingginya Arus Migrasi															X			Kepadatan Penduduk
Tingginya Arus Migrasi															X			Pendapatan penghasilan penduduk

### 2) Tingkat Pendidikan

Variabel	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Variabel
Tingkat Pendidikan													X					Kepadatan Penduduk
Tingkat Pendidikan															X			Pendapatan penghasilan penduduk

### 3) Kepadatan Penduduk

Variabel	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Variabel
Kepadatan Penduduk												X						Pendapatan penghasilan penduduk

## D. Pengendalian Hukum

Variabel	Deskripsi
Pengawasan tanah kurang ketat	Pengawasan tanah kurang ketat yang mempengaruhi terhadap faktor prioritas penyebab kumuh kawasan yang dinilai dari Besaran Bangunan yg tidak sesuai dengan pemanfaatan Lahan (Persil/Ha)
Kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum	Kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum yang mempengaruhi terhadap faktor prioritas penyebab kumuh kawasan yang dinilai dari ketersediaan dokumen perencanaan kawasan permukiman.

### 1) Pengawasan tanah kurang ketat

Variabel	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Variabel
Pengawasan tanah kurang ketat																	X	Kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum

**RESPONDEN 2 (DINAS TATA RUANG & BANGUNAN KOTA BANJARMASIN)**  
**KUSIONER AHP (*ANALYSIS HIERARCHY PROCESS*)**  
**ANALISIS FAKTOR PRIORITAS PENYEBAB KUMUH**  
**PADA KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DI KELURAHAN BELITUNG SELATAN KOTA**  
**BANJARMASIN**



**ITS**  
Institut  
Teknologi  
Sepuluh Nopember

**JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA**  
**FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN**  
**INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER SURABAYA**  
**TAHUN 2015**

**BIODATA PENELITI**

Nama : Abi Syarwan Wimarana  
NRP : 3612100067  
No. HP : 085750090094  
Jurusan : Perencanaan Wilayah dan Kota  
Fakultas : Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan  
Judul Penelitian : Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin  
Dosen Pembimbing : Rulli Pratiwi Setiawan, ST., M.Sc.

Bapak/Ibu yang saya hormati,

Saya Abi Syarwan Wimarana selaku mahasiswa ITS yang sedang mengadakan penelitian Tugas Akhir tentang *Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin*. Penelitian yang saya lakukan ini terkait dengan persepsi anda sebagai stakeholder didalam mengkaji faktor prioritas penyebab kekumuhan di kawasan permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan. Atas bantuan Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

**Kuesioner Untuk Pemerintah**

Kuesioner ini terdiri dari 2 bagian, yaitu :

1. Data Identitas Responden
2. Data Kuesioner

**I. Identitas Responden**

**STAKEHOLDER**

Dinas/Badan/Kantor : Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Banjarmasin  
Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Penataan Ruang

### BIODATA

Nama : Shirley Adillah Alk, ST.  
 Alamat : Jl. Citrawati No. 3 Banjarmasin  
 No. HP : 081347851218  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Usia : 37 Tahun  
 Tanggal Pengisian : Jumat, 11 Maret 2016



### Petunjuk Pengisian

Kuesioner ini bertujuan untuk melakukan pembobotan kriteria faktor prioritas penyebab kumuh di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin yang berdasarkan tingkat kepentingannya, pembobotan kriteria dibagi menjadi 9 kategori atau tingkatan sebagai berikut :

Intensitas Kepentingan	Keterangan	Penjelasan
1	Kedua faktor memiliki pengaruh yang sama dalam faktor prioritas penyebab kumuh kawasan	Kedua faktor yang diuji memiliki karakteristik dan tingkat kepentingan yang sama, sehingga dapat dikatakan bahwa kedua faktor berada pada tingkatan prioritas yang sama.
3	Faktor sedikit lebih penting dan berpengaruh dibandingkan dengan faktor yang lain dalam faktor prioritas penyebab kumuh kawasan	Keberadaan faktor memiliki sedikit pengaruh yang patut dipertimbangkan sehingga faktor dapat menjadi faktor yang sedikit berpengaruh dan sedikit lebih diprioritaskan daripada faktor pembandingnya dalam faktor prioritas penyebab kumuh kawasan
5	Faktor jelas lebih penting dan berpengaruh daripada faktor yang lain dalam faktor prioritas penyebab kumuh kawasan	Keberadaan faktor memiliki cukup banyak pengaruh yang patut dipertimbangkan sehingga faktor menjadi faktor yang lebih berpengaruh dan lebih diprioritaskan dibandingkan faktor pembandingnya dalam faktor prioritas penyebab kumuh kawasan
7	Faktor sangat jelas lebih penting dan berpengaruh daripada faktor yang lain dalam faktor prioritas penyebab kumuh kawasan	Keberadaan faktor memiliki lebih banyak pengaruh yang patut dipertimbangkan sehingga perbandingan antar faktor dapat dengan mudah diketahui tingkat pengaruh dan prioritasnya dalam faktor prioritas penyebab kumuh kawasan
9	Faktor mutlak lebih penting dan berpengaruh dibandingkan dengan faktor yang lain dalam faktor prioritas penyebab kumuh kawasan	Keberadaan faktor sangat banyak memiliki pengaruh yang patut dipertimbangkan sehingga perbandingan antar dua faktor yang diuji dapat dengan mudah diketahui bahwa faktor jelas sangat lebih berpengaruh dan lebih penting serta sangat diprioritaskan dalam faktor prioritas penyebab kumuh kawasan
2,4,6,8	Faktor antara 2 nilai pertimbangan yang berdekatan sehingga ragu-ragu dalam prioritas penyebab kumuh kawasan karena saling berdekatan.	Faktor memiliki tingkatan nilai yang saling berdekatan antara nilai dibawah dan diatasnya dimana faktor yang diberikan bila ada 2 kompromi diantara 2 pilihan.

### Level Kriteria Tingkat I

Berikut ini terdapat kriteria yang akan dibobotkan untuk mendapatkan kriteria utama penentu yang dapat digunakan dalam membantu menentukan faktor prioritas penyebab kumuh. kriteria ini disusun berdasarkan hasil sintesa pustaka yang telah dilakukan peneliti sebelumnya.

Keterangan :

Faktor	Deskripsi
Kondisi Fisik Bangunan	Kondisi fisik bangunan adalah faktor prioritas penyebab kumuh yang dijelaskan dengan variabel kepemilikan lahan bangunan, ketersediaan rumah, Kualitas bangunan, kepadatan bangunan
Kondisi Sarana & Prasarana	Kondisi sarana & prasarana merupakan komponen faktor prioritas penyebab kumuh yang dijelaskan dengan variabel ketersediaan sarana & prasarana, kualitas sarana & prasarana.
Kondisi Sosial & Ekonomi Masyarakat	Kondisi sosial & Ekonomi masyarakat adalah faktor prioritas penyebab kumuh yang dijelaskan dengan variabel tingginya arus migrasi, tingkat pendidikan, kepadatan penduduk, pendapatan penghasilan penduduk.

Faktor	Deskripsi
Pengendalian Hukum	Pengendalian Hukum adalah pengawasan dan ketersediaan rencana kebijakan terhadap kawasan kumuh yang ditinjau dengan kebijakan, dokumen perencanaan serta undang-undang oleh pihak pengampu kebijakan.

### 1. Kondisi Fisik Bangunan

Faktor	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Faktor
Kondisi Fisik Bangunan														X				Kondisi Sarana & Prasarana
Kondisi Fisik Bangunan						X												Kondisi Sosial & Ekonomi Masyarakat
Kondisi Fisik Bangunan													X					Pengendalian Hukum

### 2. Kondisi Sarana & Prasarana

Faktor	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Faktor
Kondisi Sarana & Prasarana		X																Kondisi Sosial & Ekonomi Masyarakat
Kondisi Sarana & Prasarana							X											Pengendalian Hukum

### 3. Kondisi Sosial & Ekonomi Masyarakat

Faktor	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Faktor
Kondisi Sosial & Ekonomi Masyarakat														X				Pengendalian Hukum

### Level Kriteria Tingkat II

Berikut ini terdapat sub - kriteria berupa variabel yang akan dibobotkan untuk mendapatkan faktor prioritas utama penentu yang dapat digunakan dalam membantu menentukan faktor prioritas penyebab kumuh. kriteria ini disusun berdasarkan hasil sintesa pustaka yang telah dilakukan peneliti sebelumnya.

#### A. Kondisi Fisik Bangunan

Variabel	Deskripsi
Kepemilikan Lahan Bangunan	Kepemilikan lahan bangunan yang mempengaruhi terhadap faktor prioritas penyebab kumuh kawasan yang dinilai dari Status kategori kepemilikan tanah dan Izin Mendirikan Bangunan yaitu sertifikat tanah yang dimiliki.
Ketersediaan Rumah	Ketersediaan rumah yang mempengaruhi terhadap faktor prioritas penyebab kumuh kawasan yang dinilai dari Besaran Ketersediaan Lahan Peruntukan Perumahan (luas lahan/Ha)
Kualitas Bangunan	Kualitas Bangunan yang mempengaruhi terhadap faktor prioritas penyebab kumuh kawasan yang dinilai dari berdasarkan material jenis & konstruksi bentuk bangunan seperti atap, dinding, pencahayaan.
Kepadatan Bangunan	Kepadatan Bangunan yang mempengaruhi terhadap faktor prioritas penyebab kumuh kawasan yang dinilai dari tingkat kepadatan bangunan yang diukur melalui koefisien dasar bangunan (KDB) dan jarak antar bangunan di wilayah penelitian.

1) **Kepemilikan Lahan Bangunan**

Variabel	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Variabel
Kepemilikan Lahan Bangunan															X			Ketersediaan rumah
Kepemilikan Lahan Bangunan												X						Kualitas Bangunan
Kepemilikan Lahan Bangunan																X		Kepadatan Bangunan

2) **Ketersedian Rumah**

Variabel	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Variabel
Ketersediaan rumah								X										Kualitas Bangunan
Ketersediaan rumah													X					Kepadatan Bangunan

3) **Kualitas Bangunan**

Variabel	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Variabel
Kualitas Bangunan													X					Kepadatan Bangunan

**B. Kondisi Sarana & Prasarana**

Variabel	Deskripsi
Kualitas Sarana & Prasarana	Kualitas Sarana & Prasarana yang mempengaruhi terhadap faktor prioritas penyebab kumuh kawasan yang dinilai dari Tingkat Pelayanan Sarana & Prasarana yaitu jangkauan jarak sarana & Prasarana serta tingkat kepuasan pelayanan oleh masyarakat
Ketersediaan Sarana & Prasarana	Ketersediaan sarana & prasarana yang mempengaruhi terhadap faktor prioritas penyebab kumuh kawasan yang dinilai dari Besaran Ketersedian jumlah sarana & prasarana (jumlah fasilitas)

1) **Kualitas Sarana & Prasarana**

Variabel	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Variabel
Kualitas Sarana & Prasarana																	X	Ketersediaan Sarana & Prasarana

**C. Kondisi Sosial & Ekonomi Masyarakat**

Variabel	Deskripsi
Tingginya Arus Migrasi	Tingginya Arus Migrasi yang mempengaruhi terhadap faktor prioritas penyebab kumuh kawasan yang dinilai dari Besaran laju migrasi penduduk setiap tahunnya (Jiwa/Tahun)
Tingkat Pendidikan	Tingkat Pendidikan yang mempengaruhi terhadap faktor prioritas penyebab kumuh kawasan yang dinilai dari Penduduk Berdasarkan Pendidikan Terakhir yaitu tamat SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi.
Kepadatan Penduduk	Kepadatan penduduk yang mempengaruhi terhadap faktor prioritas penyebab kumuh kawasan yang dinilai dari Tingkat kepadatan penduduk per (Jiwa/Ha)

Variabel	Deskripsi
Pendapatan penghasilan penduduk	Pendapatan penghasilan penduduk yang mempengaruhi terhadap faktor prioritas penyebab kumuh kawasan yang dinilai dari Besaran Pendapatan Penduduk.

### 1) Tingginya Arus Migrasi

Variabel	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Variabel
Tingginya Arus Migrasi								X										Tingkat Pendidikan
Tingginya Arus Migrasi												X						Kepadatan Penduduk
Tingginya Arus Migrasi								X										Pendapatan penghasilan penduduk

### 2) Tingkat Pendidikan

Variabel	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Variabel
Tingkat Pendidikan															X			Kepadatan Penduduk
Tingkat Pendidikan							X											Pendapatan penghasilan penduduk

### 3) Kepadatan Penduduk

Variabel	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Variabel
Kepadatan Penduduk				X														Pendapatan penghasilan penduduk

## D. Pengendalian Hukum

Variabel	Deskripsi
Pengawasan tanah kurang ketat	Pengawasan tanah kurang ketat yang mempengaruhi terhadap faktor prioritas penyebab kumuh kawasan yang dinilai dari Besaran Bangunan yg tidak sesuai dengan pemanfaatan Lahan (Persil/Ha)
Kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum	Kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum yang mempengaruhi terhadap faktor prioritas penyebab kumuh kawasan yang dinilai dari ketersediaan dokumen perencanaan kawasan permukiman.

### 1) Pengawasan tanah kurang ketat

Variabel	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Variabel
Pengawasan tanah kurang ketat									X									Kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum

**RESPONDEN 3 (KELURAHAN BELITUNG SELATAN)  
KUSIONER AHP (*ANALYSIS HIERARCHY PROCESS*)  
ANALISIS FAKTOR PRIORITAS PENYEBAB KUMUH  
PADA KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DI KELURAHAN BELITUNG SELATAN KOTA  
BANJARMASIN**



**ITS**  
Institut  
Teknologi  
Sepuluh Nopember

**JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA  
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER SURABAYA  
TAHUN 2015**

**BIODATA PENELITI**

Nama	: Abi Syarwan Wimarana
NRP	: 3612100067
No. HP	: 085750090094
Jurusan	: Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas	: Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
Judul Penelitian	: Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin
Dosen Pembimbing	: Rulli Pratiwi Setiawan, ST., M.Sc.

Bapak/Ibu yang saya hormati,

Saya Abi Syarwan Wimarana selaku mahasiswa ITS yang sedang mengadakan penelitian Tugas Akhir tentang *Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin*. Penelitian yang saya lakukan ini terkait dengan persepsi anda sebagai stakeholder didalam mengkaji faktor prioritas penyebab kekumuhan di kawasan permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan. Atas bantuan Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

**Kuesioner Untuk Pemerintah**

Kuesioner ini terdiri dari 2 bagian, yaitu :

1. Data Identitas Responden
2. Data Kuesioner

**I. Identitas Responden**

**STAKEHOLDER**

Dinas/Badan/Kantor : Kelurahan Belitung Selatan  
Jabatan : Lurah Belitung Selatan

### BIODATA

Nama : Karmiyanto  
 Alamat : Jl. Rawasari V No. 16 RT 54 Banjarmasin  
 No. HP : 085248645772  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Usia : 58 Tahun  
 Tanggal Pengisian : Kamis, 10 Maret 2016



### Petunjuk Pengisian

Kuesioner ini bertujuan untuk melakukan pembobotan kriteria faktor prioritas penyebab kumuh di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin yang berdasarkan tingkat kepentingannya, pembobotan kriteria dibagi menjadi 9 kategori atau tingkatan sebagai berikut :

Intensitas Kepentingan	Keterangan	Penjelasan
1	Kedua faktor memiliki pengaruh yang sama dalam faktor prioritas penyebab kumuh kawasan	Kedua faktor yang diuji memiliki karakteristik dan tingkat kepentingan yang sama, sehingga dapat dikatakan bahwa kedua faktor berada pada tingkatan prioritas yang sama.
3	Faktor sedikit lebih penting dan berpengaruh dibandingkan dengan faktor yang lain dalam faktor prioritas penyebab kumuh kawasan	Keberadaan faktor memiliki sedikit pengaruh yang patut dipertimbangkan sehingga faktor dapat menjadi faktor yang sedikit berpengaruh dan sedikit lebih diprioritaskan daripada faktor pembandingnya dalam faktor prioritas penyebab kumuh kawasan
5	Faktor jelas lebih penting dan berpengaruh daripada faktor yang lain dalam faktor prioritas penyebab kumuh kawasan	Keberadaan faktor memiliki cukup banyak pengaruh yang patut dipertimbangkan sehingga faktor menjadi faktor yang lebih berpengaruh dan lebih diprioritaskan dibandingkan faktor pembandingnya dalam faktor prioritas penyebab kumuh kawasan
7	Faktor sangat jelas lebih penting dan berpengaruh daripada faktor yang lain dalam faktor prioritas penyebab kumuh kawasan	Keberadaan faktor memiliki lebih banyak pengaruh yang patut dipertimbangkan sehingga perbandingan antar faktor dapat dengan mudah diketahui tingkat pengaruh dan prioritasnya dalam faktor prioritas penyebab kumuh kawasan
9	Faktor mutlak lebih penting dan berpengaruh dibandingkan dengan faktor yang lain dalam faktor prioritas penyebab kumuh kawasan	Keberadaan faktor sangat banyak memiliki pengaruh yang patut dipertimbangkan sehingga perbandingan antar dua faktor yang diuji dapat dengan mudah diketahui bahwa faktor jelas sangat lebih berpengaruh dan lebih penting serta sangat diprioritaskan dalam faktor prioritas penyebab kumuh kawasan
2,4,6,8	Faktor antara 2 nilai pertimbangan yang berdekatan sehingga ragu-ragu dalam prioritas penyebab kumuh kawasan karena saling berdekatan.	Faktor memiliki tingkatan nilai yang saling berdekatan antara nilai dibawah dan diatasnya dimana faktor yang diberikan bila ada 2 kompromi diantara 2 pilihan.

### Level Kriteria Tingkat I

Berikut ini terdapat kriteria yang akan dibobotkan untuk mendapatkan kriteria utama penentu yang dapat digunakan dalam membantu menentukan faktor prioritas penyebab kumuh. kriteria ini disusun berdasarkan hasil sintesa pustaka yang telah dilakukan peneliti sebelumnya.

Keterangan :

Faktor	Deskripsi
Kondisi Fisik Bangunan	Kondisi fisik bangunan adalah faktor prioritas penyebab kumuh yang dijelaskan dengan variabel kepemilikan lahan bangunan, ketersediaan rumah, Kualitas bangunan, kepadatan bangunan
Kondisi Sarana & Prasarana	Kondisi sarana & prasarana merupakan komponen faktor prioritas penyebab kumuh yang dijelaskan dengan variabel ketersediaan sarana & prasarana, kualitas sarana & prasarana.
Kondisi Sosial & Ekonomi Masyarakat	Kondisi sosial & Ekonomi masyarakat adalah faktor prioritas penyebab kumuh yang dijelaskan dengan variabel tingginya arus migrasi, tingkat pendidikan, kepadatan penduduk, pendapatan penghasilan penduduk.



Pengendalian Hukum	Pengendalian Hukum adalah pengawasan dan ketersediaan rencana kebijakan terhadap kawasan kumuh yang ditinjau dengan kebijakan, dokumen perencanaan serta undang-undang oleh pihak pengampu kebijakan.
--------------------	---

### 1. Kondisi Fisik Bangunan

Faktor	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Faktor
Kondisi Fisik Bangunan		X																Kondisi Sarana & Prasarana
Kondisi Fisik Bangunan											X							Kondisi Sosial & Ekonomi Masyarakat
Kondisi Fisik Bangunan							X											Pengendalian Hukum

### 2. Kondisi Sarana & Prasarana

Faktor	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Faktor
Kondisi Sarana & Prasarana														X				Kondisi Sosial & Ekonomi Masyarakat
Kondisi Sarana & Prasarana											X							Pengendalian Hukum

### 3. Kondisi Sosial & Ekonomi Masyarakat

Faktor	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Faktor
Kondisi Sosial & Ekonomi Masyarakat				X														Pengendalian Hukum

### Level Kriteria Tingkat II

Berikut ini terdapat sub - kriteria berupa variabel yang akan dibobotkan untuk mendapatkan faktor prioritas utama penentu yang dapat digunakan dalam membantu menentukan faktor prioritas penyebab kumuh. kriteria ini disusun berdasarkan hasil sintesa pustaka yang telah dilakukan peneliti sebelumnya.

#### A. Kondisi Fisik Bangunan

Variabel	Deskripsi
Kepemilikan Lahan Bangunan	Kepemilikan lahan bangunan yang mempengaruhi terhadap faktor prioritas penyebab kumuh kawasan yang dinilai dari Status kategori kepemilikan tanah dan Izin Mendirikan Bangunan yaitu sertifikat tanah yang dimiliki.
Ketersediaan Rumah	Ketersediaan rumah yang mempengaruhi terhadap faktor prioritas penyebab kumuh kawasan yang dinilai dari Besaran Ketersediaan Lahan Peruntukan Perumahan (luas lahan/Ha)
Kualitas Bangunan	Kualitas Bangunan yang mempengaruhi terhadap faktor prioritas penyebab kumuh kawasan yang dinilai dari berdasarkan material jenis & konstruksi bentuk bangunan seperti atap, dinding, pencahayaan.
Kepadatan Bangunan	Kepadatan Bangunan yang mempengaruhi terhadap faktor prioritas penyebab kumuh kawasan yang dinilai dari tingkat kepadatan bangunan yang diukur melalui koefisien dasar bangunan (KDB) dan jarak antar bangunan di wilayah penelitian.

1) **Kepemilikan Lahan Bangunan**

Variabel	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Variabel
Kepemilikan Lahan Bangunan													X					Ketersediaan rumah
Kepemilikan Lahan Bangunan															X			Kualitas Bangunan
Kepemilikan Lahan Bangunan																	X	Kepadatan Bangunan

2) **Ketersedian Rumah**

Variabel	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Variabel
Ketersediaan rumah											X							Kualitas Bangunan
Ketersediaan rumah															X			Kepadatan Bangunan

3) **Kualitas Bangunan**

Variabel	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Variabel
Kualitas Bangunan												X						Kepadatan Bangunan

**B. Kondisi Sarana & Prasarana**

Variabel	Deskripsi
Kualitas Sarana & Prasarana	Kualitas Sarana & Prasarana yang mempengaruhi terhadap faktor prioritas penyebab kumuh kawasan yang dinilai dari Tingkat Pelayanan Sarana & Prasarana yaitu jangkauan jarak sarana & Prasarana serta tingkat kepuasan pelayanan oleh masyarakat
Ketersediaan Sarana & Prasarana	Ketersediaan sarana & prasarana yang mempengaruhi terhadap faktor prioritas penyebab kumuh kawasan yang dinilai dari Besaran Ketersedian jumlah sarana & prasarana (jumlah fasilitas)

1) **Kualitas Sarana & Prasarana**

Variabel	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Variabel
Kualitas Sarana & Prasarana			X															Ketersediaan Sarana & Prasarana

**C. Kondisi Sosial & Ekonomi Masyarakat**

Variabel	Deskripsi
Tingginya Arus Migrasi	Tingginya Arus Migrasi yang mempengaruhi terhadap faktor prioritas penyebab kumuh kawasan yang dinilai dari Besaran laju migrasi penduduk setiap tahunnya (Jiwa/Tahun)
Tingkat Pendidikan	Tingkat Pendidikan yang mempengaruhi terhadap faktor prioritas penyebab kumuh kawasan yang dinilai dari Penduduk Berdasarkan Pendidikan Terakhir yaitu tamat SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi.
Kepadatan Penduduk	Kepadatan penduduk yang mempengaruhi terhadap faktor prioritas penyebab kumuh kawasan yang dinilai dari Tingkat kepadatan penduduk per (Jiwa/Ha)
Pendapatan penghasilan penduduk	Pendapatan penghasilan penduduk yang mempengaruhi terhadap faktor prioritas penyebab kumuh kawasan yang dinilai dari Besaran Pendapatan Penduduk.

1) **Tingginya Arus Migrasi**

Variabel	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Variabel
Tingginya Arus Migrasi				X														Tingkat Pendidikan
Tingginya Arus Migrasi			X															Kepadatan Penduduk
Tingginya Arus Migrasi													X					Pendapatan penghasilan penduduk

2) **Tingkat Pendidikan**

Variabel	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Variabel
Tingkat Pendidikan									X									Kepadatan Penduduk
Tingkat Pendidikan																X		Pendapatan penghasilan penduduk

3) **Kepadatan Penduduk**

Variabel	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Variabel
Kepadatan Penduduk																	X	Pendapatan penghasilan penduduk

### D. Pengendalian Hukum

Variabel	Deskripsi
Pengawasan tanah kurang ketat	Pengawasan tanah kurang ketat yang mempengaruhi terhadap faktor prioritas penyebab kumuh kawasan yang dinilai dari Besaran Bangunan yg tidak sesuai dengan pemanfaatan Lahan (Persil/Ha)
Kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum	Kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum yang mempengaruhi terhadap faktor prioritas penyebab kumuh kawasan yang dinilai dari ketersediaan dokumen perencanaan kawasan permukiman.

1) **Pengawasan tanah kurang ketat**

Variabel	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Variabel
Pengawasan tanah kurang ketat															X			Kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum

**RESPONDEN 4 (DINAS PU & BINA MARGA KOTA BANJARMASIN)  
KUSIONER AHP (*ANALYSIS HIERARCHY PROCESS*)  
ANALISIS FAKTOR PRIORITAS PENYEBAB KUMUH  
PADA KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DI KELURAHAN BELITUNG SELATAN KOTA  
BANJARMASIN**



**ITS**  
Institut  
Teknologi  
Sepuluh Nopember

**JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA  
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER SURABAYA  
TAHUN 2015**

**BIODATA PENELITI**

Nama	: Abi Syarwan Wimardana
NRP	: 3612100067
No. HP	: 085750090094
Jurusan	: Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas	: Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
Judul Penelitian	: Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin
Dosen Pembimbing	: Rulli Pratiwi Setiawan, ST., M.Sc.

Bapak/Ibu yang saya hormati,

Saya Abi Syarwan Wimardana selaku mahasiswa ITS yang sedang mengadakan penelitian Tugas Akhir tentang *Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin*. Penelitian yang saya lakukan ini terkait dengan persepsi anda sebagai stakeholder didalam mengkaji faktor prioritas penyebab kekumuhan di kawasan permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan. Atas bantuan Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

**Kuesioner Untuk Pemerintah**

Kuesioner ini terdiri dari 2 bagian, yaitu :

1. Data Identitas Responden
2. Data Kuesioner

**I. Identitas Responden**

**STAKEHOLDER**

Dinas/Badan/Kantor : Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga Kota Banjarmasin  
Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan dan Pengawasan Jaringan Jalan

### BIODATA

Nama : Kartika Estaurina, ST.  
 Alamat : Jl. Sultan Adem Komplek Taekwondo Permai  
 No. HP : 08115112200  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Usia : 33 Tahun  
 Tanggal Pengisian : Rabu, 16 Maret 2016



### Petunjuk Pengisian

Kuesioner ini bertujuan untuk melakukan pembobotan kriteria faktor prioritas penyebab kumuh di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin yang berdasarkan tingkat kepentingannya, pembobotan kriteria dibagi menjadi 9 kategori atau tingkatan sebagai berikut:

Intensitas Kepentingan	Keterangan	Penjelasan
1	Kedua faktor memiliki pengaruh yang sama dalam faktor prioritas penyebab kumuh kawasan	Kedua faktor yang diuji memiliki karakteristik dan tingkat kepentingan yang sama, sehingga dapat dikatakan bahwa kedua faktor berada pada tingkatan prioritas yang sama.
3	Faktor sedikit lebih penting dan berpengaruh dibandingkan dengan faktor yang lain dalam faktor prioritas penyebab kumuh kawasan	Keberadaan faktor memiliki sedikit pengaruh yang patut dipertimbangkan sehingga faktor dapat menjadi faktor yang sedikit berpengaruh dan sedikit lebih diprioritaskan daripada faktor pembandingnya dalam faktor prioritas penyebab kumuh kawasan
5	Faktor jelas lebih penting dan berpengaruh daripada faktor yang lain dalam faktor prioritas penyebab kumuh kawasan	Keberadaan faktor memiliki cukup banyak pengaruh yang patut dipertimbangkan sehingga faktor menjadi faktor yang lebih berpengaruh dan lebih diprioritaskan dibandingkan faktor pembandingnya dalam faktor prioritas penyebab kumuh kawasan
7	Faktor sangat jelas lebih penting dan berpengaruh daripada faktor yang lain dalam faktor prioritas penyebab kumuh kawasan	Keberadaan faktor memiliki lebih banyak pengaruh yang patut dipertimbangkan sehingga perbandingan antar faktor dapat dengan mudah diketahui tingkat pengaruh dan prioritasnya dalam faktor prioritas penyebab kumuh kawasan
9	Faktor mutlak lebih penting dan berpengaruh dibandingkan dengan faktor yang lain dalam faktor prioritas penyebab kumuh kawasan	Keberadaan faktor sangat banyak memiliki pengaruh yang patut dipertimbangkan sehingga perbandingan antar dua faktor yang diuji dapat dengan mudah diketahui bahwa faktor jelas sangat lebih berpengaruh dan lebih penting serta sangat diprioritaskan dalam faktor prioritas penyebab kumuh kawasan
2,4,6,8	Faktor antara 2 nilai pertimbangan yang berdekatan sehingga ragu-ragu dalam prioritas penyebab kumuh kawasan karena saling berdekatan.	Faktor memiliki tingkatan nilai yang saling berdekatan antara nilai dibawah dan diatasnya dimana faktor yang diberikan bila ada 2 kompromi diantara 2 pilihan.

### Level Kriteria Tingkat I

Berikut ini terdapat kriteria yang akan dibobotkan untuk mendapatkan kriteria utama penentu yang dapat digunakan dalam membantu menentukan faktor prioritas penyebab kumuh. kriteria ini disusun berdasarkan hasil sintesa pustaka yang telah dilakukan peneliti sebelumnya.

Keterangan :

Faktor	Deskripsi
Kondisi Fisik Bangunan	Kondisi fisik bangunan adalah faktor prioritas penyebab kumuh yang dijelaskan dengan variabel kepemilikan lahan bangunan, ketersediaan rumah, Kualitas bangunan, kepadatan bangunan
Kondisi Sarana & Prasarana	Kondisi sarana & prasarana merupakan komponen faktor prioritas penyebab kumuh yang dijelaskan dengan variabel ketersediaan sarana & prasarana, kualitas sarana & prasarana.
Kondisi Sosial & Ekonomi Masyarakat	Kondisi sosial & Ekonomi masyarakat adalah faktor prioritas penyebab kumuh yang dijelaskan dengan variabel tingginya arus migrasi, tingkat pendidikan, kepadatan penduduk, pendapatan penghasilan penduduk.

Faktor	Deskripsi
Pengendalian Hukum	Pengendalian Hukum adalah pengawasan dan ketersediaan rencana kebijakan terhadap kawasan kumuh yang ditinjau dengan kebijakan, dokumen perencanaan serta undang-undang oleh pihak pengampu kebijakan.

### 1. Kondisi Fisik Bangunan

Faktor	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Faktor
Kondisi Fisik Bangunan										X								Kondisi Sarana & Prasarana
Kondisi Fisik Bangunan	X																	Kondisi Sosial & Ekonomi Masyarakat
Kondisi Fisik Bangunan	X																	Pengendalian Hukum

### 2. Kondisi Sarana & Prasarana

Faktor	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Faktor
Kondisi Sarana & Prasarana		X																Kondisi Sosial & Ekonomi Masyarakat
Kondisi Sarana & Prasarana				X														Pengendalian Hukum

### 3. Kondisi Sosial & Ekonomi Masyarakat

Faktor	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Faktor
Kondisi Sosial & Ekonomi Masyarakat								X										Pengendalian Hukum

### Level Kriteria Tingkat II

Berikut ini terdapat sub - kriteria berupa variabel yang akan dibobotkan untuk mendapatkan faktor prioritas utama penentu yang dapat digunakan dalam membantu menentukan faktor prioritas penyebab kumuh. kriteria ini disusun berdasarkan hasil sintesa pustaka yang telah dilakukan peneliti sebelumnya.

#### A. Kondisi Fisik Bangunan

Variabel	Deskripsi
Kepemilikan Lahan Bangunan	Kepemilikan lahan bangunan yang mempengaruhi terhadap faktor prioritas penyebab kumuh kawasan yang dinilai dari Status kategori kepemilikan tanah dan Izin Mendirikan Bangunan yaitu sertifikat tanah yang dimiliki.
Ketersediaan Rumah	Ketersediaan rumah yang mempengaruhi terhadap faktor prioritas penyebab kumuh kawasan yang dinilai dari Besaran Ketersediaan Lahan Peruntukan Perumahan (luas lahan/Ha)
Kualitas Bangunan	Kualitas Bangunan yang mempengaruhi terhadap faktor prioritas penyebab kumuh kawasan yang dinilai dari berdasarkan material jenis & konstruksi bentuk bangunan seperti atap, dinding, pencahayaan.
Kepadatan Bangunan	Kepadatan Bangunan yang mempengaruhi terhadap faktor prioritas penyebab kumuh kawasan yang dinilai dari tingkat kepadatan bangunan yang diukur melalui koefisien dasar bangunan (KDB) dan jarak antar bangunan di wilayah penelitian.

1) **Kepemilikan Lahan Bangunan**

Variabel	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Variabel
Kepemilikan Lahan Bangunan																	X	Ketersediaan rumah
Kepemilikan Lahan Bangunan																	X	Kualitas Bangunan
Kepemilikan Lahan Bangunan												X						Kepadatan Bangunan

2) **Ketersedian Rumah**

Variabel	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Variabel
Ketersediaan rumah										X								Kualitas Bangunan
Ketersediaan rumah			X															Kepadatan Bangunan

3) **Kualitas Bangunan**

Variabel	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Variabel
Kualitas Bangunan	X																	Kepadatan Bangunan

**B. Kondisi Sarana & Prasarana**

Variabel	Deskripsi
Kualitas Sarana & Prasarana	Kualitas Sarana & Prasarana yang mempengaruhi terhadap faktor prioritas penyebab kumuh kawasan yang dinilai dari Tingkat Pelayanan Sarana & Prasarana yaitu jangkauan jarak sarana & Prasarana serta tingkat kepuasan pelayanan oleh masyarakat
Ketersediaan Sarana & Prasarana	Ketersediaan sarana & prasarana yang mempengaruhi terhadap faktor prioritas penyebab kumuh kawasan yang dinilai dari Besaran Ketersedian jumlah sarana & prasarana (jumlah fasilitas)

1) **Kualitas Sarana & Prasarana**

Variabel	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Variabel
Kualitas Sarana & Prasarana												X						Ketersediaan Sarana & Prasarana

**C. Kondisi Sosial & Ekonomi Masyarakat**

Variabel	Deskripsi
Tingginya Arus Migrasi	Tingginya Arus Migrasi yang mempengaruhi terhadap faktor prioritas penyebab kumuh kawasan yang dinilai dari Besaran laju migrasi penduduk setiap tahunnya (Jiwa/Tahun)
Tingkat Pendidikan	Tingkat Pendidikan yang mempengaruhi terhadap faktor prioritas penyebab kumuh kawasan yang dinilai dari Penduduk Berdasarkan Pendidikan Terakhir yaitu tamat SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi.
Kepadatan Penduduk	Kepadatan penduduk yang mempengaruhi terhadap faktor prioritas penyebab kumuh kawasan yang dinilai dari Tingkat kepadatan penduduk per (Jiwa/Ha)
Pendapatan penghasilan penduduk	Pendapatan penghasilan penduduk yang mempengaruhi terhadap faktor prioritas penyebab kumuh kawasan yang dinilai dari Besaran Pendapatan Penduduk.

1) **Tingginya Arus Migrasi**

Variabel	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Variabel
Tingginya Arus Migrasi															X			Tingkat Pendidikan
Tingginya Arus Migrasi														X				Kepadatan Penduduk
Tingginya Arus Migrasi																	X	Pendapatan penghasilan penduduk

2) **Tingkat Pendidikan**

Variabel	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Variabel
Tingkat Pendidikan												X						Kepadatan Penduduk
Tingkat Pendidikan											X							Pendapatan penghasilan penduduk

3) **Kepadatan Penduduk**

Variabel	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Variabel
Kepadatan Penduduk										X								Pendapatan penghasilan penduduk

## D. Pengendalian Hukum

Variabel	Deskripsi
Pengawasan tanah kurang ketat	Pengawasan tanah kurang ketat yang mempengaruhi terhadap faktor prioritas penyebab kumuh kawasan yang dinilai dari Besaran Bangunan yg tidak sesuai dengan pemanfaatan Lahan (Persil/Ha)
Kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum	Kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum yang mempengaruhi terhadap faktor prioritas penyebab kumuh kawasan yang dinilai dari ketersediaan dokumen perencanaan kawasan permukiman.

1) **Pengawasan tanah kurang ketat**

Variabel	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Variabel
Pengawasan tanah kurang ketat															X			Kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum



**RESPONDEN 5 (BAPPEDA KOTA BANJARMASIN)  
KUSIONER AHP (*ANALYSIS HIERARCHY PROCESS*)  
ANALISIS FAKTOR PRIORITAS PENYEBAB KUMUH  
PADA KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DI KELURAHAN BELITUNG SELATAN KOTA  
BANJARMASIN**



**ITS**  
Institut  
Teknologi  
Sepuluh Nopember

**JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA  
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER SURABAYA  
TAHUN 2015**

**BIODATA PENELITI**

Nama	: Abi Syarwan Wimardana
NRP	: 3612100067
No. HP	: 085750090094
Jurusan	: Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas	: Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
Judul Penelitian	: Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin
Dosen Pembimbing	: Rulli Pratiwi Setiawan, ST., M.Sc.

Bapak/Ibu yang saya hormati,

Saya Abi Syarwan Wimardana selaku mahasiswa ITS yang sedang mengadakan penelitian Tugas Akhir tentang *Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin*. Penelitian yang saya lakukan ini terkait dengan persepsi anda sebagai stakeholder didalam mengkaji faktor prioritas penyebab kekumuhan di kawasan permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan. Atas bantuan Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

**Kuesioner Untuk Pemerintah**

Kuesioner ini terdiri dari 2 bagian, yaitu :

1. Data Identitas Responden
2. Data Kuesioner

**I. Identitas Responden**

**STAKEHOLDER**

Dinas/Badan/Kantor : Bappeda Kota Banjarmasin  
Jabatan : Bidang Pengembangan Wilayah

### BIODATA

Nama : Jauhar Arif  
 Alamat : Jl. Cengkeh Kota Banjarmasin  
 No. HP : 081250183990  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Usia : 47 Tahun  
 Tanggal Pengisian : Senin, 14 Maret 2016



#### Petunjuk Pengisian

Kuesioner ini bertujuan untuk melakukan pembobotan kriteria faktor prioritas penyebab kumuh di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin yang berdasarkan tingkat kepentingannya, pembobotan kriteria dibagi menjadi 9 kategori atau tingkatan sebagai berikut:

Intensitas Kepentingan	Keterangan	Penjelasan
1	Kedua faktor memiliki pengaruh yang sama dalam faktor prioritas penyebab kumuh kawasan	Kedua faktor yang diuji memiliki karakteristik dan tingkat kepentingan yang sama, sehingga dapat dikatakan bahwa kedua faktor berada pada tingkatan prioritas yang sama.
3	Faktor sedikit lebih penting dan berpengaruh dibandingkan dengan faktor yang lain dalam faktor prioritas penyebab kumuh kawasan	Keberadaan faktor memiliki sedikit pengaruh yang patut dipertimbangkan sehingga faktor dapat menjadi faktor yang sedikit berpengaruh dan sedikit lebih diprioritaskan daripada faktor pembandingnya dalam faktor prioritas penyebab kumuh kawasan
5	Faktor jelas lebih penting dan berpengaruh daripada faktor yang lain dalam faktor prioritas penyebab kumuh kawasan	Keberadaan faktor memiliki cukup banyak pengaruh yang patut dipertimbangkan sehingga faktor menjadi faktor yang lebih berpengaruh dan lebih diprioritaskan dibandingkan faktor pembandingnya dalam faktor prioritas penyebab kumuh kawasan
7	Faktor sangat jelas lebih penting dan berpengaruh daripada faktor yang lain dalam faktor prioritas penyebab kumuh kawasan	Keberadaan faktor memiliki lebih banyak pengaruh yang patut dipertimbangkan sehingga perbandingan antar faktor dapat dengan mudah diketahui tingkat pengaruh dan prioritasnya dalam faktor prioritas penyebab kumuh kawasan
9	Faktor mutlak lebih penting dan berpengaruh dibandingkan dengan faktor yang lain dalam faktor prioritas penyebab kumuh kawasan	Keberadaan faktor sangat banyak memiliki pengaruh yang patut dipertimbangkan sehingga perbandingan antar dua faktor yang diuji dapat dengan mudah diketahui bahwa faktor jelas sangat lebih berpengaruh dan lebih penting serta sangat diprioritaskan dalam faktor prioritas penyebab kumuh kawasan
2,4,6,8	Faktor antara 2 nilai pertimbangan yang berdekatan sehingga ragu-ragu dalam prioritas penyebab kumuh kawasan karena saling berdekatan.	Faktor memiliki tingkatan nilai yang saling berdekatan antara nilai dibawah dan diatasnya dimana faktor yang diberikan bila ada 2 kompromi diantara 2 pilihan.

### Level Kriteria Tingkat I

Berikut ini terdapat kriteria yang akan dibobotkan untuk mendapatkan kriteria utama penentu yang dapat digunakan dalam membantu menentukan faktor prioritas penyebab kumuh. kriteria ini disusun berdasarkan hasil sintesa pustaka yang telah dilakukan peneliti sebelumnya.

Keterangan :

Faktor	Deskripsi
Kondisi Fisik Bangunan	Kondisi fisik bangunan adalah faktor prioritas penyebab kumuh yang dijelaskan dengan variabel kepemilikan lahan bangunan, ketersediaan rumah, Kualitas bangunan, kepadatan bangunan
Kondisi Sarana & Prasarana	Kondisi sarana & prasarana merupakan komponen faktor prioritas penyebab kumuh yang dijelaskan dengan variabel ketersediaan sarana & prasarana, kualitas sarana & prasarana.
Kondisi Sosial & Ekonomi Masyarakat	Kondisi sosial & Ekonomi masyarakat adalah faktor prioritas penyebab kumuh yang dijelaskan dengan variabel tingginya arus migrasi, tingkat pendidikan, kepadatan penduduk, pendapatan penghasilan penduduk.

Faktor	Deskripsi
Pengendalian Hukum	Pengendalian Hukum adalah pengawasan dan ketersediaan rencana kebijakan terhadap kawasan kumuh yang ditinjau dengan kebijakan, dokumen perencanaan serta undang-undang oleh pihak pengampu kebijakan.

### 1. Kondisi Fisik Bangunan

Faktor	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Faktor
Kondisi Fisik Bangunan				X														Kondisi Sarana & Prasarana
Kondisi Fisik Bangunan											X							Kondisi Sosial & Ekonomi Masyarakat
Kondisi Fisik Bangunan					X													Pengendalian Hukum

### 2. Kondisi Sarana & Prasarana

Faktor	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Faktor
Kondisi Sarana & Prasarana														X				Kondisi Sosial & Ekonomi Masyarakat
Kondisi Sarana & Prasarana										X								Pengendalian Hukum

### 3. Kondisi Sosial & Ekonomi Masyarakat

Faktor	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Faktor
Kondisi Sosial & Ekonomi Masyarakat			X															Pengendalian Hukum

### Level Kriteria Tingkat II

Berikut ini terdapat sub - kriteria berupa variabel yang akan dibobotkan untuk mendapatkan faktor prioritas utama penentu yang dapat digunakan dalam membantu menentukan faktor prioritas penyebab kumuh. kriteria ini disusun berdasarkan hasil sintesa pustaka yang telah dilakukan peneliti sebelumnya.

#### A. Kondisi Fisik Bangunan

Variabel	Deskripsi
Kepemilikan Lahan Bangunan	Kepemilikan lahan bangunan yang mempengaruhi terhadap faktor prioritas penyebab kumuh kawasan yang dinilai dari Status kategori kepemilikan tanah dan Izin Mendirikan Bangunan yaitu sertifikat tanah yang dimiliki.
Ketersediaan Rumah	Ketersediaan rumah yang mempengaruhi terhadap faktor prioritas penyebab kumuh kawasan yang dinilai dari Besaran Ketersediaan Lahan Peruntukan Perumahan (luas lahan/Ha)
Kualitas Bangunan	Kualitas Bangunan yang mempengaruhi terhadap faktor prioritas penyebab kumuh kawasan yang dinilai dari berdasarkan material jenis & konstruksi bentuk bangunan seperti atap, dinding, pencahayaan.
Kepadatan Bangunan	Kepadatan Bangunan yang mempengaruhi terhadap faktor prioritas penyebab kumuh kawasan yang dinilai dari tingkat kepadatan bangunan yang diukur melalui koefisien dasar bangunan (KDB) dan jarak antar bangunan di wilayah penelitian.

1) **Kepemilikan Lahan Bangunan**

Variabel	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Variabel
Kepemilikan Lahan Bangunan					X													Ketersediaan rumah
Kepemilikan Lahan Bangunan			X															Kualitas Bangunan
Kepemilikan Lahan Bangunan				X														Kepadatan Bangunan

2) **Ketersedian Rumah**

Variabel	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Variabel
Ketersediaan rumah						X												Kualitas Bangunan
Ketersediaan rumah							X											Kepadatan Bangunan

3) **Kualitas Bangunan**

Variabel	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Variabel
Kualitas Bangunan								X										Kepadatan Bangunan

**B. Kondisi Sarana & Prasarana**

Variabel	Deskripsi
Kualitas Sarana & Prasarana	Kualitas Sarana & Prasarana yang mempengaruhi terhadap faktor prioritas penyebab kumuh kawasan yang dinilai dari Tingkat Pelayanan Sarana & Prasarana yaitu jangkauan jarak sarana & Prasarana serta tingkat kepuasan pelayanan oleh masyarakat
Ketersediaan Sarana & Prasarana	Ketersediaan sarana & prasarana yang mempengaruhi terhadap faktor prioritas penyebab kumuh kawasan yang dinilai dari Besaran Ketersedian jumlah sarana & prasarana (jumlah fasilitas)

1) **Kualitas Sarana & Prasarana**

Variabel	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Variabel
Kualitas Sarana & Prasarana																	X	Ketersediaan Sarana & Prasarana

**C. Kondisi Sosial & Ekonomi Masyarakat**

Variabel	Deskripsi
Tingginya Arus Migrasi	Tingginya Arus Migrasi yang mempengaruhi terhadap faktor prioritas penyebab kumuh kawasan yang dinilai dari Besaran laju migrasi penduduk setiap tahunnya (Jiwa/Tahun)
Tingkat Pendidikan	Tingkat Pendidikan yang mempengaruhi terhadap faktor prioritas penyebab kumuh kawasan yang dinilai dari Penduduk Berdasarkan Pendidikan Terakhir yaitu tamat SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi.
Kepadatan Penduduk	Kepadatan penduduk yang mempengaruhi terhadap faktor prioritas penyebab kumuh kawasan yang dinilai dari Tingkat kepadatan penduduk per (Jiwa/Ha)
Pendapatan penghasilan penduduk	Pendapatan penghasilan penduduk yang mempengaruhi terhadap faktor prioritas penyebab kumuh kawasan yang dinilai dari Besaran Pendapatan Penduduk.

1) **Tingginya Arus Migrasi**

Variabel	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Variabel
Tingginya Arus Migrasi																	X	Tingkat Pendidikan
Tingginya Arus Migrasi							X											Kepadatan Penduduk
Tingginya Arus Migrasi																X		Pendapatan penghasilan penduduk

2) **Tingkat Pendidikan**

Variabel	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Variabel
Tingkat Pendidikan		X																Kepadatan Penduduk
Tingkat Pendidikan										X								Pendapatan penghasilan penduduk

3) **Kepadatan Penduduk**

Variabel	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Variabel
Kepadatan Penduduk																	X	Pendapatan penghasilan penduduk

## D. Pengendalian Hukum

Variabel	Deskripsi
Pengawasan tanah kurang ketat	Pengawasan tanah kurang ketat yang mempengaruhi terhadap faktor prioritas penyebab kumuh kawasan yang dinilai dari Besaran Bangunan yg tidak sesuai dengan pemanfaatan Lahan (Persil/Ha)
Kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum	Kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum yang mempengaruhi terhadap faktor prioritas penyebab kumuh kawasan yang dinilai dari ketersediaan dokumen perencanaan kawasan permukiman.

1) **Pengawasan tanah kurang ketat**

Variabel	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Variabel
Pengawasan tanah kurang ketat	X																	Kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum

**RESPONDEN 6 (AKADEMISI DOSEN ARSITEKTUR ITS)**  
**KUSIONER AHP (*ANALYSIS HIERARCHY PROCESS*)**  
**ANALISIS FAKTOR PRIORITAS PENYEBAB KUMUH**  
**PADA KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DI KELURAHAN BELITUNG SELATAN KOTA**  
**BANJARMASIN**



**ITS**  
 Institut  
 Teknologi  
 Sepuluh Nopember

**JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA**  
**FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN**  
**INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER SURABAYA**  
**TAHUN 2015**

**BIODATA PENELITI**

Nama : Abi Syarwan Wimarana  
 NRP : 3612100067  
 No. HP : 085750090094  
 Jurusan : Perencanaan Wilayah dan Kota  
 Fakultas : Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan  
 Judul Penelitian : Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin  
 Dosen Pembimbing : Rulli Pratiwi Setiawan, ST., M.Sc.

Bapak/Ibu yang saya hormati,

Saya Abi Syarwan Wimarana selaku mahasiswa ITS yang sedang mengadakan penelitian Tugas Akhir tentang *Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin*. Penelitian yang saya lakukan ini terkait dengan persepsi anda sebagai stakeholder didalam mengkaji faktor prioritas penyebab kekumuhan di kawasan permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan. Atas bantuan Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

**Kuesioner Untuk Akademisi**

Kuesioner ini terdiri dari 2 bagian, yaitu :

1. Data Identitas Responden
2. Data Kuesioner

**I. Identitas Responden**

**STAKEHOLDER**

Dinas/Badan/Kantor : Jurusan Arsitektur ITS

Jabatan : Dosen Bidang Perumahan & Permukiman Arsitektur ITS

### BIODATA

Nama : Dr. Dewi Septanti, S.Pd, ST, MT.  
 Alamat : Jl. Teknik Komputer IV / U-120 Surabaya 60111  
 No. HP : 08155145437  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Usia : 46 Tahun  
 Tanggal Pengisian : Jumat, 1 April 2016



### Petunjuk Pengisian

Kuesioner ini bertujuan untuk melakukan pembobotan kriteria faktor prioritas penyebab kumuh di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin yang berdasarkan tingkat kepentingannya, pembobotan kriteria dibagi menjadi 9 kategori atau tingkatan sebagai berikut :

Intensitas Kepentingan	Keterangan	Penjelasan
1	Kedua faktor memiliki pengaruh yang sama dalam faktor prioritas penyebab kumuh kawasan	Kedua faktor yang diuji memiliki karakteristik dan tingkat kepentingan yang sama, sehingga dapat dikatakan bahwa kedua faktor berada pada tingkatan prioritas yang sama.
3	Faktor sedikit lebih penting dan berpengaruh dibandingkan dengan faktor yang lain dalam faktor prioritas penyebab kumuh kawasan	Keberadaan faktor memiliki sedikit pengaruh yang patut dipertimbangkan sehingga faktor dapat menjadi faktor yang sedikit berpengaruh dan sedikit lebih diprioritaskan daripada faktor pembandingnya dalam faktor prioritas penyebab kumuh kawasan
5	Faktor jelas lebih penting dan berpengaruh daripada faktor yang lain dalam faktor prioritas penyebab kumuh kawasan	Keberadaan faktor memiliki cukup banyak pengaruh yang patut dipertimbangkan sehingga faktor menjadi faktor yang lebih berpengaruh dan lebih diprioritaskan dibandingkan faktor pembandingnya dalam faktor prioritas penyebab kumuh kawasan
7	Faktor sangat jelas lebih penting dan berpengaruh daripada faktor yang lain dalam faktor prioritas penyebab kumuh kawasan	Keberadaan faktor memiliki lebih banyak pengaruh yang patut dipertimbangkan sehingga perbandingan antar faktor dapat dengan mudah diketahui tingkat pengaruh dan prioritasnya dalam faktor prioritas penyebab kumuh kawasan
9	Faktor mutlak lebih penting dan berpengaruh dibandingkan dengan faktor yang lain dalam faktor prioritas penyebab kumuh kawasan	Keberadaan faktor sangat banyak memiliki pengaruh yang patut dipertimbangkan sehingga perbandingan antar dua faktor yang diuji dapat dengan mudah diketahui bahwa faktor jelas sangat lebih berpengaruh dan lebih penting serta sangat diprioritaskan dalam faktor prioritas penyebab kumuh kawasan
2,4,6,8	Faktor antara 2 nilai pertimbangan yang berdekatan sehingga ragu-ragu dalam prioritas penyebab kumuh kawasan karena saling berdekatan.	Faktor memiliki tingkatan nilai yang saling berdekatan antara nilai dibawah dan diatasnya dimana faktor yang diberikan bila ada 2 kompromi diantara 2 pilihan.

### Level Kriteria Tingkat I

Berikut ini terdapat kriteria yang akan dibobotkan untuk mendapatkan kriteria utama penentu yang dapat digunakan dalam membantu menentukan faktor prioritas penyebab kumuh. kriteria ini disusun berdasarkan hasil sintesa pustaka yang telah dilakukan peneliti sebelumnya.

Keterangan :

Faktor	Deskripsi
Kondisi Fisik Bangunan	Kondisi fisik bangunan adalah faktor prioritas penyebab kumuh yang dijelaskan dengan variabel kepemilikan lahan bangunan, ketersediaan rumah, Kualitas bangunan, kepadatan bangunan
Kondisi Sarana & Prasarana	Kondisi sarana & prasarana merupakan komponen faktor prioritas penyebab kumuh yang dijelaskan dengan variabel ketersediaan sarana & prasarana, kualitas sarana & prasarana.
Kondisi Sosial & Ekonomi Masyarakat	Kondisi sosial & Ekonomi masyarakat adalah faktor prioritas penyebab kumuh yang dijelaskan dengan variabel tingginya arus migrasi, tingkat pendidikan, kepadatan penduduk, pendapatan penghasilan penduduk.

Faktor	Deskripsi
Pengendalian Hukum	Pengendalian Hukum adalah pengawasan dan ketersediaan rencana kebijakan terhadap kawasan kumuh yang ditinjau dengan kebijakan, dokumen perencanaan serta undang-undang oleh pihak pengampu kebijakan.

### 1. Kondisi Fisik Bangunan

Faktor	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Faktor
Kondisi Fisik Bangunan							X											Kondisi Sarana & Prasarana
Kondisi Fisik Bangunan							X											Kondisi Sosial & Ekonomi Masyarakat
Kondisi Fisik Bangunan						X												Pengendalian Hukum

### 2. Kondisi Sarana & Prasarana

Faktor	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Faktor
Kondisi Sarana & Prasarana										X								Kondisi Sosial & Ekonomi Masyarakat
Kondisi Sarana & Prasarana										X								Pengendalian Hukum

### 3. Kondisi Sosial & Ekonomi Masyarakat

Faktor	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Faktor
Kondisi Sosial & Ekonomi Masyarakat										X								Pengendalian Hukum

### Level Kriteria Tingkat II

Berikut ini terdapat sub - kriteria berupa variabel yang akan dibobotkan untuk mendapatkan faktor prioritas utama penentu yang dapat digunakan dalam membantu menentukan faktor prioritas penyebab kumuh. kriteria ini disusun berdasarkan hasil sintesa pustaka yang telah dilakukan peneliti sebelumnya.

#### A. Kondisi Fisik Bangunan

Variabel	Deskripsi
Kepemilikan Lahan Bangunan	Kepemilikan lahan bangunan yang mempengaruhi terhadap faktor prioritas penyebab kumuh kawasan yang dinilai dari Status kategori kepemilikan tanah dan Izin Mendirikan Bangunan yaitu sertifikat tanah yang dimiliki.
Ketersediaan Rumah	Ketersediaan rumah yang mempengaruhi terhadap faktor prioritas penyebab kumuh kawasan yang dinilai dari Besaran Ketersediaan Lahan Peruntukan Perumahan (luas lahan/Ha)
Kualitas Bangunan	Kualitas Bangunan yang mempengaruhi terhadap faktor prioritas penyebab kumuh kawasan yang dinilai dari berdasarkan material jenis & konstruksi bentuk bangunan seperti atap, dinding, pencahayaan.
Kepadatan Bangunan	Kepadatan Bangunan yang mempengaruhi terhadap faktor prioritas penyebab kumuh kawasan yang dinilai dari tingkat kepadatan bangunan yang diukur melalui koefisien dasar bangunan (KDB) dan jarak antar bangunan di wilayah penelitian.



1) **Kepemilikan Lahan Bangunan**

Variabel	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Variabel
Kepemilikan Lahan Bangunan	X																	Ketersediaan rumah
Kepemilikan Lahan Bangunan					X													Kualitas Bangunan
Kepemilikan Lahan Bangunan											X							Kepadatan Bangunan

2) **Ketersedian Rumah**

Variabel	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Variabel
Ketersediaan rumah											X							Kualitas Bangunan
Ketersediaan rumah																X		Kepadatan Bangunan

3) **Kualitas Bangunan**

Variabel	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Variabel
Kualitas Bangunan													X					Kepadatan Bangunan

**B. Kondisi Sarana & Prasarana**

Variabel	Deskripsi
Kualitas Sarana & Prasarana	Kualitas Sarana & Prasarana yang mempengaruhi terhadap faktor prioritas penyebab kumuh kawasan yang dinilai dari Tingkat Pelayanan Sarana & Prasarana yaitu jangkauan jarak sarana & Prasarana serta tingkat kepuasan pelayanan oleh masyarakat
Ketersediaan Sarana & Prasarana	Ketersediaan sarana & prasarana yang mempengaruhi terhadap faktor prioritas penyebab kumuh kawasan yang dinilai dari Besaran Ketersedian jumlah sarana & prasarana (jumlah fasilitas)

1) **Kualitas Sarana & Prasarana**

Variabel	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Variabel
Kualitas Sarana & Prasarana													X					Ketersediaan Sarana & Prasarana

**C. Kondisi Sosial & Ekonomi Masyarakat**

Variabel	Deskripsi
Tingginya Arus Migrasi	Tingginya Arus Migrasi yang mempengaruhi terhadap faktor prioritas penyebab kumuh kawasan yang dinilai dari Besaran laju migrasi penduduk setiap tahunnya (Jiwa/Tahun)
Tingkat Pendidikan	Tingkat Pendidikan yang mempengaruhi terhadap faktor prioritas penyebab kumuh kawasan yang dinilai dari Penduduk Berdasarkan Pendidikan Terakhir yaitu tamat SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi.
Kepadatan Penduduk	Kepadatan penduduk yang mempengaruhi terhadap faktor prioritas penyebab kumuh kawasan yang dinilai dari Tingkat kepadatan penduduk per (Jiwa/Ha)
Pendapatan penghasilan penduduk	Pendapatan penghasilan penduduk yang mempengaruhi terhadap faktor prioritas penyebab kumuh kawasan yang dinilai dari Besaran Pendapatan Penduduk.

1) **Tingginya Arus Migrasi**

Variabel	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Variabel
Tingginya Arus Migrasi																	X	Tingkat Pendidikan
Tingginya Arus Migrasi													X					Kepadatan Penduduk
Tingginya Arus Migrasi														X				Pendapatan penghasilan penduduk

2) **Tingkat Pendidikan**

Variabel	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Variabel
Tingkat Pendidikan						X												Kepadatan Penduduk
Tingkat Pendidikan							X											Pendapatan penghasilan penduduk

3) **Kepadatan Penduduk**

Variabel	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Variabel
Kepadatan Penduduk											X							Pendapatan penghasilan penduduk

## D. Pengendalian Hukum

Variabel	Deskripsi
Pengawasan tanah kurang ketat	Pengawasan tanah kurang ketat yang mempengaruhi terhadap faktor prioritas penyebab kumuh kawasan yang dinilai dari Besaran Bangunan yg tidak sesuai dengan pemanfaatan Lahan (Persil/Ha)
Kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum	Kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum yang mempengaruhi terhadap faktor prioritas penyebab kumuh kawasan yang dinilai dari ketersediaan dokumen perencanaan kawasan permukiman.

1) **Pengawasan tanah kurang ketat**

Variabel	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Variabel
Pengawasan tanah kurang ketat									X									Kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum

**RESPONDEN 7 (MASYARAKAT KELURAHAN BELITUNG SELATAN)  
KUSIONER AHP (*ANALYSIS HIERARCHY PROCESS*)  
ANALISIS FAKTOR PRIORITAS PENYEBAB KUMUH  
PADA KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DI KELURAHAN BELITUNG SELATAN KOTA  
BANJARMASIN**



**ITS**  
Institut  
Teknologi  
Sepuluh Nopember

**JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA  
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER SURABAYA  
TAHUN 2015**

**BIODATA PENELITI**

Nama	: Abi Syarwan Wimardana
NRP	: 3612100067
No. HP	: 085750090094
Jurusan	: Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas	: Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
Judul Penelitian	: Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin
Dosen Pembimbing	: Rulli Pratiwi Setiawan, ST., M.Sc.

Bapak/Ibu yang saya hormati,

Saya Abi Syarwan Wimardana selaku mahasiswa ITS yang sedang mengadakan penelitian Tugas Akhir tentang *Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin*. Penelitian yang saya lakukan ini terkait dengan persepsi anda sebagai stakeholder didalam mengkaji faktor prioritas penyebab kekumuhan di kawasan permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan. Atas bantuan Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

**Kuesioner Untuk Masyarakat**

Kuesioner ini terdiri dari 2 bagian, yaitu :

1. Data Identitas Responden
2. Data Kuesioner

**I. Identitas Responden**

**STAKEHOLDER**

Dinas/Badan/Kantor : Rukun Warga (RW) Kelurahan Belitung Selatan  
Jabatan : Ketua RW 01

### BIODATA

Nama : Sabri  
 Alamat : Jl. Belitung Darat Gg. Keluarga No. 19 RT 08  
 No. HP : 085754235055  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
 Usia : 43 Tahun  
 Tanggal Pengisian : Rabu, 16 Maret 2016



#### Petunjuk Pengisian

Kuesioner ini bertujuan untuk melakukan pembobotan kriteria faktor prioritas penyebab kumuh di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin yang berdasarkan tingkat kepentingannya, pembobotan kriteria dibagi menjadi 9 kategori atau tingkatan sebagai berikut :

Intensitas Kepentingan	Keterangan	Penjelasan
1	Kedua faktor memiliki pengaruh yang sama dalam faktor prioritas penyebab kumuh kawasan	Kedua faktor yang diuji memiliki karakteristik dan tingkat kepentingan yang sama, sehingga dapat dikatakan bahwa kedua faktor berada pada tingkatan prioritas yang sama.
3	Faktor sedikit lebih penting dan berpengaruh dibandingkan dengan faktor yang lain dalam faktor prioritas penyebab kumuh kawasan	Keberadaan faktor memiliki sedikit pengaruh yang patut dipertimbangkan sehingga faktor dapat menjadi faktor yang sedikit berpengaruh dan sedikit lebih diprioritaskan daripada faktor pembandingnya dalam faktor prioritas penyebab kumuh kawasan
5	Faktor jelas lebih penting dan berpengaruh daripada faktor yang lain dalam faktor prioritas penyebab kumuh kawasan	Keberadaan faktor memiliki cukup banyak pengaruh yang patut dipertimbangkan sehingga faktor menjadi faktor yang lebih berpengaruh dan lebih diprioritaskan dibandingkan faktor pembandingnya dalam faktor prioritas penyebab kumuh kawasan
7	Faktor sangat jelas lebih penting dan berpengaruh daripada faktor yang lain dalam faktor prioritas penyebab kumuh kawasan	Keberadaan faktor memiliki lebih banyak pengaruh yang patut dipertimbangkan sehingga perbandingan antar faktor dapat dengan mudah diketahui tingkat pengaruh dan prioritasnya dalam faktor prioritas penyebab kumuh kawasan
9	Faktor mutlak lebih penting dan berpengaruh dibandingkan dengan faktor yang lain dalam faktor prioritas penyebab kumuh kawasan	Keberadaan faktor sangat banyak memiliki pengaruh yang patut dipertimbangkan sehingga perbandingan antar dua faktor yang diuji dapat dengan mudah diketahui bahwa faktor jelas sangat lebih berpengaruh dan lebih penting serta sangat diprioritaskan dalam faktor prioritas penyebab kumuh kawasan
2,4,6,8	Faktor antara 2 nilai pertimbangan yang berdekatan sehingga ragu-ragu dalam prioritas penyebab kumuh kawasan karena saling berdekatan.	Faktor memiliki tingkatan nilai yang saling berdekatan antara nilai dibawah dan diatasnya dimana faktor yang diberikan bila ada 2 kompromi diantara 2 pilihan.

#### Level Kriteria Tingkat I

Berikut ini terdapat kriteria yang akan dibobotkan untuk mendapatkan kriteria utama penentu yang dapat digunakan dalam membantu menentukan faktor prioritas penyebab kumuh. kriteria ini disusun berdasarkan hasil sintesa pustaka yang telah dilakukan peneliti sebelumnya.

Keterangan :

Faktor	Deskripsi
Kondisi Fisik Bangunan	Kondisi fisik bangunan adalah faktor prioritas penyebab kumuh yang dijelaskan dengan variabel kepemilikan lahan bangunan, ketersediaan rumah, Kualitas bangunan, kepadatan bangunan
Kondisi Sarana & Prasarana	Kondisi sarana & prasarana merupakan komponen faktor prioritas penyebab kumuh yang dijelaskan dengan variabel ketersediaan sarana & prasarana, kualitas sarana & prasarana.
Kondisi Sosial & Ekonomi Masyarakat	Kondisi sosial & Ekonomi masyarakat adalah faktor prioritas penyebab kumuh yang dijelaskan dengan variabel tingginya arus migrasi, tingkat pendidikan, kepadatan penduduk, pendapatan penghasilan penduduk.

Pengendalian Hukum	Pengendalian Hukum adalah pengawasan dan ketersediaan rencana kebijakan terhadap kawasan kumuh yang ditinjau dengan kebijakan, dokumen perencanaan serta undang-undang oleh pihak pengampu kebijakan.
--------------------	---

### 1. Kondisi Fisik Bangunan

Faktor	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Faktor
Kondisi Fisik Bangunan		X																Kondisi Sarana & Prasarana
Kondisi Fisik Bangunan												X						Kondisi Sosial & Ekonomi Masyarakat
Kondisi Fisik Bangunan						X												Pengendalian Hukum

### 2. Kondisi Sarana & Prasarana

Faktor	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Faktor
Kondisi Sarana & Prasarana																	X	Kondisi Sosial & Ekonomi Masyarakat
Kondisi Sarana & Prasarana											X							Pengendalian Hukum

### 3. Kondisi Sosial & Ekonomi Masyarakat

Faktor	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Faktor
Kondisi Sosial & Ekonomi Masyarakat		X																Pengendalian Hukum

### Level Kriteria Tingkat II

Berikut ini terdapat sub - kriteria berupa variabel yang akan dibobotkan untuk mendapatkan faktor prioritas utama penentu yang dapat digunakan dalam membantu menentukan faktor prioritas penyebab kumuh. kriteria ini disusun berdasarkan hasil sintesa pustaka yang telah dilakukan peneliti sebelumnya.

#### A. Kondisi Fisik Bangunan

Variabel	Deskripsi
Kepemilikan Lahan Bangunan	Kepemilikan lahan bangunan yang mempengaruhi terhadap faktor prioritas penyebab kumuh kawasan yang dinilai dari Status kategori kepemilikan tanah dan Izin Mendirikan Bangunan yaitu sertifikat tanah yang dimiliki.
Ketersediaan Rumah	Ketersediaan rumah yang mempengaruhi terhadap faktor prioritas penyebab kumuh kawasan yang dinilai dari Besaran Ketersediaan Lahan Peruntukan Perumahan (luas lahan/Ha)
Kualitas Bangunan	Kualitas Bangunan yang mempengaruhi terhadap faktor prioritas penyebab kumuh kawasan yang dinilai dari berdasarkan material jenis & konstruksi bentuk bangunan seperti atap, dinding, pencahayaan.
Kepadatan Bangunan	Kepadatan Bangunan yang mempengaruhi terhadap faktor prioritas penyebab kumuh kawasan yang dinilai dari tingkat kepadatan bangunan yang diukur melalui koefisien dasar bangunan (KDB) dan jarak antar bangunan di wilayah penelitian.

1) **Kepemilikan Lahan Bangunan**

Variabel	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Variabel
Kepemilikan Lahan Bangunan			X															Ketersediaan rumah
Kepemilikan Lahan Bangunan														X				Kualitas Bangunan
Kepemilikan Lahan Bangunan								X										Kepadatan Bangunan

2) **Ketersedian Rumah**

Variabel	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Variabel
Ketersediaan rumah																	X	Kualitas Bangunan
Ketersediaan rumah												X						Kepadatan Bangunan

3) **Kualitas Bangunan**

Variabel	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Variabel
Kualitas Bangunan				X														Kepadatan Bangunan

**B. Kondisi Sarana & Prasarana**

Variabel	Deskripsi
Kualitas Sarana & Prasarana	Kualitas Sarana & Prasarana yang mempengaruhi terhadap faktor prioritas penyebab kumuh kawasan yang dinilai dari Tingkat Pelayanan Sarana & Prasarana yaitu jangkauan jarak sarana & Prasarana serta tingkat kepuasan pelayanan oleh masyarakat
Ketersediaan Sarana & Prasarana	Ketersediaan sarana & prasarana yang mempengaruhi terhadap faktor prioritas penyebab kumuh kawasan yang dinilai dari Besaran Ketersedian jumlah sarana & prasarana (jumlah fasilitas)

1) **Kualitas Sarana & Prasarana**

Variabel	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Variabel
Kualitas Sarana & Prasarana															X			Ketersediaan Sarana & Prasarana

**C. Kondisi Sosial & Ekonomi Masyarakat**

Variabel	Deskripsi
Tingginya Arus Migrasi	Tingginya Arus Migrasi yang mempengaruhi terhadap faktor prioritas penyebab kumuh kawasan yang dinilai dari Besaran laju migrasi penduduk setiap tahunnya (Jiwa/Tahun)
Tingkat Pendidikan	Tingkat Pendidikan yang mempengaruhi terhadap faktor prioritas penyebab kumuh kawasan yang dinilai dari Penduduk Berdasarkan Pendidikan Terakhir yaitu tamat SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi.
Kepadatan Penduduk	Kepadatan penduduk yang mempengaruhi terhadap faktor prioritas penyebab kumuh kawasan yang dinilai dari Tingkat kepadatan penduduk per (Jiwa/Ha)
Pendapatan penghasilan penduduk	Pendapatan penghasilan penduduk yang mempengaruhi terhadap faktor prioritas penyebab kumuh kawasan yang dinilai dari Besaran Pendapatan Penduduk.

1) **Tingginya Arus Migrasi**

Variabel	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Variabel
Tingginya Arus Migrasi														X				Tingkat Pendidikan
Tingginya Arus Migrasi															X			Kepadatan Penduduk
Tingginya Arus Migrasi																	X	Pendapatan penghasilan penduduk

2) **Tingkat Pendidikan**

Variabel	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Variabel
Tingkat Pendidikan							X											Kepadatan Penduduk
Tingkat Pendidikan											X							Pendapatan penghasilan penduduk

3) **Kepadatan Penduduk**

Variabel	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Variabel
Kepadatan Penduduk											X							Pendapatan penghasilan penduduk

## D. Pengendalian Hukum

Variabel	Deskripsi
Pengawasan tanah kurang ketat	Pengawasan tanah kurang ketat yang mempengaruhi terhadap faktor prioritas penyebab kumuh kawasan yang dinilai dari Besaran Bangunan yg tidak sesuai dengan pemanfaatan Lahan (Persil/Ha)
Kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum	Kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum yang mempengaruhi terhadap faktor prioritas penyebab kumuh kawasan yang dinilai dari ketersediaan dokumen perencanaan kawasan permukiman.

1) **Pengawasan tanah kurang ketat**

Variabel	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Variabel
Pengawasan tanah kurang ketat														X				Kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum

*“Halaman sengaja dikosongkan.”*



## **BAB V**

### **KESIMPULAN & REKOMENDASI**

#### **5.1 Kesimpulan**

Perkembangan permukiman kumuh di wilayah Kota Banjarmasin tergolong sangatlah pesat. Salah satunya di Kelurahan Belitung Selatan. Wilayah Kelurahan Belitung Selatan termasuk dalam kawasan permukiman kumuh perkotaan. Dimana persebarannya mencakup 10 RT di Kelurahan Belitung Selatan yang termasuk dalam kategori kumuh ringan dan kumuh sedang dengan luas permukiman kumuh sebesar 6,04 Ha.

Kelurahan Belitung Selatan termasuk dalam kawasan permukiman kumuh dengan keadaan bangunan yang cukup padat. Kondisi jaringan jalan terbagi atas 2 jenis jaringan akses yaitu jalan paving dengan kondisi perkerasan kurang baik dan jalan titian kayu yang digunakan bagi warga sebagai akses penghubung antar rumah yang terletak pada sepanjang bantaran sungai dan lahan gambut.

Menurut hasil identifikasi beberapa bangunan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Belitung Selatan ini pada dasarnya terletak pada area lahan gambut atau basah yang memiliki kadar air di dalam tanah yang cukup tinggi. Namun itu terletak pada sebagian wilayah permukiman kumuh. Hampir keseluruhan bangunan yang berdiri memiliki sistem pondasi bangunan bergaya panggung sesuai dengan budaya dan karakteristik wilayah.

Di sisi sosial ekonomi, wilayah penelitian memiliki beberapa permasalahan dari segi tingkat pendidikan, penghasilan pendapatan penduduk, tingkat pendidikan, mata pencaharian, hingga tingginya kepadatan penduduk, Serta pengendalian hukum yang masih kurang. Terlihat dari masih

minimnya pengetahuan masyarakat terhadap undang-undang dan kesadaran peran mereka terhadap lingkungan permukiman. Kondisi inilah yang menjadi dasar penentuan arahan penanganan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin.

Berdasarkan hasil identifikasi yang telah dilakukan terhadap kawasan penelitian. Maka dari itu kawasan permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan memiliki karakteristik sebagai berikut :

- 1) Kualitas bangunan yang kurang baik dengan rentan waktu massa bangunan lebih dari 20 tahun. Dengan satatus kepemilikan berupa hak millik dan girik.
- 2) Kepadatan bangunan tinggi dengan rata-rata material bangunan kayu serta jaringan drainase yang belum tersedia.
- 3) Masyarakat kawasan permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan memiliki tingkat pendapatan cukup rendah sehingga masih di bawah UMR Kota Banjarmasin.
- 4) Dari segi pelayanan fasilitas sarana dan prasarana masih sangat buruk. Diakibatkan kualitas bangunan serta sistem pelayanan sarana dan prasarana yang masih kurang.
- 5) Masih belum terdapatnya program mitigasi bencana terkait evakuasi. Dilihat dari tingginya angka bencana kebakaran di Kota Banjarmasin.

Terdapat 4 indikator penyebab prioritas penyebab kumuh. Dari analisa didapat faktor prioritas penyebab kumuh sebagai berikut berdasarkan bobot nilai terbesar yaitu (1) Kondisi Fisik Bangunan (2) Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat (3) Kondisi Sarana dan Prasarana (4) Pengendalian Hukum.

Dari faktor tersebut terbagi lagi atas beberapa variabel penyebab kumuh di masing faktor. Dimana melalui faktor dan variabel penyebab kumuh dilakukan analisa terkait prioritas penyebab serta tingkatan prioritas arahan penanganan kawasan permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan. Tingkatan prioritas arahan penanganan dilaksanakan dalam kurun waktu 4 tahun sesuai dengan program 100-0-100 program permukiman berkelanjutan tahun 2015-2019.

- a) Prioritas I** : Kualitas Bangunan, Kepadatan Bangunan, Pendapatan Penghasilan Penduduk.
- b) Prioritas II** : Ketersediaan Sarana & Prasarana.
- c) Prioritas III** : Kepemilikan Lahan Bangunan, Ketersediaan Bangunan, Tingkat Pengetahuan dan Kesadaran Hukum, Tingkat Pendidikan, Kepadatan Penduduk, Kualitas Sarana & Prasarana.
- d) Prioritas IV** : Pengawasan Tanah, Tingkat Arus Migrasi.

Menurut hasil analisa diperoleh tingkatan prioritas penanganan yang dilaksanakan melalui arahan detail penanganan serta klasifikasi berupa arahan peningkatan atau pengendalian. Berikut arahan penanganan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Belitung Selatan :

- 1) Klasifikasi Arahan Peningkatan :
  - a. Kualitas Bangunan  
Peremajaan kualitas bangunan melalui perbaikan material bangunan atap menggunakan seng serta dinding bangunan dengan kayu berjenis ulin yang memiliki daya tahan terhadap air.

- b. Tingkat Penghasilan Penduduk  
Pengembangan kawasan permukiman baru untuk mendorong ekonomi masyarakat dan pembekalan latihan keterampilan untuk meningkatkan keahlian masyarakat.
  - c. Ketersediaan dan Kualitas Sarana & Prasarana  
Perbaikan fasilitas pendidikan dan sarana jaringan jalan lingkungan serta penyediaan jaringan drainase di kawasan permukiman kumuh Kelurahan Beitung Selatan.
- 2) Kalasifikasi Arahan Pengendalian :
- a. Kepadatan Bangunan  
Pengawasan terhadap izin mendirikan bangunan serta peraturan disentif terhadap rencana tata ruang yang telah ada.
  - b. Pengawasan Tanah Yang Kurang Ketat  
Evaluasi terkait dengan himbauan yang telah dilakukan sebelumnya. Melakukan sosialisasi terkait sanksi dan kebijakan disinsentif kepada masyarakat yang berdomisili di wilayah penelitian termasuk didalamnya dijelaskan terkait dengan kategorisasi pelanggaran dan sanksinya.

Dari penelitian ini maka juga diperoleh manfaat teoritis yaitu merumuskan arahan penanganan umum dan detail secara terpadu dan komprehensif melalui program-program permukiman dari segi pembangunan dan pengelolaan infrastruktur serta lingkungan. Arahan tersebut dilaksanakan disesuaikan dengan tingkatan prioritas dalam jangka waktu 4 tahun. Demi tercapainya penanganan kawasan permukiman kumuh yang baik dan berkelanjutan.

## 5.2 Saran & Rekomendasi

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Maka diberikanlah beberapa saran terhadap penelitian penanganan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin. Salah satunya perlunya studi lebih lanjut terkait lokasi relokasi atau program penataan rencana kawasan permukiman khusus di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin. Ada juga penanganan lebih lanjut terkait peningkatan kualitas fisik bangunan serta sosial ekonomi masyarakat pada kawasan permukiman kumuh. Saran lainnya yang dapat dirumuskan terkait penyusunan penelitian ini antara lain sebagai berikut :

- 1) Senantiasa memelihara dukungan terhadap pemerintah dalam hal ini senantiasa meningkatkan partisipasi aktif terkait program-program yang dilaksanakan terutama oleh pemerintah dan disertai pula dengan peningkatan kesadaran terutama terkait pentingnya kepedulian terhadap lingkungan sekitar dan pemberdayaan ekonomi secara kemitraan serta swadaya melalui program seperti UKM atau CSR kerjasama pemerintah-swasta.
- 2) Pemerintah yang dalam hal ini Pemerintah Kota Banjarmasin diharapkan dapat melakukan pengembangan atau program berdasarkan kebutuhan masyarakat serta senantiasa melibatkan peran aktif masyarakat terutama dalam pengembangan wilayah permukiman ini. Selain itu konsistensi pemerintah kota terkait evaluasi, pengawasan, dan kontrol pemerintah terhadap wilayah yang marginal ini perlu ditingkatkan mengingat hal inilah yang dikeluhkan masyarakat yakni pembimbingan dan pengawasan pemerintah.
- 3) Mempertimbangkan arahan penanganan variabel tingkat pendidikan melalui pengenalan serta sistem pendidikan

dini terhadap lingkungan dan penataan ruang. Bertujuan meningkatkan kepekaan masyarakat secara jangka panjang dimulai pada tingkat pendidikan usia dini hingga usia produktif selama 12 tahun.

- 4) Penelitian yang masih terdapat banyak kekurangan, sehingga diharapkan kedepan terdapat studi lebih jauh terkait pengembangan permukiman dalam pengendalian kawasan permukiman kumuh. Melalui pendekatan dengan konsep *Ecological Urban Housing System* ,yaitu terhadap fisik dan lingkungan permukiman secara komprehensif serta berkelanjutan. Baik untuk wilayah penelitian atau lokasi lainnya yang perlu dilakukan oleh para peneliti atau akademisi lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, H. Rahardjo. 2005. *Pembangunan Ekonomi Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Budiharjo, Eko. 2009. **Perumahan dan Permukiman di Indonesia**. Semarang: P.T. Alumni

Komarudin. 1999. *Pembangunan Perkotaan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: Dirjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum.

Sinulingga, Budi D. 1999. *Pembangunan Kota: Tinjauan Regional dan Lokal*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.  
Adisasmita. H.R. 2005. *Dasar-dasar Ekonomi Wilayah*. Jakarta: Graha Ilmu.

Yunus, Hadi Sabari. 2000. *Struktur Tata Ruang Kota*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Komarudin, 1997. **Menelusuri Pembangunan Perumahan dan Permukiman**. Yayasan Real Estate Indonesia, hal. 82.

Kurniasih, Sri. 2007. **Penelitian : Usaha Perbaikan Pemukiman Kumuh di Petungkang Utara – Jakarta Selatan**.

Kurniati, Aryani. 2014. **Kajian Persebaran Permukiman Kumuh di Surabaya Pusat**. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.

Kuswartojo, Tjuk. 2006. **Perumahan dan Pemukiman di Indonesia; Upaya Membuat Perkembangan Kehidupan Yang Berkelanjutan**. Bandung: Institut Teknologi Bandung.

Kuswartojo.2005. **Perumahan dan pemukiman di Indonesia**. Bandung: Institut Teknologi Bandung.

Masyhuri, M. Zainuddin. 2008. **Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif**. PT. Refika Aditama: Bandung.

Parwata, I Wayan. 2004. **Dinamika Permukiman Perdesaan Pada Masyarakat Bali**. Denpasar: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pedoman Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Daerah Penyangga Kota Metropolitan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP) Kota Banjarmasin Tahun 2011.

Penyusunan Identifikasi Kawasan Kumuh Kota Banjarmasin Tahun 2014.

Rencana Pembanguanan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota Banjarmasin Tahun 2012.

Penyusunan Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010.



Pedoman Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Daerah  
Penyangga Kota Metropolitan

*SK Walikota Banjarmasin No. 460 Tahun 2015.*

*“Halaman sengaja dikosongkan.”*

## BIODATA PENULIS



Penulis dilahirkan di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 17 Juli 1994 dan merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Penulis telah menempuh pendidikan formal selama dua belas tahun. SD Muhammadiyah 10 Kota Banjarmasin, SMP Islam Sabital Muhtadin Kota Banjarmasin, dan SMA Negeri 1 Kota Banjarmasin. Setelah lulus menempuh pendidikan formal pada jenjang SMA. Pada tahun 2012 penulis melanjutkan pendidikan dengan mengikuti Seleksi Jalur Mandiri ITS dan diterima pada Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota FTSP-ITS di Tahun 2012 dengan NRP 3612100067. Selama masa perkuliahan penulis cukup aktif dalam kegiatan jurusan, institusi dan kegiatan kemahasiswaan. Pada kegiatan jurusan, Berpartisipasi sebagai panitia dari pelatihan LandseSim dan profil jurusan. Penulis cukup aktif dalam mengikuti Kegiatan seminar CITIES sebagai peserta atau panitia, serta menjadi kru eureka ITS TV. Sedangkan Untuk kegiatan mahasiswa, penulis aktif dalam Himpunan Mahasiswa Planologi FTSP-ITS sebagai staf Divisi Media Informasi (HMPL ITS 2013/2014) dan Kepala Departemen Komunikasi dan Informasi (HMPL ITS 2014/2015). Penulis memiliki ketertarikan pada bidang perumahan dan permukiman, *urban design* serta penerapan *geographic information system (GIS)* sehingga memicu penulis untuk menuangkannya sebagai tema Tugas Akhir.